

# **SCHOOLPRENEURSHIP BERBASIS PESANTREN**

Studi Kasus di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo

## **DISERTASI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Keislaman  
Konsentrasi Pendidikan Islam Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel



Oleh:

**Mohammad Darwis**  
**NIM: F0.6.5.11.090**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Darwis  
NIM : F0.6.5.11.090  
Program : Doktor (S-3)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2019

Saya yang menyatakan



  
Mohammad Darwis

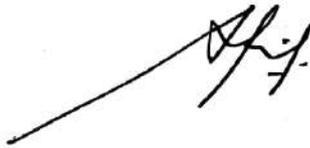
**PERSETUJUAN PROMOTOR**

DISERTASI MOHAMMAD DARWIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal Januari 2020

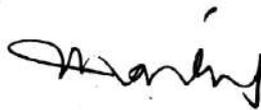
Oleh:

PROMOTOR



**Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.**

KO-PROMOTOR



**Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph. D.**

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

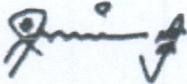
Diserias yang berjudul:

**SCHOOLPRENEURSHIP DI SMK NURUL JAMID PAITON  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

Dixulis oleh Mohammad Darwis ini telah diuji dalam tahap pertama (tertutup)  
pada tanggal 29 Januari 2020 dan layak diujikan ke dalam tahap terbuka.

Tim Penguji:

Dr. Hj. Hasan Asrohah, M.Ag. Ketua /Penguji

  
(.....)

H. Mohammad Saifuddin, M.Ed., Ph.D. Sekretaris/  
Penguji

  
(.....)

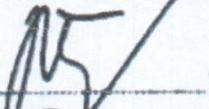
Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA. Promotor/ Penguji

  
(.....)

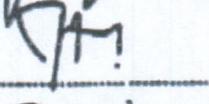
Prof. H. Masdar Hilmy, MA. Ph.D. Promotor/ Penguji

  
(.....)

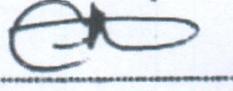
Prof. Dr. H. Ahmad Pathoni, M.Ag. Penguji Utama

  
(.....)

Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z., M.Ag. Penguji

  
(.....)

Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin., Ph.D. Penguji

  
(.....)



Sembayan, April 2020  
Direktur

  
Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag  
NIP. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpust@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Darwis  
NIM : F0.6.5.11.090  
Fakultas/Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
E-mail address : mohammad.darwis70@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  **Disertasi**  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Schoolpreneurship Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Smk Nurul Jadid Paiton  
Probolinggo**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 November 2022

Penulis

(Mohammad Darwis)

## ABSTRAK

Mohammad Darwis: *Schoolpreneurship* Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Disertasi, *Promotor*. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA, dan Prof. Masdar Hilmy, MA.,Ph.D. 2019.

Kata kunci *Schoolpreneurship*, Pesantren.

Latar belakang penelitian ini adalah ketertarikan peneliti terhadap fenomena perkembangan sekolah *entrepreneurship* yang berintegrasi dengan pesantren. Keunikannya adalah eksistensi SMK (Nurul Jadid Paiton) dengan stigma negatif sebagai sekolah yang hanya berorientasi kerja (duniawi) dan bersifat profan, bisa survive di dalam pesantren yang kental keagamaannya (religius) dan lebih transenden.

Fokus dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo? dan kedua, bagaimana dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus menggunakan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan analisis dokumentasi. Analisis data melalui tiga alur, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara, untuk memastikan keabsahan data dilakukan melalui teknik perpanjangan masa penelitian dan triangulasi data.

Hasil penelitian ini adalah; pertama, model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo memakai model pengelolaan integratif dengan melibatkan tiga komponen sub sistem pembelajaran, yaitu sekolah (SMK Nurul Jadid), Dunia Usaha dan Industri (DUDI), dan Pesantren Nurul Jadid Paiton. Terdapat enam aspek yang diintegrasikan, yaitu; manajerial, kurikulum, sistem pembelajaran, keuangan, sarana dan prasarana, serta iklim sekolah. Kedua, model pengelolaan tersebut memiliki dampak terhadap tiga komponen sub sistem pembelajaran yang terlibat, yaitu sekolah, DUDI dan pesantren, baik dampak positif maupun negatif.

Implikasi teoritik penelitian ini, yaitu menguatkan sekaligus mengkritik teori-teori yang ada tentang model pengelolaan SMK, dengan mengajukan temuan baru, yaitu “*pendidikan multi sistem*” yang oleh peneliti disingkat PMS. Implikasi yang menguatkan adalah karena PMS pada dasarnya dibangun dari teori Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di mana pendidikan dijalankan di dua tempat, yaitu sekolah dan industri dengan pendekatan *link and match* sebagaimana teori Idler dan Wardiman. Adapun implikasi kritik dan penemuan baru, karena PMS berbeda dengan PSG yang hanya melibatkan dua tempat (sub-sistem) belajar, sementara PMS melibatkan tiga tempat yaitu; Sekolah, Industri dan Pesantren. Dengan demikian temuan ini sekaligus mengembangkan teori Masriam Bukit yang membagi pengelolaan SMK ke dalam enam model. Dengan temuan PMS akan menjadi tujuh model. Yaitu; Company Model, School Model, Comperative Model atau Dual System, Non-Formal Vocational Education, School Model plus Praktik Kerja Industri (prakerin), Production Based Model, dan Pendidikan Multi Sistem (Multi System Education Model).

## ABSTRACT

Mohammad Darwis: Pesantren-Based Schoolpreneurship at SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Dissertation, Promoter. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA, and Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D. 2019.

Keywords: Schoolpreneurship, Islamic Boarding School.

The background of this research is the researchers' interest toward the development of entrepreneurship schools that integrate with Islamic Boarding School Phenomenon. Its uniqueness is the existence of SMK (Nurul Jadid Paiton) with a negative stigma as a school that is only a worldly-oriented and profane, can survive in a religiously and more transcendent environment.

The focus of this research is; first, how is the management model of Islamic boarding-based entrepreneurship schools in SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo ?, and second, how does the impact of management model of islamic boarding-based entrepreneurship schools in SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo?

This research is a qualitative research with case studies using a phenomenological approach. Data is obtained through observation, interviews and documentation analysis. The data has been analyzed through three paths, namely; data reduction, data presentation and conclusion. Meanwhile, to ensure the validity of the data is done through the extension of the research and data triangulation.

The results of this study are; first, the management model of boarding-based entrepreneurship schools in SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo uses an integrative management model involving three components of learning system, namely schools (SMK Nurul Jadid), World of Business and Industry (DUDI), and Nurul Jadid Islamic Boarding Schools. There are six aspects that are integrated, namely; managerial, curriculum, learning system, finance, facilities and infrastructure, and the school climate. Second, the management model has an impact on the three components of learning sub-system involved, namely schools, World of Business and Industry (DUDI) and Nurul Jadid Islamic Boarding Schools, both positive and negative impacts.

The theoretical implications of this research are to strengthen and criticize the existing theories about the SMK management model, by proposing new findings, namely "Multi-System Education" or Pendidikan Multi Sistem in Bahasa Indonesia which researchers abbreviated become PMS. The strengthening implication is that PMS is basically built from the theory of Dual System Education (PSG) in which education is run in two places, namely schools and industries with a link and match approach as the theories of Idler and Wardiman. The implications of criticism and new findings is because PMS is different from PSG which only involves two places (sub-systems) of learning, while PMS involves three places, namely; Schools, Industries and Islamic Boarding Schools. Therefore, this finding also develops the theory of Masriam Bukit which divides the management of Vocational Schools into six models. So that the PMS findings built the seventh models. That is; Company Model, School Model, Comperative Model or Dual System, Non-Formal Vocational Education, School Model plus Industrial Work Practices (internship), Production Based Models, and Multi System Education.

## ملخص الدراسة

محمد درويش : مدرسة ريادة الاعمال المؤسسة على نظام المعهد فى المدرسة الوسطى للاعمال نور الجديد ببطان فربولنجو. رسالة الدكتوراه. تحت اشراف : البروفيسور الدكتور على مفردى، الماجستير، والبروفيسور مصدر حلمى الماجستير الدكتور، 2019 م.

الكلمات الرئيسية : مدرسة ريادة الاعمال، المعهد

خلفية هذا البحث هو اهتمام الباحث بمظاهر تطور مدارس ريادة الاعمال التى تتكامل مع المعهد. تفردا هو وجود المدرسة الوسطى للاعمال (نور الجديد ببطان) مع وصمة عار سلبية كمدرسة ليست سوى اتجاه عمل (دنيوى) وتدنيس، ويمكن البقاء على قيد المعهد الذى كان فى ديانات الدينية واكثر من المتعالية.

ومحور هذا البحث هو : اولا، كيف يكون نموذج ادارة مدرسة ريادة الاعمال المؤسسة على نظام المعهد فى المدرسة الوسطى للاعمال نور الجديد ببطان فربولنجو؟ وثانيا، كيف يؤثر نموذج الادارة فى مدرسة ريادة الاعمال فى المدرسة الوسطى للاعمال نور الجديد ببطان فربولنجو؟

هذا البحث هو البحث النوعى مع دراسات الحالة باستخدام نهج الظواهر. يتم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات وتحليل الوثائق. تحليل البيانات من خلال ثلاثة مسارات، وهي الحد من البيانات، وعرض البيانات والاستنتاج. وفى الوقت نفسه، لضمان صحة البيانات تتم من خلال تمديد تقنية البحث وتثليث البيانات.

تتائج هذه الدراسة هي، اولا، يستخدم نموذج الادارة لمدرسة ريادة الاعمال المؤسسة على نظام المعهد فى المدرسة الوسطى للاعمال نور الجديد ببطان فربولنجو نموذج ادارة متكامل يضم ثلاثة مكونات لنظام التعلم وهي المدرسة (المدرسة الوسطى للاعمال نور الجديد)، ومحل الكسب او المصانع، والمعهد نور الجديد. وهناك ستة جوانب متكاملة، وهي، الادارية، والمناهج الدراسية، ونظام التعلم، والتمويل، والمرافق والوسائل، ومناخ المدرسة. ثانيا لنموذج الادارة تأثير على المكونات الثلاثة للنظام الفرعى للتعلم يعنى المدرسة، ومحل الكسب او المصانع، والمعهد، سواء كانت الاثار ايجابية او سلبية.

والاثار النظرية لهذا البحث هي تهدف الى تعزيز انتقاد النظريات الموجودة حول نموذج ادارة المدرسة الوسطى للاعمال، من خلال اقتراح نتيجة جديدة وهي "التعليم متعدد النظم" الذى اختصر الباحث ب PMS . وتداعيات التعزيز هي ان PMS مبنية بشكل اساسى على نظرية التعليم بنظام مزدوج (PSG) التى يتم فيها تشغيل التعليم فى مكانين، هما المدرسة والصناعات التى لها نهج الارتباط والمطابقة وكذلك نظريتي ادلير وارديمان. وتداعيات النقد ونتيجة جديدة هنا، لان PMS يختلف عن PSG الذى لا يتضمن سوى مكانين (انظمة فرعية) للتعلم، بينما PMS تتضمن ثلاثة اماكن، وهي المدرسة، والصناعات والمعهد. وهكذا فان هذا الاستنتاج يطور نظرية مسريام بوكيت الذى يقسم ادارة المدرسة المهنية الى ستة نماذج بحيث تكون النتيجة PMS كسابعة نماذج. وهي : نموذج الشركة، نموذج المدرسة، نموذج المعادلة او النظام المزدوج، التعليم المهني غير الرسمي، نموذج المدرسة بالاضافة الى ممارسات العمل الصناعى (التدريب الداخلى)، النموذج المعتمد على الانتاج، والتعليم متعدد النظام (نموذج نظام التعليم المتعدد).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PRASYARAT .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI .....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Kegunaan Penelitian .....	17
F. Studi Terdahulu .....	18
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	41
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>44</b>
A. Sekolah Entrepreneurship .....	44
B. Kajian Pesantren .....	134
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>158</b>
A. Identitas Penelitian .....	158
B. Letak Geografis SMK Nurul Jadid .....	158
C. Sejarah SMK Nurul Jadid .....	159
D. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan .....	163
E. Visi dan Misi SMK Nurul Jadid .....	163
F. Tujuan SMK Nurul Jadid .....	164
G. Profil Lulusan SMK Nurul Jadid .....	165
H. Prospek Lulusan SMK Nurul Jadid .....	166

I. Jurusan .....	167
J. Kegiatan Siswa SMK Nurul Jadid .....	170
K. Fasilitas Pendukung SMK Nurul Jadid .....	171
L. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Jadid .....	172
M. Jadwal Harian Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid .....	173
N. Unit Keterampilan Santri .....	177
O. Struktur Organisasi .....	177
P. Kerjasama Pondok Pesantren Nurul Jadid .....	179
Q. Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid .....	180
<b>BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>182</b>
A. Model Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton .....	182
B. Dampak Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton .....	238
<b>BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>260</b>
A. Model Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo .....	260
B. Dampak Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton .....	320
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>353</b>
A. Kesimpulan .....	353
B. Implikasi Teori .....	362
C. Keterbatasan Studi .....	366
D. Rekomendasi .....	367
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>369</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakekatnya proses pendidikan merupakan upaya pengadaptasian dan pengadopsian kondisi eksternal ke kondisi internal seorang peserta didik. Proses tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan sebuah bangsa, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, sejauh ini hasil proses pendidikan masih belum bisa dirasakan secara maksimal, setidaknya jika dilihat dari sudut pandang keterpakaian out put pendidikan pada dunia kerja. Konsekwensinya adalah bertambahnya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Inilah sebenarnya permasalahan dasar yang sedang dihadapi bangsa ini.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah Negara, sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat kaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Menurut data BPS tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah 265.015.000 jiwa dengan komposisi 131.879.000 laki-laki dan 133.136.000 perempuan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Word Economic Forum, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 234

---

<sup>1</sup> Mohammad Saroni, *Mendidik dan Melatih Entrepreneur Muda Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik* (Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2012), 29.

<sup>2</sup> <http://tumoutounews.com> (diakses pada tanggal 25 Juni 2018).

juta jiwa. Jumlah tersebut akan terus bertambah dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai angka 288 juta jiwa.<sup>3</sup>

Dengan demikian, Indonesia menjadi Negara dengan jumlah populasi terbanyak setelah Cina (1.397.230.000 jiwa atau 18,5%), India (1.343.630.000 jiwa atau 17,8%) dan Amerika (331.090.000 atau 4,38%).<sup>4</sup> Dibanding dengan Negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, pertumbuhan penduduk Indonesia tersebut termasuk yang paling cepat.

Jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan yang cepat, menimbulkan peluang sekaligus tantangan bagi suatu Negara. Dalam konteks Indonesia, keberadaan jumlah penduduk yang demikian banyak, di satu sisi memberi makna bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, sekaligus menjadi pasar ekonomi yang prospek, namun di sisi lain merupakan tantangan dan problema tersendiri. Hal tersebut karena pertumbuhan penduduk Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, sebagaimana dikutip oleh Halim<sup>5</sup>, bahwa angka pengangguran di Indonesia pada 2010 sebanyak 8.319.779 dan mengalami penurunan di tahun 2011 yaitu mencapai 7.700. 086. Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari aspek status pendidikan, maka diketahui bahwa pengangguran tersebut didominasi oleh kalangan yang tidak tamat SD

---

<sup>3</sup> World Economic Forum, *The Indonesia Competitiveness Report 2011* (Genewa: World Economic forum, 2011), 3.

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 25 Juni 2018).

<sup>5</sup> Neddy Rafinaldy Halim, *Penguatan Lembaga Pendidikan dalam Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan*. Makalah disampaikan pada acara seminar nasional pendidikan Islam dan launching program sertifikasi dosen perguruan tinggi agama Islam tahun 2010 di Makassar, 24 Maret 2010.

dan lulusan SD, yaitu mencapai 50,48 %. Sementra itu, lulusan SLTP mencapai 22,83%, Lulusan SLTA mencapai 14,45% dan lulusan diploma dan perguruan Tinggi mencapai 12,14 %. Hal ini cukup memprihatinkan, karena selisih angka antara lulusan SLTA dan lulusan Diploma atau perguruan tinggi relatif kecil yaitu 2,21%.

Selain potensi sumber daya manusia yang cukup besar, Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia memiliki kurang lebih 17.508 pulau yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat garis khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratannya mencapai 1,9 juta km<sup>2</sup> dan luas perairannya kurang lebih 7,9 juta km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 81.000 km. Selain itu, luas laut Indonesia mencakup 2/3 luas Laut Tengah. Persentase spesiesnya mencapai 37% dunia dan merupakan pusat keanekaragaman tropis dunia. Lebih dari 70 genus dari karang, 18 % terumbu karang dunia ada di Indonesia. Lebih dari itu, di Natuna Blok D Alpha cadangan gas alam mencapai 202 triliun kaki kubik, sementara di Blok Cepu juga terkandung kekayaan alam yang bernilai ratusan miliar dolar. Indonesia juga memiliki tambang emas terbesar di dunia namun secara resmi telah dieksploitasi oleh PT Freeport. Dari data tersebut yang tentunya masih sangat banyak potensi yang dimiliki Indonesia yang lain membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek menjadi Negara maju dan sejahtera.

Potensi dan kekayaan yang begitu melimpah yang dimiliki Indonesia, ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan perekonomian dan tingkat pendapatan yang dihasilkan. Sementara ini, pendapatan perkapita

Indonesia masih kalah jauh dengan Malaysia dan Singapura. Pada 2010 pendapatan perkapita Indonesia hanya mencapai US\$ 3.015, sedangkan Malaysia dan Singapura sudah melesat jauh yang masing-masing menyentuh angka US\$ 8.423 dan US\$ 43.117.

Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh minimnya jumlah wirausahawan atau *entrepreneur* di Indonesia. Menurut data yang ada jumlah *entrepreneur* di Indonesia hanya sekitar 0,24% dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan menurut David McClelland, seorang ilmuwan sosial-pembangunan yang mengungkapkan konsep “need for Achievement Virus” berpendapat bahwa suatu Negara akan menjadi makmur secara ekonomi apabila memiliki *entrepreneur* sedikitnya 2% dari jumlah penduduk.<sup>6</sup>

Permasalahan di atas menjadi lebih kompleks ketika Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), yang merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang telah direalisasikan pada tahun 2015.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA yang bisa dijadikan momentum positif dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan

---

<sup>6</sup> Menurut laporan Global *Entrepreneurship Monitor* (GEM) jika di dibandingkan dengan negara maju seperti Singapura dan AS, Indonesia sangat jauh tertinggal. Tahun 2005 Singapura telah memiliki *entrepreneur* sebanyak 2,1% dari total penduduk, sementara AS memiliki 6 juta *entrepreneur* dari total penduduk 280 juta. Sementara Indonesia menurut data statistik yang ada hanya memiliki sekitar 400.000 *entrepreneur* dari jumlah total penduduk 220 juta, atau sekitar 0,18%, sehingga Indonesia memerlukan 12 kali *entrepreneur* lebih banyak dari yang ada. Selanjutnya menurut data BPS tahun 2011, jumlah *entrepreneur* di Indonesia hanya naik sedikit menjadi 0,24%, sementara AS mencapai sekitar 11%, dan Singapura mencapai 7% Badan Pusat Statistik Indonesia, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-ekonomi Indonesia November 2011* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011). Bandingkan dengan Riant Nugroho, *Memahami latar belakang pemikiran Entrepreneurship Ciputra* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), xi.

pasar dan basis produksi. Dengan demikian arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Hal tersebut merekomendasikan keniscayaan adanya suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, bisa dipastikan terciptanya iklim persaingan yang adil, adanya perlindungan konsumen, tercegahnya pelanggaran hak cipta, terciptanya jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, hilangnya sistem *Double Taxation*, dan meningkatnya perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA diproyeksikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal tersebut diupayakan dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing dan dinamisme UKM dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi di antara negara-negara anggota. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan terus didorong untuk meningkatkan partisipasi pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-

negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka keberadaan *entrepreneur* yang memadai merupakan salah satu kunci solusi dari problem sosial dan perekonomian bangsa dan Negara ini. Namun untuk mencetak manusia *entrepreneur* yang handal tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus melalui proses yang berkesinambungan dan sistematis. Salah satu proses yang bisa dilakukan adalah dengan melalui proses pendidikan. Untuk itu, pola pendidikan di Indonesia harus dirubah dari pola pendidikan kolonial yang hanya bertujuan mencetak tenaga kerja, menjadi pola pendidikan yang berorientasi pada terwujudnya insan yang kreatif, inovatif dan mandiri. Dalam konteks inilah urgensi sekolah vokasional, seperti SMK menjadi sangat signifikan dan memiliki *positioning* yang strategis.

Dalam dunia pendidikan, jiwa kewirausahaan turut menjadi faktor penentu kesuksesan peserta didik di masyarakat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat misalnya, ditemukan bahwa faktor kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*Hard Skill*) saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*Soft Skill*). Lebih jauh penelitian ini mengungkapkan bahwa *Hard Skill* hanya menentukan sekitar 20% dari kesuksesan, dan selebihnya 80% kesuksesan ditentukan oleh *Soft Skill*. Dengan

demikian kecerdasan kognitif hanya berkontribusi sekitar 20 – 30 persen, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung jiwa sosial justru menyumbang 80 persen kesuksesan seseorang di kemudian hari.<sup>7</sup>Hal ini juga menegaskan bahwa kecerdasan seorang *entrepreneur* lebih kompleks dan majemuk (*Multiple Intelegenes*) sebagaimana teori Gardner.<sup>8</sup>

Namun demikian, nampaknya peranan sekolah sebagai institusi pelaksana proses pendidikan sejauh ini belum maksimal mendukung pengembangan pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, kelemahan pada aspek pembelajaran di kelas, dengan beberapa indikasi, yaitu; pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang belum maksimal mengarah pada pemberdayaan potensi peserta didik, proses layanan pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan, minat dan bakat yang beragam dari peserta didik, serta belum terlaksananya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered*).

Kedua, lemahnya pengorganisasian pengalaman peserta didik, dengan tetap dilaksanakannya sistem klasikal yang cenderung menjadikan guru sulit memberikan layanan maksimal dalam mengembangkan bakat, minat peserta didik yang berbeda satu dengan yang lain. Ketiga, lemahnya pelaksanaan pengembangan kurikulum. Hal tersebut disebabkan dalam pengembangan

---

<sup>7</sup> Hasil penelitian ini di jelaskan oleh Ali dalam Pusat Kurikulum, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa dan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan* (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010), 2. Bandingkan dengan Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan: Konsep dan Strategi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 18.

<sup>8</sup> Dalam hal ini ada delapan kecerdasan, yaitu; kecerdasan linguistic, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan naturalis, kecerdasan musical dan kecerdasan spasial. Baca Howard Gardner, *Frames of mind: The Theory of multiple Intelligences* (New York: Basic Books, 1983), 41-43.

kurikulum yang ada, aspek kewirausahaan peserta didik belum diintrodusir secara maksimal di setiap satuan pendidikan secara integral dan berjenjang. Keempat, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga proses penginternalisasian pendidikan kewirausahaan tidak bisa efektif dan optimal.<sup>9</sup>

Terlepas dari adanya problematika di atas, sebenarnya jika dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum, pendidikan kewirausahaan juga termasuk materi yang harus diajarkan. Tetapi permasalahannya adalah pendidikan kewirausahaan di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu seringkali masih terjadi distorsi desentralisasi pendidikan yang dijadikan justifikasi bebasnya pengelolaan lembaga pendidikan.<sup>10</sup> Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah mentransformasi sekolah menjadi sekolah *entrepreneurship* atau sekolah yang menekankan pada pengembangan pendidikan kewirausahaan. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam rangka mentransformasikan diri sebagai sekolah *entrepreneurship*, antara lain; membenahi kurikulum, meningkatkan peran sekolah dalam mempersiapkan *entrepreneur*, membenahi pengorganisasian

---

<sup>9</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan.*, 47-48.

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan, Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan* (Jakarta: Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum, 2010), 3-4.

proses pembelajaran, membenahi proses kelompok serta pengembangan kualitas guru.<sup>11</sup>

Lebih dari itu, fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini lebih memberikan harapan yang lebih baik dan optimis. Hal tersebut dikarenakan dunia pendidikan Indonesia mulai melakukan reorientasi atas arah dan tujuan pendidikan yang dilaksanakan. Secara jelas, dunia pendidikan telah mengklasifikasi jenis sekolah yang ada. Selanjutnya sebagai bentuk konkrit reorientasi positif, dunia pendidikan lebih memprioritaskan kepada jenis sekolah yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki *life skill* dan mampu hidup mandiri setelah pembelajarannya selesai. Adanya program 60 : 40 atau bahkan sudah mencapai 70 : 30 untuk perbandingan jumlah sekolah kejuruan (SMK) dan sekolah umum merupakan bentuk nyata perubahan reorientasi tersebut.<sup>12</sup>

Di daerah se-Karesidenan Besuki yang meliputi Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, keberadaan SMK, berdasarkan data Kemendikbud 2014 berjumlah 235 sekolah. Dengan perincian Situbondo memiliki 16 sekolah, Banyuwangi sebanyak 36 sekolah, Bondowoso memiliki 26 sekolah, Jember sebanyak 91 sekolah, Lumajang memiliki 20 sekolah, Kota Probolinggo sebanyak 18 sekolah dan Kabupaten Probolinggo sebanyak 28

---

<sup>11</sup> Pusat Kurikulum, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa dan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan* (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010).

<sup>12</sup> Baca Mohammad Saroni, *Mendidik dan melatih Entrepreneur Muda Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik* (Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2012),23.

sekolah. Meskipun data tersebut masih jauh lebih sedikit dari pada keberadaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan MA (Madrasah Aliyah) yang mencapai jumlah 448 se-Karesidenan Besuki, namun pada tahun-tahun selanjutnya diyakini akan bisa memperkecil selisih jumlah yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mereorientasi pendidikan dan menargetkan perbandingan 70:30 untuk SMK dibanding SMA atau MA.

Kebijakan mereorientasi pendidikan di Indonesia, dari pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran *knowledge* menjadi pembelajaran *Skill* patut diapresiasi. Hal tersebut karena proses pembelajaran di sekolah kejuruan (SMK) misalnya, lebih ditekankan pada proses pelatihan untuk keterampilan sesuai dengan kejuruan yang dipilih peserta didik. Keterampilan aplikatif itulah yang akan menjadi *brandingself*<sup>13</sup> peserta didik dan akan mengantarkan untuk bisa hidup *survive* dan mandiri kelak di kemudian hari.

Selanjutnya, sebagaimana dimaklumi dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dalam kehidupan ini salah satu hal yang penting dimiliki oleh seseorang adalah citra diri atau *brandingself*. Citra diri inilah yang akan menjadi bukti eksistensi seseorang dan keberadaannya diakui sebagai pribadi yang efektif untuk kehidupan. Dengan *brandingself* pula seseorang mempunyai nilai jual dan tidak perlu mencari pekerjaan serta orang-orang dengan citra diri yang tinggi akan ikut menentukan perjalanan hidup masyarakatnya.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, jika menelaah cita-cita pendidikan dalam konteks pendidikan nasional, maka pendidikan yang diorientasikan untuk pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik sebagaimana SMK, bukanlah satu-satunya hal yang harus diwujudkan. Namun, masih ada hal penting lain yang juga harus dilakukan secara simultan untuk hasil pendidikan yang lebih utuh dan holistik. Hal tersebut dikarenakan sistem pendidikan yang ada tidak hanya mengidealkan out put yang memiliki keterampilan dan *life skill* yang handal saja, tapi di samping itu hendaknya out put tersebut memiliki spiritual keagamaan yang tinggi. Manusia yang memiliki keseimbangan spiritual keagamaan dan kompetensi skill yang handal itulah cita-cita tertinggi pendidikan.

Dengan kata lain pendidikan diharapkan menghasilkan manusia yang utuh dan bukan manusia yang *split personality*. Untuk itu dewasa ini muncul gagasan pendidikan integratif atau pendidikan yang menggunakan konsep integratif-interkoneksi, sehingga dalam konteks pendidikan vokasional seperti SMK misalnya, desain kurikulumnya bukan hanya diaksentuasikan pada penanaman jiwa *entrepreneurship* dan skill yang cenderung didasarkan pada prinsip *link and mach* saja, tapi juga disimultankan dengan penanaman karakter dan spiritualitas yang mapan.

Salah satu bukti adanya upaya konkrit untuk mewujudkan gagasan di atas, adalah SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang berbasis Pesantren. Sebagaimana diketahui, dewasa ini telah banyak pesantren yang juga melaksanakan sistem pendidikan sekolah termasuk SMK. Salah satu pesantren

yang melaksanakan pendidikan SMK adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pendidikan SMK di Ponpes Nurul Jadid dibuka pada tahun 2005 dengan nama SMK Nurul Jadid. SMK Nurul Jadid saat ini memiliki beberapa program keahlian, yaitu; Multi Media, Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (LTPTL) PJB Class, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI), dan Tata Busana (TB).

Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan adalah sistem sinergitas antara pendidikan sekolah dan pendidikan pesantren. Kurikulum yang dikembangkan diorientasikan lebih kepada praktek dari pada teori dengan perbandingan 60% untuk praktek dan 40% untuk teori.

Dinamika pengembangan pendidikan vokasional yang diorientasikan pada penanaman jiwa *entrepreneurship* sebagai mana di atas, terutama yang dilakukan oleh pihak SMK Nurul Jadid Paiton merupakan sebuah fenomena yang unik dan menarik untuk dilakukan kajian yang mendalam. Hal tersebut karena statusnya yang berada di naungan Kemendikbud namun disinergikan bahkan diintegrasikan dengan pesantren yang notabene berada di bawah naungan Kemenag, sehingga dianggap tidak linier. Fenomena tersebut berbeda dengan madrasah yang ada dalam pesantren atau yang dipadukan dengan sistem pesantren, semisal MAN Insan Cendikia di Serpong maupun di Gorontalo, atau MAN 3 Malang atau MAN Terpadu di Lumajang. Dalam kasus beberapa madrasah tersebut tidak ditemukan hal yang unik karena dianggap sinkron dan linier.

Keunikan itu juga akan lebih terasa jika dilihat dari konteks pesantren yang melaksanakan pendidikan SMK. Dalam konteks ini, pesantren lebih diposisikan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan SMK, tanpa menimbulkan beban yang berarti dalam hal kebijakan baik dari internal pesantren maupun pemerintah. Lebih dari itu, karakter SMK sebagai lembaga yang memiliki orientasi mencetak lulusan yang “hanya” siap kerja masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. SMK seringkali mendapat stigma negatif sebagai sekolah yang berorientasi dunia saja sehingga cenderung profan, sementara pesantren dikenal sebagai institusi keagamaan dan penanaman moral yang cenderung transenden. Namun kedua institusi ini bisa bersanding dan terintegrasi.

Selain itu dalam konteks Pesantren Nurul Jadid Paiton, keberadaan SMK Nurul Jadid dianggap sebagai salah satu unit pelaksana pesantren, sehingga dalam setiap halnya tidak boleh lepas dari cita-cita besar pesantren. Dengan demikian SMK Nurul Jadid memiliki dua induk institusi sekaligus yang menaunginya, yaitu Pesantren dan pemerintah (Dinas Pendidikan). Kondisi demikian tentu meniscayakan konsekuensi-konsekuensi manajerial yang memiliki tingkat kerumitan tersendiri, terutama dalam mensinkronkan program pembelajaran yang sesuai dengan karakter pesantren di satu sisi, dan harus mengikuti regulasi pemerintah di sisi yang lain. Fenomena-fenomena di atas menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebenarnya ada beberapa hal yang memungkinkan untuk dikaji secara mendalam dan dijadikan rumusan masalah. Di antaranya adalah sejauh mana kebijakan pemerintah (undang-undang atau peraturan pemerintah) mengatur dan memberikan wewenang pengelolaan pendidikan pada institusi ataupun pada daerah (dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan). Hal ini jika dikaitkan dengan *political will* dalam bidang pendidikan. Masalah juga bisa muncul ketika fenomena yang ada di atas di lihat dari sudut kelembagaan. Misalnya dengan mempertanyakan bagaimana atau apa saja tipologi pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* atau kewirausahaan yang sesuai dengan cita-cita undang-undang pendidikan nasional. Maka, kajian tersebut akan menghasilkan tipologi lembaga pendidikan *entrepreneur* yang bisa menjadi alternatif lain dari tipologi yang sudah ada.

Namun demikian, untuk lebih spesifik dan menghindari bias dalam penelitian, maka masalah yang akan di kaji dalam hal ini sebatas model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren serta dampak pengelolaan tersebut di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu rumusan atau fokus masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu; bagaimana model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan bagaimana dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Penelitian ini hanya terbatas pada satu lembaga yaitu SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi pembatasan tersebut adalah berangkat dari hasil penelusuran sementara peneliti yang mendapati SMK berbasis pesantren dengan pengelolaan integratif penuh. Artinya keberadaan SMK diposisikan sebagai pelaksana pesantren dan menjadi bagian pesantren yang tak terpisahkan dengan pesantren, baik secara manajerial, kurikulum, pembelajaran, keuangan, sarana dan prasarana serta iklim sekolah. Selain itu keberadaan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang relatif dikenal secara regional maupun nasional, sebagai pesantren yang maju dan modern juga turut menjadi pertimbangan peneliti.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo?
2. Bagaimana dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dan menganalisis secara mendalam model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Memahami dan menganalisis secara mendalam dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu;

1. Secara teoretis penelitian ini dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuan tentang pengembangan pendidikan *entrepreneurship*, khususnya pada jenjang pendidikan tingkat menengah yang berbasis pesantren. Beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para pakar dicoba dicarikan implikasinya pada satuan pendidikan yakni SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur. Dengan demikian bisa jadi teori yang sudah ada dan telah terbangun sebelumnya menjadi lebih kokoh dan berkembang, atau justru tereduksi oleh fenomena yang ada di lapangan penelitian. Hasil penelitian ini yang berupa kesimpulan-kesimpulan penelitian bisa dijadikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori pendidikan *entrepreneurship* di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan pengalaman dan gambaran konkrit bagi peneliti sendiri tentang varian-varian model pengelolaan

sekolah *entrepreneurship* di sebuah lembaga pendidikan terutama yang berbasis pesantren. Penelitian ini juga akan memiliki kegunaan sebagai umpan balik atas proses pengembangan manajemen pendidikan *entrepreneurship* bagi obyek penelitian yakni SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menentukan positioning penelitian serta mencari perbandingan dan menggali informasi tentang tema penelitian, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki *cor* penelitian yang tidak jauh berbeda. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagaimana tabel berikut;

1. M. Hamid Aqil, *Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi Kasus Pada SMK Di Pondok Pesantren "Nahd}atuth-T}alabah") Kesilir Wuluhan Jember*. Hasil penelitian tersebut, diperoleh beberapa temuan, yaitu proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan SMK Nahd}atuth-T}alabah dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengambilan kebijakan manajemen modern, yang meliputi; perumusan kebijakan dengan melalui pengidentifikasian masalah, pengambilan kebijakan melibatkan semua badan dalam struktur organisasi pondok pesantren "Nahd}atuth-T}alabah" dan pengambilan kebijakannya menggunakan metode perbandingan. Adapun Proses implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Nahd}atuth-T}alabah

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Proses implementasi didukung oleh sumber daya manusia (Kepala Sekolah, wakil dan para guru) yang memiliki standar persyaratan dan sarana prasarana memadai merupakan pendukung dalam pengimplemetasian kebijakan penyelenggaraan SMK Nahd}atuth-T}alabah. Bukti nyata dari keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah meningkatnya prestasi siswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.<sup>15</sup>

2. Abd. Jalil, *Spiritual Entrepreneurship; Studi Transformaasi Spiritualitas Pengusaha Kudus*. Hasil penelitian ini adalah bahwa spiritual *entrepreneurship* merupakan sinergi antara wira usaha yang profan dengan agama yang sakral, dunia dan akhiran, pasar dengan masjid dalam formasi yang seimbang dan integratif. Spritual *entrepreneurship* tersebut dihasilkan oleh proses dialog yang intens dan kreatif antara *ritual involvement*, *teological involvement*, *intellectual involvement* dan *experiential involvement*. Sedangkan proses transformasi merupakan sinergi antara teologi, ritual, intelektual dan pengalaman yang terus berproses secara sadar untuk membentuk bangunan kognitif baru dalam bingkai keimanan pengusaha Kudus. Dari sinilah dalam diri mereka muncul karakter spiritual *entrepreneurship*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Hamid Aqil, “Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi Kasus Pada SMK Di Pondok Pesantren "Nahd}atuth-T}alabah”) Kesilir Wuluhan Jember” (Tesis— IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

<sup>16</sup> Abd.Jail, “Spiritual *Entrepreneurship*; Studi Transformaasi Spiritualitas Pengusaha Kudus” (Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

3. Patrikha Finisica, *Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Keluarga dan di Sekolah Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Self-efficacy Siswa SMK (SMEA) di Kota Malang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dalam keluarga dan di sekolah berpengaruh signifikan terhadap *self-efficacy* siswa. Besar pengaruh langsung dan tidak langsung pendidikan kewirausahaan dalam keluarga dan di sekolah terhadap *self-efficacy* siswa sebesar 16,10%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dalam keluarga, pendidikan kewirausahaan di sekolah dan *self-efficacy* berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha siswa. Besar pengaruh langsung dan tidak langsung pendidikan kewirausahaan dalam keluarga, pendidikan kewirausahaan di sekolah dan *self-efficacy* terhadap minat berwirausaha siswa adalah sebesar 40,5%.<sup>17</sup>
4. Kurdie Syuaeb, *Pendidikan Kewirausahaan Melalui Kemitraan Antara Deperindag Dengan Pesantren: Studi Kasus Usaha Permeubelan pada Pondok Pesantren Al-Ittihad Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka*. Adapun hasilnya bahwa latar belakang keikutsertaan santri pada pendidikan kewirausahaan bidang permeubelan disebabkan adanya motivasi yang kuat untuk menjadi pengusaha atau pekerja dalam bidang permeubelan. Pembelajaran kewirausahaan tersebut memakai sistem dan program pendidikan luar sekolah. Adapun pengelolaannya, dikelola sendiri oleh

---

<sup>17</sup> Patrikha Finisica, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Keluarga dan di Sekolah Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Self-efficacy Siswa SMK (SMEA) di Kota Malang" (Tesis-Universitas Negeri Malang, Malang, 2012)

peserta didik dengan bekerja sama dengan pihak Pondok Pesantren al-Ittihad Cipeundeuy dengan Deperindag Majalengka. Dari proses pembelajaran wira usaha tersebut para santri memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang memproduksi meubel dan pemasarannya. Hal tersebut juga memberi dampak positif yaitu tumbuhnya rasa percaya diri mereka dalam menghadapi masa depan.<sup>18</sup>

5. Ziad Faroh Haqiqi, *Manajemen Kewirausahaan (Studi Kasus di Pesantren Abdurrahman Bin Auf Klaten)*. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen kewirausahaan, upaya pemanfaatan potensi ekonomi dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan ingin mengetahui aplikasi nilai-nilai kewirausahaan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf Klaten. Sedangkan hasil penelitiannya pesantren ini mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dengan mendirikan unit-unit usaha seperti, peternakan sapi, kambing, potong ayam. Sementara dalam pelaksanaan manajemennya dengan mengedepankan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemberdayaan, pembelajaran, pengawasan, dan evaluasi. Pada tarap aplikasi nilai-nilai kewirausahaannya dengan menggunakan sosial *entrepreneurship*, yakni keuntungan usaha secara keseluruhan kembali ke pesantren sebagai dana program pendidikannya. Nilai kepemimpinan diterapkan dengan kepemimpinan yang unggul, inovasi terus menerus. Dalam

---

<sup>18</sup> Kurdie Syuaeb, "Pendidikan Kewirausahaan Melalui Kemitraan antara Deperindag dengan Pesantren: Studi Kasus Usaha Permeubelan pada Pondok Pesantren Al-Ittihad Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka" (Tesis-UPI, Bandung, 2013)

pengambilan keputusan senantiasa mengedepankan sikap hati-hati terhadap semua resiko serta penuh tanggung jawab terhadap perubahan.<sup>19</sup>

6. Mohamad Hizqil Mahbub, *Pendidikan Kewirausahaan Di Kalangan Santri (Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyyaah Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pondok Pesantren Assa'idiyyah memberikan pendidikan kewirausahaan kepada santri agar santri mempunyai bekal ketrampilan hidup. Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren melibatkan semua pengasuh pondok pesantren baik sebagai tenaga pengajar dan sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Pondok Pesantren Assa'idiyyah juga bekerjasama dengan masyarakat di sekitar pondok dan dinas atau instansi seperti Departemen Agama, Dinas Sosial dan Tenaga kerja dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang dipelajari santri antara lain ketrampilan bertani, beternak, menjahit dan komputer. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan dengan memanfaatkan waktu kosong santri yaitu sesudah pulang sekolah dan pada waktu hari libur.<sup>20</sup>
7. Fitri Nurlaili, *Pembelajaran Kewirausahaan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf Klaten*. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pengembangan kurikulum yang dilakukan difokuskan pada aspek

<sup>19</sup> Ziad Faroh Haqiqi, "Manajemen Kewirausahaan (Studi Kasus di Pesantren Abdurrahman Bin Auf Klaten)" (Tesis—IAIN Wali Songo, Semarang, 2010).

<sup>20</sup> Mohamad Hizqil Mahbub, "Pendidikan Kewirausahaan di Kalangan Santri (Kasus Pondok Pesantren Assa'idiyyaah Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)" (Tesis-UNS, Surakarta, 2011)

kepribadian islam, kemandirian dan profesionalisme. Kurikulum disusun dan dikelola secara mandiri oleh internal pesantren (2) pengajar berasal dari berbagai disiplin ilmu (3) Santri yang mengikuti kewirausahaan adalah pemuda usia produktif yang bertekad menjadi wirausaha (4) pembelajaran dilakukan dengan berbagai variasi metode dan model sesuai kebutuhan pembelajaran (5) media pembelajaran mendukung pembelajaran dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran (6) penilaian pembelajaran dilakukan dengan penilaian autentik.<sup>21</sup>

8. Moh. Nadjib, *Makna Pembelajaran Berbasis Agribisnis Semangat Kerja dan Kemandirian Komunitas Pondok: Studi Kasus pada Pondok Sirojuth Tjolibin*. Adapun hasil penelitian ini adalah pembelajaran di Pondok Sirojuth Tholibin dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai ekonomi; pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ibadah dengan menggunakan sumber belajar terdiri dari sesuatu yang ada lingkungan sekitar. Keberhasilan pembelajaran yang ada disebabkan kharisma kyai yang memiliki pengaruh yang cukup besar. Selain itu dalam pembelajaran selalu ditekankan bahwa seorang wirausaha wajib berikhtiyar, sabar, silaturahmi, jujur, qana`ah, karena akan meningkatkan semangat dan kemandirian.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Fitri Nurlaili, "Pembelajaran kewirausahaan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf Klaten" (Tesis-USM, Semarang, 2013)

<sup>22</sup> Moh. Nadjib, "Makna Pembelajaran Berbasis Agribisnis Semangat Kerja dan Kemandirian Komunitas Pondok: Studi Kasus pada Pondok Sirojuth Tjolibin" (Tesis--Universitas Negeri Malang, Malang, 2010).

9. Inayatul Khusnah, *Pesantren dan Entrepreneurship (Upaya Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto dalam Pembentukan Jiwa Entrepreneurship Santrinya)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pesantren dalam pembentukan jiwa *entrepreneurship*. Di samping itu, penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa tidak semua santri yang sudah lulus atau keluar dari pesantren menjadi seorang ulama atau Kyai, dan melihat arus gelombang dunia global, maka dalam mengantisipasi semua itu, pesantren diharapkan mampu memberikan bekal kepada para santri untuk mampu tampil di tengah masyarakat tidak saja dengan kemampuan di bidang agama saja, melainkan juga mampu tampil dengan berbagai macam ketrampilan dan keahlian-keahlian tersendiri.<sup>23</sup>

10. Moh. Rasyad, *Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemandirian dan Profesionalisme (Studi tentang Manajemen Kewirausahaan Pondok Modern Darussyahid Sampang Madura)*. Hasil penelitian ini adalah aktifitas manajemen dimulai dengan melakukan secara sistematis beberapa hal, yaitu; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Terdapat dua jenis pengelolaan wira usaha yaitu, usaha ekonomi mandiri dan tidak. Keduanya mempunyai peran penting dalam operasional pesantren. Adapun proses penanaman nilai jiwa kewirausahaan bagi santri diorientasikan pada aspek

---

<sup>23</sup> Inayatul Khusnah, "Pesantren *Entrepreneurship* (Upaya Pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto dalam Pembentukan Jiwa *Entrepreneurship* Santrinya)" (Tesis-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan harapan santri mampu berwirausaha dan mandiri.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian tentang *entrepreneurship* yang pernah dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks ekonomi dan bisnis, peneliti belum menemukan titik kesamaan terhadap penelitian yang hendak dikaji, khususnya pengembangan model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan. Dari sini nampak perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada fokus penelitian, di mana penelitian ini akan ditekankan pada model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Penelitian ini akan fokus mengkaji tentang model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren serta dampaknya di SMK tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case-studies*).<sup>25</sup> Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini

<sup>24</sup> Moh. Rasyad, "Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemendirian dan Profesionalisme (Studi tentang Manajemen Kewirausahaan Pondok Modern Darussyahid Sampang Madura)" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

<sup>25</sup> Studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57. Bandingkan dengan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 82.

dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* di Sekolah Menengah Kejuruan berbasis pesantren yaitu SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur.<sup>26</sup> Untuk mengungkap substansi penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang mendalam terhadap pengelolaan sekolah *entrepreneurship* mulai dari model pengelolalan yang dipakai sampai dampak model pengelolaan tersebut.

Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini memakai rancangan studi kasus. Sesuai dengan karakteristik studi kasus maka peneliti melakukan penelitian pada satu obyek penelitian yang memiliki latar (*setting*) atau tempat yang tertentu,<sup>27</sup> dalam hal ini adalah SMK Nurul Jadid Paiton. Dipilihnya jenis pendekatan studi kasus dikarenakan tujuan penelitian ini diorientasikan untuk mendeskripsikan model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* beserta dampaknya di SMK tersebut.

Selain hal tersebut rancangan penelitian studi kasus dipilih oleh peneliti karena ada beberapa alasan, antara lain; pertama, studi kasus dapat menghasilkan informasi penting terkait hubungan antar-variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas dan rinci. Kedua, dengan pendekatan studi kasus peneliti sangat dimungkinkan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia yang diteliti, sulit menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diduga

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian /kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 6.

<sup>27</sup> Bogdan, R.C, & S.K. biklen, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods* (London: Allyn and bacon: 1982), 62.

sebelumnya. Ketiga, data-data dan temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian studi kasus akan sangat berguna untuk dijadikan dasar dalam membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih mendalam dalam konteks pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti dalam melaksanakan penelitian studi kasus ini melakukan beberapa rangkaian kegiatan penelitian di lapangan. Di antaranya, peneliti melakukan studi awal, kemudian dilanjutkan dengan studi orientasi dan studi terfokus. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi terkait model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* dan dampaknya di lokus penelitian yaitu SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Lebih dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan baik dari sekolah maupun pesantren Nurul Jadid baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Kemudian untuk memperkuat data yang ada, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terkait fokus penelitian yang ada.

Jenis penelitian ini adalah *grounded theory* karena penelitian ini ditujukan untuk menemukan teori dengan skema analisis abstrak fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan kata lain penelitian ini secara induktif bertujuan untuk memperoleh data-data yang diberlakukan untuk pengembangan teoritis. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan beberapa prinsip penelitian *grounded theory* antara lain;

perumusan masalah, deteksi fenomena, penurunan teori (*theory generation*), pengembangan teori, dan pemilihan teori.<sup>28</sup>

Selanjutnya dalam mendekati obyek penelitian, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mengharuskan bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek yang diteliti. Kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan menjadi salah satu ciri utama dari penelitian fenomenologis.<sup>29</sup> Dalam penelitian fenomenologis penekanan yang dilakukan diorientasikan pada interpretasi dan analisis emic berupa ungkapan dan simbol di lapangan.<sup>30</sup>

Adapun model penelitian dalam penelitian ini yaitu model naturalistic.<sup>31</sup> Artinya dalam melakukan penelitian peneliti melaksanakannya secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak mengadakan manipulasi dan rekayasa kondisi, sehingga proses diskripsi dilakukan secara alami. Kondisi dan situasi alamiah di lapangan ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan jenis dan sifat data yang dikumpulkan melalui berbagai informasi di lapangan yang dihasilkan dari proses pengamatan, wawancara, serta studi dokumentasi untuk menemukan makna di balik realita alamiah

---

<sup>28</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 192-207.

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2002), 19.

<sup>30</sup> Lark Moutakas, *Phenomenological Research Methods* (California: SAGE, Thousand Oaks, 1994), 26.

<sup>31</sup> Naturalistic merupakan salah satu model penelitian kualitatif dimana peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam menafsirkannya.

pengembangan pendidikan *entrepreneurship* berbasis pesantren di lokasi penelitian.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama data adalah berupa kata-kata dan tindakan. Sedangkan dokumen dan lain-lainnya diposisikan sebagai data pendukung atau tambahan.<sup>32</sup> Adapun data yang berupa kata-kata adalah ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban hasil wawancara yang diberikan oleh subyek penelitian ketika menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dimungkinkan untuk terus berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan data dan kondisi di lapangan dengan tetap berpegang pada fokus penelitian. Data yang berupa tindakan merupakan hasil pengamatan peneliti di lapangan dalam rangka melengkapi dan memperkokoh data yang ada.

Berangkat dari uraian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu *pertama* adalah sumber data yang berupa manusia, dan yang *kedua* berupa sumber data non manusia. Sumber data manusia dalam penelitian ini adalah para pengelola sekolah menengah kejuruan yang menjadi obyek penelitian, yaitu SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta para pengelola pesantren, antara lain adalah kepala sekolah, wakil kepala, sejumlah guru, pengasuh pesantren, pengurus

---

<sup>32</sup> Baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

pesantren, sejumlah ustad pesantren serta beberapa siswa atau santri, dan juga beberapa wali siswa atau wali santri. Sumber data tersebut dicatat dalam transkrip wawancara untuk selanjutnya dianalisis dan diungkapkan dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dipilih sebagai subyek atau informan dalam penelitian ini karena mereka menjadi pengelola dan pelaku dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang menjadi obyek penelitian. Guru dijadikan informan karena guru sebagai pelaksana pembelajaran di kelas dan bersentuhan langsung dengan peserta didik. Sedangkan pengurus pesantren dipilih menjadi informan karena ia adalah salah satu pihak yang juga terlibat dalam penentuan kebijakan yang berdampak pada sekolah. Pengasuh dipilih sebagai informan karena dalam konteks pesantren pengasuh memiliki wewenang tak terbatas sebagai penanggung jawab utama dalam seluruh kegiatan pesantren termasuk pelaksanaan proses pendidikan yang ada di dalamnya. Ustadh dipilih sebagai informan karena memiliki tanggung jawab dalam mengajar dan membimbing peserta didik dalam hal ilmu keagamaan dan kegiatan lain di pesantren. Siswa atau santri dijadikan informan karena mereka yang juga terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan di pesantren. Sementara wali siswa atau wali santri dijadikan informan karena penelitian ini juga membutuhkan data terkait dengan motivasi yang mendorong peserta didik untuk belajar di lembaga ini, serta harapan orang

tua siswa atau santri terhadap anaknya setelah menyelesaikan studi di SMK Nurul Jadid paiton Probolinggo.

Adapun sumber data non manusia adalah berupa dokumen terkait model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren, serta hasil pengamatan peneliti terhadap tindakan-tindakan dan kegiatan yang ada di lapangan penelitian, selain yang berupa ucapan dan pernyataan. Data yang dihasilkan dari sumber non manusia ini diposisikan sebagai data pendukung untuk memberikan keyakinan yang lebih mantap bagi peneliti, terkait data yang diperoleh di lapangan yakni SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh peneliti dengan cara observasi dan wawancara. Dengan demikian data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan pernyataan-pernyataan informan di lapangan terkait fokus penelitian dan berupa tindakan-tindakan subyek penelitian di lapangan yang bersifat *up to date*. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi yang terkait dengan tema penelitian.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam menggunakan teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap serangkaian aktifitas dan proses kegiatan yang ada di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersifat konkrit dan bisa memperkuat pemahaman dan pengetahuan peneliti berdasarkan gagasan yang telah terbangun sebelumnya.<sup>34</sup> Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek atau informan penelitian. Dengan demikian observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif (*participant observation*). Dengan observasi partisipatif diharapkan akan mendapat pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh aspek penelitian.

Observasi partisipan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, dimulai dari observasi deskriptif (*descriptive observation*) secara luas dengan melukiskan secara umum situasi yang ada di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Tahap berikutnya dilakukan observasi terfokus (*fokused observation*) untuk menemukan kategori-

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2013, 224.

<sup>34</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 93.

kategori model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren dan dampaknya di SMK tersebut.

b. Interview

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari para informan yang telah ditentukan. Teknik ini dimaksudkan agar data-data yang telah dihasilkan melalui teknik lain seperti observasi, menjadi lebih sempurna dan bisa lebih dipahami dengan baik. Hal tersebut karena kadangkala terdapat data yang sulit didapat melalui observasi, seperti pola pikir atau makna dari kejadian yang sudah terjadi.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstandar (*unstandarrized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Selanjutnya wawancara yang tidak terstandar ini dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu; (1) wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview* atau *passive interview*). Jenis Wawancara ini sering disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka, karena dalam setiap wawancara peneliti tidak menggunakan instrument terstandar atau pedoman wawancara yang bersifat baku.<sup>36</sup> Hal demikian dikarenakan peneliti ingin melakukan

---

<sup>35</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 63. Bandingkan dengan Soeharto Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen* (Jakarta: Lukman Offset, 1999), 159.

<sup>36</sup> Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunitas dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 180.

komunikasi secara langsung dengan informan secara mendalam (*indepth interview*). Untuk memastikan data yang didapat lengkap dan tidak hilang maka peneliti akan selalu menggunakan catatan berupa buku catatan atau alat perekam, sehingga setiap kegiatan wawancara selesai akan selalu dilakukan pencatatan. (2) wawancara agak terstruktur (*some what structured interview*). Dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan instrument terstruktur namun peneliti telah membuat garis-garis besar yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Dalam melakukan dua metode wawancara di atas peneliti menggunakan pendekatan wawancara terbuka (*open interview*) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang *open ended* serta ditujukan kepada informan-informan tertentu yang dianggap sebagai informan kunci dan informan biasa. (3) wawancara sambil lalu (*casual interview*). Dalam hal ini wawancara dilakukan apabila secara kebetulan peneliti bertemu informan yang tidak direncanakan atau diseleksi terlebih dahulu seperti informan siswa. Wawancara ini juga dilakukan sesuai dengan situasi yang ada sehingga sangat tidak terstruktur (*very unstructured*). Wawancara jenis ketiga ini peneliti posisikan sebagai wawancara pendukung dari metode wawancara yang pertama dan kedua.

Dalam melakukan wawancara di atas peneliti selalu mengarahkan topik pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Hal tersebut untuk menghindari wawancara yang melantur dan

menghasilkan informasi yang kosong. Wawancara dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu atau pula secara seponan sesuai waktu yang diberikan informan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani yang berkaitan dengan arsip atau catatan-catatan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, foto-foto, agenda, dan sebagainya.<sup>37</sup> Data hasil studi dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap dan penunjang bagi data primer sehingga menjadi data yang utuh komprehensif dan berkualitas.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dalam menentukan objek penelitian ini, peneliti melakukan kajian lapangan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti telah melakukan studi pendahuluan tentang model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Alasan dipilihnya SMK ini sebagai obyek penelitian, karena ada beberapa karakteristik yang unik dan dianggap menarik untuk diteliti, sebagaimana telah dijabarkan di latar belakang.

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data menata data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya sehingga menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup>

Dengan memakai jenis analisis deskriptif kualitatif tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam menganalisis data peneliti melakukan interpretasi terhadap data berupa peristiwa yang terjadi di latar sekolah (ungkapan ungkapan informan dan isi dokumen yang tersedia pada kasus), sehingga diperoleh makna yang dapat dideskripsikan sebagai hasil temuan penelitian.<sup>39</sup>

Proses analisis data penelitian ini dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data dan analisis setelah pengumpulan data selesai. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memahami seluruh data yang telah dikumpulkan, serta memikirkan peluang-peluang pengumpulan data berikutnya yang kemungkinan data tersebut lebih bagus kualitasnya, dalam rangka melengkapi data yang dirasa kurang, sekaligus menguji gagasan-gagasan yang muncul selama pengumpulan data.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>39</sup> Nasutiaon S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito 1998), 52.

<sup>40</sup> Manthaw B. Miles and Huberman.A.M., *Qualitative Data Analysis A. Course Book of New Method* (Berverly Hills: Sage Publication Inc 1992), 54.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis pada tahap ini adalah sebagaimana berikut yaitu;

a. Reduksi data

Dalam proses penelitian, tentunya data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan umum, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi, yaitu dengan menyederhanakan, memotong, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data penelitian telah direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Dalam penyajian data ini hal yang dilakukan peneliti adalah penyusunan data sebagai hasil reduksi data yang telah dilakukan agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya. Hal itu dikarenakan data yang terkumpul biasanya tidak sistematis dan bercampur antara poin satu dengan poin berikutnya. Dalam hal ini maka peneliti melakukan penyusunan data dalam bentuk yang sederhana dan

selektif untuk memudahkan pemahaman secara utuh tentang hal-hal yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Selain itu penyajian data ini juga dimaksudkan untuk memperoleh pola-pola bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Adapun proses penyajian data dilakukan setelah peneliti memperoleh data dan menemukan makna yang sudah jelas setelah dilakukan analisis terlebih dahulu oleh peneliti.

c. Verifikasi dan Penarikan Simpulan

Pada hakekatnya dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus oleh peneliti baik selama maupun sesudah pengumpulan data. Hal itu dilakukan guna mempermudah melakukan penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang suatu peristiwa yang terjadi. Sejak permulaan pengumpulan data penarikan kesimpulan sudah dilakukan yakni di saat peneliti mulai memberikan makna terhadap suatu data yang diperoleh. Keputusan peneliti dalam memberikan arti terhadap suatu data pada dasarnya merupakan suatu rumusan kesimpulan meskipun masih bersifat longgar dan terbuka. Selanjutnya peneliti melakukan reduksi ulang dan menverifikasi kembali selama penelitian berlangsung, sehingga rumusan-rumusan tersebut bisa disimpulkan menjadi temuan penelitian dan ditulis sebagai kesimpulan akhir.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti ialah verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan awal sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan apakah data yang didapatkan valid, maka peneliti melakukan pengecekan data dengan menggunakan teknik triangulasi dan validitas internal. Triangulasi dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>41</sup>

Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi triangulasi sumber data dan metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya. Adapun triangulasi metode dilaksanakan dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik kredibilitas data atau informasi yang diperoleh. Misalnya

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 330.

hasil wawancara dibandingkan atau dikroscek dengan metode observasi dan kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan.

Dengan demikian bisa dikatakan langkah pelaksanaan triangulasi yang dilakukan peneliti dalam memastikan validitas data dalam penelitian ini adalah:

- a. Membandingkan data dari satu informan dengan informan lainnya.
- b. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan bahkan data dokumen.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- d. Membandingkan apa yang dikatakan para informan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Adapun teknik validitas internal yang dilakukan peneliti, yaitu dengan menambah dan memperpanjang intensitas kehadiran dalam melakukan penelitian. Memperpanjang waktu penelitian dipandang perlu dilakukan oleh peneliti sebagai langkah antisipasi mengingat peneliti adalah orang luar dari SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Hal tersebut mengakibatkan peneliti mengalami relatif kesulitan untuk menemui para sumber data dalam rangka pengumpulan data, sehingga dengan memperpanjang waktu penelitian problem tersebut bisa diatasi dengan baik.

Begitu juga dengan observasi yang diperdalam sebagai upaya memastikan data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat.<sup>42</sup> Dengan kata lain semakin tekun mengadakan pengamatan di lapangan penelitian maka akan semakin memperkecil kesalahan seperti kecerobohan serta ketidakhati-hatian dalam mencari dan mengamati suatu data.

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

- a. Tahap pra lapangan, dalam hal ini peneliti mengawali dengan melakukan kajian awal berbagai fenomena sosial sekaligus mencari referensi di perpustakaan. Peneliti membuat dan mengajukan judul disertasi kepada ketua program studi. Setelah itu peneliti menyusun rancangan penelitian, melakukan pemilihan lokasi, mengurus izin penelitian, dan mempersiapkan peralatan penelitian. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pra lapangan ini peneliti membuat proposal disertasi serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk kemudian bisa disetujui dan diuji dalam seminar proposal.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi pemahaman latar penelitian di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo, melakukan persiapan penelitian, memasuki lapangan penelitian dan berperan serta di lapangan sambil mengumpulkan data. Selanjutnya peneliti mengorganisasi data dan melakukan pemilahan data sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Surabaya; Viv Press, 2012), 269-275.

dan dilanjutkan dengan melakukan tahap analisis data. Adapun tahap analisis data ini pada hakikatnya senantiasa dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.

- c. Tahap penulisan hasil penelitian atau pelaporan. Tahap ini dilaksanakan setelah proses pengumpulan pembahasan dan analisa data selesai dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat laporan secara tertulis tentang segala sesuatu yang diperoleh dari penelitian dalam wujud disertasi sebagai syarat untuk menyelesaikan program doktor. Selanjutnya peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing atau para promotor untuk mengecek hasil penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan konsultasi kepada kepala SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo guna memastikan apa yang peneliti tulis sesuai dengan realitas yang ada serta mendapat persetujuan dengan yang bersangkutan. Setelah itu dilakukan ujian kelayakan disertasi baik secara tertutup maupun terbuka.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah penulisan laporan disertasi maka perlu disusun sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut;

Bab *pertama* berisi pendahuluan dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah dengan mengulas alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan, kemudian dikemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu untuk mempertegas posisi penelitian yang

hendak ditulis. Dalam bab ini juga memuat ulasan metode penelitian sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian yang meliputi; metode dan pendekatan penelitian, prosedur pengumpulan data, objek penelitian dan sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Selanjutnya pada bagian akhir bab ini diurai tentang sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Kajian teoretik yang menyajikan tentang teori-teori dan konsep yang terkait dengan judul yakni, sekolah *entrepreneurship* dan Pondok Pesantren. Terkait dengan teori tentang sekolah *entrepreneurship* dalam bab ini akan dipaparkan tentang; pengertian tentang sekolah dan *entrepreneurship*, teori tentang pendidikan sekolah *entrepreneurship* di SMK (pengertian sekolah dan *entrepreneurship*, model dan strategi pengembangan sekolah *entrepreneurship* di SMK). Adapun yang terkait dengan teori Pondok Pesantren yaitu meliputi sejarah dan karakteristik pesantren, kurikulum, tipologi pengembangan pesantren, dan lain-lain.

Bab *ketiga*, penyajian data yang mengemukakan temuan-temuan penelitian tentang gambaran umum objek penelitian yaitu SMK Nurul Jadid dan Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dalam bab ini menguraikan Profil SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sejarah SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo, letak geografis SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo, data keberadaan guru dan siswa serta kurikulum dan sarana prasarana SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Selain itu, dalam bab ini juga akan dikemukakan beberapa hal

terkait pesantren mengingat keberadaan SMK Nurul Jadid terintegrasi dengan pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Bab *keempat* pembahasan terkait dengan analisis data hasil penelitian, terkait dengan model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Bab *kelima* adalah pembahasan hasil temuan penelitian, yang meliputi model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo serta dampak model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Bab *keenam* merupakan bab penutup yang meliputi, simpulan, temuan konseptual dan Implikasi Teoretik, serta keterbatasan penelitian dan rekomendasi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sekolah *Entrepreneurship*

#### 1. Konsep Pendidikan Sekolah dan *Entrepreneurship*

##### a. Konsep Pendidikan Sekolah

Secara etimologi sekolah berasal dari bahasa Inggris yaitu *school* yang berarti waktu luang,<sup>43</sup> sehingga sekolah bisa diartikan sebagai waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar.

Adapun secara terminologi, sekolah memiliki beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar. Aan Qomariah mengartikan sekolah sebagai sebuah sistem. Menurutnya, sebagai sebuah sistem sekolah mempunyai beberapa komponen utama yaitu; input, proses dan output. Komponen-komponen tersebut saling terkait, sehingga tidak bisa terikat dan saling mempengaruhi, sehingga tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.<sup>44</sup> Tiga komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Input Sekolah; Input sekolah adalah segala masukan yang diperlukan sekolah dalam rangka terwujudnya proses untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan. Input sekolah

---

<sup>43</sup> Secara Historis bangsa Yunani kuno memiliki kebiasaan mengisi waktu luang dengan cara mendatangi seseorang yang pandai untuk menanyakan sesuatu yang ingin di ketahui. Kebiasaan tersebut sering diistilahkan dengan *Schole*, *Scola*, atau *Schola*.

<sup>44</sup> Aan Qomariah, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 1.

tersebut berupa manusia (*man*), uang (*money*), material atau bahan-bahan (*materialis*), metode dan mesin (*machines*).

- 2) Proses Penyelenggaraan Sekolah. Proses penyelenggaraan sekolah adalah pelaksanaan pengelolaan masukan masukan (*input*) agar tujuan (*output*) sekolah yang telah ditentukan bisa tercapai. Dalam hal ini yang menjadi inti proses penyelenggaraan adalah pelaksanaan pembelajaran yang berupa interaksi antara guru dan siswa yang didukung oleh perangkat lain sebagai bagian keberhasilan pembelajaran.<sup>45</sup>

Adapun perangkat yang memiliki daya dukung tersebut adalah proses kepemimpinan dan proses manajemen. Proses kepemimpinan menghasilkan keputusan keputusan kelembagaan, pemotivasian staf, dan penyebaran inovasi. Sedangkan proses manajemen menghasilkan aturan aturan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, pengkordinasian kegiatan, monitoring dan evaluasi.<sup>46</sup>

- 3) Output sekolah. Output sekolah adalah seberapa banyak hal yang dipelajari dan seberapa baik hasil yang diperoleh dalam mempelajarinya. Dengan demikian output sekolah merujuk pada kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan didapatkan oleh siswa dan orang yang membutuhkan. Pembelajaran

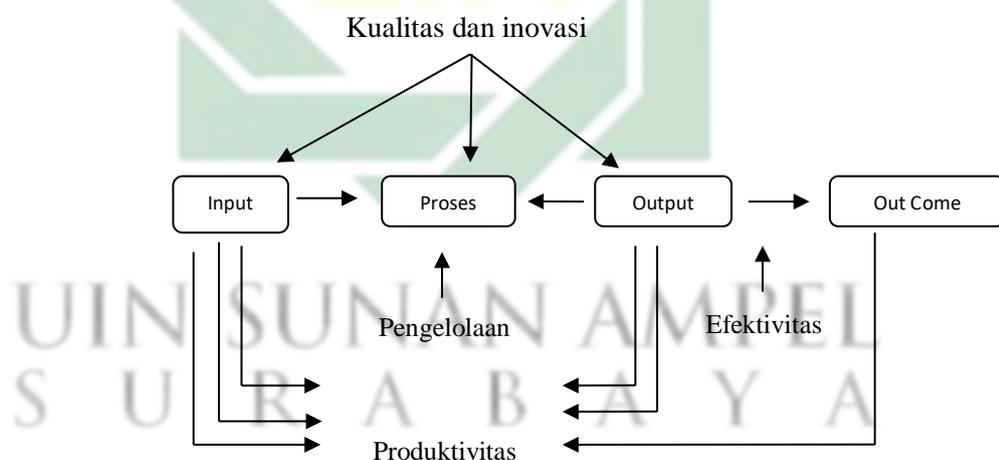
---

<sup>45</sup> Bandingkan Dengan Barnawi dan M. Arifin, *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship* (Jogjakarta : AR-RUZZ Media, 2013), 39.

<sup>46</sup> Aan Komariyah, *Visionary Leadership*, 3.

di sekolah tersebut bisa berupa kognitif, keterampilan, maupun sikap dan nilai diri.<sup>47</sup>

Barnaour dan M. Arifin menambahkan, selain kriteria output di atas output sekolah juga merujuk pada kinerja sekolah itu sendiri. Menurutnya output sekolah tidak hanya diukur dari lulusnya saja, tapi juga diukur dari tingkat kinerja sekolah. Kinerja sekolah tentunya tidak hanya kinerja siswa yang belajar, melainkan kinerja seluruh komponen sistem. Kinerja sekolah diukur dari efektivitas sekolah, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kinerja, surplus dan moral kerja.<sup>48</sup> Lebih jelasnya hal tersebut bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kinerja sekolah  
Sumber: Slamet ( 2003 : 3 )

<sup>47</sup> Moerdyanto, *Manajemen Sekolah Indonesia Yang Efektif Melalui Penerapan Total Quality Management*, makalah di sampaikan pada Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia, 22-24 Juni 2007

<sup>48</sup> Barmawi dan M. Arifin, *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship*, 39.

Gambar di atas, bisa dipahami bahwa kesuksesan dan keberhasilan pendidikan di sekolah diukur sejauh mana optimalisasi dan maksimalisasi keberdayaan semua komponen sekolah secara holistik dan komprehensif ukuran kesuksesan sekolah tidak bisa difokuskan pada satu komponen sekolah secara persial seperti *output* atau *out come* saja.

## **b. Konsep Dasar *Entrepreneurship***

### **1) Perspektif Ekonomi dan Bisnis**

*Entrepreneurship* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “*entreprendre*” yang berarti petualang, pencipta dan pengelola usaha. *Entrepreneurship* memiliki kesamaan arti dengan *unterachmer* dalam bahasa Jerman dan *ondernemer* dalam bahasa Belanda.<sup>49</sup> Dalam bahasa Indonesia *entrepreneurship* dimaknai dengan kewirausahaan berarti seseorang yang mampu menjalankan usaha dengan jujur, berani, dan ksatria.<sup>50</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata *entrepreneur* diartikan sebagai: “orang yang padai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun

---

<sup>49</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 2.

<sup>50</sup> Muhammad Hamdani, *Entrepreneurship Untuk Mahasiswa Sebuah Solusi Untuk Siap Mandiri* (Jakarta: Trans Info Media, 2012), 29.

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya”.<sup>51</sup>

Istilah *entrepreneur* menjadi semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi abad ke-19 bernama J.B. Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dari tingkat produktifitas yang rendah menjadi lebih tinggi.<sup>52</sup>

Seiring dengan perkembangan industri alisasi dan persaingan pasar ada abad ke-20 M, muncul Frank Knight (1921) yang lebih spesifik mengaitkan *entrepreneurship* dengan pasar. Menurutnya *entrepreneurship* merupakan kemampuan seseorang dalam memprediksi dan menyikapi dinamika pasar. Pengertian ini menekankan pada peranan seorang *entrepreneur* dalam menyikapi ketidakpastian pasar.<sup>53</sup>

Selain itu Joseph Schumpeter (1934) secara lebih tegas mengistilahkan *entrepreneur* sebagai seorang inovator yang mampu membuat perubahan-perubahan dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru.<sup>54</sup> Penekanan pada penciptaan hal-hal yang baru dalam *entrepreneurship* kokoh oleh Peter F. Drucker

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 430.

<sup>52</sup> Rambat Lupiyoadi dan Jero Wacik, *Wawasan Kewirausahaan, Cara Mudah menjadi Wirausaha* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004), 1.

<sup>53</sup> Bandingkan dengan Abd. Jalil, *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan* (Yogyakarta: LKS, 2013), 45.

<sup>54</sup> Aldrich Howard, *“Entrepreneurship” dalam the handbook of economic sociology* (New Jersey: Pristown University Press, 2005), 452.

yang menyatakan bahwa *entrepreneurship* merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.<sup>55</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa seorang *entrepreneurship* adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dengan yang lain yang sudah ada sebelumnya.

Pengertian yang tidak jauh berbeda dari pendapat Drucker, adalah pendapat Zimmerer yang mengartikan *entrepreneurship* sebagai suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).<sup>56</sup>

Sampai di sini, berdasarkan paparan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *entrepreneurship* merupakan sebuah proses yang direncanakan secara kreatif dan inovatif untuk mendapatkan nilai tambahan dan keuntungan usaha serta kepuasan pribadi dengan sescepat persiapan menerima resiko yang ada.

Pengertian *entrepreneur* menjadi semakin luas, ketika dalam kenyataannya *entrepreneur* bisa dijumpai pada semua profesi, misalnya bidang kedokteran, *engineering*, pendidikan, arsitektur, praktisi hukum, bidang pekerjaan sosial, dan bidang-bidang yang lain. Kondisi yang seperti ini mengantarkan Robert D. Hisrich dan Candida G. Brush menawarkan pengertian yang lebih

---

<sup>55</sup> Peter Drucker, *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principels* (London: Willian Hernemann Ltd, 1985), 79.

<sup>56</sup> Muhammad Anwar, *Pengantar Wirausaha*, 3

komprehensif dan relevan terkait *entrepreneurship*. Menurut mereka “*entrepreneurship* adalah proses di mana diciptakan sesuatu yang berbeda dan bernilai, di mana orang menanggung resiko finansial, psikologikal, serta sosial, dan orang yang bersangkutan menerima hasil-hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi sebagai dampak kegiatan itu”.<sup>57</sup>

Seiring dengan itu pula muncul beberapa istilah baru yang terkait dengan *entrepreneurship* seperti *intrepreneurship* dan *entrepreneurial*. *Intrepreneurship* diartikan sebagai pengaplikasian *entrepreneurship* dalam sebuah organisasi sebagai bentuk upaya mengatasi kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar.<sup>58</sup>

Selanjutnya harus diakui bahwa berbagai macam definisi *entrepreneurship* yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa *entrepreneurship* dipandang dari berbagai perspektif yang agak berbeda. Namun demikian masing-masing definisi mengandung hal-hal pokok yang sama yaitu: hal baru, pengorganisasian, penciptaan, kekayaan, dan berani menerima resiko. Lebih dari itu rumusan *entrepreneurship* yang berkembang sekarang cenderung mengakar pada konsep Scumpeter (1934) yang menjelaskan bahwa *entrepreneurship* adalah melaksanakan kombinasi-kombinasi baru

---

<sup>57</sup> J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 172.

<sup>58</sup> Abd. Jalil, *Spiritual Entrepreneurship*, 48.

dalam bidang teknik dan komersial dalam bentuk praktik yang konkrit.

Sampai pada poin ini kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan di atas, bahwa *entrepreneurship* dari sudut pandang ilmu ekonomi dan bisnis bisa dipahami sebagai pengombinasian *resources*, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi. Selain itu *entrepreneurship* juga melingkupi proses melaksanakan dan memperkenalkan perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi.

Pembahasan tentang pengembangan konsep *entrepreneurship* akan terus menerus menemukan momentum seiring tentang pengimplementasiannya yang luas dan dinamis. Perbedaan kemampuan masing-masing individu *entrepreneur*, baik dalam pemahaman konsep dan praktek *entrepreneurship* di lapangan juga memunculkan adanya klasifikasi jenis *entrepreneurship*. Dalam hal ini Wiliamason dan J.A Buttrick menyajikan 4 klasifikasi *entrepreneurship* sebagaimana berikut:

a) *Innovating Entrepreneurship*

*Entrepreneurship* semacam ini menurut mereka dicirikan oleh pengumpulan informasi secara agresif serta analisis tentang hasil-hasil yang dicapai dari kombinasi-kombinasi baru dari faktor-faktor produksi. Para *entrepreneur* dalam kelompok ini melakukan eksperimentasi secara agresif dan mereka trampil

mempraktekkan transformasi-transformasi kemungkinan-kemungkinan atraktif.

b) *Imitative Entrepreneurship*

*Entrepreneurship* demikian dilakukan oleh *entrepreneur* yang bersedia memikul inovasi-inovasi yang berhasil diterapkan oleh kelompok para *Innovating Entrepreneur*.

c) *Fabian Entrepreneurship*

Jenis *Entrepreneurship* seperti ini dicirikan oleh sikap yang sangat hati-hati bahkan skeptikal, namun tetap melakukan peniruan-peniruan demi mempertahankan posisi relatif mereka dalam suatu industri.

d) *Drone Entrepreneurship*

Macam *entrepreneurship* ini dilakukan oleh seseorang yang malas bahkan menolak untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk kemudian menciptakan perubahan-perubahan dalam rumus produksi sekalipun, ia sadar bahwa itu mengakibatkan hilangnya peluang dan hasil seperti yang diperoleh oleh produsen lainnya.<sup>59</sup>

Menurut Winardi, sebenarnya masih ada sebuah jenis *entrepreneurship* yang bisa diungkapkan selain 4 macam *entrepreneurship* di atas. *Entrepreneurship* tersebut ia namakan

---

<sup>59</sup> H.F. Willianson dan J.A. Buttrick (Eds), *Economic Development* (Englewood Cliff: Prentice Hall Inc., 1961), 205.

*Prasitic Entrepreneurship*. Menurutnya *entrepreneurship* tersebut dialamatkan bagi perilaku sekelompok *entrepreneur* yang senantiasa menunggu kesempatan dan peluang mendapatkan untuk sebanyak-banyaknya, dan untuk kepuasan diri sendiri, sekalipun dengan cara-cara yang tidak halal. Seperti pemburu rente (*rentsecker*) dalam masyarakat, menurut Winardi, masuk dalam kelompok *entrepreneur* demikian.<sup>60</sup>

Dilihat dari paparan ini, nampak jelas bahwa klasifikasi dan jenis *entrepreneurship* erat kaitannya dengan sikap dan perilaku para *entrepreneur* yang ada. Nampaknya para periset cenderung mengidentifikasi para *entrepreneur* tersebut melalui cara mereka berperilaku dan apa yang dicapai mereka melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya. Begitupun dalam rangka menjelaskan karakteristik-karakteristik *entrepreneur*, para periset mengacu pada sejumlah sifat, sikap, dan perilaku yang melekat pada mereka.

Rumusan karakteristik *entrepreneur* secara ringkas diajukan oleh David Silver yaitu; memiliki sifat enerjik, berfikiran tunggal, dan memiliki visi dan misi yang jelas. Selain itu menurutnya, seorang *entrepreneur* itu senantiasa berintensi untuk menciptakan sebuah produk baru dan pelayanan terbaik untuk

---

<sup>60</sup> Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*., 21.

memenuhi kebutuhan hidup orang banyak dengan tetap berusaha secara mandiri.<sup>61</sup>

Yuyun Wirasasmita mengemukakan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*, yaitu: (a) *Self Knowledge*, yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. (b) *Imagination*, yaitu memiliki imajinasi, ide dan perspektif serta tidak mengandalkan kesuksesan di masa lalu. (c) *Practical Knowledge*, yaitu memiliki pengetahuan praktis, seperti pengetahuan teknik, desain, prosesing, pembukuan administrasi dan pemasaran. (d) *Search Skill*, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. (e) *Forseight*, yaitu berpandangan jauh ke depan. (f) *Computation Skill*, yaitu kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan masa yang akan datang. (g) *Communication Skill*, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain.<sup>62</sup>

Sementara itu, Bygrave mengemukakan karakteristik *entrepreneur* yang sukses sebagaimana berikut: <sup>63</sup> (a) *Dream*, seorang *entrepreneur* yang mempunyai visi masa depan dirinya dan bisnis yang dikelolanya. (b) *Dicisivenes*, seorang *entrepreneur* yang bekerja secara cepat. (c) *Doers*, cepat menindaklanjuti

<sup>61</sup> David, A. Silver, *The Entrepreneurial Life* (New York: John Wiley & Sons, 1983), 26.

<sup>62</sup> Yuyun Wirasasmita, *Pemikiran Kewirausahaan, Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan* (Bandung: Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Unpad, 1999), 3.

<sup>63</sup> Yuyas Suryana dan Kartib, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawa Sukses* (Jakarta: Kencana, 2013), 60-62.

keputusan yang telah diambil. (d) *Determination*, melaksanakan kegiatan secara teliti dan rasa tanggung jawab. (e) *Dedication*, memiliki dedikasi yang tinggi. (f) *Devotion*, memiliki kecintaan yang tinggi terhadap bisnis yang digeluti. (g) *Details*, memiliki kecermatan dan ketelitian yang tinggi serta tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. (h) *Destiny*, dia memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang tinggi untuk meraih tujuan yang diinginkan. (i) *Dollars*, motivasinya bukan memperoleh uang meskipun uang dijadikan salah satu ukuran kesuksesan setelah usahanya berhasil. (j) *Distribute*, seorang *entrepreneur* dapat mendistribusikan bisnisnya kepada orang yang dipercayai.

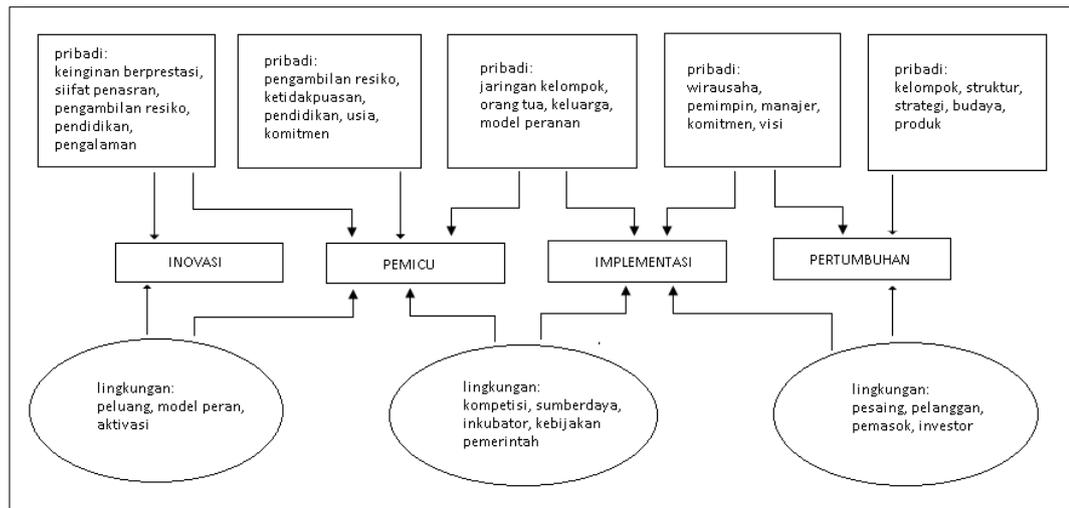
Lebih lanjut Bygrave menambahkan dalam implementasi dan pertumbuhan bisnis ada beberapa faktor lingkungan yang juga memiliki peran signifikan. Faktor lingkungan tersebut berupa unsur persaingan, keberadaan konsumen, suplai barang yang kontinu dan berkelanjutan, fasilitas dari investor, ketersediaan sumber dan dukungan kebijakan pemerintah.<sup>64</sup>

Berdasarkan uraian di atas nampaknya Bygrave cenderung menampakkan bahwa proses entrepreneurship didorong oleh dua faktor penting yaitu faktor personal *entrepreneur* (kepribadian) dan faktor lingkungan. Masing-masing dari dua faktor tersebut memiliki titik tekan spesifik terhadap empat langkah

---

<sup>64</sup> Ibid.

*Entrepreneurship* yang ada sebagai mana telah dijelaskan diatas yaitu; *innovation, triggering event, implementation, dan growth*. Untuk lebih jelasnya berikut adalah gambar model proses entrepreneurship menurut Bygrave.



Gambar 2.2 Model Proses *Entrepreneurship* William D. Bygrave

Selanjutnya, Abdul Jalil menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi media latar belakang munculnya karakter *Entrepreneurship* dalam diri seseorang, yaitu:<sup>65</sup>

- a) Faktor lingkungan keluarga. Menurutnya beberapa riset yang telah dilakukan menemukan kesimpulan bahwa anak dengan urutan kelahiran pertama lebih banyak memilih menjadi *entrepreneur*. Para *entrepreneur* yang berhasil, kebanyakan adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang juga *entrepreneur*, karena mereka memiliki pengalaman luas dalam

<sup>65</sup> Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan.*, 51.

usaha. Lebih jauh lagi, pengaruh pekerjaan orang tua ternyata memberikan motivasi tumbuhnya semangat *entrepreneurship* yang signifikan.<sup>66</sup>

- b) Faktor pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menumbuhkan semangat *entrepreneurship*. Pendidikan akan memberikan pengetahuan yang baik dalam mengelola usaha. Pendidikan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang cara-cara mengatasi masalah dan mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dalam bisnis.
- c) Faktor usia. Jalil menyitir pendapat Staw yang berpendapat bahwa usia bisa mempengaruhi keberhasilan bisnis. Semakin lama seseorang menjadi *entrepreneur*, maka usia dan kematangan bisnisnya semakin bertambah.
- d) Faktor pengalaman kerja. Pengalaman kerja turut menjadi faktor penting dalam kesuksesan seorang *entrepreneur*. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam berbisnis, dengan segenap dinamikanya, maka semakin bertambah pula ketangguhan mental *entrepreneurship* yang dimilikinya. Hal ini akan menjadikan dirinya sebagai seorang *entrepreneurship* yang ulat dan pantang menyerah.

---

<sup>66</sup> B. Prihatin Dwi Riayanti, *Entrepreneurship dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian* (Jakarta: Grasindo, 2003), 37.

Mencermati uraian para ahli di atas, nampak jelas bahwa jiwa *entrepreneurship* dan karakter *entrepreneur* sukses bisa dimunculkan oleh beberapa faktor. Namun suatu hal yang menarik, bahwa faktor pendidikan merupakan faktor yang konsisten disebut dalam rumusan-rumusan tersebut.

## 2) Perspektif Islam

Islam dan *entrepreneurship* merupakan dua kata yang memiliki kaitan cukup erat, hanya Islam menggunakan istilah yang berbeda untuk *entrepreneurship*. Dalam Islam istilah *entrepreneurship* diterjemahkan sebagai sebuah kerja keras, kemandirian, dan tidak cengeng.<sup>67</sup> Ada beberapa kata yang menunjuk pada kegiatan bekerja, seperti *al-‘amal*, *al-kasb*, *al-fi'l*, *as-sa'yu*, *an-nashru*, dan *ash-sha'n*. Meskipun secara bahasa, kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda tetapi secara umum semua kata tersebut merujuk pada makna berkerja, berusaha, mencari rezeki, dan menjelajah (untuk bekerja).<sup>68</sup>

Kata *al-‘amal* dengan berbagai derivasinya telah ditemukan sebanyak 359 kali dalam 319 surat al-Qur'an. *al-‘Amal* merujuk pada sebuah perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Sedangkan pelakunya adalah Tuhan,

<sup>67</sup> Muhammad Anwar, *Pengantara Kewirausahaan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenada, 2014), 126.

<sup>68</sup> Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship: Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan* (Yogyakarta: LkiS, 2013), 67.

malaikat, jin dan manusia. Hanya saja manusia adalah pelaku terbanyaknya, karena dari 359 kali penyebutan, 351 nya adalah manusia.<sup>69</sup>

Kata *al-kasb* merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh keuntungan, semua pelakunya pun manusia. Tetapi *al-kasb* ini terkadang malah berakibat negatif. al-Qur'an menyebut kata *al-kasb* sebanyak 70 kali dalam 30 surat.<sup>70</sup> Dari kata *al-'amal* dan *al-kasb* ini, ada satu kata yang lebih umum dari keduanya yaitu *al-fi'l*. *al-Fi'l* ini menunjukkan perbuatan yang lebih umum, baik itu perbuatan terpuji maupun tercela. Pelakunya pun tidak hanya manusia, namun juga Tuhan, malaikat, binatang, dan benda. Meskipun yang menjadi pelakunya tidak hanya manusia, tetapi tetap saja manusia yang paling dominan. Karena dari 97 kali penyebutan kata *al-fi'l*, 75 kalinya dilakukan oleh manusia. Sementara kata *as-sa'y* hanya disebutkan 28 kali dalam 26 surat, sedangkan kata *ash-sha'n* 20 kali dalam 19 surat, dan *al-nashr* disebut sebanyak 17 kali dalam 16 surat.<sup>71</sup> Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* sangat erat hubungannya dengan umat Islam.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Ibrahim al-Abyari, *al-Mawsu'ah al-Iqtishadiyyah*, vol. VIII (Beirut: Mu'assal Sijil al-'Arab, 1984), 391.

<sup>70</sup> Ibid, 485.

<sup>71</sup> Jalaluddin Rahmat, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'ani* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 45.

<sup>72</sup> Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship*, 67-68.

Hal ini dibuktikan dengan perintah Rasulullah kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya termasuk dalam berbisnis atau bekerja. Umat Islam diperintahkan untuk bekerja dan dilarang bermalas-malasan karena bekerja untuk mendapatkan suatu yang halal adalah bentuk lain dari sebuah ibadah.

Bahkan sibuknya beribadah dan bertawakal kepada Allah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bekerja. Karena Allah telah menyuruh umatnya untuk bertebaran (mencari pekerjaan) setelah mereka beribadah, yang dijelaskan dalam surah al-Jumu'ah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>73</sup>

Dalam Islam, berbisnis (*entrepreneurship*) tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi saja, namun berbisnis merupakan sebuah cermin dari keimanan, manifestasi tauhid, bukti ketinggian akhlak, dan barometer ketakwaan kepada Allah.

Rasulullah pernah bersabda:

إن الله يحب المؤمن المحترف (رواه الطبراني)

“sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang muhtarif (bekerja, berprofesi, dan berbisnis)”.

<sup>73</sup> al-Qur'an 62: 10

Kegiatan bisnis ini dapat dinilai sebagai bagian dari ibadah apabila diniatkan untuk mencari keridhaan dari Allah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah:

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (رواه

البخارى ومسلم)

“semua amal perbuatan harus diiringi dengan niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang sudah diniatkan”.

Dalam riwayat lain, Islam memandang entrepreneurship sebagai suatu bentuk jihad di jalan Allah. Hal ini merujuk pada sebuah hadits Nabi:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : "التاجر الأمين الصدوق المسلم

مع الشهداء -وفي رواية : مع النبيين والصديقين

والشهداء – يوم القيامة" (رواه ابن ماجه والحاكم

والدارقطني وغيرهم)

“dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: pedagang (pebisnis) yang jujur dan dapat dipercaya, akan dikumpulkan bersama dengan para Nabi, orang-orang yang shiddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak”.

Melihat dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa berjihad tidak melulu dengan berperang di jalan Allah. Tetapi pedagang yang benar-benar amanah ternyata memiliki kedudukan

yang sederajat dengan orang yang berperang membela agama Allah.

Berbisnis yang dapat disejajarkan dengan orang yang berjihad, jika orang yang berbisnis dapat istiqomah dalam mematuhi aturan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak tergoda, dan tidak terjebak untuk memperoleh keuntungan secara batil, sekalipun peluangnya terbuka lebar.

Karakter lain dari seorang mujahid dalam bidang *entrepreneurship* adalah kemampuan diri dalam kegiatan bisnis yang melalaikannya dalam beribadah. Mereka adalah orang-orang yang tetap melakukan shalat berjama'ah, memakmurkan masjid atau mushalla, peduli terhadap kepentingan masyarakat, dan kemajuan Islam.<sup>74</sup>

Nabi Muhammad saw adalah seorang *entrepreneur* yang handal. Darah *entrepreneurship* dalam diri Nabi Muhammad saw sudah mengalir dari kakek moyangnya yakni Hasyim bin 'Abdu Manaf. Hasyim bin 'Abdu Manaf termasuk golongan dari tokoh-tokoh besar di Mekkah, dia berhasil membuka jalur perdagangan ke Yaman dan Shiria. Kegiatan dagang ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yakni ketika musim panas dan musim dingin.

---

<sup>74</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Muhammad saw: The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), hlm. 40-44

Kegiatan dagang tersebut telah digambarkan oleh al-Qur'an dalam surah al-Quraish:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۱ إِفْهِمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۲ فَلْيَعْبُدُوا  
رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن  
خَوْفٍ ۴

“karena kebiasaan orang-orang Quraish [1] (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas [2] Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah) [3] yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan [4]”

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa orang Quraish memiliki dua kali perjalanan dagang, yakni musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas, orang Quraish melakukan perjalanan perdagangan ke daerah utara (Shiria, Yordania, Palestina, Lebanon), bahkan terkadang mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Turki dan perbatasan Eropa Barat. Daerah tersebut menjadi rute perjalanan ketika musim panas, karena di daerah tersebut relatif lebih sejuk daripada Mekkah dan Jeddah. Sedangkan pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke daerah selatan (Yaman, Ethiopia), karena daerah tersebut relatif lebih hangat.

Melihat lingkungan sekeliling Nabi Muhammad saw yang kental akan jiwa *entrepreneurship*, maka tidak heran jika Nabi Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi seorang *entrepreneur*. Peran *entrepreneurship* yang dilakukan oleh

keluarga besar Nabi Muhammad saw, dapat dilihat dari tabel berikut ini.<sup>75</sup>

<b>Hubungan Kerabat</b>	<b>Nama</b>	<b>Peran <i>Entrepreneurship</i></b>
Kakek besar	Hasyim bin 'Abdu Manaf	Saudagar besar, penentu jalur perdagangan Shiria – Makkah – Yaman, pemangku kebijakan perdagangan Quraish
Kakek	'Abdul Mut}t}alib	Pedagang besar Mekkah, peternak unta dan kambing
Ayah	'Abdullah bin 'Abdul Mut}t}alib	Pedagang regional, meninggal di Madinah saat kembali dari perjalanan bisnis dari Shiria menuju Mekkah
Paman	'Abbas bin 'Abdul Mut}t}alib	Kreditur besar Quraish, bahkan ayat dan hadits riba di antaranya turun untuk mengingatkan praktik bisnis lamanya
Paman	Abu T}alib bin 'Abdul Mut}t}alib	Pedagang regional, pernah mengajak Nabi Muhammad saw melakukan perjalanan bisnis hingga ke Busra dekat Damaskus
Kerabat setingkat paman	Abu Sufyan	Pedagang besar Quraish, salah seorang terkaya di Mekkah
Istri	Khadijah binti Khuwailid	Investor terkemuka Quraish, banyak menjalin hubungan bisnis dengan para agen untuk menjalankan bisnis regional, salah seorang agen dagang tersebut adalah Nabi Muhammad saw
Sepupu	'Ali bin Abu T}alib	Pedagang Mekkah
Karib kerabat dan teman	Abu Bakr, 'Umar, 'Utsman, 'Abdurrahman bin 'Auf, Suhaib Ar-Rumi, T}alhah, Zubair	Semuanya adalah pembisnis yang sukses dan mandiri, banyak menciptakan lapangan kerja untuk masyarakatnya

<sup>75</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Leadership*, 4-7.

Namun jiwa *entrepreneurship* yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad saw tidak terjadi begitu saja. Karena jiwa *entrepreneurship* yang dimiliki Nabi Muhammad saw terbentuk melalui sebuah proses yang panjang, yaitu dimulai dari Nabi Muhammad saw masih anak-anak.<sup>76</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Collin, Moores, dan Zaleznik, bahwa “*the act of entrepreneurship is an act patterned after modes of coping with early childhood experience*”. Menurut mereka pengalaman yang terjadi di masa kecil akan menentukan keberhasilan dan kegagalan kita di masa mendatang.

Jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dikenal sebagai pedagang. Nabi Muhammad saw mulai berdagang saat usianya masih berumur 12 tahun. Nabi Muhammad berkecimpung dalam dunia bisnis sejak dini, tidak lain karena kehidupan beliau yang memang menuntutnya untuk hidup mandiri.

Kondisi ekonomi keluarga pamannya yang sangat sederhana, membuat Nabi Muhammad saw merasa harus membantu sang paman dalam meringankan bebannya. Nabi Muhammad pun mulai bekerja apa saja yang halal untuk memperkecil ketergantungan kepada sang paman. Mulai dari bekerja membantu tetangga membersihkan rumah, memikul batu,

---

<sup>76</sup> Ibid.

sampai mengambil kayu bakar atau semak belukar dari hutan untuk dijual di pasar.

Kemudian saat usia Rasulullah menginjak usia 12 tahun, beliau mulai ikut pamannya berdagang. Awalnya ‘Abu T}alib tidak mengizinkannya ikut dalam perjalanan dagang tersebut. Tetapi melihat Nabi Muhammad kecil berkeras untuk ikut, ‘Abu T}alib terpaksa mengizinkannya untuk ikut.

Saat memulai bisnisnya di dunia dagang, Nabi Muhammad saw berdagang kecil-kecilan di Mekkah. Nabi Muhammad membeli barang-barang dari pasar dan menjualnya kepada orang-orang. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad berdagang jauh sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah.

Nabi Muhammad saw sempat menerima modal dari para investor serta anak-anak yatim yang masih belum bisa mengelola hartanya. Mereka sangat mempercayai Nabi Muhammad saw untuk mengelola harta mereka berdasarkan kerjasama mudharabah. Karena dalam menjalankan bisnisnya Nabi Muhammad saw selalu memegang prinsip-prinsip kedisiplinan, kejujuran, menepati janji, dan sifat-sifat baik yang lainnya. Maka tidak heran jika masyarakat di Mekkah sangat mempercayai beliau.

Kegiatan berdagang yang dilakukan oleh Rasulullah ini tetap beliau tekuni, bahkan ketika beliau telah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Hanya saja perbedaannya, sebelum Nabi

menikah, beliau adalah *project manager* bagi Khadijah. Tetapi setelah menikah, Nabi Muhammad saw menjadi *joint owner* dan *supervisor* bagi agen-agen dalam usaha isterinya.

Jika dilihat dalam ilmu *entrepreneurship*, yang dilakukan Nabi Muhammad saw pascamenikah adalah sebuah lompatan dari kuadran pekerja menjadi kuadran *business owner* dan *co-investor*. Teori ini sama halnya dengan yang pernah disarankan oleh Robert T. Kiyosaki, yaitu teori *cashflow quadrant*. Namun jauh sebelum teori ini ada, Nabi Muhammad telah mempraktekkannya terlebih dahulu.

Melihat dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kondisi dan pengalaman berdagang Rasulullah di masa kecil telah mengantarkannya menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan handal.<sup>77</sup> Dimulai dari usia 12 tahun, Nabi Muhammad kecil telah mengenal perdagangan, atau bisa diistilahkan sebagai magang (*internship*). Kemudian di usia 17 tahun, beliau mulai membuka usahanya sendiri. Saat itu, Rasulullah sudah menjadi seorang *business manager*. Karena banyak dari para investor yang mempercayakan hartanya kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau menjadi seorang *investment manager*.

Saat usianya 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah dan menjadi mitra bisnisnya. Dengan begitu, beliau merupakan

---

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Leadership*, 10-21.

seorang *business owner*. Menginjak usia 30 an, Nabi Muhammad mulai menjadi investor. Pada kondisi ini, Nabi Muhammad telah mencapai *financial freedom* (kebebasan uang) dan kebebasan waktu. Sejak itulah, Nabi Muhammad mulai memperbanyak *tahannuts* (menyendiri) sampai kemudian beliau menerima wahyu pertamanya di gua Hira'.<sup>78</sup> Masa perjalanan Nabi Muhammad dapat dilihat dari tabel berikut.

No	Periode	Rentan Usia (tahun)	Durasi (tahun)
1	Masa kanak-kanak	0 – 12	12
2	Berdagang ( <i>entrepreneurship</i> )	12 – 37	25
3	Berkontemplasi dan refleksi	37 – 40	3
4	Masa kerasulan	40 – 63	23

Secara implisit, unsur-unsur *entrepreneurship* telah ada dalam Islam. Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Adapun unsur-unsur *entrepreneurship* menurut Islam, antara lain:

a) Aktif

Seorang muslim hendaknya memiliki sifat aktif, pekerja keras, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Bahkan Islam sangat mengistimewakan para pekerja keras. Dalam surah at-Taubah ayat 105 dijelaskan:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,

<sup>78</sup> Ibid, 20-21.

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Kemudian dipertegas kembali dalam surah Ar-Ra’du:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ۝ ۱۱

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Mengacu pada dua ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk mengubah kehidupannya, maka manusia harus berusaha (bekerja). Jika melihat kata “kerja”, ternyata Islam memiliki penjelasan lebih dalam memaknainya. Kata “kerja” tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencari nafkah untuk dirinya dan orang lain, tetapi maknanya lebih dalam dari itu, Islam memandang kata “kerja” sebagai sebuah ibadah dan ukhrawi.

Dalam kasus seseorang yang membuang duri di jalan, yang dalam konteks duniawi dimaknai sebagai upaya menyelamatkan diri dan orang lain, maka Islam memandang sebagai sebuah bentuk ibadah. Sama halnya dengan seseorang yang memberi minum anjing yang kehausan, maka hal itu dimaknai sebuah ibadah.

Sedang “kerja” dimaknai ukhrawi, karena sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik hal itu positif maupun negatif, maka nantinya akan mendapat balasan

setimpal di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.

b) Produktif

Dalam Islam, produktifitas telah disinggung dalam al-Qur'an dalam surah al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ۚ

“yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Ayat ini dengan tegas mengingatkan bahwa kita diciptakan untuk berkompetisi dalam segala bentuk kebaikan. Artinya kita diperintah untuk memiliki sifat produktif, karena tanpa sifat tersebut maka tidak akan ada sebuah kompetisi.<sup>79</sup>

Produktivitas sebenarnya memiliki banyak pengertian, namun dapat di kelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain:

<sup>79</sup> Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship*, 67-74.

(1) Produktivitas merujuk pada sebuah ratio dari apa yang dihasilkan (output) terhadap peralatan produksi yang digunakan.

(2) Produktivitas pada dasarnya adalah sebuah mental manusia yang memiliki pandangan bahwa kualitas hidup yang dilakukannya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

من كان يومه خيرا من امسه فهو راجح، ومن كان يومه

مثل امسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من امسه فهو

معلون (رواه الحاكم)

“Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung; Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi; dan Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka”.

(3) Produktifitas adalah gabungan dari tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu investasi, manajemen, dan tenaga kerja.<sup>80</sup>

#### c) Inovatif

Secara umum inovatif memiliki makna selalu melihat sesuatu secara berbeda, selalu melakukan hal yang baru, dan biasanya jarang disadari banyak orang. Orang yang tingkat inovatifnya

<sup>80</sup> Purwatiningsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Semarang: Stikubank, 1992), 54.

tinggi biasanya memiliki ketajaman dalam menyelesaikan suatu masalah, dan dapat menyelesaikannya dengan cara-cara di luar kebiasaan. Sikap inovatif ini melibatkan ide-ide baru, berguna, serta tidak terduga, tetapi dapat diimplementasikan setelah melalui tahap *exploring*, *inventing*, dan *choosing*.

Dalam ilmu ekonomi, inovasi dapat meliputi 5 hal, yaitu; (1) Memperkenalkan produk baru yang belum pernah ada, (2) Memperkenalkan cara produksi yang baru, (3) Pembukaan daerah pasar yang baru, (4) Menemukan sumber-sumber bahan mentah yang baru, dan (5) Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri.

Sedangkan dalam Islam, ada beberapa hadits yang mengarahkan pada perilaku tersebut. Salah satu kasus pada sebuah pembukaan lahan baru, maka hal itu akan meningkatkan produktivitas. Lahan baru itu bisa berupa tanah yang mati (tidak ada pemiliknya), kemudian seseorang menghidupkan (memanfaatkan) tanah yang tidak ada pemiliknya itu. Hal ini dibahas dalam hadits Rasulullah:

من احيا ارضا ميتة فهي له (رواه البخاري)

“Barang siapa menghidupkan tanah yang telah mati, maka tanah tersebut untuknya”.

من عمّر ارضا ليست لاحد فهو احق بها (رواه احمد)

“Barang siapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih atas tanah tersebut”.

Merujuk pada kedua hadis di atas, bahwa jika ada sebidang tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, kemudian ada seseorang yang memanfaatkannya (menggarap tanah tersebut), menanam dengan tumbuh-tumbuhan, maka tanah tersebut otomatis menjadi miliknya. Hal ini memberikan motivasi tersendiri bagi umat Islam untuk memanfaatkan lahan yang mati menjadi lahan produktif sehingga karunia Allah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

d) Kalkulatif

Bisnis merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dengan cara melalui penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Dalam berbisnis pun tidak akan lepas dari sebuah risiko. Adapun jenis-jenis dari risiko dalam berbisnis di antaranya risiko kredit (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar valuta asing (*foreign exchange rate risk*), dan risiko operasional (*operational risk*).

Beberapa jenis risiko tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain:

- (1) Risiko yang sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang terjadi akibat adanya kondisi makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah,

situasi krisis, perubahan situasi pasar, dan perubahan-perubahan lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian.

- (2) Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*), merupakan suatu risiko yang unik, biasanya risiko ini terdapat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu.

Karena dalam Islam adalah agama yang sangat komprehensif, maka segala bentuk risiko ini telah masuk dalam kalkulasi bisnis,<sup>81</sup> dengan berprinsip pada surah al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Adapun tujuan dari berbisnis dalam Islam, antara lain:

- a) Berbisnis (bekerja) adalah bagian dari kewajiban yang diperintahkan Allah.
- b) Bekerja juga sangat menentukan martabat seorang manusia.
- c) Bisnis yang halal merupakan sumber penghasilan yang baik.
- d) Bekerja merupakan sarana untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat.

<sup>81</sup> Abdul Jalil, *Spiritual Entrepreneurship*, 76-80.

- e) Bekerja tidak hanya untuk meningkatkan standart ekonomi seseorang, namun juga meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Supaya umat Islam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka setiap pekerja muslim harus memiliki etika moral yang tinggi yang direfleksikan dengan berbagai cara berikut ini:

- a) Seorang muslim harusnya selalu termotivasi dengan keinginan agar selalu mendapat keridhaan dari Allah swt.
- b) Ketika seorang muslim memulai bisnisnya, usahakan untuk tetap berada pada ruang lingkup aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam.
- c) Bisnis yang dilakukan seseorang harus sesuai dengan ketentuan Syariah.
- d) Bisnis yang dilakukan, tidak boleh membuat seorang muslim lalai dalam menjalankan ibadahnya.
- e) Seorang muslim hendaknya bertanggungjawab dan menjaga amanah kepada siapa saja yang bekerjasama dengannya.
- f) Seorang muslim harus bekerja secara profesional, agar pekerjaannya menghasilkan produk yang berkualitas.<sup>82</sup>

## **2. Pendidikan *Entrepreneurship* Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**

### **a. Konsep Sekolah Menengah Kejuruan**

---

<sup>82</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Leadership*, 45-47.

Dalam konteks Indonesia, sekolah termasuk dalam tipe pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi.<sup>83</sup> Pendidikan formal mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademis, pendidikan profesional, pendidikan agama, dan pendidikan khusus.

Dalam terminologi pendidikan, SMK merupakan wujud riil institusi pendidikan kejuruan. Dalam mendefinisikan SMK para pakar selalu mengacu pada definisi pendidikan kejuruan itu sendiri. Untuk itu, penting dijelaskan terlebih dahulu beberapa pendapat para ahli terkait pengertian pendidikan kejuruan.

Finch & Crunkilton cenderung mengartikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan untuk mencari penghasilan bagi kehidupan, atau dengan kata lain pendidikan untuk bekerja (*education for work*). Pengertian seperti itu tidak lepas dari pandangan keduanya yang membagi tujuan pendidikan ke dalam dua kategori, yaitu: “*education for life and education for earning a living*”, atau “pendidikan umum atau pendidikan untuk hidup (*education for life*), dan pendidikan untuk mencari penghasilan guna kebutuhan hidup (*education for*

---

<sup>83</sup> Menurut UU sisdiknas 2003 pendidikan di Indonesia dibagi ke dalam tiga tipe yaitu formal, non formal, dan informal. Formal adalah pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun non formal adalah proses pendidikan yang dilakukan sebagai pengganti, atau tambahan bagi sekolah formal untuk menyokong kehidupan seumur hidup. Sementara informal adalah mencakup aktivitas-aktivitas pembelajaran independen yang dilaksanakan oleh keluarga atau masyarakat. Depdiknas, “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003”.

*earning a living*). Dengan demikian pendidikan kejuruan lebih dekat dengan tujuan pendidikan yang kedua.<sup>84</sup>

Kongres Amerika Serikat mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan persiapan untuk bekerja, serta pelatihan tambahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau karirnya. Dengan pengertian seperti ini, maka bisa dipahami bahwa pendidikan kejuruan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu: pertama, sebagai persiapan untuk bekerja, dan kedua, untuk peningkatan dalam karir.<sup>85</sup>

Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SESDIKNAS) tahun 2003 dimaknai sebagai pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik terutama untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu dan siap melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Paparan beberapa pengertian di atas setidaknya menjelaskan empat ciri khas pendidikan kejuruan, yaitu: pertama, bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang lebih berorientasi pada praktik dari pada akademik. Kedua, pendidikan kejuruan lebih menggambarkan sebagai pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja. Ketiga, pendidikan kejuruan dimungkinkan untuk dilaksanakan di luar sekolah. Keempat, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang

---

<sup>84</sup> Curtiz, R. Finch and J. Crunkilton, *Curriculum Development In Vocational and Technical Education* (Boston: Allyn & Bacon, 1993), 5.

<sup>85</sup> Calfrey C. Calchoun and Alton V. Finch, *Vocational Education Concepts and Operations* (California: Wadsworth Inc. 1982), 5.

tertentu. Dengan demikian pengertian ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan program pendidikan untuk persiapan sebelum kerja.<sup>86</sup>

Selanjutnya dalam konteks pengembangan pendidikan *entrepreneurship* di SMK, terdapat setidaknya lima aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan, (2) Belajar melalui proses kerjanya, (3) Pengakuan standar nasional, (4) Guru yang bermutu, dan (5) Pelembagaan penelitian dan bimbingan karir.

Dalam aspek kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan, hal ini penting dilakukan guna membentuk kerangka pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kerjasama ini meliputi penyediaan dana, pengembangan dan implementasi kurikulum, serta penilaian dan sertifikasi kompetensi.

Adapun aspek belajar melalui proses kerja nyata, merupakan keniscayaan tersendiri mengingat tujuan pendidikan di SMK, yaitu terwujudnya lulusan yang siap bekerja di perusahaan atau industri. Untuk itu, kompetensi dan penguasaan teknik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta pembiasaan perilaku *entrepreneurship* yang lain perlu dikembangkan bersama melalui proses sinergitas antara belajar di sekolah dan belajar di tempat kerja.

---

<sup>86</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan dari Kompetensi ke Kompetensi* (Bandung: Alfabeta), 14.

Sedangkan dalam aspek pengakuan standar nasional diperlukan untuk menjamin kualitas dan mutu lulusan. Terwujudnya jaminan kualitas dan mutu lulusan bisa dipastikan jika pelaksanaannya didasarkan pada standar tertentu baik dalam bidang pekerjaan, pelatihan maupun penilaian. Hal tersebut dikarenakan kesetaraan standar kualifikasi dan sertifikasi menjadi dasar penerimaan bekerja (*employability*), mobilitas, serta penerimaan masyarakat.

Selanjutnya, aspek guru dan pelatih yang bermutu memiliki signifikansi yang tinggi terhadap pelaksanaan pelatihan yang notabene menjadi penentu utama kualitas lulusan. Dengan kata lain pendidikan kejuruan yang berbasis sekolah dan lapangan kerja sekaligus, membutuhkan guru-guru di sekolah, dan para pelatih di perusahaan yang memiliki keterampilan, profesionalitas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

Sementara itu, pelembagaan penelitian dan bimbingan karir memiliki peran sebagai pusat informasi pendidikan dan peluang kerja. Penelitian tentang pendidikan dan lapangan kerja serta keterkaitan antara keduanya perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar proses pengadaptasian keduanya bisa dilakukan dengan mudah. Artinya, pusat informasi pendidikan kejuruan dan bimbingan karir akan sangat membantu peserta didik dalam mengikuti proses awal pendidikan kejuruan (*initial vocational training*) serta pelatihan lanjutan

(*continous vocational training*) serta membantu mempercepat mendapatkan pekerjaan dan mobilitas tenaga kerja.

Kemudian, dalam rangka upaya eksistensi yang lebih baik ke depan, penting untuk juga memahami beberapa permasalahan yang memiliki potensi untuk menghambat perkembangan pendidikan kejuruan. Berikut adalah paparan beberapa permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Citra dan stigma pendidikan kejuruan dalam pandangan masyarakat. Dalam budaya dan tradisi masyarakat tertentu, pendidikan kejuruan dipersepsikan sebagai sekolah yang hanya berorientasi keduniaan dan materialistik. Ia juga dianggap pendidikan yang hanya menyiapkan pekerja kasar perusahaan. Tidak sedikit masyarakat yang memposisikan pendidikan kejuruan di bawah pendidikan umum. Pendidikan kejuruan dipandang sebagai jalur sekolah bagi anak-anak lemah (*under achievers*).<sup>87</sup>

Hal ini diperkuat dengan fenomena penilaian masyarakat yang menganggap pegawai negeri dengan pendidikan akademik itu lebih bergengsi dibandingkan dengan tukang, montir, dan pekerja lain yang melakukan tugas dengan keterampilan tangan. Bahkan sebagian masyarakat memandang pendidikan umum lebih bergengsi karena lebih berorientasi melanjutkan ke jenjang

---

<sup>87</sup> Ruth Klaus and Grollmann Philipp, *Monitoring VET System of Mayor EU Competitor Countries* (London: Universitas Bremen, 2009), 6.

perguruan tinggi dengan tendensi gelar kesarjanaan sebagai simbol sosial di masyarakat.

- 2) Orientasi pendidikan yang cenderung teoretis. Proses pembelajaran pendidikan kejuruan semisal di SMK cenderung berorientasi pada konsep kependidikan (*educationally oriented*) baik dalam isi pelajaran maupun dalam nilai-nilai (*values*) yang terdapat dalam penyajian pelajaran. Pembelajaran pada pendidikan kejuruan masih cenderung diorientasikan sebagai upaya penumpukan pengetahuan dan teori, serta melalaikan performen atau praktik nyata.
- 3) Rombongan belajar yang gemuk. Hal ini diiringi anggapan bahwa bila semakin banyak rombongan belajar siswa pada pendidikan kejuruan, akan semakin banyak pula lulusan yang terampil. Padahal jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas, dan cenderung melebihi kapasitas sekolah, akan berakibat terbatasnya peluang yang sama bagi peserta didik yang ada dalam menggunakan fasilitas praktik. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pencapaian standar dan kompetensi yang dituntut oleh dunia kerja. Demikian halnya dengan peluang mengikuti praktik di industri atau perusahaan. Semakin bertambahnya jumlah siswa pendidikan kejuruan, akan mengurangi kesempatan pengikut praktik industri. Maka dari itu hendaknya jumlah siswa pada setiap kelas harus seimbang dengan kapasitas dan fasilitas yang tersedia.

- 4) Model assesmen yang berbasis norma. Bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh sekolah kejuruan sering kali masih cenderung normatif. Sistem penilaian pada ujian tes tulis, diberi bobot yang lebih tinggi dari pada bobot nilai praktik demonstrasi. Hal ini akan berpengaruh pada relevansi pendidikan dan pelatihan kejuruan terhadap pekerjaan. Pada akhirnya juga mengurangi minat siswa untuk masuk ke pendidikan kejuruan.
- 5) Kurangnya dialog antara sekolah dengan industri. Penyesuaian antara sekolah dengan dunia kerja mutlak diperlukan dalam proses pendidikan kejuruan. Hal tersebut terkait konsep *Link dan Match* yang meniscayakan penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak dapat menetapkan sendiri standar mutu lulusan sesuai persepsi sepihak. Sekolah harus mengadakan dialog dengan pihak pengguna dan masyarakat industri. Maka dari itu konsep *Link and Match* antara sekolah dan dunia kerja hanya dapat tercipta bila ada upaya saling menyesuaikan di antara keduanya.
- 6) Keterbatasan sumber daya. Dalam hal ini ada dua sumber daya yang masing-masing sangat menentukan keberhasilan pendidikan kejuruan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fisik atau sarana. Keterbatasan sumber daya di sekolah kejuruan akan sangat berpengaruh pada operasional pendidikan kejuruan yang dilakukan. Keterbatasan sumber daya manusia terutama guru yang berkualitas, serta keterbatasan sumber fisik seperti mesin, alat,

bahan serta kekurangan dana operasional akan menjadi kendala serius dalam pendidikan kejuruan. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia dan sumber daya fisik menjadi penting untuk dilakukan secara baik dan profesional.

Berdasarkan paparan di atas, ternyata terdapat beberapa masalah yang berpotensi menghambat pengembangan pendidikan kejuruan. Namun jika disimpulkan permasalahan tersebut tertumpu pada dua hal, yaitu pandangan masyarakat yang cenderung negatif dan masalah manajemen pendidikan kejuruan. Dalam rangka mencari solusi dari masalah-masalah tersebut maka semua pihak terutama Pemerintah dan pihak sekolah untuk memberikan bukti berupa lulusan yang berkualitas dan cocok dengan kebutuhan pasar dan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan jenis dan mekanisme pengelolaannya, pada awalnya pendidikan kejuruan setidaknya memiliki tiga model pendidikan, yaitu: model pelatihan di perusahaan (*company model*), model persekolahan (*school model*), model kerjasama (*cooperative*) atau dikenal dengan model pendidikan sistem ganda (*dual system*).

Namun pada perkembangan berikutnya sebagaimana hasil simposium *United Nation of Education Science and Culture Organization* (UNESCO) yang diadakan di Hamburg Jerman pada tahun 1989 membuat klasifikasi pendidikan kejuruan menjadi empat model, yaitu: (1) *Company Model*, (2) *School Model*, (3) *Cooperatif Model* (*School and Enterprise* atau *Training Centre & Enterprise*), (4)

*Informal Vocational Education*.<sup>88</sup> Bahkan dalam konteks Indonesia menjadi lima karena muncul juga satu model yang dikenal dengan model pendidikan berbasis unit produksi sekolah.<sup>89</sup>

Menurut UNESCO model pendidikan kejuruan di perusahaan (*company model*) adalah sistem pendidikan atau pelatihan yang merupakan tanggung jawab perusahaan dan dijalankan sepenuhnya di perusahaan. Pada model ini pemerintah (negara) tidak mempunyai peran menentukan, terutama dalam hal kualifikasi profesi pendidikan kejuruan. Hal tersebut karena semua pembiayaan, fasilitas, dan standarnya di bawah dominasi perusahaan itu sendiri.

Sementara model persekolahan (*school model*) adalah suatu bentuk pendidikan kejuruan di mana tanggung jawab penyelenggaraan sepenuhnya ada di tangan pemerintahan atau pengelola sekolah. Pada model ini seluruh pelajaran yang melingkupi teori dan praktik sama-sama diberikan. Selain itu pengelola sekolah sangat mendominasi dalam menentukan arah dan tujuan serta standart kualifikasi peserta didik. Adapun peran industri pada model ini hanya diposisikan sebagai pelengkap saja, seperti penyediaan tempat sebagai praktikum dan pemagangan saja.

Adapun model pendidikan cooperative diartikan sebagai pendidikan kejuruan yang diselenggaraan bersama antara sekolah dan

---

<sup>88</sup> Bandingkan dengan Mariam Bukit, *Streng than TVET Teacher Education Through Teacher Industry Link ages: Report of the Third Online Conference* (Bonn: UNESCO – UNIVOC, 2005), 15.

<sup>89</sup> Masriam Bukit, *Strategi Dan Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 18.

perusahaan. Model ini terbagi dua macam, yaitu: pertama, kerjasama antara perusahaan dengan sekolah (*school and enterprise*); dan kedua, kerjasama antara pusat latihan dan perusahaan (*training centre and enterprise*). Pada model sekolah dengan perusahaan (*school and enterprise*) penyelenggaraan pendidikan kejuruan dilaksanakan bersama dan berada di bawah tanggung jawab bersama pula. Adapun pada model kerjasama antara pusat latihan dengan perusahaan (*training center and enterprise*), pelaksanaan pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan di industri diambil alih oleh pusat latihan. Dengan demikian kapasitas tempat pendidikan dapat ditingkatkan.<sup>90</sup>

Selanjutnya, *model Informal Vocational Education* dalam beberapa literatur modern juga disebut model *Non-formal Vocational Education*. Model ini merupakan model pendidikan kejuruan yang memisahkan pelatihan yang bersifat singkat yang lahir dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Dengan kata lain model ini merupakan sistem pendidikan yang lahir dengan sendirinya atas inisiatif pribadi atau kelompok, terutama untuk memenuhi tuntutan keterampilan yang tidak dapat melalui pendidikan formal.

Selain empat model di atas, sebenarnya masih terdapat satu model yang ditemukan dalam konteks Indonesia, yaitu model pendidikan kejuruan berbasis unit produksi (*production based*). Model ini muncul sebagai solusi dari adanya problem ketidakseimbangan

---

<sup>90</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 18.

antara ketersediaan tempat praktik dengan banyaknya siswa SMK yang akan melaksanakan PRAKERIN (Praktik Kerja Industri). Situasi ini diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan atau industri yang menolak ditempati praktik.

Problem di atas kemudian mendorong sekolah untuk mencari solusi alternatif, yaitu dengan cara membuat bengkel sekolah yang pada akhirnya menjadi tempat kegiatan unit produksi sekolah sekaligus menjadi pengganti tempat praktik kerja industry siswa. Inilah yang kemudian dikenal dengan model pendidikan kejuruan dengan istilah model unit produksi (*Production based education*).<sup>91</sup>

Berdasarkan paparan model-model pendidikan kejuruan di atas, nampak bahwa keseluruhan model tersebut digunakan untuk mempelajari suatu profesi. Namun demikian, jika ditinjau dari tujuannya, maka model-model tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua tipe pendidikan kejuruan, yaitu: belajar melalui pekerjaan yaitu dalam situasi tempat kerja, dan belajar dalam situasi simulasi.

Dalam tataran konsep dan desain operasional pendidikan kejuruan seperti SMK, terdapat pendekatan yang selama ini diaplikasikan dalam rangka peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan perkembangan zaman yang global, yaitu pendekatan *Link and*

---

<sup>91</sup> Hadiwaratama, *Production Based Education* (Bandung: Politeknik Manufaktur ITB, 1992), 54. Dan DV. Lindsay, *Roles and Contribution of The Educators on Promoting Industrial Development* (Hongkong: Institution of Engineer, 199).

*Match*. Melalui konsep *Link and Match* ini pula gagasan program pendidikan sistem ganda (PSG) di Indonesia bisa terwujud.

Secara harfiah *Link* memiliki arti ada pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif, sementara *Match* berarti cocok, sesuai atau sepadan.<sup>92</sup> Berdasarkan arti harfiah tersebut konsep *Link and Match* dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang sesuai dan terkait langsung dengan kebutuhan pembangunan.

Lebih spesifik, Wardiman Djojonegoro sebagaimana dikutip oleh Bukit menjelaskan bahwa *Link* memiliki arti sebagai suatu keadaan di mana pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan kebutuhan pasar dari semua aspek pelaksanaannya. Sementara *Match* diartikan sebagai suatu keadaan di mana program-program yang dikembangkan, dibina, dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional dapat menghasilkan output yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dan dunia kerja. Dengan demikian *Link and Match* mengandung arti sebagai upaya dalam rangka menghasilkan lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (*the world of work*) atau industri.<sup>93</sup>

Dari pengertian *Link and Match* di atas dapat dipahami bahwa antara pendidikan kejuruan dalam hal ini SMK dan pihak industri atau

---

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Link and Match* (Jakarta: Depdikbud, 1993), 47.

<sup>93</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi*, 31.

dunia kerja diniscayakan adanya upaya saling penyesuaian dan kerjasama yang sungguh-sungguh. Hal ini selanjutnya akan merekomendasikan untuk terwujudnya dialog yang terus menerus serta ikatan kemitraan yang erat antara pihak sekolah dan masyarakat industri sebagai pasar dan pemakai lulusan sekolah. Sekolah tidak bisa lagi sendirian dalam menetapkan konsep dan standart operasional pendidikan kejuruan, namun juga wajib melibatkan pihak pengguna atau industri dalam menentukan konsep dan standart tersebut.

Secara konseptual dimensi *Link and Match* dapat diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu: dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi tiga aspek antara lain:

- 1) Vertical, pengembangan pendidikan dan pembangunan kebudayaan harus benar-benar terkait dalam pelaksanaannya di lapangan
- 2) Horizontal, upaya peningkatan keterkaitan secara terpadu dan selaras dengan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada berbagai unit kerja di instansi terkait
- 3) Spesial, yaitu upaya untuk meningkatkan keterkaitan secara terpadu dan selaras antara program dengan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Adapun dimensi eksternal dalam konsep *Link and Match* terkait dengan peran dan fungsi pendidikan sebagai instrumen pembangunan nasional dalam konteks global. Dimensi ini dimaksudkan sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan agar lebih sesuai dengan seluruh bidang pembangunan nasional.<sup>94</sup>

Dalam rangka merealisasikan konsep *Link and Match*, maka dicangkakan program pendidikan sistem ganda (PSG) di sekolah kejuruan. PSG diartikan sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistemik dan sinkron, antara program pendidikan formal dan program penguasaan keahlian dengan cara melakukan kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, yang diarahka untuk mencapai tingkat keahlian profesional tertentu.<sup>95</sup>

Dengan pengertian seperti ini maka penyelenggaraan pendidikan berlangsung sebagian di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau industri. Di sekolah pembelajaran yang diberikan bersifat teoretis dan kognitif serta akademis, sementara pembelajaran di dunia usaha atau industri (DUDI) lebih bersifat psikomotorik, vocational dan berbasis kerja.<sup>96</sup>

Pendidikan sistem ganda (PSG) dilaksanakan berdasarkan beberapa tujuan, antara lain: (1) Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, (2) Memperkokoh *Link and Match* antara SMK dan dunia kerja, (3) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses pembelajaran

---

<sup>94</sup> J. Pakpahan, *Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 47.

<sup>95</sup> Departemen Pendidikan Formal, *Pendidikan Sistem Ganda Strategi Operasional Link and Match Pada Sekolah Menengah Kejuruan* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 47.

<sup>96</sup> Pakpahan, *Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda*, 48.

dan pelatihan tenaga kerja berkualitas, (4) Memberi pengakuan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Kemudian, untuk memastikan perhatian, yaitu: (1) Institusi pasangan, (2) Program pendidikan bersama, (3) Kelembagaan kerjasama, (4) Nilai tambah dan insentif, (5) Jaminan keberlangsungan.<sup>97</sup>

Program PSG disusun berdasarkan kurikulum SMK 1994 yang mengacu pada profil kemampuan dan garis-garis besar program pembelajaran. Salah satu upaya untuk mensukseskan PSG adalah dilakukan melalui pemetaan profil komponen pendidikan yang meliputi: adaptif, teori kejuruan, praktik dengan profesi, dan praktik keahlian profesi. Dalam hal ini, pelaksanaan komponen-komponen tersebut dibagi antara sekolah dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Pelaksanaan pendidikan domain pendidikan praktik dasar profesi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dan DUDI. Adapun domain pendidikan praktik keahlian profesi menjadi tanggung jawab DUDI.<sup>98</sup>

Namun demikian, dalam proses pelaksanaan PSG seringkali ditemui masalah-masalah yang membutuhkan solusi agar program PSG yang dilaksanakan tetap berhasil. Masalah-masalah tersebut antara lain; (1) Ketidaksesuaian antara latar belakang disiplin ilmu siswa dengan DUDI tempat kerja, (2) Butuhnya adaptasi siswa dengan suasana dan

---

<sup>97</sup> Anwar, "Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda Pada SMK di Kota Kendari", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 036 Mei 2002, 418-435.

<sup>98</sup> D. I. Wahyu, "Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda", dalam *Jurnal Kependidikan*, No. 26 Th. 1996, 15-24.

lingkungan DUDI tempat kerja, (3) Kurangnya monitoring dari pihak sekolah. Untuk itu, solusi yang perlu ditempuh dalam mengantisipasi masalah-masalah tersebut adalah peran serta masing-masing sekolah dan DUDI dalam beberapa hal, seperti: perencanaan proses dan hasil, dan pemasaran lulusan.<sup>99</sup>

Dalam ranah pengembangan kurikulum, SMK dengan sistem PSG menitik beratkan pelajaran kejuruannya pada beberapa hal, yaitu: penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mengacu pada standart kompetensi industri. Hal ini meniscayakan bahwa SMK dengan sistem PSG harus mengakomodasikan kompetensi industri dalam kurikulum yang dikembangkan sekolah. Dengan kata lain penerapan PSG pada SMK menuntut penerapan kompetensi sebagai konsep pembelajaran di sekolah dan pedoman pelatihan di industri..<sup>100</sup>

Kurikulum SMK pada umumnya mengandung tiga komponen, yaitu: komponen normatif, komponen adaptif, dan komponen produktif. Komponen normatif merupakan satu kelompok mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk watak atau kepribadian sebagai warga bangsa Indonesia. Adapun komponen adaptif adalah sekelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk membekali siswa dengan suatu kemampuan agar bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sedangkan komponen produktif, adalah satu kelompok

---

<sup>99</sup> Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup* (Bandung: ALFABETA, 2006), 51.

<sup>100</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 120.

mata pelajaran yang diorientasikan untuk memberi bekal kemampuan untuk bekerja. Komponen produktif meliputi tiga hal, yaitu: teori kejuruan, praktik dasar kejuruan, dan praktik keahlian kerja.<sup>101</sup>

Dalam ranah aplikasinya, tiga hal dalam komponen produktif tersebut dilaksanakan di sekolah dan industri dalam bagian masing-masing. Teori kejuruan dan praktik dasar kejuruan diberikan di sekolah, sedangkan praktik keahlian kerja diberikan di industri. Dalam hal ini pelaksanaan di SMK terdapat beberapa pola yaitu: pola *day release*, pola *block release*, dan pola kombinatif antara dua pola tersebut. Pola *day release* merupakan pola pelaksanaan yang variasinya ditentukan oleh jumlah hari di mana siswa belajar di sekolah dan jumlah hari di mana siswa belajar di industri.

Adapun pola *block release* adalah bentuk pelaksanaan di mana ada pemisahan block belajar di sekolah dan block belajar di industri. Selama block waktu tertentu siswa berada di industri, siswa sama sekali tidak perlu datang ke sekolah. Variansi dalam bentuk *block release* tergantung kepada jumlah bulan dari block waktu yang ditentukan dan ditetapkan di sekolah. Dengan demikian, masing-masing block belajar memiliki waktu tertentu dan juga target tertentu.

Adapun bentuk kombinasi antara *day release* dan *block release* adalah pola pelaksanaan belajar di mana siswa selama block waktu tertentu belajar sekian hari di industri dan belajar sekian hari di sekolah.

---

<sup>101</sup> Ibid, 127.

Selama block waktu tertentu siswa dapat ditugaskan sekian hari perminggu untuk belajar di industri dan sekian hari perminggu belajar di sekolah. Setelah block itu berakhir maka siswa dapat kembali penuh belajar di sekolah.<sup>102</sup>

#### **b. Model Pendidikan *Entrepreneurship* di SMK**

Pendidikan *entrepreneurship* di sekolah termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bertujuan membentuk manusia secara utuh (holistik), yaitu sebagai insan yang memiliki karakter, juga memiliki pemahaman dengan keterampilan sebagai seorang Wirausaha (Entrepreneur)<sup>103</sup>. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan dengan pembelajaran di SMK yang berorientasi pada pembimbingan anak didik agar menjadi lulusan yang siap bekerja dan menjadi orang yang mandiri.<sup>104</sup> Untuk itu, SMK lebih mengedepankan Proses Pembelajaran yang aplikatif dengan Standar Kompetensi Keahlian tertentu.

Selain itu, di SMK terdapat Program-program Kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang disusun dan dilaksanakan sedemikian rupa dengan tujuan menyiapkan peserta didik sebagai bagian dunia secara aktif. Berdasarkan diskursus yang berkembang, pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* di sekolah, tidak harus dilaksanakan

<sup>102</sup> Ibid, 131.

<sup>103</sup> Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan. Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan* (Jakarta: Kemendiknas Balitbang Pusat Kurikulum, 2010).

<sup>104</sup> Bandingkan dengan Muhammad Saroni, *Mendidik Dan Melatih Enterpreneur Muda Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik* (Jogyakarta: AR-RU 22 Media, 2012), 128.

secara mandiri atau otonom dengan membuat kurikulum baru. Pendidikan *entrepreneurship* di sekolah dapat dilakukan dengan cara diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada.<sup>105</sup>

Dalam tataran kebijakan, pengintegrasian pendidikan *entrepreneurship* pada setiap satuan pendidikan, termasuk SMK didasarkan pada butir-butir Kebijakan Nasional dalam Bidang Pendidikan. Butir-butir kebijakan tersebut adalah antara lain; Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, efisien menuju terangkainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

Lebih dari itu, pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik yang memiliki dua kemampuan, yaitu: menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.<sup>106</sup>

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional di orientasikan untuk penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dengan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha (*entrepreneurship*). Namun demikian, realita yang ada masih menunjukkan bahwa sistem pembelajaran saat ini belum sepenuhnya mengarah pada orientasi dengan tujuan tersebut. Hal ini diindikasikan

<sup>105</sup> Antonius Tanan, Mendidik Enterpreneur, Harian Kompas, Edisi Senin 22 Februari 2010. Baca juga, Muhammad Saroni, Mendidik dengan melatih Enterpreneur Muda, 128.

<sup>106</sup> Rahmat Sutomo, *Kewirausahaan Dari Sisi Kebijakan Pendidikan, dalam "Forum Mangan Wijaya V & VI Membentuk Jiwa Wirausaha"* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2012), 12.

oleh jumlah pengangguran yang relatif tinggi, jumlah enterpreneur yang masih sedikit, dan terjadinya degradasi moral. Untuk itu, dalam upaya menanggulangi problema tersebut, terutama yang terkait dengan Kewirausahaan (*entrepreneurship*), setidaknya ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu: (1) Menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstra kurikuler, maupun pengembangan diri, (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan Pendidikan Kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang mampu meningkatkan pemahaman tentang *entrepreneurship*, menumbuhkan jiwa *entrepreneurship*, serta menumbuhkan skill enterpreneur, (3) Menumbuh-kembangkan budaya *entrepreneurship* di lingkungan sekolah.<sup>107</sup>

Selanjutnya dalam tatanan Landasan Fondasional, pendidikan *entrepreneurship* di SMK didasarkan pada pemahaman mendalam dan filosofis serta berbagai prinsip dasar pembangunan pendidikan. Dalam hal ini Rahmat Sutomo secara lebih spesifik menjabarkan Landasan Fondasional Pendidikan *Entrepreneurship* sebagai berikut:<sup>108</sup>

- 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Rahmat, dengan mengacu pada landasan tersebut maka sistem Pendidikan Nasional memosisikan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>107</sup> Ibid, 13.

<sup>108</sup> Ibid, 14-15.

dengan segala fitrahnya. Mereka diberi tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulai.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa “Pendidikan Nasional Berfungsi Mengembangkan Kemampuan dan Membentuk Watak serta Peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berjuang untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Hal ini memberikan arah pelaksanaan gerakan memasyarakatkan kewirausahaan di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab dibawah koordinasi Kementerian Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah. Melalui gerakan ini diharapkan budaya kewirausahaan akan menjadi etos kerja masyarakat sehingga mampu melahirkan para wirausahawan baru yang handal, tangguh dan mandiri.

- 4) Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan Menteri Pendidikan Nasional No. 02/SKB/MENEG/VI/2000 dan No. 4/U/SKB/2000 29 Juni 2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan. Tujuan dari SKB ini adalah (a) memasyarakatkan dan mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan melalui pendidikan, (b) menyiapkan kader-kader koperasi dan wirausaha yang profesional, (c) menumbuh-kembangkan koperasi, Usaha Kecil dengan Menengah untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dalam tatanan ekonomi kerakyatan.
- 5) Pidato Presiden pada Nasional Summit tahun 2010 telah mengamanatkan perlunya menggalakkan jiwa kewirausahaan dan metodologi pendidikan yang lebih mengembangkan kewirausahaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka bisa dipahami bahwa pendidikan *entrepreneurship* di SMK memiliki Pijakan Fondasional yang jelas dan kuat. Bahkan, dengan mengacu pada landasan-landasan di atas, pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* di sekolah juga menemukan pijakan operasionalnya. Dengan demikian maka asumsi-asumsi negatif tentang pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* di sekolah bisa diminimalisir.

Adapun konsep operasional pendidikan *entrepreneurship* di SMK lebih cenderung memakai pendekatan integratif. Artinya,

pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* tidak harus otonom dan berdiri sendiri dengan membuat kurikulum baru. Tetapi, pendidikan *entrepreneurship* cukup diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada.

Dalam hal ini, Agus Wibowo secara lebih rinci menjelaskan bahwa integrasi pendidikan *entrepreneurship* bisa dilakukan dengan cara mengembangkan, mengeskplisitkan serta mengaitkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma, nilai-nilai pada setiap pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang berwawasan *entrepreneurship* tidak hanya menyentuh tatanan kognitif, namun juga menyentuh tatanan Internalisasi Sikap (afektif), serta pengamalan praktik (psikomotorik) konkrit dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.<sup>109</sup>

Selain itu, pendidikan *entrepreneurship* juga bisa di implementasikan dengan cara memadukan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, seperti kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* membutuhkan kekompakan dan kerjasama dari semua *stake holders* yang ada, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, konselor sekolah, komite dan anak didik.

---

<sup>109</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan Konsep dan Strategi* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 46.

Untuk lebih jelasnya, konsep pengintegrasian pendidikan *entrepreneurship* di SMK, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

- 1) Pendidikan *entrepreneurship* diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran.

Dalam hal ini, nilai-nilai *entrepreneurship* diinternalisasikan dalam setiap kegiatan belajar, sehingga peserta didik tidak hanya diarahkan untuk menguasai materi yang ditargetkan, namun juga dirancang untuk mengenal, menyadari serta menjadikan nilai-nilai *entrepreneurship* sebagai karakter dan perilaku sehari-hari.<sup>110</sup>

Menurut Kemendiknas, proses pengintegrasian tersebut dilakukan secara bertahap, serta dengan cara memilih sejumlah nilai pokok sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai yang lain. Selanjutnya nilai-nilai pokok itu diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Adapun nilai pokok yang dimaksud, menurut Kemendiknas terdapat enam nilai pokok, antara lain; mandiri, kreatif, pengambilan resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dengan kerja keras.

Proses pengintegrasian pendidikan *entrepreneurship* bisa dilakukan pada saat penyampaian materi, melalui metode pembelajaran, maupun melalui sistem penilaian. Dengan kata lain

---

<sup>110</sup> Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, 59-60.

integrasi pendidikan *entrepreneurship* dalam mata pelajaran dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran.

Pada tahap perencanaan, silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) dirancang sedemikian rupa sehingga muatan dan kegiatan pembelajarannya mengantarkan terwujudnya internalisasi nilai-nilai *entrepreneurship* dalam diri peserta didik. Secara rinci pengintegrasian nilai-nilai *entrepreneurship* dan silabus dan RPP dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan apakah nilai-nilai *entrepreneurship* sudah terungkap di dalamnya atau belum.
  - b) Mencantumkan nilai-nilai *entrepreneurship* yang sudah dirumuskan di dalam SK dan KD ke dalam silabus.
  - c) Mengembangkan langkah-langkah pembelajaran model peserta didik aktif, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai *entrepreneurship* dan mengaplikasikannya dalam perilaku.
  - d) Melakukan proses pembelajaran dengan mengacu pada silabus dan RPP yang dibuat, sembari melihat peluang untuk melakukan inovasi pembelajaran selanjutnya.
- 2) Memadukan dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling, yang bertujuan membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka, melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah.

Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diberi muatan pendidikan entrepreneurship, antara lain; olahraga, seni budaya, pramuka, pameran dan sebagainya. Melalui olahraga misalnya, peserta didik diajari nilai-nilai entrepreneurship yaitu sportif atau sportivitas. Melalui seni budaya mereka diajari kreatifitas, melalui pramuka mereka diajari kemandirian dan ulet. Adapun melalui pameran mereka diajari inovasi dan berkompetisi.

3) Pendidikan *entrepreneurship* melalui pengembangan diri.

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran, sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan karakter, termasuk karakter *entrepreneurship*. Pengembangan diri dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.<sup>111</sup>

4) Pengintegrasian dalam bahan atau buku ajar.

---

<sup>111</sup> Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, 61-63.

Dalam proses pembelajaran, bahan atau buku ajar merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship dapat dilakukan ke dalam bahan ajar yang baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi. Adapun caranya tergantung pada kreatifitas masing-masing guru. Namun demikian, prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah tujuan menanamkan pemahaman, penyadaran akan pentingnya nilai-nilai dan karakter *entrepreneurship* serta praktiknya dalam kehidupan kepada setiap peserta didik.

5) Pengintegrasian melalui kultur sekolah.

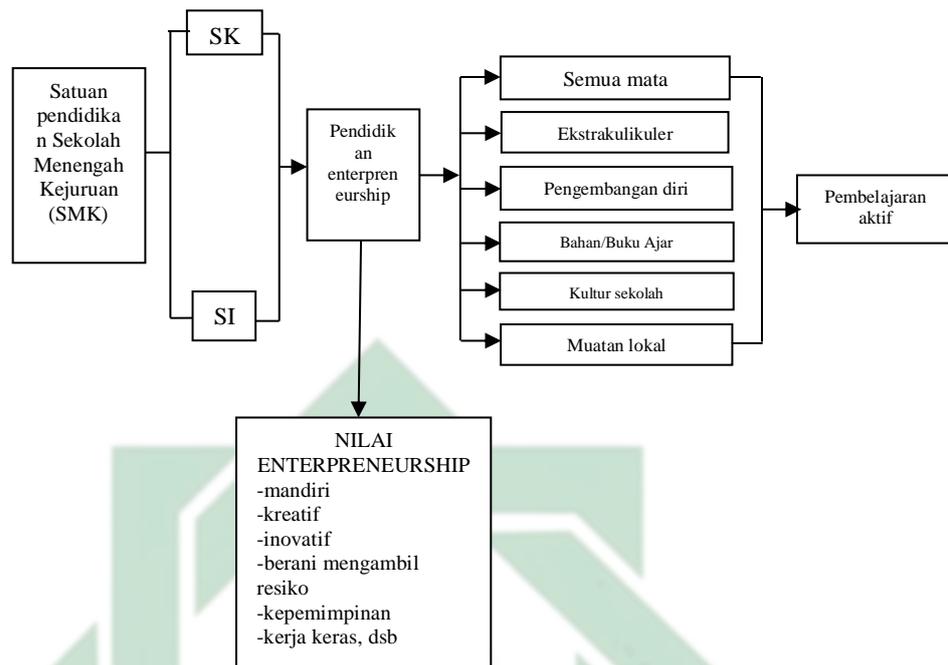
Dalam konteks ini yang dimaksud kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah, di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama, guru sesamanya, dan antar-kelompok masyarakat sekolah. Penanaman nilai-nilai *entrepreneurship* melalui pengintegrasian dengan kultur sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik seraya menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, komitmen dan perilaku lain yang mencerminkan nilai-nilai *entrepreneurship*.

6) Pengintegrasian melalui muatan lokal.

Muatan lokal merupakan pelajaran yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Oleh karena itu muatan lokal harus memuat karakteristik dan kearifan budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat serta mengangkat permasalahan sosial dan lingkungannya. Muatan lokal pada akhirnya dimaksudkan membekali peserta didik dengan keterampilan dasar (life skill) dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat.

Dalam konteks ini, pengintegrasian pendidikan entrepreneurship dalam muatan lokal dilakukan mulai fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, RPP dirancang agar muatan lokal maupun pembelajarannya menjadi wahana pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship. Adapun cara pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship dalam RPP muatan lokal bisa dilakukan dengan cara mengadaptasi RPP muatan lokal yang sudah ada, dengan menambahkan nilai-nilai entrepreneurship pada materi, langkah-langkah pembelajaran atau evaluasi pembelajaran.

Untuk lebih memperjelas konsep pengintegrasian pendidikan entrepreneurship di SMK, maka berikut adalah gambar framework pengintegrasian dimaksud:



Gambar 2.3 framework pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Selanjutnya untuk memastikan pelaksanaan pendidikan *entrepreneurship* di SMK, perlu juga memahami kelemahan-kelemahan yang sering kali menghambat proses implementasinya. Dalam hal ini, menurut Arifin setidaknya ada empat kelemahan, yaitu<sup>112</sup>; pertama, kelemahan pada aspek proses pembelajaran di kelas. Kedua, kelemahan pada aspek pengorganisasian pengalaman belajar peserta didik. Ketiga, kelemahan pada aspek pengembangan kurikulum. Keempat, kelemahan pada aspek sarana dan prasarana di sekolah.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut sebagai upaya maksimalisasi penginternalisasian tersebut, yaitu;

<sup>112</sup> Arifin, "Pendidikan Kewirausahaan Siswa melalui Koperasi Sekolah". Makalah. Disampaikan dalam workshop dan penataran manajemen Koperasi Siswa se-Jawa Timur, Tanggal 9 November 2008 di gedung PSBB MAN 3 Malang.

1) Membenahi kurikulum.

Membenahi kurikulum dengan cara melengkapi materi kurikulum dengan bidang studi kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta terus menerus mengintegrasikan nilai-nilai *entrepreneurship* ke dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam hal ini menurut Kemendiknas terdapat beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan, yaitu: (1) Proses pengembangan nilai-nilai *entrepreneurship* merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan, sehingga desain pengembangan kurikulum juga memiliki orientasi berkelanjutan. (2) Nilai-nilai *entrepreneurship* tidak harus dijadikan pokok bahasan dalam pembelajaran, namun cukup diintegrasikan dalam mata pelajaran, baik melalui materi, metode maupun penilaian. (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang ada, namun cukup menggunakan materi pokok bahasan itu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai *entrepreneurship*. (4) Implementasi kurikulum dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.

Berdasarkan paparan di atas, pengembangan kurikulum pendidikan *entrepreneurship*, khususnya di SMK hendaknya dirumuskan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai *entrepreneurship* memerlukan waktu dan proses yang panjang, sehingga memerlukan

perhatian yang serius, ulet, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dari semua stake holders di SMK.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan konteks kurikulum entrepreneurship di jenjang pendidikan SMK, menurut Arifin adalah menyangkut beberapa aspek berikut: (1) Aspek keimanan, jiwa dan semangat untuk berkarya atau berjuang demi mengharap ridha Allah semata. (2) Sikap mental dan kebiasaan sehari-hari untuk berkarya, misalnya; sikap mental dan tidak mudah puas, ulet, tekun, pandai bergaul, disiplin, empati, menghormati orang lain, jujur, besar hati dan lain sebagainya. (3) Daya pikir kreatif, misalnya; melatih belajar otodidak, membuat buku catatan harian, dan perilaku kreatif yang lain. (4) Membangun sikap mental keutamaan hasil karya melalui kerjasama. (5) Sikap mental untuk menggerakkan diri, seperti; kegairahan dalam hidup, kesediaan untuk berusaha mencapai keberhasilan, melakukan karya dengan segenap hati, mengenal dan memahami keberagaman hidup dan bersaing. (6) Mengenal dan berani mengambil resiko, seperti resiko konflik atau inisiatif, (7) Kemampuan meyakinkan diri, seperti yakin untuk berhasil, yakin dengan hasil produk sendiri, serta yakin terhadap respon pasar dan pembeli, (8) Mengenal dasar-dasar manajemen, mengenal untung rugi, peningkatan biaya anggaran dan rencana, pembentukan model dan berhemat, (9) Keterampilan dalam berwirausaha, seperti cakap dalam pembukuan, penguasaan

bahasa asing, siap mencoba usaha di beberapa bidang, paham tentang hukum, asuransi, perbankan dan sebagainya.

2) Membenahi pengorganisasian proses pembelajaran.

Terkait dengan pendidikan *entrepreneurship* diperlukan pengorganisasian baru yang lebih matang, dan relevan agar peserta didik mendapatkan pengembangan pribadi mendapatkan pengembangan pribadi yang integratif, dinamis dan kreatif.

Dalam hal pengorganisasian proses pembelajaran pendidikan *entrepreneurship* bisa dilakukan melalui beberapa bentuk upaya berikut: (a) Pelaksanaan pengorganisasian kegiatan *entrepreneurship* sekolah melalui OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), seperti dalam bentuk aktifitas koperasi siswa, atau Bank Mini di SMK, (b) Membentuk panitia penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu yang terkait penanaman nilai-nilai *entrepreneurship*, (c) Melakukan kegiatan bersama antar-sekolah atau instansi dengan melakukan kepanitiaan bersama, (d) Menjalin kerjasama lintas sektoral dengan orang tua wali dan tokoh masyarakat (komite sekolah), (e) Melakukan pembinaan secara bertahap dan berkesinambungan tentang perilaku *entrepreneurship*.

3) Membenahi dinamika kelompok.

Guru dituntut kreatif dalam mengatur dan memodifikasi pengelompokan peserta didik dalam proses pembelajaran.

4) Membenahi kompetensi dan budaya guru.

Dalam konteks pendidikan *entrepreneurship* guru memiliki peranan yang sangat penting, sehingga guru harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendalami, mempraktikkan dan menjadikan pendidikan *entrepreneurship* sebagai karakter hidup.

Ada beberapa watak *entrepreneurship* yang perlu dibangun pada diri setiap guru, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pembinaan *entrepreneurship*, yaitu antara lain: (a) Mentalitas berorientasi, masa depan, berpandangan positif dan kreatif, (b) Ulet, tekun, tidak mudah putus asa dan pandai bergaul, (c) Sangat menghargai waktu dan siap berkompetisi secara sehat, (d) Menjunjung sikap dermawan dan familiar, (e) Selalu siap bekerja keras, tidak suka pilih-pilih pekerjaan dan tidak berperilaku komsumenisme, (f) Tidak gila pangkat, gelar, kekuasaan dan selalu menerima hasil usaha sendiri, (g) Beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, (h) Tidak suka tergantung pada orang lain dan bertanggung jawab, (i) Berdisiplin nurani, berani mengambil resiko, (j) Bertekad memajukan lingkungan, berkeadilan dan suka berbagi kebaikan dengan orang lain.

Sebagai sebuah program pembelajaran, pendidikan *entrepreneurship* perlu ditetapkan standar-standar atau kriteria-kriteria tertentu guna mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan *Entrepreneurship* di sekolah, termasuk SMK. Dalam hal ini ada beberapa pencapaian peserta didik yang bisa dijadikan

indikator keberhasilan pendidikan Entrepreneurship di SMK, antara lain: (a) Peserta didik memiliki karakter entrepreneurship, (b) Peserta didik memahami konsep entrepreneurship, (c) Peserta didik mampu melihat peluang, (d) Peserta didik memiliki keterampilan entrepreneurship, (e) Terbentuknya lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang berwawasan *entrepreneurship*.<sup>113</sup>

### c. Model Pembelajaran *Entrepreneurship* di SMK

Secara teoretis terdapat beberapa definisi istilah model pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para ahli berdasarkan sudut pandang masing-masing. Misalnya, Gagne dan Briggs menjelaskan bahwa model pembelajaran sebagai “Instruksional Model”. Lebih jelasnya ia mendefinisikan model pembelajaran sebagai setting terintegrasi komponen strategi seperti ; cara tertentu ide-ide konten yang diurutkan, penggunaan ringkasan, penggunaan contoh, penggunaan praktik dan penggunaan strategi yang berbeda untuk memotivasi peserta didik<sup>114</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, nampaknya pendapat ini menekankan pada pengertian model sebagai sejumlah komponen strategi yang disusun secara integratif, yang meliputi langkah-langkah

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Iif Khoiru Ahmad dan Sofyan Amri, *Pengembangan dan Model Pembelajaran Tematik Integratif* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2014), 55.

sistematis, aplikasi hasil pemikiran, contoh-contoh, latihan, serta berbagai strategi untuk memotivasi para pembelajar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata model berarti pola, (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Dengan demikian model pembelajaran tidak akan terlepas dari pola, contoh atau acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran<sup>115</sup>.

Menurut Soekanto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dengan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian berdasarkan pendapat ini, model pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar.

Adapaun Sudrajat, memaknai model pembelajaran sebagai suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir dengan bentuk penyajian yang khas yang dilakukan oleh seorang guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan gaya pembelajaran<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> Poerwadra minto, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2008), 923.

<sup>116</sup> Ibid, 58.

Bertolak dari ulasan di atas maka yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, merancang bahan, dan mengarahkan dalam tindakan pengajaran dalam setting pembelajaran di kelas.

Seiring dengan pengembangan Kurikulum 2013, maka pengembangan model pembelajaran menjadi penting dilakukan. Adalah model pembelajaran terpadu atau Integratif menjadi salah satu model pembelajaran yang dianggap relevan dengan konteks pembelajaran Kurikulum 2013 tersebut. Hal itu dikarenakan arah Kurikulum 2013 tersebut ditujukan pada terwujudnya peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, lebih dari itu peserta didik diharapkan lebih kreatif, inovatif dan lebih produktif.

Dalam tatanan teoritik, terdapat beberapa pengertian dari pembelajaran terpadu atau pembelajaran integratif yang disampaikan oleh Iif, menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya (*Center of Interest*)<sup>117</sup>.

Adapun menurut Nana S. Sukmadinata menyatakan bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang

---

<sup>117</sup> Ibid, 44.

melibatkan beberapa bidang studi. Pembelajaran seperti ini di maksudkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna. Arti bermakna di sini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu atau *integrative* diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung, kemudian menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka faham<sup>118</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka bisa difahami bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menyesuaikan daya tingkat perkembangan peserta didik (*Develop mentally Appropriate Practical*). Pendekatan ini berangkai dari teori pembelajaran yang menolak Drill-System sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak.

Selanjutnya pembelajaran integratif sebagai sebuah proses, memiliki beberapa ciri<sup>119</sup>, yaitu; cenderung berpusat pada peserta didik (*student centered*), proses pembelajaran yang lebih ditekankan pada pemberian pengalaman langsung, dan pemisahan antar-bidang studi tidak terlihat jelas. Selain itu, yang paling menonjol dari pembelajaran integratif adalah menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran, pembelajaran integratif selain memiliki sifat

---

<sup>118</sup> Nna Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 2.

<sup>119</sup> Iif Khoiru Ahmad, dkk. *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 45.

luwes, juga bisa dikembangkan dalam rangka mencapai keberhasilan sesuai dengan bakat, minat dan kebutuhan peserta didik.

Secara lebih detail, penjelasan ciri-ciri pembelajaran integratif tersebut dipaparkan oleh Abdul Majid<sup>120</sup>, sebagai berikut :

- 1) Berpusat pada peserta didik (*Student Contered*), yaitu peserta didik ditempatkan sebagai subyek utama belajar, sementara guru lebih berperan sebagai fasilitator saja.
- 2) Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik (*Direct Experiences*), dengan artian peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Mereka mendapatkan bekal pengetahuan dan kecakapan dalam berkarya secara nyata di masyarakat.
- 3) Pemisahan antar-bidang studi tidak terlihat jelas. Artinya fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik.
- 4) Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Dalam hal ini pembelajaran integratif dimaksudkan untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh dan holistik terhadap konsep-konsep tertentu yang diajarkan dalam proses pembelajaran.
- 5) Bersifat luwes dan fleksibel. Adapun yang dimaksud dengan sifat luwes dan fleksibel adalah peluang dan kebebasan bagi guru untuk mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata

---

<sup>120</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 89–90.

pelajaran yang lain, bahkan mengaitkannya dengan dengan kehidupan nyata serta keadaan peserta didik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Selanjutnya, dari tatanan fondasionalnya, pembelajaran integratif memiliki tiga landasan<sup>121</sup>, yaitu :

1) Landasan filosofis.

Dalam pembelajaran integratif sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat yaitu; *progresivisme*, *konstruktivisme* dan *tiomanisme*. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami serta memperhatikan pengalaman peserta didik. Adapun aliran konstruktivisme melihat bahwa kunci utama pembelajaran adalah pengalaman langsung peserta didik (*Dircet Experiences*). Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil kontruksi atau bentukan manusia. Manusia yang mengontruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada peserta didik, tetapi harus diinterpretasikan langsung oleh masing-masing peserta didik. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang terus menerus berkembang.

---

<sup>121</sup> Ibid, 87-88.

Adapun humanisme berpandangan bahwa suatu proses pembelajaran harus berorientasi memanusiakan manusia. Dalam pandangan humanisme, peserta didik adalah makhluk yang unik dan memiliki kekhasan masing-masing. Mereka yang memiliki motivasi, potensi, bakat dan minat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, menurut humanisme proses pembelajaran harus fokus pada pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan motivasi, potensi bakat dan minat yang dimiliki masing-masing mereka.

## 2) Landasan Psikologi.

Pembelajaran integratif berkaitan erat dengan psikologi, terutama psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan materi pembelajaran usaha diberikan kepada peserta didik. Hal tersebut dimaksudkan agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Adapun psikologi belajar memberikan kontribusi terkait dengan materi itu diajarkan kepada peserta didik dan bagaimana pula mereka harus mempelajarinya.

## 3) Landasan Yuridis.

Dalam pembelajaran integratif berhubungan erat dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Landasan yuridis tersebut seperti di UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai bakat dan minatnya. Sementara UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya<sup>122</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, menjadi jelas bahwa secara fondasional pembelajaran integratif memiliki landasan yang kuat. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran ini di sekolah bisa dikembangkan sehingga peserta didik betul-betul mendapatkan pembelajaran yang tepat, relevan dengan dirinya dan juga mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik.

Untuk lebih memahami konsep pembelajaran integratif, perlu dijelaskan model-model dalam pembelajaran integratif menurut Fogarty (1991). Dari sudut pandang sifat keterpaduannya, pembelajaran integratif bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>122</sup> Ibid, 76.

- 1) Model dalam satu desain ilmu yang meliputi model keterhubungan (*connected*) dan terangkai (*nested*)
- 2) Model antar-bidang studi yang meliputi model keterurutan (*sequenced*), model berbagi (*shared*), model jaring laba-laba (*webbed*), model bergalur (*threaded*) dan model keterpaduan (*integrated*)
- 3) Model lintas sesuai yang meliputi model *immersed* dan model *net work*.<sup>123</sup>

Dari model-model tersebut di atas, terdapat tiga model pembelajaran integratif yang dikembangkan di sekolah<sup>124</sup>, yaitu ;

- 1) Model keterhubungan (*Connected*), yaitu model pembelajaran yang secara sengaja menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas dalam suatu hari dengan tugas lain di hari yang lain, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide di semester yang lain. Model ini dikembangkan oleh Robert Maynard Hutchins.
- 2) Model jaring laba-laba (*Webbed*), merupakan model pembelajaran terpadu melalui pendekatan tematik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menetapkan tema terlebih dahulu. Dalam hal ini tema bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta

<sup>123</sup> Robin Fogarty, *How To Integrate The Carrricula* (Illinois: Skylight Publishing Inc, 1991), 4.

<sup>124</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, 76-77.

didik atau hasil diskusi dengan sesama guru. Setelah tema ditentukan, maka dilanjutkan dengan mengembangkan sub-sub tema dengan memperhatikan keterkaitannya dengan bidang studi yang lain. Berdasarkan sub-sub tema tersebut, kemudian merancang pelaksanaan aktifitas belajar yang harus dilakukan peserta didik. Tokoh yang mengembangkan model ini adalah Lyndon B. Johnson.

- 3) Model keterpaduan (*Integrated*) adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan integrasi antar-bidang studi. Model ini dilaksanakan dengan upaya menggabungkan antara bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, sikap yang saling terkait di dalam beberapa bidang studi. Berbeda dengan model jaring-jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal, model integrasi malah berupaya menemukan keterkaitan yang terdapat dalam berbagai bidang studi yang kemudian dipilih sebagai tahap perencanaan program. Secara lebih runtut, pelaksanaan model ini diawali dengan menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang memiliki keterhubungan erat tumpang tindih di antara bidang studi. Adapun tokoh yang mengembangkan model ini adalah John Milton.

Berdasarkan paparan terkait beberapa model pembelajaran integratif di atas, nampaknya semua model itu memiliki arah pembelajaran yang sama yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Yaitu pengalaman belajar yang baik menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptualnya yang diyakini bisa mengantarkan pada pembelajaran yang lebih efektif.

Selanjutnya, pembelajaran integratif memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran integratif yaitu meliputi:<sup>125</sup>

- 1) Prinsip penggalian tema. Dalam prinsip ini terdapat beberapa hal, yaitu: (a) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat dilakukan pemaduan dalam banyak bidang studi, (b) Tema harus bermakna, artinya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya, (c) Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak, (d) Tema harus mewartakan minat mayoritas peserta didik, (e) Tema harus relevan dengan peristiwa-peristiwa yang ada, (f) Tema disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, dengan harapan masyarakat, (g) Tema yang dipilih harus mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.
- 2) Prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu. Hal ini meliputi: (a) Guru jangan terlalu dominan dalam proses pembelajaran, (b)

---

<sup>125</sup> Iif Khoiru Ahmad dkk, *Strategi pembelajaran sekolah terpadu*, 48.

Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas saat pemberian tugas kelompok, (c) Guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide baru yang muncul meskipun tidak ada perencanaan.

- 3) Prinsip Evaluatif. Prinsip evaluatif adalah prinsip yang meliputi:
  - (a) Memberi kesempatan peserta didik untuk mengevaluasi diri disamping bentuk evaluasi lainnya, (b) Guru hendaknya melibatkan siswa dalam mengevaluasi hasil belajar berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama.
- 4) Prinsip Reaksi. Prinsip reaksi artinya guru harus bereaksi dalam setiap gejala yang muncul dari peserta didik dalam semua event, untuk kemudian diarahkan pada pemahaman yang utuh dan bermakna.

## **B. Kajian Pesantren**

### **1. Pengertian dan Asal Usul Pesantren**

Pesantren sering juga disebutkan dengan istilah Pondok Pesantren.

Pondok secara terminology berasal dari bahasa Arab *Funduq*, yang berarti hotel atau asrama.<sup>126</sup> Adapun Pesantren berasal dari kata santri,<sup>127</sup> memiliki arti tempat para santri. Menurut Nurcholish Madjid, ada dua

<sup>126</sup> Bandingkan dengan Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3E5,1994), 18. lihat juga Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3E5,2011), 80.

<sup>127</sup> Menurut Chifford Geertz kata santri mempunyai makna sempit dan luas. Dalam makna sempit santri merupakan seorang murid di sekolah agama yang disebut Pondok Pesantren. Sehingga pesantren diambil dari kata santri yang berarti tempat untuk santri. Adapun dalam makna yang luas, santri adalah bagian penduduk jawa yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai kegiatan keagamaan yang lain. Chifford Geertz, *Abangan santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), 268. Lihat juga Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang: Kalimasahada Press, 1993), 4.

pendapat tentang asal usul dan arti kata santri. Pendapat pertama, menyatakan bahwa santri berasal dari kata sanksekerta “*shastri*” yang berarti melek huruf. Adapun pendapat yang kedua, menyatakan bahwa santri berasal dari bahasa jawa “*cantrik*” yang berarti seseorang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru tersebut menetap.<sup>128</sup> Selain itu, pesantren juga sering dikatakan berasal dari bahasa India “*shastri*” yang berarti orang yang mengetahui buku-buku suci agama Hindu atau orang yang ahli tentang kitab suci.<sup>129</sup>

Selanjutnya, istilah pondok pesantren menurut Arifin adalah suatu Lembaga Pendidikan Agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau pemondokan santri. Para santri belajar pendidikan agama melalui kajian kitab-kitab klasik dengan sistem dan metode tertentu, yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan seorang kyai dan memiliki Independensi dalam semua hal.<sup>130</sup> Secara lebih singkat, Zuhairini mendefinisikan Pondok Pesantren sebagai tempat atau asrama para murid yang disebut santri dalam rangka mempelajari atau mengaji agama Islam.<sup>131</sup>

Berdasarkan pemaparan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang

---

<sup>128</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 2006), 21. Lihat juga Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 62.

<sup>129</sup> Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN dan modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 94.

<sup>130</sup> M. Arifin, *Kapita Sekala Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 240.

<sup>131</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 212.

memiliki ciri khas tersendiri dalam menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran agama, sementara pondok pesantren memiliki beberapa elemen utama, antara lain; kyai atau ustadz, santri, asrama, pengajian kitab dan tempat ibadah (masjid).<sup>132</sup>

Selanjutnya, pesantren jika ditelusuri dari asal usulnya, sebenarnya tidak banyak referensi yang bisa dijadikan rujukan. Mastuhu, menyatakan bahwa tidak ditemukan keterangan yang pasti terkait dengan kapan, di mana, dan oleh siapa, pesantren pertama kali didirikan.<sup>133</sup> Namun demikian, Steenbrink berpandangan bahwa pesantren, dilihat dari sistem pendidikannya, berasal dari India. Karena sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa.<sup>134</sup>

Berbeda dari paparan di atas, Yunus menyatakan bahwa asal usul pendidikan pesantren yang menggunakan bahasa Arab pada awal pelajarannya, memiliki kecocokan dengan sistem pendidikan di Baghdad ketika menjadi pusat pemerintahan Islam. Adalah tradisi penyerahan tanah oleh negara yang terdapat dalam sistem wakaf, menjadi salah satu indikasi kuat dari analisis tersebut.<sup>135</sup>

Sementara Wahjoetomo berpandangan bahwa pesantren di tanah air, terutama di Jawa didirikan pertama kali oleh Wali Songo. Syekh

<sup>132</sup> Karel A. Steembrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3E5, 1994), 20. Bandingkan juga dengan I Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ihlis, 1993), 88.

<sup>133</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pesantren* (Jakarta: Sen INIS yx, 1994), 6.

<sup>134</sup> K.A. Steembrink, pesantren, *Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3E5, 1986), 20.

<sup>135</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992), 31.

Maulana Malik Ibrahim atau masyhur disebut syeikh Maulana Maghribi merupakan orang pertama yang mendirikan pesantren yaitu di Gresik.<sup>136</sup>

Berdasarkan paparan di atas, nampaknya ada dua teori yang bisa dipahami tentang asal usul pesantren di Indonesia. Pertama, teori yang menyatakan bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam.<sup>137</sup> Hal ini mengacu pada adanya korelasi dengan tradisi pendidikan Islam di Baghdad, dan sistem pembelajaran agama Islam yang dilakukan oleh Walisongo. Kedua, adalah teori yang menyatakan bahwa pesantren pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Nusantara. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa sebelum datangnya Islam ke Indonesia, sistem pesantren sudah diadakan sebagai tempat membina kader-kader penyebar Hindu.

## 2. Elemen-elemen pesantren

Menurut Dhofier, pondok pesantren memiliki lima elemen pokok yang menjadi prasyarat utamanya. Lima elemen tersebut adalah pondok,

<sup>136</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

<sup>137</sup> Menurut Samsul Nizar, Pesantren berakar pada tradisi kaum sufi atau terakat. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan terakat. Dalam hal ini, terbentuk kelompok-kelompok organisasi terakat yang melaksanakan amalan-amalan dzikirdan wirid tertentu. Pemimpin terakat disebut kyai atau mursyid. Dalam sebagian terakat ada yang mewajibkan para pengikutnya untuk melaksanakan suluk selama 40 hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama anggota lain dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu dibawah bimbingan kyai. Untuk itu, para kyai menyediakan ruangan-ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak di sekitar masjid, selain dzikir dan amalan-amalan tersebut, para murid juga diajarkan kitab-kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Aktivitas tersebut kemudian dikenal dengan istilah pengajian dan akhirnya berkembang menjadi lembaga pesantren. Samsul nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Kencana, 2013), 88.

masjid, santri, pengajian kitab-kitab klasik<sup>138</sup> dan Kyai.<sup>139</sup> Selanjutnya berikut penjelasan tentang lima elemen tersebut, yaitu :

- a. Pondok, yaitu asrama santri yang menjadi ciri khas pesantren di Indonesia dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang kebanyakan berkembang di beberapa wilayah negara Islam yang lain.<sup>140</sup> Menurut Ziemek, istilah pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang cenderung pada makna kesederhanaan.<sup>141</sup> Sementara Arifin berpandangan bahwa pondok berasal dari bahasa arab *funduk* yang berarti ruang tidur, wisma, atau model sederhana.<sup>142</sup>
- b. Masjid. Menurut Sidi Ghazalba, masjid berasal dari kata bahasa arab yang berarti tempat sujud.<sup>143</sup> Sementara Yusuf Al-Qordhawi mendefinisikan masjid sebagai rumah Allah SWT. yang dibangun agar umat manusia mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah SWT dengan sebaik-baiknya.<sup>144</sup>

<sup>138</sup> Dalam penelitian Hariadi, dalam konteks sekarang istilah pengajian kitab-kitab klasik lebih tepatnya dirubah menjadi pengajian ilmu-ilmu agama, sehingga tidak spesifik harus kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Hal tersebut karena dalam praktiknya, pengajaran ilmu agama di pesantren dilakukan dengan dua cara, yaitu ; pertama, melalui kitab-kitab klasik atau yang lebih populer disebut “kitab kuning”. Kedua melalui kitab-kitab berbahasa arab yang tidak tergolong kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer. Untuk pelajaran yang pertama biasanya dilakukan oleh pesantren salaf, sementara yang kedua dilakukan oleh pesantren modern. Hariadi, *Evolusi Pesantren Studi Kepemimpinan Kyai Berbasis Orientasi ESQ* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 18.

<sup>139</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3E5, 1990), 44.

<sup>140</sup> Ibid., 45.

<sup>141</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, 18.

<sup>142</sup> Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, 6.

<sup>143</sup> Sidi Ghazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), 118. Wahyudin Supeno, *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya* (ed) Abdul Hamid (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 1.

<sup>144</sup> Yusuf Al-Qordhawi, *Tuntunan Membangun Masjid*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (ed) Darmadi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

Dalam konteks tradisi pesantren, masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah semata, tetapi lebih dari itu, masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dan pembinaan watak para santri. Karena itu, menurut Dhofier Masjid menjadi elemen mutlak bagi pesantren.<sup>145</sup> Di masjid itu pula, sebelum pesantren mengenal sistem klasikal, pelaksanaan proses belajar mengajar, serta komunikasi hubungan antara kyai dengan para santri, dilakukan.<sup>146</sup>

c. Santri. Santri merupakan istilah yang diperuntukkan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Para santri tinggal di asrama pesantren.<sup>147</sup> Seiring perkembangan kajian tentang pesantren, istilah santri memiliki dua konotasi atau pengertian. Pertama, santri diartikan sebagai orang muslim sholeh yang dengan sungguh-sungguh dan teliti menjalankan ajaran-ajaran agama, sambil senantiasa berupaya membersihkan aqidahnya dari berbagai jenis kesyirikan yang terdapat di daerah-daerahnya.<sup>148</sup> Kedua, santri adalah siswa yang belajar di pesantren.<sup>149</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, santri lebih diposisikan pada pandangan dan konotasi yang kedua, yaitu siswa yang belajar di pesantren baik tinggal bermukim di pesantren atau tidak. Dari sinilah kemudian muncul klasifikasi santri berdasarkan tempat tinggal para

<sup>145</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 49.

<sup>146</sup> H. P. Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 17.

<sup>147</sup> Inran Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, 11.

<sup>148</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren*, 24.

<sup>149</sup> H. P. Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren*, 24.

santri di lingkungan pesantren. Dalam hal ini santri dibagi menjadi dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong.<sup>150</sup>

Santri mukim adalah santri tinggal di pesantren selama menuntut ilmu dan tidak pulang ke rumahnya.<sup>151</sup> Adapun santri kalong adalah santri yang tidak menetap di pesantren karena tempat tinggalnya berada di sekitar pesantren.<sup>152</sup>

- d. Pengajaran Kitab-Kitab Klasik. Pengajaran kitab-kitab klasik merupakan salah satu elemen yang tak terpisahkan dari sistem pesantren. Bahkan Arifin menyatakan jika pesantren tidak lagi mengajarkan kitab-kitab klasik (kuning) maka keaslian pesantren itu semakin kabur, dan lebih pantas dikatakan perguruan atau madrasah dengan sistem asrama dari pada disebut pesantren.<sup>153</sup>

Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian peneliti pesantren tidak lagi mengharuskan pesantren mengajarkan kitab-kitab kuning yang cenderung spesifik ke kitab kuning. Hariadi misalnya, ketika menjelaskan elemen ini, ia lebih longgar memakai istilah “pengajaran ilmu-ilmu ke-Islaman” dan tidak mesti harus kitab kuning. Dalam hal ini ia mengacu pada sistem dan materi pembelajaran ke-Islaman di pesantren modern (*khalaf*), dengan berbasis pada kitab-kitab yang berbahasa Arab namun tidak termasuk kitab-kitab klasik. Kitab-kitab tersebut sering diistilahkan dengan

<sup>150</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren*, 24.

<sup>151</sup> H. P. Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, 15.

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai*, 8.

kitab-kitab kontemporer yang dikarang oleh ulama-ulama masa modern dan dicetak dalam kertas yang tidak kuning.<sup>154</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa elemen pengajaran di pesantren dapat dibedakan antara pengajian melalui kitab-kitab Islam klasik, dan pengajian kitab-kitab non klasik. Kitab-kitab klasik atau kitab kuning merujuk pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman pertengahan.<sup>155</sup> Dalam hal ini Dhofier menggolongkan kitab klasik yang diajarkan di pesantren pada umumnya menjadi delapan kelompok, yaitu: (1) Nahwu dan shorof, (2) Fiqh, (3) Ushul fiqh, (4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid, (7) Tasawuf dan etika, dan (8) Cabang-cabang lain seperti tarikh (sejarah Islam) dan balaghah (ilmu gaya bahasa).<sup>156</sup>

- e. Kyai. Kata Kyai berasal dari bahasa Jawa, dan bukan dari bahasa Arab. Kata kyai memiliki arti yang agung, keramat dan dituahkan.<sup>157</sup>

Dalam konteks kepesantrenan, kyai merupakan sosok penting dengan peran yang sangat signifikan, karena kyai adalah perintis, pendiri pengelola, pengasuh, pemimpin bahkan terkadang sebagai pemilik tunggal sebuah pesantren. Kyai memiliki kekuasaan mutlak (power center) dan sekaligus sebagai pusat pengambilan keputusan (decision maker centre) di lingkungan pesantren yang dikelolanya.<sup>158</sup>

<sup>154</sup> Baca Hariadi, *Evolusi Pesantren*, 29.

<sup>155</sup> Ibid, 30.

<sup>156</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 32

<sup>157</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 55.

<sup>158</sup> I Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, 90.

Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kyai dipandang sebagai sesepuh atau figur yang dituakan. Di tengah-tengah masyarakat, kyai terkadang tidak hanya sebagai pemberi nasehat dalam berbagai aspek dan probelmatika kehidupan masyarakat, namun ada kalanya kyai juga dipercaya untuk mendoakan bahkan untuk mengobati anggota masyarakat yang sedang sakit. Menurut Bawani tradisi masyarakat yang seperti ini yang kemudian melatarbelakangi mantapnya posisi dan peran kyai sebagai tokoh kunci di mana kata-kata dan keputusannya lebih dipatuhi oleh sebagian kalangan, daripada kebijakan pemimpin formal sekalipun.<sup>159</sup>

### **3. Model dan Tipologi Pesantren**

Menurut Mujamil Qomar, variasi pesantren dapat dilihat dari berbagai sudut sehingga menghasilkan kategorisasi yang rinci. Dilihat dari segi rangkaian kurikulumnya, pesantren dibagi menjadi tiga macam, yaitu pesantren modern, pesantren tahassus dan pesantren campuran. Dari segi spesifikasi keilmuan, pesantren dibagi menjadi empat, yaitu; pesantren alat, pesantren fiqih, pesantren qiro'ah dan pesantren tasawwuf. Berdasarkan jenis santri yang belajar, pesantren dibagi menjadi empat macam, yakni; pesantren anak-anak, pesantren khusus orang tua, pesantren mahasiswa dan pesantren umum (campuran). Sementara, pesantren jika dilihat dari segi kecenderungan pada organisasi keagamaan, maka muncul

---

<sup>159</sup> Ibid, 91.

sebutan pesantren sesuai dengan organisasi tersebut, seperti pesantren NU, Pesantren Muhammadiyah, Pesantren Persis, pesantren al-Irsyad, dan Pesantren yang netral.<sup>160</sup>

Selain itu Sulton dan Khusnuridho mengklasifikasi pesantren dilihat dari bentuk Pendidikannya menjadi empat macam, yaitu:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional
- b. Pesantren yang mengajarkan pendidikan agama dengan sistem Madrasah namun juga mengajarkan Ilmu-Ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional
- c. Pesantren yang hanya mengajarkan Ilmu-Ilmu agama dengan bentuk Madrasah Diniyah
- d. Pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian.<sup>161</sup>

Betapapun variasi perkembangan pesantren bisa dibagi berdasarkan sudut pandang yang bermacam-macam pada prinsipnya, model pengembangan pesantren berpangkal pada dua macam istilah pesantren sebagaimana dikedepankan oleh Zamakhsyari Dhofier, yaitu pesantren Salafi dan pesantren khalafi.<sup>162</sup>

Selanjutnya, menurut pendapat Abdurahman Mas'ud terdapat empat model Pesantren yang berkembang hingga saat ini. Keempat model

<sup>160</sup> Mujamil Qomas, *Pesantren*, 16-18.

<sup>161</sup> M. Sulton Masyhud dan Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 7-8.

<sup>162</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 41-42. Abdullah Syukuri Zarkasyi, *Manajemen Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor* (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 49.

pesantren tersebut adalah; pertama, model pesantren yang masih mempertahankan kemurnian karakter dan identitas aslinya. Pesantren ini memastikan dirinya hanya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi din*) bagi para santrinya. Kedua, model pesantren yang memasukkan materi pelajaran umum dalam proses pembelajarannya. Ketiga, model pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah atau sekolah dalam berbagai jenjangnya. Keempat, model pesantren yang berupa asrama pelajar Islam, di mana para santinya belajar di sekolah atau perguruan Tinggi di luar pesantren.<sup>163</sup>

Sementara Dawam Raharjo berpandangan bahwa perkembangan pesantren telah mengalami proses konvergensi yang mengerucut pada lima tipologi pesantren, yaitu:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan Kurikulum nasional dengan bentuk madrasah atau sekolah
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah, serta mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional
- c. Pesantren yang hanya melaksanakan pendidikan agama dalam bentuk Madrasah diniyah

---

<sup>163</sup> Abdurrachman Mas'ud, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 149.

- d. Pesantren yang hanya menjadi Majelis Taklim
- e. Pesantren yang disediakan sebagai asrama pelajar sekolah umum atau madrasah pemerintah, atau bahkan mahasiswa perguruan Tinggi yang semuanya berada di luar pesantren.<sup>164</sup>

#### 4. Sistem Pendidikan di Pesantren.

Distingsi yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Islam tradisional yang lain adalah sistem asrama yang ada di pesantren. Sistem pendidikan dengan model diasramakan ini, kemudian menjadi Ciri Khas pesantren. Adapun manfaat model asrama tersebut, memungkinkan proses pendidikan di pesantren dilaksanakan sepanjang hari selama 24 jam. Kyai bisa mengawasi, membina dan membimbing selama sehari penuh, sehingga setiap tahapan perkembangan santri dapat diarahkan secara tepat sesuai tujuan pendidikan pesantren.

Menurut Mastuhu, setidaknya pesantren memiliki dua belas prinsip utama yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (a) Teoretis (berorientasi ketauhidan), (b) Suka rela dalam pengabdian, (c) Kearifan, (d) Kesederhanaan, (e) Kolektivitas, (f) Mengatur kegiatan bersama, (g) Kebebasan terpimpin, (h) Kemandirian, (i) Pesantren tempat mencari ilmu dan mengabdikan, (j) Mengamalkan ajaran agama, (k) Belajar di pesantren

---

<sup>164</sup> M. Dawani Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), 116.

untuk mencari ijazah, (l) Restu kyai, artinya semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh warga pesantren sangat tergantung pada kerelaan, restu dan do'a kyai.<sup>165</sup>

Selanjutnya, Basri dalam Nata, menyebutkan ada delapan ciri khas sistem pendidikan pesantren, yaitu: (a) Adanya hubungan yang akrab antara santri dan kyai, (b) Kepatuhan santri pada kyai, (c) Perilaku hidup hemat dan sederhana, (d) Sikap hidup mandiri, (e) Budaya tolong menolong dan hubungan persaudaraan antar-para santri, (f) Perilaku disiplin yang tinggi di pesantren, (g) Berani menghadapi tantangan dan penderitaan untuk mencapai cita-cita dan tujuan belajar, (h) pemberian ijazah dan sanad keilmuan.<sup>166</sup>

Terkait dengan ciri-ciri sistem pendidikan pesantren di atas, Hariadi menggaris bawahi bahwa ciri-ciri tersebut cenderung memiliki relevansi dengan pesantren-pesantren tradisional saja. Adapun pesantren-pesantren yang telah menjalani perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada, ciri-ciri tersebut bisa jadi sudah tidak relevan lagi karena peradaptasian yang dilakukan lebih condong mengadopsi sistem pendidikan yang modern.<sup>167</sup>

Adapun dalam tataran metode pembelajaran di pesantren, terdapat beberapa metode khas pesantren, yaitu; metode *wetonan* atau *bandongan*,

<sup>165</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pesantren*, 62.

<sup>166</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2001), 118.

<sup>167</sup> Hariadi, *Evolusui Pesantren*, 78.

metode *sorogan* dan metode hafalan.<sup>168</sup> Metode *wetonan*<sup>169</sup> atau *bandongan* adalah metode kuliah yang bersifat kolektif, di mana sekelompok santri mendengarkan dan mencatat apa yang diterangkan oleh kyai tentang materi suatu kitab yang dikaji.

Sementara metode *sorogan*<sup>170</sup> adalah metode di mana santri secara seorang perseorang maju ke hadapan Kyai membawa kitab yang akan dipelajari. Selanjutnya Kyai membacakan dan menterjemahkan kalimat demi kalimat, kemudian menjelaskan maksudnya. Sementara itu, santri menyimak bacaan Kyai, kemudian mengulangnya di hadapan Kyai sampai memahami betul dan mendapatkan pengesahan pemahaman dari Kyai.<sup>171</sup>

Sedangkan metode hafalan adalah metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab-kitab yang dipelajarinya, yang biasanya dalam bentuk syair atau nadham, sehingga santri merasa mudah dalam menghafal. Dalam tradisi pembelajaran di pesantren, metode menghafal merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak masa awal masuk pesantren. Bahkan hafalan tidak hanya terbatas pada ayat-ayat al-

<sup>168</sup> Ibid,10. Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 28.

<sup>169</sup> Istilah “wetonan” menurut Hariadi berasal dari bahasa Jawa “wekton” yang berarti “waktu-waktu tertentu dan mendapatkan akhiran “an”. Hal itu karena pengajian tersebut di berikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sesudah atau sebelum melakukan sholat wajib. Di Jawa Barat, menurut Abuddin Nata yang mengutip Basri metode ini di sebut dengan “bandongan” dan di sumatra disebut “halaqoh”. Sistem ini juga kadangkala disebut “balaghan” yaitu belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri. Hariadi, *Evolusi Pesantren*, 80. Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan*, 108.

<sup>170</sup> Istilah sorogan berasal dari bahasa jawa “sorog” yang berarti sodor. Sehingga dalam praktiknya, santri menyodorkan kitab ke hadapan kyai atau badalnya. Menurut Nata pembelajaran dengan metode ini merupakan pelimpahan nilai-nilai sebagai proses *Delivery of Culture* di pesantren dengan istilah tutorship atau mentoship. Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan*, 108.

<sup>171</sup> Hariadi, *Evolusi Pesantren*, 80.

Qur'an dan Hadis ataupun nadham, tetapi juga isi atau teks kitab tertentu.<sup>172</sup>

Selain beberapa metode di atas, Widodo menambahkan beberapa metode pembelajarn yang juga dilaksanakan di pesantren, yaitu metode, *Muhawaroh*, metode *Mudzakaroh* dan majlis ta'lim<sup>173</sup> Metode *Muhawaroh* adalah metode yang biasa dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab melalui percakapan antara dua orang santri. Sebelum pelaksanaannya, mereka terlebih dahulu diberikan sebuah topik oleh guru dan selanjutnya santri melaksanakan metode *Muhawaroh* dengan membahas sekitar topik yang telah ditentukan. Dalam metode ini, yang menjadi fokus adalah kelancaran santri dalam berbicara memaki bahasa Arab.

Adapun metode *mudzakaroh* adalah metode pembelajaran melalui pertemuan-pertemuan ilmiah yang khusus diadakan untuk membahas masalah-masalah agama sesuai dengan rujukan kitab-kitab tertentu yang langsung dipimpin oleh kyai atau santri yang telah dipercaya. Sedangkan metode majlis ta'lim adalah metode pengajaran agama Islam yang bersifat umum, terbuka dan tidak terbatas hanya bagi santri dipesantren tersebut.<sup>174</sup>

## 5. Tradisi Pendidikan Pesantren

<sup>172</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan*, 109.

<sup>173</sup> Sembodo Ari Widodo, *Stuktur Keilmuan Pesantren Studi Komparatif Antara Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'allimin Muhammadiyah Yokyakarta* (Yokyakarta: IAIN Sunan Kalijogo, 2002), 43.

<sup>174</sup> Ibid.

Menurut Nata tradisi pendidikan di pesantren meliputi beberapa nilai, antara lain; komitmen untuk *tafaqquh fi al-din*, pendidikan sepanjang waktu, pendidikan Integratif, pendidikan seutuhnya, adanya kebebasan, keragaman, kemandirian, dan tanggung jawab, serta nilai pesantren sebagai miniatur masyarakat.

a. Komitmen untuk *Tafaqquh Fi al-din*

Sebagai lembaga pendidikan agama Islam, pesantren dalam melaksanakan program pendidikannya berorientasi pada komitmen *tafaqquh fi al-din*, yaitu pengajaran tentang ilmu dan nilai-nilai agama Islam, untuk mewujudkan pribadi muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran Allah SWT, serta mengamalkannya dalam berbagai segi kehidupan. Dengan bahasa lain, Mastuhu mengatakan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah mewujudkan kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkhidmat dan bermanfaat kepada masyarakat, seraya mengikuti sunnah Nabi, dan berdakwah demi *Izzul Islam wal Muslimin*, terutama dalam konteks Indonesia.<sup>175</sup>

b. Pendidikan Sepanjang Waktu

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama, memungkinkan seluruh kegiatan dan aktivitas di lingkungan pesantren memiliki nilai pendidikan dan pembelajaran.

---

<sup>175</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 56.

Dengan demikian pesantren menjadi tempat belajar sepanjang hari bagi para santri, sehingga mereka bisa belajar lebih dalam tentang agama Islam. Di pesantren, selama 24 jam setiap hari, kyai beserta seluruh guru senantiasa membimbing, mengajar dan mendidik para santri melalui pengajaran dan keteladanan.<sup>176</sup>

c. Pendidikan Integratif

Pendidikan Integratif adalah konsep pendidikan yang mengkolaborasikan antara pendidikan formal, non formal dan informal. Dengan demikian, pesantren dengan sistem asrama sepanjang 24 jam sehari, memungkinkan untuk memadukan semua kegiatan pembelajaran yang ada dalam satu nafas untuk mewujudkan tujuan besar didirikannya pesantren.

Selain itu pendidikan Integratif di pesantren terwujud dalam keterpaduan sistem pembelajaran pesantren, di mana kebersamaan kyai, guru dan santri dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga segala persoalan segera mendapat perhatian dan solusi. Dalam ranah kurikulum pendidikan, antar lembaga pendidikan yang diselenggarakan pesantren, seperti madrasah, sekolah, halaqoh, majlis ta'lim, bisa saling menguatkan pembelajaran yang telah diberikan. Dan pada saat belajar di lembaga apapun di pesantren tersebut, para

---

<sup>176</sup> Bandingkan dengan Departemen Agama, *Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Tahun 1997* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), 1099.

santri akan mendapatkan keilmuan dan pengalaman yang utuh, komprehensif dan tidak persial.

d. Pendidikan Seutuhnya

Pendidikan pesantren merupakan pembelajaran yang tidak hanya mengedepankan pemahaman teoretis ajaran dan ilmu pengetahuan agama, namun juga menekankan pengamalan secara praktik. Pembelajaran pesantren menekankan keseimbangan antara ilmu dan amal, tidak hanya kecerdasan intelektual yang bersifat kognitif tapi juga kesantunan sikap yang bersifat afektif. Bahkan juga harus seimbang dengan ranah psikomotorik, selain itu pendidikan di pesantren tidak hanya berorientasi hasil tapi juga berorientasi proses.

Secara lebih spesifik, pendidikan pesantren diarahkan pada terwujudnya insan kamil yaitu manusia yang memiliki kepribadian muslim hakiki, bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, terampil, kuat fisik dan mental, serta berguna bagi agama, diri sendiri dan masyarakat. Selebihnya pendidikan pesantren juga berorientasi kepada terwujudnya keseimbangan dunia dan akhirat.

e. Adanya kebebasan, keragaman, kemandirian dan tanggung jawab

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kebebasan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Pesantren bebas menentukan model ataupun kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan, sesuai kecenderungan dan kemauan sang pendiri atau pengasuhnya. Tidak heran jika ada pesantren yang lebih fokus pada

kurikulum dan keilmuan tertentu, seperti pesantren khusus al-Qur'an, khusus Hadis, atau lebih mementingkan ilmu-ilmu alat seperti Nahwu, Sharaf dan Bahasa Arab, serta ilmu-ilmu agama yang lain. Hal ini karena pesantren lahir dari dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat bebas menentukan segala sesuatunya.

Kuatnya kemandirian pesantren pada gilirannya akan memunculkan sikap tanggung jawab yang tinggi, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada Allah SWT. Hal tersebut karena pesantren meyakini bahwa pemilik hakiki pesantren itu adalah Allah SWT. Pesantren merupakan amanat suci dari Allah, karena pesantren menjadi pusat pembelajaran keagamaan Islam, baik secara teori maupun praktik. Pesantren sejak mulai didirikan oleh seorang kyai, tujuannya tidak lain untuk meninggikan kalimat Allah SWT di muka bumi.

f. Pesantren merupakan miniatur masyarakat

Pesantren merupakan lembaga pembelajaran tentang makan kehidupan bermasyarakat secara praktis. Keberadaan para santri yang memiliki keragaman latar belakang, mulai dari geografis, budaya, bakat minat, karakter jiwa, status sosial dan perbedaan-perbedaan yang lain, mereka hidup bersama dalam nuansa dan suasana yang sama yaitu pesantren. Karena itulah, komunitas santri merepresentasikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sebenarnya yang majemuk, multikultural dan heterogen.

Para santri yang belajar di pesantren pada hakekatnya sedang berproses untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat luas setelah kelak mereka pulang dari pesantren. Pengalaman mereka hidup bersama dalam suasana persaudaraan yang kuat, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, menjadikan para santri memiliki mental sosial yang tangguh. Mereka akan lebih siap menghadapi realita kehidupan dan cepat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan zaman.

Berdasarkan paparan di atas, terlepas dari plus minus pesantren yang ada, dapat dikatakan, bahwa pendidikan pesantren dibangun di atas nilai-nilai tradisi yang khas. Kekhasan inilah yang memungkinkan pesantren memiliki distingsi dan nilai tersendiri dibanding lembaga pendidikan yang lain. Hal inilah yang menjadikan pesantren mampu memelihara eksistensinya, bahkan pesantren bisa menjadi tawaran solusi alternatif untuk penyelesaian probelamtika pendidikan dalam konteks Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III OBJEK PENELITIAN

#### A. Identitas Penelitian

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Jadid merupakan sekolah kejuruan yang berada di naungan Yayasan Nurul Jadid. SMK Nurul Jadid didirikan pada tahun 2005. Adapun profil lengkap dari SMK Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Profil SMK Nurul Jadid

Nama Sekolah	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Jadid
Tahun Berdiri	:	2005
Npsn	:	20553240
Status	:	Terakreditasi BAN PT 2008
Yayasan Penyelenggara	:	Yayasan Nurul Jadid
Nomor Telepon/ Fax	:	0335774585
E-mail	:	<a href="mailto:admin@smknuruljadid.net">admin@smknuruljadid.net</a>
Website	:	<a href="http://smknuruljadid.net">smknuruljadid.net</a>
Alamat	:	Po Box 1 Nurul Jadid Paiton Probolinggo 67291
Desa	:	Karanganyar
Kecamatan	:	Paiton
Kota/ Kabupaten	:	Probolinggo
Bidang Keahlian	:	Teknik Informasi Dan Komunikasi
Program Keahlian	:	Teknik Komputer Dan Informatika
Kompetensi Keahlian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multimedia (MM)</li> <li>2. Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ)</li> <li>3. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)</li> <li>4. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL)</li> <li>5. Agribisnis dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi)</li> <li>6. Tata Busana (TB)</li> </ol>
Nama Kepala Sekolah	:	Dr. H. Moh. Mahfudz Faqih, M. Si

## B. Letak Geografis SMK Nurul Jadid

Jl. Kyai Haji Zaini Mun'im, Karanganyar, Paiton, Dusun Karang Anom, Karanganyar, Kec. Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291



Gambar 3.1 Letak Lokasi SMK Nurul Jadid

## C. Sejarah SMK Nurul Jadid

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Jadid merupakan lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan SLTA/ SMA. SMK Nurul Jadid berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Pendirian SMK Nurul Jadid sudah direncanakan sejak KH. Abdul Wahid Zaini menjabat sebagai pengasuh. Awal mula direncanakan pendirian SMK ini, pendidikan kejurumannya hanya diarahkan pada jurusan teknik mesin (STM) yang diketuai oleh Ir. Suprayitno dan kemudian dilanjutkan oleh Drs. Sugio Ahmad. Sayangnya, karena terdapat beberapa kendala maka rencana tersebut masih belum bisa direalisasikan.

Kemudian rencana pendirian SMK ini muncul kembali ketika terdapat kebijakan dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI. Kebijakan yang dibuat oleh Gus Dur ini lebih menekankan pada pembangunan sumber daya laut yang ada di Indonesia.

Akhirnya, karena melihat letak geografis pondok pesantren berada pada garis pantai, maka pondok pesantren menyambut peluang tersebut dengan merencanakan pendirian SMK. Namun berbeda dengan rencana awal yang diarahkan pada teknik mesin, pada rencana kedua pendirian SMK diarahkan pada kelautan dan perikanan. Rencana kedua dalam pendirian SMK diketuai oleh Foni Yusanda, SP. Sayangnya direncanakan kedua, SMK ini masih belum bisa terealisasi juga.

Rencana pendirian SMK ini tidak berhenti pada rencana kedua saja. Karena besarnya dukungan dari para alumni, wali santri, dan partisipan, akhirnya rencana pendirian SMK berlanjut dengan dikeluarkannya surat keputusan pada tanggal 1 Maret 2005 dari ketua yayasan yang mengangkat Foni Yusanda, SP sebagai ketua, Ernawiyadi, S. Ag., Muzanni Shanhaji, BA dan Ahmadi Adianto sebagai anggota tim pendirian SMK. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya surat pernyataan dari yayasan nomor 050/401/426.505/2005 tertanggal 31 Maret 2005 tentang kesanggupan menerima siswa baru tahun pelajaran 2005-2006.

Untuk merealisasikan pendirian SMK ini, tim tersebut melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan SMK lain yang sudah berdiri. Kemudian tim langsung merespon kebijakan pemerintah yang mengadakan program SMK kelas jauh. Dengan fasilitasi dari SMK Negeri 2 Probolinggo, akhirnya Pondok Pesantren Nurul Jadid resmi membuka pendaftaran siswa baru SMK Nurul Jadid pada tahun ajaran 2005/2006 dengan status SMK Filial (kelas jauh) dari SMK Negeri 2 Probolinggo. Awal membuka pendaftaran

siswa baru, SMK Nurul Jadid ini hanya membuka program keahlian Multimedia dan siswa baru yang mendaftar tercatat sebanyak 38 siswa.

Berdirinya SMK Nurul Jadid mendapat respon yang baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, untuk menyambut respon baik ini, pengelola SMK Nurul Jadid menambah program keahlian Teknik Komputer & Jaringan pada tahun ajaran 2006/2007. Setahun kemudian, SMK Nurul Jadid menambah program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Sampai tahun ketiga, SMK Nurul Jadid ini berhasil memiliki program keahlian dengan 7 rombongan belajar. Sampai tahun ini SMK Nurul Jadid Paiton memiliki 6 jurusan yaitu: Multimedia (MM), Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL), Agribisnis dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi), Tata Busana (TB).

Adapun pendirian SMK Nurul Jadid ini juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Pesantren Nurul Jadid pada tahun 1976, yang mana pendiri pondok pesantren Nurul Jadid ini yakni KH. Zaini Mun'im memiliki tujuan untuk menyiarkan dan meninggikan agama Allah. Kehadiran pesantren Nurul Jadid dimaksudkan untuk mampu secara perlahan mengubah tata kehidupan masyarakat sekitar. Berkat ketekunan KH. Zaini Mun'im bersama santri-santrinya, akhirnya masyarakat disadarkana akan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun tak hanya masalah agama, KH. Zaini Mun'im juga menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyeimbangan

persoalan agama dan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa Islam bukan hanya persoalan vertikal semata, namun juga ada aspek horizontal di dalamnya.

Berdirinya pondok pesantren Nurul Jadid ini memberikan dampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar. Mulai dari bidang keagamaan, perekonomian dan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan pondok pesantren Nurul Jadid menerapkan sistem yang sistematis dan terprogram. Sehingga output yang dihasilkan mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam berbagai bidang, yang mana dapat digunakan untuk mengabdikan kepada agama maupun tanah air. Pada perkembangan selanjutnya Pondok pesantren Nurul Jadid kemudian mulai mendirikan beberapa lembaga pendidikan formal. Diantara pendidikan formal yang didirikannya adalah SMK Nurul Jadid pada tahun 2005.

Pendirian SMK Nurul Jadid ini jika ditelusuri dalam konteks filosofis pendirian pesantren Nurul Jadid selaras dengan rumusan trilogi santri dan panca kesadaran santri yang dirumuskan langsung oleh pendiri pesantren Nurul Jadid Paiton yaitu KH. Zaini Mun'im. Adapun trilogi santri tersebut adalah memperhatikan kewajiban fardhu ain, mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar, dan berakhlak baik kepada Allah dan makhluk. Sedangkan panca kesadaran santri yaitu kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran berorganisasi.

#### **D. Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan**

Adapun tujuan pendidikan menengah kejuruan yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, kepribadian serta keterampilan untuk

hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan lebih mendalam sesuai dengan kejuruannya.

## **E. Visi dan Misi SMK Nurul Jadid**

### **1. Visi**

Adapun visi dari SMK Nurul Jadid adalah Menjadi SMK berkualitas yang agamis, berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan.

### **2. Misi**

Adapun Misi dari SMK Nurul Jadid yaitu:

- a. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sekolah berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Menanamkan karakter melalui kegiatan pembiasaan.
- c. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis TIK.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
- e. Mengembangkan pengelolaan sekolah meliputi SDM, kurikulum, kesiswaan, sarana-prasarana, maupun administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada peserta didik.
- f. Mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik dalam rangka meningkatkan daya saing.
- g. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan.

## **F. Tujuan SMK Nurul Jadid**

Adapun tujuan SMK Nurul Jadid adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, berkualitas, terampil, berdaya saing dan berwawasan kewirausahaan.
2. Meningkatkan sarana-prasarana pembelajaran dan pelayanan peserta didik berbasis TIK (Teknik Informasi dan Komunikasi).
3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan.
4. Mempersiapkan peserta didik menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam Kompetensi keahlian pilihannya.
5. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
6. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan DU/DI (Dunia Usaha/ Dunia Industri).
7. Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
8. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

#### **G. Profil Lulusan SMK Nurul Jadid**

Penyelenggaraan proses pendidikan di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo diorientasikan untuk mewujudkan lulusan yang memiliki beberapa karakteristik profil sebagai berikut;

1. Mampu dan taat dalam melaksanakan tuntutan ibadah wajib (Furudlul ‘ainiyah) secara baik dan benar
2. Mampu membaca al-Qur’an secara lancar dan tepat
3. Ramah dalam sikap dan prilaku serta santun dalam bertutur kata
4. Memiliki sikap disiplin , jujur, bertanggung jawab, mandiri serta jiwa entrepreneurship yang lain
5. Menguasai aplikasi perkantoran dasar (Ms. Office)
6. Mampu melakukan instalasi sistem operasi (windows)
7. Mampu mengoperasikan software application
8. Memiliki keahlian dasar dalam setiap bidang keahlian yang digeluti

#### **H. Prospek Lulusan SMK Nurul Jadid**

Adapun peluang kerja bagi lulusan SMK Nurul Jadid memiliki prospek kerja yang cukup bagus karena bisa masuk pada beberapa lapangan kerja yang luas. Dengan kompetensi dan keahlian sesuai bidang yang ada, para lulusan SMK Nurul Jadid akan bisa mudah diterima kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, selain juga bisa berusaha secara mandiri sebagai seorang entrepreneur. Namun secara spesifik lulusan SMK Nurul Jadid berdasarkan jurusan dan bidang keahlian yang ada, memiliki beberapa peluang kerja, antara lain; teknisi computer, teknisi jaringan, web developer, biro periklanan modern, industri penerbitan, industri media massa, lembaga komputer umum, setting dan desainer mandiri, industri seni, industri pertelevisian, industri audio visual, programmer, PJB, PLTU, PLTA, teknisi

penanganan dan pengolahan hasil perikanan, teknisi pengujian mutu hasil perikanan, tailor, pembuat pelengkap busana konveksi, dan lain-lain.

Selain itu lulusan SMK Nurul Jadid memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di tingkat Diploma maupun Strata Satu (S1) pada jurusan perkuliahan yang relevan, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), di dalam negeri maupun luar negeri.

## **I. Jurusan**

### **1. Multimedia**

Tujuan Program keahlian Multimedia adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam mengembangkan citra dan animasi digital, WEB-interaktif, merekam dan menyunting audio-video, serta mengembangkan aplikasi multimedia interaktif. Adapun kompetensi kejuruan multimedia yaitu: a) dasar desain grafis dan multimedia, b) fotografi digital, c) desain dan pengembangan WEB, d) produksi audio-video, e) integrasi 2D dan 3D ke dalam sajian multimedia, f) integrasi audio-video ke dalam multimedia.

### **2. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**

Tujuan program Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar kompeten dalam bidang pemrograman database, pemrograman WEB, pemrograman berorientasi objek dan antar-muka. Adapun

kompetensi kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yaitu: a) algoritme pemrograman (JAVA), b) pembuatan website statis dan dinamis (html, css, php), c) aplikasi basis data (Ms. access, MySQL), d) bahasa pemrograman berorientasi objek (JAVA, C++), e) integrasi basis data WEB dengan MySQL server, f) aplikasi mobile programming (android, arduino, dan meruvian).

### 3. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

Tujuan program Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam instalasi jaringan lokal (*local area network*), instalasi jaringan berbasis luas (*wide area network*), dan administrasi server dalam jaringan. Adapun kompetensi kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yaitu: a) perakitan *troubleshooting* komputer, b) desain jaringan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*), c) desain kebutuhan server, d) desain sistem keamanan jaringan, e) instalasi kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) dan BNC (*Bayonet Neill–Concelman*) pada jaringan, f) instalasi jaringan nirkabel, g) administrasi perangkat jaringan, h) *back up* dan *restore* basis data jaringan.

### 4. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL) PJB (Pembangkitan Jawa-Bali) Class

Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (TPTL) dirancang untuk menyiapkan lulusan yang terampil mampu mengoperasikan

pembangkit listrik yang bertenaga uap (PLTU). Adapun kompetensi yang dicapai adalah penguasaan teori dan praktik keilmuan pembangkit listrik meliputi perangkat listrik pembangkit, mekanik, instrumentasi dan sistem kontrol. Untuk mencapai hal tersebut, SMK Nurul Jadid bekerjasama dengan PJB akademi untuk mendesain kurikulum yang dikolaborasikan dengan kebutuhan khusus dengan mitra kerja sebagai SMK pembinaan PJB UP Paiton dan UBJOM Paiton. Adapun kompetensi keahlian yang dimaksud meliputi: a) boiler, b) turbin, c) generator.

#### 5. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI)

Tujuan program Agribisnis Pengelolaan Hasil Perikanan (APHPI) yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan dan sikap agar kompeten dalam melakukan pekerjaan sebagai pengolah hasil perikanan secara mandiri/ wirausaha dan melakukan pekerjaan sebagai pelaksana penanganan dan pengolahan secara pengujian mutu hasil perikanan yang profesional dalam industri pengolahan hasil perikanan. Adapun kompetensi kejuruan yaitu: a) mengidentifikasi jenis komoditi hasil perikanan, b) mengoperasikan alat dan mesin pengolah hasil perikanan, c) mengolah produk perikanan secara tradisional, d) menentukan komposisi dan nilai gizi produk hasil perikanan, e) membuat layout pabrik pengolahan perikanan, f) melakukan perencanaan industri hasil perikanan, g) menerapkan sanitasi dan hygiene hasil perikanan, h) melakukan pengalengan hasil perikanan,

mengolah hasil perikanan untuk ekspor utama, i) memanfaatkan hasil samping produk perikanan, j) menerapkan manajemen mutu terpadu, mengerjakan transportasi ikan dalam keadaan hidup.

#### 6. Tata Busana (TB)

Tujuan program keahlian Tata Busana (TB) yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang: *fashion drawing* (menggambar busana), *pattern making* (membuat pola), pembuatan busana (khususnya busana syar'i) baik pria, wanita, dewasa dan anak-anak, dan pembuatan hiasan pada busana (*embroidery*). Adapun kompetensi keahlian yang diajarkan yaitu: a) pembuatan pola, b) pembuatan busana *custom made*, c) pembuatan busana industri, d) pengembangan produk kreatif, e) pembuatan motif dan busana syar'i.

#### J. Kegiatan Siswa SMK Nurul Jadid

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMK Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan keagamaan intensif dan terpadu (al-Qur'an dan kitab kuning)
2. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
3. Lembaga kajian, Pers dan penerbitan siswa ( majalah MASA)
4. Pembinaan Bahasa Inggris (CELL)
5. Kelas khusus DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) (Android Development)

6. Kelompok minat desain (Multi Design)
7. Kelompok minat teknisi (TKJ [Teknik Komputer dan Jaringan] Community)
8. Kelompok minat programmer (IT [Teknologi Informasi] Programming)

#### **K. Fasilitas Pendukung SMK Nurul Jadid**

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan di SMK Nurul Jadid Paiton, maka pihak pengelola menyediakan beberapa fasilitas, yaitu antara lain; 1) Sarana ibadah, 2) Ruang belajar berbasis TI, 3) Laboratorium Multimedia, 4) Laboratorium Perakitan dan Jaringan, 5) Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, 6) Laboratorium Android, 7) Laboratorium Sinematografi, 8) Laboratorium IPA, 9) Sistem Informasi Sekolah Online, 10) Hotspot Area (Wi-Fi), 11) Perpustakaan, 12) Kantin Sekolah, 13) BCV (*Branch Control Valve*) Digital Printing (Workshop Benner), 14) Asrama siswa terintegrasi dengan Pesantren, 15) Ruang UKS (Unit Kesehatan Siswa) dan Pramuka, 16) Ruang Server (ICT Center), 17) Ruang OSIS, 18) Ruang Lembaga Pers siswa (Majalah MASA), 19) Bengkel TPTL (Teknik Pembangkit Tenaga Listrik), 20) Sertifikat dari PJB dan ESDM, 21) Instruktur Khusus dari PJB, 22) Peralatan tata busana, 23) Lab Pengolahan Perikanan.

#### **L. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Jadid**

1. Visi Pondok Pesantren Nurul Jadid

Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab kemasyarakatan serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

## 2. Misi Pondok Pesantren Nurul Jadid

Adapun misi pondok pesantren Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

- a. Penanaman keimanan, ketaqwaan kepada Allah dan pembinaan akhlak al-karimah.
- b. Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan.
- c. Pengembangan bakat dan minat.
- d. Pembinaan keterampilan dan keahlian.
- e. Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian.
- f. Penanaman kesadaran hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.
- g. Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

## M. Jadwal Harian Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid

### 1. Kegiatan pada hari Sabtu, Minggu, dan Rabu:

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Hari Sabtu, Minggu, dan Rabu

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Bangun Pagi	03.00 – 03.30 WIB
2	Tahajjud dan Persiapan Shalat Shubuh	03.30 – 03.45 WIB
3	Shalat Shubuh di Masjid	03.45 – 04.45 WIB
4	Pengajian al-Qur'an	04.45 – 05.15 WIB
5	Pengajian Kitab (diperbanyak)	05.15 – 06.15 WIB
6	Sarapan Pagi, Dhuha, & Persiapan Diniyah	06.15 – 07.15 WIB
7	Berangkat Diniyah	07.15 – 07.30 WIB
8	Diniyah	07.30 – 08.45 WIB
9	Class Moving	08.45 – 09.00 WIB

10	KBM Formal	09.00 – 15.30 WIB
11	Istirahat Sore	15.30 – 16.00 WIB
12	Pengajian Kitab Sore	16.00 – 17.00 WIB
13	Persiapan Maghrib	17.00 – 17.30 WIB
14	Hadiran Maghrib dan Isya'	17.30 – 19.30 WIB
15	Makan Malam	19.30 -20.00 WIB
16	Kegiatan Belajar Mandiri / Kelompok	20.00 – 21.00 WIB
17	Tahassus Banom (Badan Otonom)	21.00 – 22.00 WIB
18	Istirahat Santri	22.00 – 03.00 WIB

2. Kegiatan pada hari Senin dan Kamis:

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Hari Senin, dan Kamis

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Bangun Pagi	03.00 – 03.30 WIB
2	Tahajjud dan Persiapan Shalat Shubuh	03.30 – 03.45 WIB
3	Shalat Shubuh di Masjid	03.45 – 04.45 WIB
4	Pengajian Al Qur'an	04.45 – 05.15 WIB
5	Pengajian Kitab (diperbanyak)	05.15 – 06.15 WIB
6	Sarapan Pagi, Dhuha, & Persiapan Diniyah	06.15 – 07.15 WIB
7	Berangkat Diniyah	07.15 – 07.30 WIB
8	Diniyah	07.30 – 08.45 WIB
9	Class Moving	08.45 – 09.00 WIB
10	KBM Formal	09.00 – 15.30 WIB
11	Istirahat Sore	15.30 – 16.00 WIB
12	Pengajian Kitab Sore	16.00 – 17.00 WIB
13	Persiapan Maghrib	17.00 – 17.30 WIB
14	Hadiran Maghrib dan Isya'	17.30 – 19.30 WIB
15	Makan Malam	19.30 -20.00 WIB
16	Pengembangan Minat Bakat Santri dan Organisasi Siswa	20.00 – 22.00 WIB
17	Istirahat Santri	22.00 – 03.00 WIB

3. Kegiatan pada hari Selasa:

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan Hari Selasa

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Bangun Pagi	03.00 – 03.30 WIB
2	Tahajjud dan Persiapan Shalat Shubuh	03.30 – 03.45 WIB
3	Shalat Shubuh di Masjid	03.45 – 04.45 WIB
4	Pengajian Al Qur'an	04.45 – 05.15 WIB

5	Olahraga dan Pengembangan Diri	05.15 – 07.30 WIB
6	KBM Formal	07.30 – 15.30 WIB
7	Istirahat Sore, Olahraga dan Pengembangan Diri	15.30 – 16.30 WIB
8	Persiapan Maghrib	16.30 – 17.30 WIB
9	Hadiran Maghrib dan Isya'	17.30 – 19.30 WIB
10	Makan Malam	19.30 – 20.00 WIB
11	Kegiatan Belajar Mandiri / Kelompok	20.00 – 21.00 WIB
12	Tahassus Banom	21.00 – 22.00 WIB
13	Istirahat Santri	22.00 – 03.00 WIB

#### 4. Kegiatan pada hari Jum'at:

Tabel 3.5 Jadwal Kegiatan Hari Jum'at

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Bangun Pagi	03.00 – 03.30 WIB
2	Tahajjud dan Persiapan Shalat Shubuh	03.30 – 03.45 WIB
3	Shalat Shubuh di Masjid	03.45 – 04.45 WIB
4	Piket dan Burdah	04.45 – 06.00 WIB
5	Olahraga dan Pengembangan Diri	06.00 – 10.00 WIB
6	Persiapan Sholat Jum'at	10.00 – 10.30 WIB
7	Sholat Jum'at	10.30 – 13.00 WIB
8	Istirahat Sore, Olahraga dan Pengembangan Diri	13.00 – 16.00 WIB
9	Persiapan Maghrib	16.00 – 17.30 WIB
10	Hadiran Maghrib dan Isya'	17.30 – 19.30 WIB
11	Makan Malam	19.30 – 20.00 WIB
12	Kegiatan Belajar Mandiri / Kelompok	20.00 – 21.00 WIB
13	Tahassus Banom	21.00 – 22.00 WIB
14	Istirahat Santri	22.00 – 03.00 WIB

## N. Unit Keterampilan Santri

### 1. Balai Latihan Kerja (BLK)

Balai latihan kerja adalah balai latihan bagi santri dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan vokasi dalam mempersiapkan santri siap kerja.

### 2. Unit Jahit Menjahit

Unit jahit menjahit adalah pelatihan dan praktik produksi/ usaha bidang jahit menjahit (konveksi) dan mini garmen.

3. Batik Tulis dan Print

Unit keterampilan pembuatan batik tulis dan print bagi santri.

4. Kerajinan Tangan (*Handy Craft*)

Unit keterampilan santri putri untuk membuat berbagai jenis kerajinan tangan (*handycraft*), antara lain pembuatan pot bunga, lampion, souvenir, boneka mini.

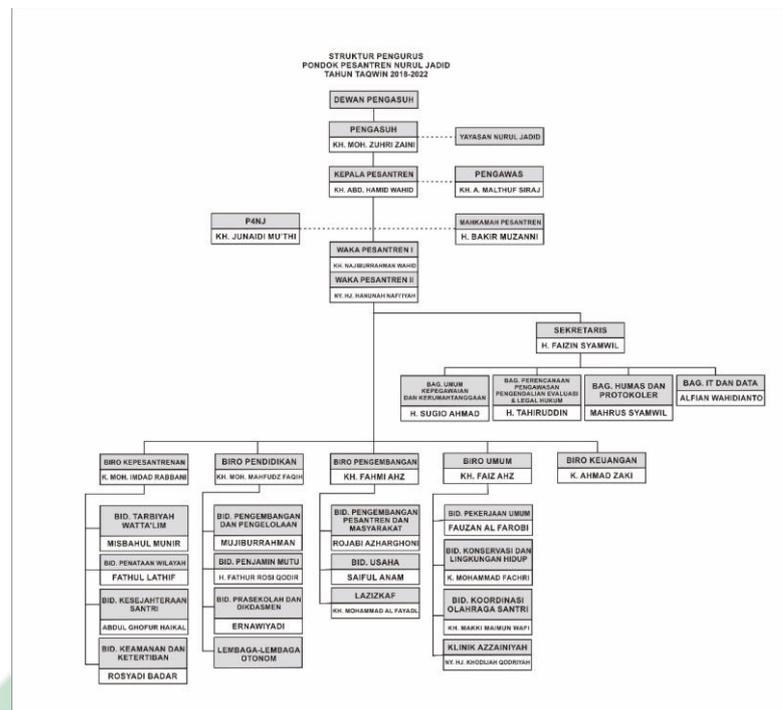
5. Kaligrafi

Wadah kreatifitas santri di bidang seni kaligrafi. Selain kaligrafi Arab yang sudah menjadi khas pesantren, juga ada seni kaligrafi Jepang dan China (Shufa).

**O. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid**

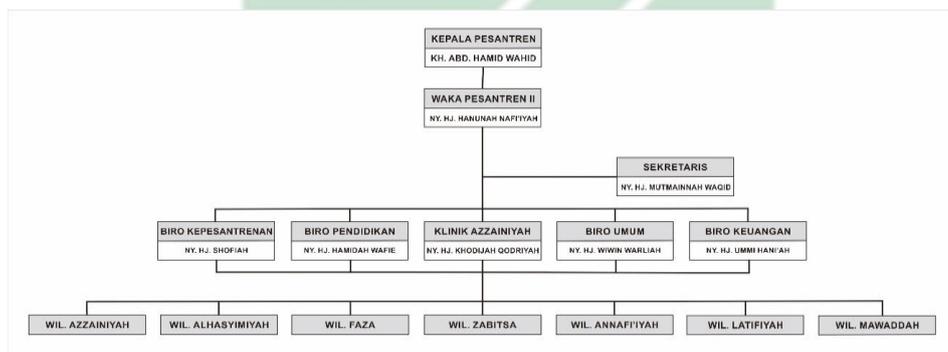
Sebuah pondok pesantren pasti memiliki organisasi kepengurusan tersendiri, demikian halnya dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid



Di pondok pesantren putri Nurul Jadid terdapat kepengurusan khusus. Adapun struktur organisasi pengurus putri adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengurus Putri



**P. Kerjasama Pondok Pesantren Nurul Jadid**

Pondok Pesantren Nurul Jadid melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan program dan pelayanan, diantaranya:

1. Penyelenggaraan Balai Latihan Kerja (BLK)

Kerjasama dengan Kementrian Ketenagakerjaan RI dalam mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas bidang otomotif bagi santri dan masyarakat sekitar.

2. Ujian Bahasa Inggris Standart Internasional

Kerjasama dengan *Indonesian International Education Foundation* (IIEF) dalam pelaksanaan *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) secara mandiri.

3. Pengembangan Bisnis Digital

Kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam pengembangan potensi bisnis startup di lingkungan pesantren berbasis digital untuk membuka lapangan pekerjaan dalam menghadapi persaingan global.

4. Pengembangan Pendidikan Islam Thailand

Kerjasama (luar negeri) dengan sejumlah lembaga Islam yang ada di bawah naungan Majelis Agama Islam Pattani Thailand sebagai upaya meningkatkan kualitas peserta didik dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pengembangan Perguruan Tinggi Pesantren

Kerjasama (luar negeri) bersama 45 perguruan tinggi pesantren se-Indonesia dengan perguruan tinggi di Taiwan dalam rangka peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi, yang difasilitasi PBNU.

6. Pengadaan Aplikasi Layanan Masyarakat

Kerjasama dengan Polres Kabupaten Probolinggo dalam penggunaan aplikasi Bromo Perakasa untuk layanan pengaduan masyarakat yang cepat

dan efektif melalui aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Teknik UNUJA (Universitas Nurul Jadid).

7. Pengawasan, Maintenance dan Produksi

Kerjasama dengan PT Yeoh Tiong Lay (YTL) Paiton Probolinggo dalam bidang pengawasan, *Maintenance* dan Produksi yang tergabung dengan CSR YTL Jawa Poweer untuk peningkatan kompetensi pendidikan Nurul Jadid.

**Q. Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid**

Unit usaha pesantren merupakan unit yang bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan santri dan masyarakat. Adapun unit usaha pesantren di antaranya:

1. NJ (Nurul Jadid) Mart

Unit usaha pertokoan Nurul Jadid untuk menyediakan kebutuhan santri dan masyarakat.

2. NJ Print

Unit usaha yang melayani kebutuhan jasa percetakan.

3. UD Mandiri

Unit usaha bergerak di bidang pengadaan alat-alat dan bahan bangunan.

4. UD Sinar Sejahtera

Unit usaha yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan pokok dan catering guna melayani santri dan tamu pesantren.

5. Enje Enterprise

Unit usaha yang bergerak di bidang persewaan perangkat-perangkat pesta, upacara, acara-acara seremonial, dan wisuda.

6. Pustaka Nurja

Unit usaha penerbitan yang dikelola oleh LP3M UNUJA, bergerak di bidang penerbitan naskah, buku, jurnal, monograf, ensiklopedia, dan lain-lain.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA PENELITIAN**

#### **A. Model Pengelolaan Sekolah *Entrepreneurship* Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristik yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lain. Keberadaan karakteristik tersebut selanjutnya menjadi distingsi yang memiliki makna tersendiri dalam upaya pengembangan masing-masing lembaga. Dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) keberadaan karakteristik tersebut menjadi lebih jelas dan spesifik. SMK dari awal keberadaannya telah memiliki karakteristik yang tidak sama dengan pendidikan umum, baik dari segi kriteria pendidikan, substansi pelajaran dan lulusannya.

Selain itu, perbedaan karakteristik antar-lembaga SMK juga menjadi keniscayaan dalam perkembangannya. Di antara beberapa perbedaan karakteristik yang muncul, adalah model pengelolaan yang dilakukan oleh stakeholder masing-masing lembaga. Demikian pula dengan lembaga SMK Nurul Jadid yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dalam pengelolaannya, SMK Nurul Jadid dikelola secara Integratif (Terpadu) dengan pesantren yang menaunginya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di dapati bahwa Integrasi Pengelolaan SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo dilakukan dalam beberapa aspek, antara lain; sistem

manajerial, kurikulum, sistem pembelajaran, keuangan, sarana prasarana dan iklim sekolah.

#### 1. Integrasi Sistem Manajerial

Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid (SMK NJ) dalam sistem pengelolaannya terintegrasi dengan sistem pengelolaan pesantren. Hal tersebut tidak lepas dari awal keberadaan SMK NJ yang digagas oleh pemangku pesantren. Keberadaan SMK NJ menjadi unit pendidikan di bawah naungan pesantren dan menjadi salah satu wahana dalam mewujudkan visi dan misi pesantren. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Abdul Manaf Firdaus sebagai Kepala SMK NJ sebagaimana berikut:

“Sistem pengelolaan di SMK Nurul Jadid ini, sebagaimana unit pendidikan lain yang berada dalam naungan pesantren Nurul Jadid terintegrasi dengan pengelolaan pesantren, karena pesantrenlah yang mendirikan SMK ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendirian SMK ditujukan sebagai wahana yang mendukung terwujudnya visi misi pesantren Nurul Jadid”.<sup>177</sup>

Pernyataan sebagaimana di atas juga senada dengan yang disampaikan KH. Moh. Mahfudz yaitu:

“SMK Nurul Jadid ini didirikan oleh pesantren pada tahun 2005 sebagai upaya melengkapi unit pendidikan yang sudah ada sebelumnya di pesantren ini, seperti MI, MTs, SMP, MA, SMA, dan Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu pengelolaannya tetap menyatu dengan pesantren. Hal tersebut, agar keberadaan SMK tetap sesuai dengan visi dan misi besarnya pesantren Nurul Jadid”.<sup>178</sup>

Berdasarkan wawancara sebagaimana di atas, didapatkan informasi bahwa pengelolaan SMK NJ dilakukan secara integratif dengan

<sup>177</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

<sup>178</sup> KH. Moh. Mahfudz (Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 25 Januari 2018.

pesantren. Pesantren sebagai institusi yang menaungi memposisikan unit-unit pendidikan di bawah naungannya termasuk SMK sebagai salah satu wahana mewujudkan visi misi besarnya. Pengintegrasian pengelolaan SMK dimaksudkan untuk memastikan visi misi pesantren bisa berhasil dengan baik. Dengan demikian, SMK NJ bisa dikatakan sebagai salah satu sub sistem pendidikan pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Dalam pengelolaannya, SMK NJ dilakukan melalui sistem Integratif Kolaboratif dengan pesantren. Artinya, sistem pengelolaan di SMK NJ tidak hanya dilakukan oleh pihak SMK secara utuh, tapi dipadukan dengan pesantren secara kolaboratif. Hal ini tercermin dengan dibentuknya beberapa biro dalam struktural pesantren Nurul Jadid yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan di lembaga-lembaga atau unit-unit di bawah naungan pesantren, termasuk SMK NJ. Adapun biro-biro tersebut antara lain; Biro Pendidikan, Biro Kepegawaian, Biro Kepesantrenan, Biro Keuangan, dan Biro Pengembangan.

Di SMK NJ, sistem pengelolaannya dipadukan dan dikolaborasikan dengan biro-biro pesantren tersebut di atas. Seperti pengelolaan penerimaan siswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh Biro Pendidikan, rekrutmen tenaga pendidik dilaksanakan secara terpadu oleh Biro Kepegawaian, kegiatan siswa di luar sekolah dilaksanakan secara terpadu oleh Biro Kepesantrenan, pengembangan kurikulum dilaksanakan secara terpadu oleh Biro Pendidikan (seperti pelaksanaan Madin Integratif) serta pengelolaan keuangan dan pembayaran sekolah

dilaksanakan secara terpadu oleh Biro Keuangan. Hal ini sebagaimana di paparkan oleh Abdul Manaf Firdaus sebagaimana berikut:

“Sistem Manajerial atau pengelolaan di SMK Nurul Jadid ini, dilakukan secara terpadu dengan pesantren, meskipun masih dalam tataran Kolaboratif. Artinya pengelolaan tersebut tidak seluruhnya dilakukan pesantren, begitu juga tidak seluruhnya dilakukan oleh sekolah, tapi lebih bersifat kolaboratif dan sinergis. Dalam hal ini, pesantren dalam struktur manajerialnya, membentuk Biro-Biro sebagai representasi pesantren dalam melaksanakan program kepesantrenan. Seperti Biro Pendidikan, Biro Kepegawaian, Biro Kepesantrenan, Biro Keuangan dan Biro Pengembangan”.<sup>179</sup>

Demikian pula penjelasan KH. Abdul Hamid yang menyatakan sebagai berikut:

“Di Pesantren Nurul Jadid ini, sistem manajerial lembaga atau unit pendidikan di bawah naungan pesantren, dilaksanakan secara terpadu dan dikerjasamakan. Untuk itu, pesantren membentuk Biro-Biro seperti; Biro Pendidikan, Biro Kepegawaian, Biro Kepesantrenan, Biro Keuangan. Hal-hal yang perlu dilaksanakan secara integratif yang kita lakukan secara sinergis. Contohnya seperti penerimaan siswa baru di Unit Pendidikan, itu dilakukan langsung oleh Biro Pendidikan, rekrutmen tenaga pendidikan dilakukan secara terpadu oleh Biro Kepegawaian, kegiatan siswa di luar sekolah yang nota bene masih di lingkungan pesantren ditangani oleh Biro Kepesantrenan, masalah pengelolaan keuangan sentral dikelola oleh Biro Keuangan dan seterusnya. Sementara pengelolaan hal-hal yang lebih teknis dan lokal dilakukan oleh masing-masing unit secara Internal”.<sup>180</sup>

Berangkat dari paparan hasil wawancara di atas maka bisa dipahami bahwa sistem manajerial di SMK NJ bersifat Integratif Kolaboratif. Nampaknya hal-hal bersifat prinsip dan berupa kebijakan strategis, pesantren tidak segan-segan menangani secara langsung. Namun

<sup>179</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

<sup>180</sup> KH. Abd. Hamid (Kepala Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 17 Januari 2018.

demikian, pesantren memberikan keleluasan kepada unit-unit dalam melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis dan Internal.

Pengintegrasian pengelolaan SMK NJ sebagaimana di atas, terimplementasikan dalam beberapa aspek, seperti penerimaan siswa baru, rekrutmen tenaga pendidikan. Di SMK NJ penerimaan siswa baru dilakukan secara terpadu bersama unit pendidikan yang lain di bawah naungan pesantren Nurul Jadid, dengan cara disentralkan dalam satu tempat, waktu dan kepanitiaan yang semuanya diatur oleh pesantren, melalui Biro Pendidikan Pesantren. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Nurul Iman sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid pelaksanaan penerimaan siswa baru dibarengkan dengan penerimaan siswa baru di unit-unit lain di bawah naungan pesantren. Jadi pesantren membentuk satu kepanitiaan khusus untuk menangani itu. Selanjutnya untuk lebih efektif dan efisien, maka pelaksanaan penerimaan siswa baru tersebut dilakukan dalam satu tempat secara terpadu dan dalam waktu yang sama. Baru setelah itu data siswa baru yang terdaftar diberikan kepada masing-masing unit, sesuai pilihan pendaftar. Ya yang mendaftar ke SMK disampaikan ke pihak SMK, begitu juga kepada unit-unit yang lain”<sup>181</sup>

Hasil wawancara sebagaimana di atas menjelaskan bahwa penangan proses penerimaan siswa baru tidak murni dilakukan oleh pihak pesantren, namun juga melibatkan pihak unit pendidikan di bawah naungannya, termasuk SMK NJ. Meskipun porsinya tidak banyak dan kepanitiaan tetap di atas namakan kepanitiaan pesantren.

---

<sup>181</sup> Nurul Iman (Tenaga Pendidik dan Waka Kesiswaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 25 Januari 2018.

Selain itu, pihak SMK NJ sendiri secara integral juga membentuk kepanitiaan lokal dalam penerimaan siswa baru. Kepanitiaan ini dimaksudkan sebagai pihak yang menangani penerimaan siswa baru di Internal SMK NJ, setelah mendapat data pendaftar dari kepanitiaan pesantren. Kepanitiaan Internal SMK, memiliki tugas menginput data siswa baru, mengatur penempatan kelas dan menyiapkan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nurul Iman, sebagaimana berikut:

“Meskipun proses penerimaan siswa baru ditangani oleh kepanitiaan pesantren, namun di pihak SMK Nurul Jadid sendiri masih kami bentuk kepanitiaan Internal yang bertugas untuk menangani masalah administrasi, seperti penginputan data, penempatan kelas dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, Tugas Kepanitiaan Lokal ini menindak lanjuti data penerimaan siswa baru yang diserahkan oleh kepanitiaan pesantren”.<sup>182</sup>

Paparan hasil wawancara di atas, menegaskan bahwa terdapat dua kepanitiaan dalam penerimaan siswa baru di SMK NJ, yaitu kepanitiaan pesantren yang terpadu dan kepanitiaan lokal yang bersifat Internal. Adapun dalam aspek tenaga pendidik, proses rekrutmen tenaga pendidik di SMK NJ juga dilakukan secara terpadu dan sentral oleh pesantren melalui Biro Kepegawaian. Dalam hal ini pihak unit pendidikan, termasuk SMK NJ cukup menyampaikan atau mengajukan kebutuhan tenaga pendidik bidang-bidang pelajaran yang dtuhkan kepada Biro Kepegawaian pesantren. Untuk selanjutnya Biro Kepegawaian melakukan proses

---

<sup>182</sup> Nurul Iman (Tenaga Pendidik dan Waka Kesiswaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

rekrutmen, mulai dari sosialisasi rekrutmen, ujian wawancara dan distrisi pelamar yang diterima kepada masing-masing unit sesuai kebutuhan. Dengan demikian, surat lamaran kerja calon tenaga pendidik dikirimkan kepada bagian Biro Kepegawaian, bukan kepada unit-unit pendidikan yang diinginkan oleh pelamar. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh KH. Moh. Mahfudz sebagaimana berikut:

“Rekrutmen tenaga pendidikan disemua unit pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pesantren. Unit pendidikan, seperti SMK Nurul Jadid hanya mengajukan kebutuhan tentang tenaga pendidik sesuai yang dtuhkan. Setelah didapatkan tenaga pendidik sesuai yang dtuhkan itu baru kami serahkan kepada unit yang bersangkutan. Hal tersebut kami lakukan karena pesantren ingin memastikan bahwa para tenaga pendidik disemua unit pendidikan pesantren Nurul Jadid sesuai dengan standart yang ditentukan pesantren”.<sup>183</sup>

Hasil wawancara di atas sesuai dengan pernyataan Rahmad Hidayatullah yang menceritakan pengalaman dirinya ketika mendaftarkan diri untuk melamar menjadi tenaga pendidik di SMK NJ sebagaimana berikut:

“Saya mengajar di SMK Nurul Jadid sudah satu tahun, semenjak tahun 2017 kemarin. Awal mula saya mengajar dan mengabdi disini, ketika saya telah menyelesaikan S1 saya di STIKOM Nurul Jadid, saya dapat informasi dari Biro Kepegawaian pesantren Nurul Jadid bahwa dtuhkan tenaga pendidikan untuk ditugaskan di SMK Nurul Jadid. Setelah saya lihat kriteria dan syarat-syaratnya, saya merasa cocok dan bisa memenuhinya. Maka saya langsung mengajukan lamaran dan ditujukan ke Biro Pendidikan. Setelah beberapa hari, saya dipanggil untuk ujian wawancara, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus”.<sup>184</sup>

<sup>183</sup> KH. Moh. Mahfudz (Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 25 Januari 2018.

<sup>184</sup> Rahmad Hidayatullah (Tenaga Pendidik di SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 17 Januari 2018.

Bertolak dari hasil beberapa wawancara di atas, rekrutmen tenaga pendidik di SMK NJ dilakukan oleh Biro Kepegawaian pesantren kebutuhan yang diajukan oleh pihak SMK NJ. Hal tersebut dilakukan karena pihak pesantren merasa memiliki tanggung jawab untuk selalu memastikan tenaga pendidik di unit pendidikan di bawah naungannya, tak terkecuali SMK, sesuai dan selaras dengan standart dan kriteria pesantren yang ditentukan.

## 2. Integrasi Kurikulum (Kewirausahaan)

Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, SMK NJ melakukan hal tersebut secara bersama-sama dengan pesantren dan mitra industri atau dunia usaha. Namun demikian, tidak semua komponen kurikulum yang diintegrasikan, namun kurikulum yang memungkinkan saja yang disusun bersama baik dengan pesantren maupun dengan industri atau dunia usaha. Sebagaimana dimaklumi kurikulum di SMK pada umumnya terdapat tiga komponen, yaitu komponen normatif, komponen adaptif dan komponen produktif. Namun di SMK NJ masih terdapat kurikulum muatan lokal, sehingga bisa dikatakan ada empat komponen.

Hal tersebut diungkapkan oleh Moh. Arief Hariyanto sebagaimana berikut:

“Pada prinsipnya penyusunan dan pengembangan kurikulum di SMK Nurul Jadid dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, yaitu pesantren dan pihak dunia usaha dan industri. Dalam hal ini, kami klarifikasikan sesuai muatan komponen kurikulum yang ada di SMK Nurul Jadid. Untuk komponen normatif seperti agama, PPKN, seni budaya dan lainnya, kami susun bersama dunia usaha dan industri, seperti prodi Jaringan Listrik disusun bersama PJB Paiton. Kalau mulok seperti pelajaran diniyah (keagamaan), kami susun dengan pesantren. Hal tersebut kami lakukan untuk mensinkronkan atau *me-matching*-kan kurikulum di sekolah

dengan lingkungan pesantren dan juga dengan dunia usaha dan industri”.<sup>185</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa pengembangan kurikulum di SMK NJ dilakukan secara bersama dengan pihak-pihak yang sekiranya terkait erat dan signifikan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak semua muatan kurikulum disusun bersama-sama dengan semua mitra, namun yang terkait saja.

Selanjutnya, terkait dengan langkah penyusunan dan pengembangan kurikulum bersama pihak pesantren maupun pihak dunia usaha dan industri, di SMK NJ dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan pengelolaan belajar yang akan diberikan kepada siswa, pengorganisasian pengalaman belajar dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Dalam proses penyusunan dan pengembangan kurikulum bersama dengan pihak pesantren atau pihak dunia usaha dan industri, kami lakukan dengan melakukan beberapa langkah, antara lain; merumuskan bersama tujuan pembelajaran, menentukan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa, merumuskan bagaimana pengorganisasian pengalaman belajar tersebut dan evaluasi. Jadi empat hal ini yang betul-betul kami perhatikan karena akan menentukan sekali terhadap proses pembelajaran selanjutnya”.<sup>186</sup>

Paparan hasil wawancara di atas menegaskan bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum di SMK NJ dilakukan bersama pihak-pihak

---

<sup>185</sup> Moh. Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

<sup>186</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

terkait baik pesantren maupun dunia usaha dan industri. Penyusunan tersebut dilakukan dalam semua komponen, baik normatif, adaptif, produktif maupun mulok. Namun demikian, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tersebut, pihak SMK NJ memilah milih mana komponen yang disusun bersama pesantren dan mana komponen kurikulum yang disusun bersama dunia usaha dan industri.

Adapun pendekatan dalam pengembangan kurikulum di SMK NJ dilakukan dengan cara pendekatan yang berbasis pada pesantren. Artinya pengembangan kurikulum di SMK NJ didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik pesantren Nurul Jadid yang menaunginya. Sebagaimana pengembangan kurikulum muatan lokal, di SMK NJ dilaksanakan dalam bentuk kurikulum diniyah, dengan ciri khas kajian kitab kuning yang nota bene merupakan karakteristik pesantren. Demikian pula pada komponen kurikulum normatif, seperti pelajaran agama, maka materi dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada siswa adalah materi dan pengalaman agama sesuai dengan paham Ahlussunah Wal Jamaah an-Nahdliyah. Hal tersebut karena pondok pesantren yang menaunginya adalah pesantren yang didirikan oleh salah satu ulama NU, sehingga amaliyah keagamaan di pesantren Nurul Jadid adalah amaliyah NU.

Begitu pula, dalam pengembangan ekstra kurikuler di SMK NJ. Di SMK NJ terdapat ekstra kulikuler antara lain; pembiasaan Furudul ‘Ainiyah, pengajian al-Qur’an, pengajian kitab kuning dan praktek ibadah, itu semua didasarkan pada Trilogi santri yang dirumuskan oleh Pendiri

Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu KH. Zaini Mun'im. Adapun Trilogi santri tersebut adalah; memperhatikan kewajiban fardlu 'ain, mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan berakhlaq baik kepada Allah dan makhluk. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, SMK Nurul Jadid memakai pendekatan yang berbasis pada sekolah, karena SMK Nurul Jadid memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan karakteristik pesantren yang menaunginya. Contohnya dalam menyusun kurikulum muatan lokal yang kami lakukan dengan pihak pesantren, sehingga terwujudlah kurikulum diniyah yang berbasis pada kitab kuning. Kitab kuning ini kan menjadi ciri khas pesantren. Juga materi keagamaan yang diajarkan adalah yang cocok dengan paham ahlusunah wal jamaah ala NU. Karena pesantren Nurul Jadid adalah pesantren NU yaitu KH. Zaini Mun'im”.<sup>187</sup>

Selanjutnya, di SMK NJ juga dilakukan pengembangan kurikulum integratif pada tema-tema pelajaran tertentu. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan materi penelitian kepada pengintegrasian kurikulum kewirausahaan di SMK NJ. Hal ini dikarenakan kewirausahaan (*entrepreneurship*) menjadi *core* tersendiri dalam penelitian ini.

Terkait dengan pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di SMK NJ, hal tersebut tidak lepas dari visi misi pesantren Nurul Jadid sendiri. Di antara visi dan misi pesantren tersebut adalah pembinaan keterampilan dan keahlian serta pengembangan kewirausahaan dan kemandirian.<sup>188</sup> Berdasarkan visi misi pesantren tersebut, maka SMK NJ

<sup>187</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

<sup>188</sup> Dokumen Visi dan Misi Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungannya memiliki landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum kewirausahaan, disamping SMK memang merupakan sekolah yang sangat relevan dengan konsep pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid pengembangan kurikulum kewirausahaan bukan hanya karena SMK memang memiliki relevansi yang kuat dengan pembentukan jiwa entrepreneur siswa, namun bagi SMK Nurul Jadid pembelajaran kewirausahaan menjadi salah satu visi misi pesantren yang harus dilaksanakannya. Perlu diketahui bahwa diantara misi pesantren Nurul Jadid adalah pembinaan keterampilan dan keahlian serta pengembangan kewirausahaan dan kemandirian. Nah, nampaknya pesantren Nurul Jadid mendirikan SMK ini ya untuk mewujudkan visi dan misi pesantren tersebut”<sup>189</sup>.

Adapun langkah-langkah dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di SMK NJ, pihak sekolah melakukan beberapa hal, antara lain membenahi kurikulum, membenahi pengorganisasian proses pembelajaran, membenahi proses kelompok dan meningkatkan kemampuan guru. Langkah-langkah tersebut dilakukan mengingat SMK NJ sebagaimana SMK-SMK yang lain bukanlah sekolah bisnis murni, meskipun SMK menjadi lembaga yang diorientasikan untuk mempersiapkan lulusan yang dapat bekerja dalam bidang tertentu. Hal tersebut dijelaskan oleh Arief sebagai berikut:

“Langkah yang dilakukan oleh SMK Nurul Jadid dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan adalah dengan melakukan beberapa hal, antara lain membenahi kurikulum, membenahi pengorganisasian pembelajaran, membenahi proses

---

<sup>189</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

kelompok dan meningkatkan kemampuan guru. Hal itu semua kami lakukan karena SMK itu bukan sekolah yang murni sekolah bisnis, akan tetapi sekolah Vokasional yang bertujuan menyiapkan lulusan yang siap kerja. Memang, jika dibanding dengan MA dan SMA misalnya, SMK lebih diorientasikan menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan *life skill* agar lulusannya siap bekerja dan hidup mandiri”.<sup>190</sup>

Dalam proses pembenahan kurikulum kewirausahaan di SMK NJ ada beberapa nilai kewirausahaan yang dirumuskan untuk ditanamkan dalam diri siswa. Nilai-nilai tersebut ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan siswa dan kultur pesantren Nurul Jadid yang menjadi iklim SMK NJ Adapun nilai-nilai tersebut antara lain; mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, inovatif, ulet, kerjasama, komunikatif, motivasi kuat dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut memiliki kolerasi erat bahkan identik dengan kultur dan karakter yang melekat pada pesantren. Penjelasan ini sebagaimana dituturkan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Dalam materi kewirausahaan yang diajarkan pada siswa di SMK Nurul Jadid ini yaitu berupa penanaman nilai-nilai kewirausahaan pada diri siswa. Karena siswa SMK Nurul Jadid ini sekaligus santri di pesantren ini, maka kami rumuskan nilai-nilai kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan siswa dan kultur pesantren. Nilai-nilai tersebut antara lain; mandiri, kreatif, berani menanggung resiko, kepemimpinan, kerja keras, jujur, disiplin, dan lain-lain”.<sup>191</sup>

<sup>190</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

<sup>191</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 24 Januari 2018.

Hal itu pula yang dijelaskan oleh Kyai Imdad Rabbani seraya menjelaskan keterkaitan nilai-nilai tersebut dengan kultur pesantren Nurul Jadid, sebagaimana berikut:

“Jika nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan kepada siswa di SMK Nurul Jadid itu berupa; kemandirian, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, leadership (kepemimpinan), jujur, kerja keras, ulet, disiplin punya motivasi tinggi, kerja sama, komunikatif, tanggung jawab dan lain-lain, maka kami tegaskan nilai-nilai tersebut sangat cocok dengan kultur pesantren. Bahkan saya yakin, tidak hanya pesantren Nurul Jadid ini yang seperti itu, tapi semua pesantren menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para santrinya”.<sup>192</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, nampaknya nilai-nilai kewirausahaan yang diajarkan di SMK NJ menemukan titik kolerasinya dengan kultur dan iklim pesantren yang menaunginya. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak SMK karena dalam proses pembelajaran pendidikan kewirausahaan terhadap siswa bisa lebih maksimal karena terintegrasi dengan kultur pesantren yang nota bene menjadi iklim dan lingkungan sekolah.

Selanjutnya pengintegrasian kurikulum kewirausahaan yang dilakukan oleh SMK NJ adalah dengan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah yang sudah ada. Dalam hal ini pendidikan kewirausahaan diintegrasikan pada beberapa aspek, antara lain; diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstra kulikuler, diintegrasikan ke dalam program pengembangan

---

<sup>192</sup> Imdad Rabbani (Kepala Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

diri, diintegrasikan pada kultur sekolah dan pesantren serta diintegrasikan melalui muatan lokal. Hal tersebut dijelaskan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Pendidikan kewirausahaan di SMK Nurul Jadid ini selain memang diajarkan melalui mata pelajaran kewirausahaan, juga dilakukan dengan cara pengintegrasian kurikulum kewirausahaan. Kurikulum kewirausahaan disini diintegrasikan ke dalam beberapa aspek, antara lain; diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, kegiatan ekstra kulikuler, program pengembangan diri, perubahan pembelajaran, kultur sekolah dan pesantren serta muatan lokal. Pengintegrasian ini dimaksudkan agar semua proses pembelajaran di SMK Nurul Jadid ini memiliki peran yang sama dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di sekolah ini. Sehingga pendidikan kewirausahaan bukan sekedar sampingan atau pelengkap, namun menjadi satu kesatuan tekad dan tujuan pendidikan yang ada”.<sup>193</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bisa dipahami bahwa pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dalam semua aspek pembelajaran di SMK NJ dilakukan sebagai upaya mengefektifkan pendidikan kewirausahaan yang ada. Selanjutnya dalam pengintegrasian kurikulum pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran dilaksanakan dalam semua tahap, baik tahap perencanaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai kewirausahaan yang akan ditanamkan dengan memprioritaskan nilai-nilai yang pokok terlebih dahulu. Selanjutnya nilai-nilai pokok tersebut diadaptasikan ke dalam silabus dan RPP yang sudah ada. Dalam hal ini ada enam nilai kewirausahaan yang pokok, antara lain; mandiri, kreatif, mengambil

---

<sup>193</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dan kerja keras. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief Hariyanto sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid ini, integrasi kurikulum kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran dilakukan dengan cara pengadaptasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam silabus dan RPP. Jadi para guru melakukan pengindentifikasian terlebih dahulu, apa saja nilai-nilai kewirausahaan yang mau ditanamkan, kemungkinan diadaptasikan dengan silabus dan RPP yang akan di buat. Namun, yang umum terdapat enam nilai kewirausahaan pokok yang biasa diadaptasikan, antara lain; mandiri, kreatif, mengambil resiko, kepemimpinan, orientasi, pada tindakan dan kerja keras”.<sup>194</sup>

Adapun tentang alasan kenapa hanya beberapa nilai pokok kewirausahaan yang biasa diadaptasikan, hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya banyak nilai-nilai kewirausahaan yang bisa ditanamkan kepada para siswa. Namun, kalau semua nilai tersebut harus ditanamkan sekaligus dalam setiap pelajaran hal tersebut sangat berat dan sulit baik bagi guru maupun siswa. Maka dari itu penanaman nilai-nilai kewirausahaan tersebut dilakukan secara bertahap dan memilih yang paling pokok dan mendasar. Hal tersebut diterangkan oleh Akhmad Iqbal sebagai berikut:

“Dalam mengadaptasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam silabus dan RPP, kami hanya memilih nilai-nilai kewirausahaan yang pokok-pokok saja, seperti mandiri, kreatif, kepemimpinan, orientasi tindakan, berani mengambil resiko dan kerja keras. Ya karena tidak mungkin semua nilai-nilai kewirausahaan ditanamkan sekaligus, karena itu berat dan sulit. Jadi kami lakukan secara bertahap saja”.<sup>195</sup>

<sup>194</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

<sup>195</sup> Akhmad Iqbal (Guru Kewirausahaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

Adapun pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dengan kegiatan ekstra kulikuler di SMK NJ dilakukan dalam beberapa kegiatan ekstra kulikuler seperti; olahraga dan pramuka. Melalui kegiatan olahraga, para siswa ditanamkan untuk memiliki nilai-nilai kewirausahaan seperti kekompakan tim, ketangguhan, kejujuran dan kedisiplinan. Sementara melalui kegiatan pramuka, nilai kewirausahaan yang ditanamkan kepada para siswa antara lain; kemandirian, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan menemukan peluang. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid pendidikan kewirausahaan juga dipadukan dengan kegiatan ekstra kulikuler seperti olahraga dan pramuka. Dalam kegiatan olahraga para siswa diperbolehkan memilih jenis olahraga yang disukai, seperti sepak bola, volly, bulu tangkis, tenis meja ataupun futsal. Jadi terserah mereka. Di sini sekolah hanya menyediakan fasilitas dan bimbingan guru olahraga saja. Namun demikian, guru olahraga juga memahami bahwa dalam proses berolahraga para siswa sedang diajari nilai-nilai kewirausahaan, seperti kerjasama tim, ketangguhan, jujur dan harus disiplin”.<sup>196</sup>

Sementara dalam kegiatan ekstra kulikuler pramuka, dijelaskan oleh Mujiburrohman selaku pembina pramuka dan juga salah satu siswa SMK Nurul Jadid sebagaimana berikut:

“Dalam setiap kegiatan pramuka, pada hakikatnya para siswa secara otomatis diajarkan nilai-nilai kewirausahaan, seperti; mandiri, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, menemukan peluang, dan lain-lain. Contoh dalam kegiatan berkemah, nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai yang melekat secara otomatis. Jadi, menurut saya kegiatan pramuka itu sejalan dengan upaya penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang memang ditekankan di SMK Nurul Jadid ini”.<sup>197</sup>

<sup>196</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

<sup>197</sup> Mujiburrohman (Pembina Pramuka SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 03 Maret 2018.

“Saya senang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dalam pramuka. Saya dilatih untuk mandiri, percaya diri dan kepemimpinan. Saya juga dibiasakan untuk bekerja keras, kreatif, dan menemukan peluang. Dalam kegiatan kepramukaan, seperti kegiatan berkemah dan lain-lain. Jadi insyaallah, saya sudah tidak canggung lagi ketika besok pulang ke masyarakat”.<sup>198</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka bisa dipahami bahwa pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dengan kegiatan ekstra kulikuler di SMK NJ dilakukan dalam bentuk kegiatan di luar mata pelajaran, seperti olahraga dan pramuka. Kegiatan ekstra kulikuler tersebut, dengan demikian tidak diorientasikan sebagai wahana menumbuhkan potensi bakat dan minat mereka, namun juga menjadi wahana menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada para siswa.

Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan di SMK NJ juga dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri. Di SMK NJ kegiatan pengembangan diri secara sistemik dilakukan dalam bentuk pelayanan konseling bagi para siswa. Selain itu, kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan antara lain; kegiatan rutin sekolah (seperti upacara, dan berjamaah). Perilaku keteladanan oleh guru (seperti hadir ke sekolah tepat waktu, tegas, adil, bekerja keras dan kreatif) serta pengkodisian (seperti SMK Mini Nurul Jadid). Hal tersebut dijelaskan oleh Arief sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid pendidikan kewirausahaan juga kita ajarkan melalui kegiatan pengembangan diri. Di SMK ini kegiatan pengembangan diri dilaksanakan melalui pelayanan konseling bagi para siswa. Dalam hal ini, siswa yang ingin berdiskusi atau berkonsultasi tentang karir, bisnis, peluang kerja dan prospek usaha

---

<sup>198</sup> Ibadur Rahman (Siswa SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 03 Maret 2108.

misalnya, ya kita layani. Di sanalah proses pendidikan kewirausahaan kita ajarkan, sambil kita memberikan layanan konseling”.<sup>199</sup>

Hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pendidikan kewirausahaan diintegrasikan dalam pelayanan konseling dengan membebaskan siswa untuk berkonsultasi tentang kewirausahaan. Hal ini bisa sangat efektif karena dalam berkonsultasi tersebut siswa bisa fokus dan spesifik berkonsultasi tentang kewirausahaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Adapun pendidikan kewirausahaan yang diintegrasikan dengan pengembangan diri melalui kegiatan rutin sekolah, dijelaskan oleh Nurul Iman sebagai berikut:

“Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di SMK Nurul Jadid ini ada yang sifatnya rutin seperti upacara dan berjamaah. Semua siswa diharuskan ikut. Karena manfaatnya banyak. Seperti kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan dan lain-lain. Dengan demikian upacara dan sholat berjamaah tersebut, bukan hanya ditujukan untuk menanamkan karakter kebangsaan dan religius. Namun juga kami maksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada mereka. Harapannya, mereka menjadi entrepreneur yang santri (agamis) dan nasionalis”.<sup>200</sup>

Berangkat dari paparan hasil wawancara di atas, nampak bahwa pendidikan kewirausahaan di SMK NJ disinergikan dengan kegiatan sekolah yang sifatnya rutin dengan maksud nilai-nilai kewirausahaan tersebut menjadi karakter yang melekat dalam diri siswa. Adapun

---

<sup>199</sup> Arief Hariyanto (Tenaga Pendidik dan Waka Kurikulum SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

<sup>200</sup> Nurul Iman (Waka Kesiswaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 03 Maret 2018.

pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dalam perilaku keteladanan, dijelaskan oleh Abdul Manaf sebagai berikut:

“Dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada siswa, kami para guru dan tenaga pendidikan yang ada berupaya memberikan contoh dan teladan yang baik. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, untuk memberi contoh kedisiplinan dan menghargai waktu. Kalau mengajar, selalu bersemangat dan kreatif, untuk memberi keteladanan tentang kerja keras dan kreatif. Kalau memberi penilaian kepada siswa kami nilai seobjektif dan sejujur mungkin, untuk mengajari tentang kejujuran. Semua itu kami lakukan secara sadar untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada siswa”.<sup>201</sup>

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pendidikan kewirausahaan di SMK NJ tidak hanya diajarkan secara teoritis, namun juga diajarkan melalui contoh-contoh dan perilaku keteladanan dari semua guru dan tenaga kependidikan yang ada. Pembelajaran secara integratif dan sinergis semacam itu, diharapkan efektif untuk menjadikan nilai-nilai kewirausahaan tersebut menjadi karakter dan perilaku diri para siswa.

Selain hal tersebut di atas, pendidikan kewirausahaan di SMK NJ dilakukan dalam bentuk pengkondisian sekolah sebagaimana dijelaskan oleh Mukarrom sebagai berikut:

“Dalam memaksimalkan pendidikan kewirausahaan, di SMK Nurul Jadid dilaksanakan SMK Mini, sebagai bentuk pengkondisian dan dukungan sekolah secara konkrit. Di SMK Mini Nurul Jadid ini, sementara lebih bergerak di bidang sablon dan benner. Karena hal tersebut yang paling maju dan pesat. Selain itu sekolah melaksanakan kerja sama dengan unit usaha pesantren, seperti NJ Mart, Balai Latihan Kerja Santri untuk mengembangkan kreatifitas siswa”.<sup>202</sup>

<sup>201</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

<sup>202</sup> Ahmad Mukarrom (Tenaga Pendidik Bidang Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 03 Maret 2018.

Paparan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa SMK NJ telah melakukan upaya pengkondisian sekolah dalam mendukung terealisasinya pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, baik secara internal sekolah maupun eksternal sekolah. Dalam hal ini SMK NJ tidak hanya melalui upaya mandiri sekolah, tapi juga memaksimalkan potensi pesantren yang tentunya lebih besar dan maksimal.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi pendidikan kewirausahaan dengan kultur sekolah dan pesantren, di SMK NJ para siswa yang nota bene santri mukim pesantren Nurul Jadid terjadi secara natural. Sebagaimana layaknya budaya pesantren, siswa SMK NJ yang sekaligus santri senantiasa diajarkan nilai-nilai positif seperti kemandirian, disiplin, kepemimpinan, kerja keras, tanggung jawab dan manajerial. Nilai-nilai tersebut yang juga menjadi nilai-nilai kewirausahaan secara otomatis tertanam melalui kegiatan sehari-hari santri, seperti; mencuci pakaian sendiri, makan sendiri, mengatur waktu dan keuangan sendiri, mengikuti program sekolah dan kepesantrenan yang sudah tersistematis dan terjadwal, rela menerima sanksi dari pesantren ketika melanggar dan kreatif dalam memenuhi kepentingan sendiri, serta suasana kompetitif antar siswa dan santri, baik dalam hal akademik maupun non akademik. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Manaf sebagai berikut:

“Salah satu kelebihan SMK Nurul Jadid, khususnya dalam pendidikan kewirausahaan adalah keterpaduan dan sinergitas penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang didapat oleh siswa

secara natural melalui kegiatan sehari-hari di pesantren. Siswa SMK disini yang nota bene santri telah terbiasa hidup mandiri, karena kebutuhan sehari-harinya dilakukan sendiri. Misalnya, mandi, makan, mencuci pakaian, mengatur waktu dan keuangan, berkegiatan pesantren, seperti berjamaah, latihan pidato, mengaji, berolah raga, dan lain sebagainya. Nilai-nilai seperti kemandirian tadi, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja keras, kreatifitas, manajerial dan tanggung jawab sudah menjadi budaya hidup mereka. Ini yang kita harapkan, nilai-nilai tersebut betul-betul menjadi karakter dan perilaku mereka kelak setelah pulang ke masyarakat”.<sup>203</sup>

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, nampak bahwa keberadaan SMK NJ yang berada dinaungan pesantren Nurul Jadid memiliki kelebihan tersendiri. Dalam hal pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan SMK NJ mampu memaksimalkan potensi yang berupa budaya pesantren. Keberadaan siswa SMK NJ yang sekaligus adalah santri mukim pesantren, memiliki intensitas yang tinggi dalam proses penanaman nilai-nilai kewirausahaan. Selain itu, proses penanaman nilai-nilai kewirausahaan tersebut terjadi secara integratif-naturalistik. Lebih dari itu, nilai-nilai kewirausahaan yang tertanam dalam diri siswa yang santri tersebut, berkolaborasi dengan nilai-nilai akhlaqul karimah dan mental keagamaan yang juga tertanam dalam diri mereka. Dari sini bisa diharapkan terwujudnya santri yang entrepreneur dan entrepreneur yang santri.

Selain itu, pendidikan kewirausahaan di SMK NJ juga diintegrasikan melalui muatan lokal. Di SMK NJ muatan lokal yang dilaksanakan lebih diorientasikan pada karakteristik pesantren yang

---

<sup>203</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

diwujudkan dalam bentuk pendalaman keagamaan dan kepesantrenan. Dalam hal ini terjadi beberapa kegiatan, antara lain yaitu; pelaksanaan madrasah diniyah di SMK, pengajian al-Qur'an, pengajian kitab kuning, praktek ibadah dan lain-lain.

Adapun pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dengan muatan lokal keagamaan dan kepesantrenan di SMK NJ adalah dengan cara menguatkan nilai-nilai kewirausahaan melalui pelajaran diniyah, kajian dan pemahaman al-Qur'an serta kajian kitab kuning. Misalnya, ketika para siswa melaksanakan pembelajaran di Madrasah Aliyah, kajian al-Qur'an dan kitab kuning, para ustadz atau guru memberikan penekanan-penekanan khusus ketika materi pelajaran keagamaan tersebut memiliki korelasi dengan nilai-nilai kewirausahaan.

Contohnya, ketika seorang ustadz mengajar tentang sejarah hidup nabi Muhammad sebagai sosok yang dilahirkan sebagai anak yatim, sehingga beliau hidup mandiri, umur 6 tahun beliau sudah bekerja keras sebagai pengembala kambing, dan kemudian menjadi pedagang sampai puncak karir bisnisnya pada usia 37 tahun, dan kemudian senang menyendiri di Gua Hira selama 3 tahun sampai diangkat nabi dan rasul, maka ustadz tersebut menyampaikan bahwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* dalam islam merupakan perilaku Rasulullah yang luhur. Kewirausahaan dalam islam lebih dulu dipraktekkan sebelum diteorikan. Kewirausahaan dalam islam memiliki landasan fondasional dan operasional yang kuat. Kewirausahaan dalam islam merupakan kegiatan

yang bernilai ibadah dan cermin seorang muslim dan mukmin yang tangguh. Bahkan sampai permasalahan cara bertransaksi yang halal dan benar dalam berbisnis diajarkan dengan penekanan khusus ketika seorang guru mengajar kitab fiqh dalam bab Muamalah. Hal tersebut dijelaskan oleh Ahmad Mukarrom sebagai berikut:

“Muatan lokal yang dilaksanakan di SMK Nurul Jadid ini lebih diorientasikan pada karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Sehingga bentuk muatan lokal disini berupa pelaksanaan madrasah diniyah di SMK, kajian al-Qur’an dan pengajian kitab kuning dan praktek ibadah. Terkait dengan integrasi pendidikan kewirausahaan dengan pembelajaran keagamaan tersebut, maka para ustadz yang mengajar keagamaan tersebut, baik al-Qur’an, kitab kuning, tarikh islam (sejarah islam), dan lain-lain, akan memberikan tekanan-tekanan khusus ketika materi yang diajarkan memiliki korelasi dan relevansi dengan kewirausahaan. Seperti tarikh yang mengajarkan sejarah hidup Rasul, itu kan sebagai relevan sebagai konsep dan perilaku kewirausahaan ketika ustadz mengajar tentang tauhid bahwa ”manusia wajib berikhtiar namun Allah yang menakdirkan hasilnya” maka ustadz akan memberikan penekanan bahwa berikhtiar itu termasuk berbisnis dan berwirausaha. Begitu pula pelajaran agama yang lain, seperti akhlak dan fiqh. Apalagi ketika bab muamalah dalam fiqh, maka ustadz memberikan perhatian khusus pada transaksi-transaksi yang benar dan halal menurut islam. Nah itu semua, kita harapkan perpaduan pembelajaran semacam ini betul-betul bisa memberikan bekal yang cukup kepada siswa, baik dalam segi skill, kompetensi kewirausahaan dan mental spiritual”.<sup>204</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, integrasi pendidikan kewirausahaan dengan muatan lokal di SMK NJ lebih diorientasikan pada penguatan dan wawasan keagamaan tentang kewirausahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar lulusan SMK NJ tidak kehilangan karakteristiknya

---

<sup>204</sup> Ahmad Mukarrom (Tenaga Pendidik Bidang Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 03 Maret 2018.

sebagai siswa sekolah kejuruan yang disiapkan sebagai pekerja dan pengusaha, namun juga tetap berkarakter sebagai seorang santri.

Berangkat dari paparan data di atas, pengintegrasian kurikulum kewirausahaan di SMK NJ Paiton Probolinggo dilaksanakan dalam lima bentuk pengintegrasian kurikulum, yaitu; pertama, integrasi ke dalam semua mata pelajaran dengan cara mengadaptasi nilai-nilai kewirausahaan yang sudah diidentifikasi terlebih dahulu ke dalam RPP dan silabus.

Kedua, integrasi ke dalam kegiatan ekstra kulikuler yaitu olahraga dan pramuka. Dalam hal ini, terdapat beberapa nilai kewirausahaan yang ditanamkan melalui kegiatan ekstra kulikuler tersebut, antara lain; kerjasama tim, ketangguhan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan menentukan peluang. Ketiga, integrasi pendidikan kewirausahaan, melalui kegiatan pengembangan diri. Dalam hal ini terdapat beberapa kegiatan pengembangan diri, antara lain: layanan konseling, kegiatan rutin sekolah seperti upacara dan berjamaah, perilaku keteladanan, dan pengkonisian sekolah (SMK mini, memaksimalkan BLK dan LPK pesantren).

Keempat, Integrasi pendidikan kewirausahaan dengan kultur sekolah dan pesantren. Dalam hal ini, kultur pesantren Nurul Jadid yang menaungi SMK NJ, secara natural mengintegrasikan penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan sehari-hari santri.

Kelima, integrasi pendidikan kewirausahaan dengan muatan lokal. Muatan lokal yang di programkan di SMK NJ adalah muatan lokal

keagamaan dan kepesantrenan, dalam hal ini terdapat beberapa program muatan lokal, yaitu pelaksanaan madrasah diniyah, kajian al-Quran dan pengajian kitab kuning, serta praktik ibadah.

### 3. Integrasi Sistem Pembelajaran

Pembelajaran di SMK NJ Paiton dengan model pembelajaran terpadu (integratif) antara sekolah, dunia usaha atau industri dan pesantren. Dalam pelaksanaan pembelajaran ketiganya saling terkait dan saling mendukung, meskipun masing-masing dari ketiganya tetap memiliki prioritas dan penekanan tertentu. Misalnya, pembelajaran di sekolah lebih diprioritaskan dan diorientasikan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar (*basic skill*) yang diperlukan dalam pembelajaran praktik kerja nyata di dunia usaha atau industri. Sedangkan pembelajaran di pesantren, lebih diprioritaskan dan diorientasikan untuk membekali ilmu agama dan menanamkan mental spiritual dan akhlakul karimah yang kuat (*religiuitas*). Sementara pembelajaran di dunia usaha atau industri lebih diprioritaskan dan diorientasikan sebagai kegiatan praktik kerja nyata. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Akhmad Iqbal sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid ini pembelajarannya dilaksanakan secara terpadu dan sinergis antara sekolah, pesantren dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Ketiga-tiganya ini tidak bisa meninggalkan satu dengan yang lain, karena saling terkait dan saling melengkapi, sekolah tidak bisa menafikan pesantren, karena sekolah berada di naungan pesantren, begitu juga sebaliknya. Sekolah dan pesantren tidak bisa meninggalkan DUDI, karena DUDI tempat praktik para siswa. Begitu juga DUDI tidak bisa meninggalkan sekolah dan pesantren, karena sekolah dan pesantren memiliki otoritas penuh terhadap para siswa, sekaligus yang

membekali pengetahuan dan keterampilan dasar sebelum praktik di DUDI. Jadi semuanya saling terkait”.<sup>205</sup>

Selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standart dan kompetensi dasar yang telah ditentukan, pembelajaran di SMK NJ dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut, yaitu; pertama, guru menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran serta pentingnya tujuan pembelajaran tersebut kepada para siswa. Kedua, melaksanakan pembelajaran dengan metode-metode dan pembelajaran yang efektif, seperti kombinasi antara metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan lain-lain. Untuk pembelajaran produktif, maka lebih ditekankan melalui metode praktik. Ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Dalam hal ini, guru melakukan evaluasi dan menyampaikannya kepada para siswa, sehingga mereka mendapatkan kepastian apa yang telah mereka kuasai dan apa yang harus mereka pelajari kembali. Hal tersebut dijelaskan oleh Amirulin Najah sebagai berikut:

“Kalau saya mengajar itu, intinya berupaya mengatur para siswa untuk mencapai standart kompetensi yang telah ditentukan atau istilahnya tujuan pembelajaran. Sehingga ketika saya mengajar, pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan materi yang akan saya ajarkan serta tujuan-tujuannya. Agar mereka tahu tujuan dan pentingnya mempelajari materi tersebut. Setelah mereka fokus, maka saya masuk pada pelaksanaan mengajar. Biasanya kalau saya mengajar, metode yang dipakai adalah kombinatif dari metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan lain-lain, sesuai karakter materi yang akan saya ajarkan. Setelah itu saya evaluasi. Intinya dengan evaluasi ini para siswa mendapatkan informasi tentang apa yang telah dipahami dan dikuasai, serta apa yang belum dikuasai dan harus dipelajari lagi”.<sup>206</sup>

---

<sup>205</sup> Akhmad Iqbal (Guru Kewirausahaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

<sup>206</sup> Amirulin Najah (Guru PAI SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 05 Maret 2018.

Hasil wawancara di atas, menegaskan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di SMK NJ, diutamakan pada komponen normatif dan adaptif. Adapun yang produktif lebih ditekankan pada praktik langsung untuk memberikan keterampilan dasar.

Adapun pembelajaran di pesantren oleh para siswa SMK NJ dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kepesantrenan di luar jam sekolah. Pelaksanaan pembelajaran di pesantren dalam hal ini ditangani oleh pesantren melalui biro-biro terkait. Seperti dalam hal ilmu pengetahuan agama, praktik ibadah dan pembinaan mental spiritual serta *akhlak al-karimah*, ditangani oleh Biro Kepesantrenan. Sementara dalam hal pengembangan *skill*, keterampilan dan wirausaha, ditangani oleh Biro Pengembangan dan Usaha. Hal tersebut dijelaskan oleh Abd. Manaf sebagai berikut:

“Selain pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, para siswa SMK Nurul Jadid juga mengikuti pembelajaran di pesantren. Jadi, setelah pulang dari sekolah ini, mereka pulang ke asrama masing-masing di pesantren ini. Nah disana oleh pengurus pesantren, telah disiapkan kurikulum kepesantrenan yang juga harus diikuti oleh semua santri, termasuk para siswa SMK tersebut. Mulai dari ngaji Al-Quran, ngaji kitab baik kepada pengasuh dan para para ustadz, praktik ibadah dan pembedakan karakter santri. Bahkan dalam hal pengembangan bakat, minat dan skill keterampilan juga difasilitasi dan diprogram oleh pesantren. Dengan demikian, pada hakikatnya, para siswa SMK Nurul Jadid ini, belajarnya full dalam satu hari”.<sup>207</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nampaknya pembelajaran di pesantren baik pembelajaran tentang ilmu pengetahuan agama, praktik

---

<sup>207</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 02 Maret 2018.

ibadah, mental spiritual dan pembelajaran yang bersifat kewirausahaan mulai praktik kerja, pelatihan keterampilan sampai pada sertifikasi profesi dilakukan secara serius, sistematis, dengan model integratif. Pembelajaran yang terpadu sebagaimana di SMK NJ dengan pesantren. Nurul Jadid Paiton ini memberikan harapan yang tinggi untuk terwujudnya visi dan tujuan kelembagaan baik sekolah maupun pesantren.

Selanjutnya terkait dengan pembelajaran di dunia usaha dan industri di SMK NJ dilaksanakan program dan bimbingan praktik kerja nyata secara langsung pada dunia usaha dan industri, atau yang disebut prakerin. Prakerin dimaksudkan agar para siswa mendapatkan beberapa kompetensi kerja, antara lain; mendapatkan pengalaman kerja secara riil, memahami sikap dan disiplin kerja, mendapatkan kompetensi kerja sesuai standart di dunia usaha dan industri, mengetahui cara bekerja sama dalam dunia usaha dan industri, serta mendapat pengalaman dalam hal mencari solusi dari problem kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Fanani sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan pengalaman kerja pada siswa secara riil, di SMK Nurul Jadid, sebagaimana SMK yang lain, dilaksanakan program prakerin atau praktik kerja industri. Prakerin ini banyak manfaatnya kepada siswa antara lain; siswa akan mendapat pengalaman kerja secara riil di dunia usaha atau industri, siswa bisa tahu bagaimana tentang sikap dan disiplin dalam bekerja, bagaimana standar kompetensi kerja yang dtuhkan oleh dunia usaha dan industri. Disamping itu, mereka juga mendapat pengalaman nyata bagaimana cara bekerja sama dalam bekerja dan juga cara memecahkan masalah dalam menjalani proses usaha dan bekerja. Jadi, prakerin itu sangat penting bagi siswa sehingga dalam pelaksanaannya, para siswa dibimbing oleh instruktur atau karyawan yang bekerja dalam suatu bidang pekerjaan. Selain itu,

ada guru yang mengawal sebagai pembimbing lapangan selama siswa melakukan prakerin tersebut”.<sup>208</sup>

Hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa pembelajaran praktik kerja yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri, dilakukan dalam suatu program yaitu prakerin. Dalam menjalankan program tersebut para siswa mendapat bimbingan kerja dari instruktur dan karyawan serta pengawalan dari guru. Dalam rangka memastikan hal tersebut, pihak SMK NJ terlebih dulu membuat kesepakatan dengan tempat usaha atau industri yang akan ditempati prakerin siswa. Ada beberapa poin yang disepakati bersama dalam hal ini, antara lain; pihak dunia usaha atau industri bersama pihak sekolah memberikan orientasi kerja kepada para siswa sebelum pelaksanaan prakerin, pihak dunia usaha dan industri menyediakan pembimbing kerja untuk para siswa, para siswa mendapat pekerjaan di dunia usaha atau industri tersebut, siswa dapat berinteraksi dengan pekerja, siswa diperlakukan seperti karyawan biasa (karya siswa) artinya siswa diberi tugas kerja dan kepercayaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan di tempat usaha dan industri tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Fanani sebagai berikut:

“Untuk memastikan pelaksanaan prakerin sesuai yang diharapkan, maka kami dari pihak SMK Nurul Jadid melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak DUDI, yang kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan tentang prakerin. Misalnya, melaksanakan orientasi kerja kepada siswa sebelum prakerin, adanya bimbingan prakerin dari pihak DUDI yang biasanya dari karyawan senior, adanya pekerjaan yang jelas untuk dilakukan oleh siswa, siswa dapat berinteraksi dengan pekerja lain, dan siswa

---

<sup>208</sup> Ahmad Agus Fanani (Tenaga Pendidik, Waka Humas dan DUDI di SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 04 Maret 2018.

diperlakukan sebagai layaknya karyawan biasa di DUDI tersebut. Kesempatan-kesempatan tersebut penting agar tidak terjadi miskomunikasi dan mispersepsi antara pihak SMK Nurul Jadid Paiton dan DUDI. Alhamdulillah selama ini prakerin yang kita laksanakan berjalan baik-baik saja. Ya meskipun terkadang ada kendala-kendala teknis, namun secara umum prakerin yang kita lakukan bisa berjalan baik”.<sup>209</sup>

Adapun pembelajaran kewirausahaan di SMK NJ Paiton dilakukan dalam bentuk kegiatan dan pengalaman usaha dan bisnis secara praktik kepada siswa. Dalam masalah ini ada dua hal yang dilakukan yaitu pengalaman praktik yang bersifat *skill* dan pengalaman bisnis secara langsung. Adapun dalam upaya pemberian pengalaman yang diorientasikan untuk keterampilan (*skill*) selain yang melekat pada tujuan kurikulum di setiap program keahlian yang ada (kurikuler) juga dilakukan dalam bentuk SMK Mini dan kegiatan pelatihan keterampilan yang terintegratif dengan pesantren. Hal tersebut terungkap dalam wawancara peneliti dengan Iqbal sebagai berikut:

“Di SMK Nurul Jadid ini selain di ajarkan nilai-nilai dan sikap kewirausahaan siswa juga di berikan pengalaman praktik dalam usaa dan bisnis. Dalam hal pengalaman usaha kami tekankan terlebih dahulu dalam penguasaan keterampilan atau skil agar mereka punya bekal untuk hidup mandiri. Di SMK Nurul Jadid ini ada program SMK mini yang sementara ini bergerak dalam produk sablon dan pembuatan benner. Selain itu ada program integratif dnga pesantren berupa latihan kerja yang di pusatkan di Balai Latiha Kerja (BLK) pesantren”.<sup>210</sup>

Data sebagaimana di atas, menjelaskan bahwa pemberian pengalaman kerja dalam bentuk keterampilan atau *skill* di SMK NJ

<sup>209</sup> Ahmad Agus Fanani (Tenaga Pendidik, Waka Humas dan DUDI di SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 04 Maret 2018.

<sup>210</sup> Akhmad Iqbal (Tenaga Pendidik Bidang Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

dirancang dalam bentuk program SMK Mini yang sementara ini bergerak dalam bidang sablon dan pembuatan banner. Selain itu, terdapat rancangan program integratif dengan pesantren berupa program kegiatan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pesantren yang memang disediakan untuk semua santri sesuai bakat dan minat. Di antara program keterampilan yang ada di BLK tersebut adalah bidang otomotif, sablon, peternakan, industri tempe, konveksi dan budi daya bakau.

Sementara itu, dalam hal program pengalaman bisnis secara langsung, SMK NJ merancang kegiatan latihan bisnis yang meliputi beberapa tahap, antara lain; menganalisa peluang pasar, menemukan ide dan gagasan, membuat produk baru, melakukan sosialisasi dan promosi untuk mencari pelanggan, dan selanjutnya melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Dalam hal menganalisa pesan, guru kewirausahaan mengajak para siswa melakukan penelitian dan pengamatan terhadap peluang pasar dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Mukarrom sebagai berikut:

“Dalam menganalisa peluang pasar, saya arahkan siswa terjun langsung ke objek sasaran pasar untuk meneliti dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kebutuhan pasar. Sehingga mereka mau tidak mau harus melakukan observasi dan wawancara. Ini saya maksudkan agar mereka biasa melakukan prinsip-prinsip ilmiah untuk mendapatkan hasil yang akurat, meskipun itu masih sangat dasar sesuai kondisi perkembangan mereka”.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> Ahmad Mukarrom (Tenaga Pendidik II Bidang Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

Adapun dalam kegiatan yang dilakukan siswa untuk menemukan ide gagasan, rumusan lengkapnya adalah para siswa diarahkan berpraktik langsung membuat perencanaan dan menciptakan sistem kerja berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan ketika menganalisis pasar. Hal ini dimaksudkan agar para siswa memiliki kreatifitas dalam memikirkan ide dan gagasan. Hal ini dijelaskan oleh nadif, salah satu siswa SMK NJ sebagai berikut:

“Dalam fase menemukan ide dan gagasan bisnis menurut kami merupakan fase yang penting dan menentukan. Untuk itu kami dituntut memiliki kreativitas dalam memikirkan ide dan gagasan. Yang kami lakukan ini dengan cara berdiskusi dengan teman-teman siswa yang lain, mengumpulkan banyak ide, mempertimbangkan serta memutuskan ide yang terbaik dan terjangkau untuk dilakukan. Hal itu kami lakukan tidak lepas dari arahan guru pembimbing kami”.<sup>212</sup>

Selanjutnya, dalam melaksanakan fase membuat produk, hal tersebut didasarkan pada keputusan ide dan gagasan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini siswa diarahkan agar di dalam membuat produk selalu memakai prinsip-prinsip kewirausahaan dalam produksi, seperti asas kemanfaatan dan kebaruan. Untuk itu para siswa dituntut untuk pandai berinovasi dengan menciptakan penemuan baru, pengembangan, penggandaan atau sintesis. Di samping itu dalam fase ini, siswa diajarkan dan dilatih dalam mengelola resiko-resiko yang akan dihadapi sebagai konsekwensi bisnis. Penjelasan ini sebagaimana dikemukakan oleh Iqbal sebagai berikut:

---

<sup>212</sup> Nadif Prasesa (Siswa SMK NJ kelas XI Prodi Multimedia), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

“Sebagai langkah lanjutan setelah menentukan ide dan gagasan, siswa diarahkan untuk segera membuat produk sesuai ide dan gagasan yang ada itu. Slalu saya ingatkan bahwa dalam membuat produk harus senantiasa mempertimbangkan asas manfaat dengan kebaruan. Karena itu merupakan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam produksi. Dengan demikian siswa belajar berinovasi untuk menemukan produk yang baru dan tidak meniru-niru. Nah disana pula mereka belajar berani mengambil resiko sebagai bentuk konsenkweni bisnis”.<sup>213</sup>

Adapun dalam melaksanakan sosialisasi dengan promosi dalam rangka mencari pelanggan sebagai tahap lanjutan setelah membuat produk baru, para siswa melakukan dengan cara mengadakan unjuk karya dan membuka bazar pada event-event tertentu seperti pada acara Haflatul Imtihan dan Harlah Pesantren. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Iqbal sebagai berikut:

“Untuk memberikan pengalaman langsung tentang strategi pemasaran, seperti bagaimana mensosialisasikan dan mempromosikan produk, kami selalu mengikut sertakan para siswa pada acara unjuk karya yang biasanya diadakan oleh pemerintah. Selain itu, dalam event-event tertentu, seperti acara Haflatul Imtihan dan Harlah Pesantren, kami arahkan agar para siswa membuka bazar atau gerai untuk memasarkan produk-produk mereka. Alhamdulillah, selama ini, setiap Haflah Imtihan dan Harlah Pesantren yang menjadi rutinitas tahunan di pesantren ini, SMK Nurul Jadid slalu berpartisipasi dalam mengadakan bazar. Sebagaimana biasa, kalau acara Haflah seperti itu, masyarakat yang hadir, mulai wali santri, alumni, masyarakat sekitar ditambah para santri yang aktif bisa ran yang hadir. Sehingga hasilnya pun, ya lumayan”.<sup>214</sup>

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi produk, SMK NJ menjadikan momentum

<sup>213</sup> Akhmad Iqbal (Tenaga Pendidik Bidang Studi Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

<sup>214</sup> Akhmad Iqbal (Tenaga Pendidik Bidang Studi Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

Haflatul Imtihan dan Harlah Pesantren sebagai ajang unjuk karya sekaligus praktik pemasaran. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri, mengingat momentum tersebut merupakan even tahunan pesantren yang acaranya cukup besar. Dalam tradisi pesantren, acara Haflatul Imtihan dan Harlah Pesantren menjadi even tahunan yang memiliki nilai sakralitas tersendiri.

Selanjutnya, sebagai tahap akhir pembelajaran dan praktik bisnis secara langsung, para siswa melakukan refleksi atau evaluasi untuk mencari sisi kelebihan maupun kekurangan dari proses bisnis yang telah dilakukan. Dalam hal ini, para siswa diarahkan untuk mengevaluasi mulai dari awal kegiatan sampai hasil yang diperoleh, melalui rapat evaluasi bersama. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Iqbal sebagai berikut:

“Untuk mengetahui berhasil tidaknya proses pembelajaran dan praktik bisnis yang telah dilakukan, maka para siswa diarahkan untuk melakukan refleksi atau evaluasi. Karena refleksi atau evaluasi itu penting sebagai acuan dalam langkah-langkah bisnis selanjutnya. Dengan evaluasi itu pula, mereka akan menemukan letak kekurangan dan kelebihan dalam proses yang telah dilakukan, serta akan tau bagaimana menindaklanjuti atau merespon temuan-temuan tersebut. Sehingga ketika harus melakukan kembali proses-proses berbisnis tersebut, mereka sudah tidak boleh lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin dan akan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Hal tersebut karna berwirausaha itu membutuhkan proses panjang dan penuh dengan tantangan untuk menjadi sukses”.<sup>215</sup>

Berdasarkan beberapa paparan di atas, ditemukan bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan di SMK NJ Paiton, adalah pembelajaran integratif–interkoneksi, antara sekolah, pesantren, dan dunia usaha.

---

<sup>215</sup> Akhmad Iqbal (Tenaga Pendidik Bidang Studi Kewirausahaan), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Februari 2018.

Artinya, dalam pelaksanaan proses pembelajaran di SMK NJ, tiga komponen tersebut sama-sama terlibat dan tidak bisa terpisah antara yang satu dengan yang lain, terutama dalam penanaman keterampilan, *skill* dan karakter. Kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi para siswa. Pengintegrasian pembelajaran semacam ini, menjadi kelebihan tersendiri bagi SMK NJ, sebagai SMK yang berada dalam naungan pesantren, dibanding dengan SMK yang non-pesantren. Jika, SMK yang non-pesantren hanya berinteraksi dengan dunia usaha saja, maka SMK yang berbasis pesantren akan berinteraksi dan berkoneksi dengan pesantren yang menaungi, serta dengan dunia usaha yang jadi partnernya.

Dengan demikian, maka integrasi pembelajaran di SMK NJ melibatkan tiga sub sistem, yaitu sub sistem sekolah, pesantren dan dunia usaha atau dunia industri. Ketiga sub sistem tersebut saling berkoordinasi yang kuat antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan, masing-masing dari tiga sub sistem itu menjadi tempat belajar dan berlatih para siswa.

#### 4. Integrasi Keuangan

Di SMK NJ Paiton pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan kebijakan pesantren yaitu sentralisasi keuangan. Integrasi keuangan melalui sentralisasi ini dimaksudkan agar pesantren bisa mengetahui potensi keuangan yang ada, serta bisa membuat kebijakan anggaran pesantren secara holistik, efisien dan merata. Selain itu pesantren dapat

mengontrol dan mengevaluasi keuangan secara mudah dan transparan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kyai Zaki sebagai kepala biro keuangan sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan diseluruh lembaga di bawah naungan pesantren Nurul Jadid, ya termasuk SMK Nurul Jadid Paiton, dilakukan melalui kebijakan sentralisasi keuangan. Sentralisasi ini dimaksudkan agar pesantren bisa mengetahui potensi keuangan yang ada, sehingga pesantren bisa mengatur anggaran secara holistik, efisien dan merata. Holistik artinya menyeluruh dan tidak sektoral, sementara efisien saya maksudkan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan pesantren. Adapun merata maksudnya, sistem sentralisasi keuangan memungkinkan pesantren untuk melakukan subsidi silang antara lembaga pesantren yang besar pemasukannya dengan lembaga yang kecil pemasukannya. Jadi pengembangan lembaga bisa merata dan bisa sama-sama berkembang.”<sup>216</sup>

Penjelasan di atas, dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Faizin selaku sekretaris pesantren yang menjelaskan sebagaimana berikut:

“Memang sentralisasi keuangan termasuk kebijakan pesantren yang dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan dana pesantren secara keseluruhan, serta bagaimana pengaturan penganggaran dan pendistrsiannya. Dengan sentralisasi keuangan pesantren bisa berbuat lebih banyak dalam mengembangkan lembaga-lembaga yang ada tanpa ada perbedaan pelayanan. Selain itu, agar kontrol-kontrol dan evaluasi keuangan lebih gampang, karena sudah satu pintu.”<sup>217</sup>

Pelaksanaan sistem sentralisasi keuangan sebagaimana hasil data di atas, dilaksanakan dengan cara melaksanakan perencanaan bersama antara pesantren dan lembaga-lembaga yang ada termasuk SMK NJ. Dalam hal ini, rapat perencanaan dilakukan di akhir tahun, untuk

<sup>216</sup> K. Zaki (Biro Keuangan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 13 April 2018.

<sup>217</sup> Faizin (Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 13 April 2018.

merencanakan anggaran pada tahun berikutnya selama satu tahun. Artinya, SMK NJ juga diharuskan untuk membuat anggaran belanja selama satu tahun ke depan, sebagaimana lembaga-lembaga yang lain. Rencana anggaran dari lembaga-lembaga tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam rapat pleno dan diputuskan dalam rapat tersebut oleh pesantren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bendahara SMK NJ yaitu Dian Isnaini sebagaimana berikut:

“Dalam pelaksanaan sentralisasi keuangan oleh pesantren, pihak pesantren Nurul Jadid diminta untuk membuat rencana anggaran belanja selama satu tahun, yang kemudian rencana anggaran tersebut dimusyawarahkan dalam rapat bersama antara pesantren dan lembaga termasuk SMK Nurul Jadid. Hal itu biasanya dilakukan setiap akhir tahun.”<sup>218</sup>

Integrasi pengelolaan keuangan di SMK NJ melalui sentralisasi keuangan sebagaimana di atas, diatur secara sistemik dan melalui satu pintu. Artinya, aturan lalu lintas keuangan baik alur masuk dan keluarnya keuangan dilakukan secara satu pintu yaitu pesantren. Dengan demikian semua pemasukan keuangan dimasukkan ke pesantren, dengan istilah biaya pendidikan santri. Biaya pendidikan santri ini adalah meliputi semua pembiayaan santri, mulai dari SPP sekolah, pondok, biaya makan dan pembiayaan wajib lainnya. Adapun proses pembiayaannya dilakukan melalui beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan pesantren Nurul Jadid, dan dikirim langsung ke rekening pesantren. Hal tersebut

---

<sup>218</sup> Dian Isnaini (Bendahara SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

sebagaimana dijelaskan oleh Dian Isnaini. Selaku bendahara SMK NJ sebagai berikut:

“Dengan sistem sentralisasi keuangan pesantren, maka proses pembayaran biaya pendidikan santri dilakukan secara langsung ke rekening pesantren melalui beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan pesantren, seperti Bank Jatim, BRI dan BNI. Jadi para siswa yang notabene santri tidak usah membayar ke sekolah karena semua biaya pendidikan santri sudah dibayar melalui satu pintu pembayaran tersebut”.<sup>219</sup>

Hasil wawancara di atas, dikuatkan oleh data dokumentasi peneliti sebagai mana gambar di bawah ini, yang menginformasikan tentang alur Pembayaran Biaya Pendidikan Santri (BPS) pondok pesantren Nurul Jadid Paiton.



Berdasarkan hasil dokumentasi di atas, didapatkan penjelasan bahwa alur pembayaran Biaya Pendidikan Santri (BPS) dilakukan oleh santri atau wali santri, setiap awal tri wulan, dengan meminta terlebih

<sup>219</sup> Dian Isnaini (Bendahara SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

dahulu nomor Virtual Account (VA) kepada SMK NJ (Satuan Pendidikan Santri), dan kemudian membayar langsung ke rekening pesantren Nurul Jadid Paiton, melalui beberapa bank yang bekerja sama dengan SMK NJ seperti Bank Jatim, BRI dan BNI.

Data hasil dokumentasi tersebut senada dengan hasil observasi peneliti yang mendapati beberapa santri atau siswa yang sedang membayar Biaya Pendidikan Santri melalui ATM BRI yang berada di dalam kompleks pesantren yang memang diadakan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan pesantren sebagaimana disebut di atas. Para santri tersebut cukup membayar lewat ATM yang tersedia dan langsung membayar dengan mengirim langsung ke rekening pesantren, tanpa harus ke sekolah masing-masing.

Adapun proses pencairan anggaran dari pesantren ke SMK NJ, dilakukan melalui mekanisme pengajuan anggaran bulanan yang disusun oleh pihak SMK NJ berdasarkan anggaran tahunan yang sudah disepakati dalam rapat pleno. Berdasarkan pengajuan anggaran bulanan itulah pesantren mengeluarkan pendanaan ke pihak lembaga-lembaga termasuk SMK NJ. Hal tersebut dijelaskan oleh Dian Isnaini, selaku bendahara SMK NJ sebagai berikut:

“Kalau proses pencairan dana untuk SMK Nurul Jadid, mekanismenya sama dengan lembaga-lembaga yang lain, yaitu melalui pengajuan anggaran belanja bulanan oleh masing-masing lembaga. Berdasarkan pengajuan tersebut maka pesantren setiap bulan mengeluarkan dana sesuai kebutuhan masing-masing

lembaga, mulai uang operasional, uang semester dan lain-lain, sesuai pengajuan yang ada.”<sup>220</sup>

Adapun sistem evaluasi keuangan pesantren dilakukan dengan pelaksanaan rapat evaluasi bersama yang langsung dikoordinir oleh pesantren. Dalam hal ini, pesantren mengadakan rapat evaluasi keuangan secara khusus pada setiap akhir tahun. Di samping itu, pesantren meminta laporan bulanan disetiap proses pencairan. Artinya, pihak lembaga diharuskan melampirkan laporan penggunaan anggaran bulanan yang lalu sebelum mencairkan anggaran bulan yang akan datang. Selain itu pesantren Nurul Jadid membentuk Badan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit kinerja pegawai dan keuangan lembaga-lembaga. Hal tersebut dijelaskan oleh Kyai Zaki sebagai biro keuangan pesantren, sebagai berikut:

“Dalam hal evaluasi keuangan lembaga-lembaga pesantren disini kami lakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, rapat tahunan khusus keuangan. Dalam rapat tersebut semua kepala dan bendahara lembaga kami undang bersama-sama mengevaluasi anggaran tahun yang lalu sekaligus merencanakan tahun yang akan datang. Selain rapat evaluasi tahunan tersebut, pesantren mewajibkan semua lembaga untuk membuat laporan bulan penggunaan anggaran. Caranya, laporan tersebut dijadikan syarat pencairan anggaran bulan yang akan datang, begitu seterusnya. Disamping itu, pesantren membentuk Dewan Pengawas, yang salah satu tugasnya mengawasi dan mengaudit keuangan di lembaga-lembaga pesantren.”<sup>221</sup>

Hasil wawancara di atas, dikuatkan dengan data dokumentasi peneliti sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini, yang

<sup>220</sup> Dian Isnaini (Bendahara SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

<sup>221</sup> Kyai Zaki (Kepala Biro Keuangan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 13 April 2018.

menginformasikan proses pemeriksaan keuangan di SMK NJ oleh tim audit Badan Pengawas Pesantren.



Dari data dokumentasi di atas, diinformasikan tentang proses berlangsungnya pemeriksaan keuangan di kantor SMK NJ. Dalam proses tersebut, tim audit dari Badan Pengawas Pesantren mendatangi secara langsung ke SMK NJ guna melaksanakan Audit Keuangan. Dengan demikian, diketahui bahwa evaluasi keuangan dilakukan oleh pesantren, sebagai bentuk integrasi sistem Keuangan SMK NJ dengan pesantren Nurul Jadid Paiton.

Berdasarkan data-data sebagaimana di atas, dapat dipahami bahwa Integrasi Keuangan di SMK NJ dengan pesantren Nurul Jadid terjadi melalui kebijakan pesantren yaitu Sentralisasi Keuangan. Sistem Sentralisasi Keuangan tersebut kemudian merekomendasikan bentuk integrasi pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan lalu lintas keuangan satu pintu serta evaluasi keuangan.

##### 5. Integrasi Sarana dan Prasarana

Sebagai sekolah yang berada dan dikelola oleh pesantren, sarana dan prasarana di SMK NJ Paiton juga dikelola melalui pola integrasi dengan pesantren. Artinya SMK NJ juga bisa mengakses dan menggunakan sarana dan prasarana pesantren, seperti lokasi bangunan, lapangan, tempat ibadah, asrama, kamar mandi, transportasi, komunikasi, balai latihan dan lain-lain. Hal tersebut disampaikan oleh Fifin Priandono selaku wakil kepala sarana dan prasarana SMK NJ sebagai berikut:

“Mengenai sarana dan prasarana di SMK Nurul Jadid ini, berangkat dari pemahaman bahwa semua infrastruktur yang ada disini, merupakan milik pesantren. Sehingga semua sarana dan prasarana di SMK Nurul Jadid inipun hakikatnya milik pesantren meskipun pesantren memperuntukkan penggunaannya secara luas kepada SMK Nurul Jadid. Berangkat dari pemahaman integrasi ini juga, SMK Nurul Jadid juga boleh mengakses dan menggunakan fasilitas pesantren yang lain, seperti lokasi bangunan, lapangan, tempat ibadah, asrama, kamar mandi, transportasi, komunikasi, balai latihan dan lain sebagainya. Dengan demikian, SMK Nurul Jadid bisa dikatakan sebagai pemiliknya, dalam tanda petik ya, semua sarana dan prasarana yang ada disini. Karena ya itu tadi, SMK Nurul Jadid adalah bagian yang tak terpisahkan dari pesantren Nurul Jadid.”<sup>222</sup>

Pelaksanaan integrasi sarana dan prasarana sebagaimana di atas dilakukan melalui prosedur perizinan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak SMK NJ kepada pihak pesantren. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi bentrokan waktu penggunaan dengan lembaga yang lain. Hal tersebut dijelaskan oleh Kyai Muhammad Imdad selaku Kepala Biro Kepesantrenan, sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana yang ada di pesantren Nurul Jadid ni bebas diakses dan dipergunakan oleh semua lembaga yang ada di sini. Hanya saja pihak lembaga harus ijin kepada pesantren agar

<sup>222</sup> Fifin Proandono (Waka Sarana Prasarana SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

pesantren bisa mengatur waktunya, sehingga tidak terjadi bentrokan penggunaan dengan lembaga yang lain. Seperti lapangan umpamanya, kan tidak maksimal penggunaannya jika ada dua lembaga yang menggunakannya dalam waktu yang bersamaan, apa lagi dengan kegiatan yang berbeda. Selain itu, agar tidak terjadi rebutan yang tentu tidak baik untuk kebersamaan kita di pesantren ini.”<sup>223</sup>

Berdasarkan paparan beberapa data di atas, didapatkan informasi bahwa integrasi sarana dan prasarana di SMK NJ dengan pondok pesantren Nurul Jadid berangkat dari keberadaan SMK NJ sebagai bagian tak terpisahkan dari pondok pesantren, bahkan SMK NJ diposisikan sebagai salah satu unit pelaksana visi dan misi pesantren Nurul Jadid.

Sarana dan prasarana pesantren sendiri terkelompokkan menjadi dua macam; pertama, sarana dan prasarana yang telah dikhususkan kepada lembaga tertentu, seperti bangunan sekolah, tanah yang ditempati sekolah, kantor sekolah dan sebagainya. Kedua adalah sarana dan prasarana pesantren yang sifatnya umum dan bisa dipakai bersama. Adapun pelaksanaan integrasi sarana dan prasarana dengan pesantren, dilakukan melalui prosedur perizinan dari pihak lembaga kepada pihak pesantren, khususnya dalam penggunaan sarana dan prasarana yang umum, seperti lapangan pesantren, balai latihan kerja santri, maupun fasilitas transformasi seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya.

## 6. Integrasi Iklim Sekolah

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Imdad Rabbani selaku kepala Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada tanggal 15 April 2018.

Iklim sekolah merupakan salah satu hal penting untuk menanamkan karakter siswa yang diinginkan. SMK NJ sebagai sekolah yang terintegrasi dengan pesantren memiliki tujuan mencetak siswa (yang notabene santri) menjadi sosok yang memiliki karakter sebagai santri yang entrepreneur dan entrepreneur yang santri. Hal inilah yang kemudian berupaya diwujudkan melalui integrasi iklim sekolah dengan pesantren, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Manaf selaku Kepala SMK NJ sebagai berikut:

“Salah satu kelebihan SMK Nurul Jadid ini, yaitu sekolah ini terintegrasi dengan pesantren. Siswa SMK Nurul Jadid adalah santri di pondok pesantren ini, yang selama 24 jam berada di pesantren. Sehingga karakter siswa SMK Nurul Jadid adalah karakter santri itu sendiri. Dengan demikian dalam diri siswa SMK Nurul Jadid ini secara otomatis tertanam nilai-nilai agama yang kuat dengan karakter santri yang kental melalui pembiasaan di pesantren ini. Sehingga nantinya siswa SMK Nurul Jadid ini menjadi sosok yang kuat agamanya, memiliki karakter profesional dan berprestasi. Dengan kata lain menjadi santri yang entrepreneur dan entrepreneur yang santri. Saya kira begitu.”<sup>224</sup>

Hasil wawancara di atas selaras dengan data dokumentasi yang di

dapat oleh peneliti, tentang paparan visi dan misi SMK NJ sebagaimana tertulis dalam brosur penerimaan peserta didik baru SMK NJ sebagai berikut:

“Visi: Menjadi SMK berkualitas yang agamis, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan.

Misi:

- a. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sekolah berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- b. Menanamkan karakter melalui kegiatan pembiasaan.
- c. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis TIK.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

<sup>224</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

- e. Mengembangkan pengelolaan sekolah, meliputi SDM, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, maupun administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada peserta didik.
- f. Mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik di bidang akademik dan non akademik dalam rangka meningkatkan daya saing.
- g. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan".<sup>225</sup>

Berdasarkan paparan visi dan misi sebagaimana di atas, kompetensi agama, karakter yang kuat, dan berprestasi di bidangnya secara profesional, merupakan cita-cita utama SMK NJ. Cita-cita tersebut menjadi sangat realistis dan logis karena SMK NJ berada di lingkungan pondok pesantren Nurul Jadid, sehingga para siswa di sekolah ini merupakan santri pondok pesantren. Para siswa yang notabene santri, tentu memiliki intensitas yang tinggi dalam proses penanaman kagamaan baik secara keilmuan maupun pengalamannya. Di samping itu, pembentukan karakter santri pada diri mereka dapat terlaksana secara maksimal melalui pembiasaan-pembiasaan di pesantren, seperti perilaku disiplin, tata aturan, sederhana, mandiri, pengabdian yang tulus, kebersamaan persaudaraan dan lain sebagainya. Sementara di sekolah, siswa diajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan kompetensi *entrepreneurship*.

Dengan demikian, integrasi iklim sekolah dan pesantren terlaksana secara otomatis seiring dengan keberadaan SMK NJ di tengah-tengah lingkungan pesantren Nurul Jadid. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abdul Manaf selaku kepala sekolah sebagai berikut:

---

<sup>225</sup> Dokumen Visi dan Misi Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

“Jadi, integrasi iklim SMK Nurul Jadid dengan pesantren ini sifatnya otomatis, seiring keberadaannya di lingkungan dan kompleks pesantren Nurul Jadid. Selain itu, siswa-siswa SMK Nurul Jadid ini merupakan santri tetap pondok pesantren Nurul Jadid, sehingga ketika mereka ada di sekolah walaupun sebutannya siswa, pada hakikatnya mereka tetap santri pesantren Nurul Jadid”<sup>226</sup>.

Integrasi iklim SMK NJ dengan pesantren sebagaimana di atas, nampaknya bukan hanya strategi dalam rangka mewujudkan visi misi SMK NJ, namun juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pesantren Nurul Jadid. Hal tersebut diungkapkan oleh Faizin selaku Sekretaris Umum pesantren Nurul Jadid sebagaimana berikut:

“Keberadaan SMK Nurul Jadid sebagai salah satu unit pelaksana pesantren, meniscayakan integrasi SMK Nurul Jadid dengan pesantren, termasuk dalam hal iklim dan budayanya. Sebab, kalau kita tarik kepada acuan dasarnya, semuanya harus bertolak dari cita-cita besarnya pesantren, yang secara global tertuang dalam visi misi pesantren Nurul Jadid. Dengan kata lain, terwujudnya santri yang menjadi entrepreneur dan entrepreneur yang santri juga menjadi cita-cita pesantren yang harus diorientasikan bersama oleh unit-unit dengan lembaga di bawahnya.”<sup>227</sup>

Paparan data sebagaimana di atas, memiliki kecocokan dengan data dokumentasi peneliti tentang visi dan misi pesantren, bahkan nilai-nilai dan karakter kesantrian di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton sebagaimana yang tertuang dalam Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri, sebagai berikut:

“Visi: Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Misi:

<sup>226</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

<sup>227</sup> Faizin (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

- a. Penanaman keimanan, ketaqwaan kepada Allah dan pembinaan akhlak al karimah.
- b. Pendidikan keilmuan dan pengembangan wawasan.
- c. Pengembangan bakat dan minat.
- d. Pembinaan keterampilan dan keahlian.
- e. Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian.
- f. Penanaman tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Trilogi Santri:

- a. Memperhatikan kewajiban-kewajiban fardlu 'ain.
- b. Mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar.
- c. Berbudi luhur kepada Allah dan makhluk.

Panca Kesadaran Santri:

- a. Kesadaran beragama.
- b. Kesadaran berilmu.
- c. Kesadaran bermasyarakat.
- d. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- e. Kesadaran berorganisasi.”<sup>228</sup>

Data tentang visi, misi, trilogi santri dan panca kesadaran santri pondok pesantren Nurul Jadid sebagaimana di atas merupakan acuan dasar dalam membentuk iklim dan budaya di lingkungan pesantren, dan lembaga-lembaga di bawah pesantren tak terkecuali SMK NJ. Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan di atas, bisa diketahui bahwa integrasi iklim SMK NJ dengan pondok pesantren terpolarisasikan secara otomatis, seiring dengan keberadaan SMK NJ sebagai salah satu unit pelaksana cita-cita besar pesantren Nurul Jadid, ditambah persis SMK yang berada di kompleks dan lingkungan pesantren. Selain itu, status siswa SMK NJ adalah santri tetap di pondok pesantren Nurul Jadid, sehingga mereka selama 24 jam dalam setiap hari berada di lingkungan pondok pesantren. Integrasi ini juga merupakan konsekuensi logis karena visi misi SMK NJ pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi dan

<sup>228</sup> Dokumen Visi, Misi, Trilogi Santri, dan Panca Kesadaran Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid.

misi besar pesantren Nurul Jadid serta Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

## **B. Dampak Pengelolaan Sekolah berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton**

Berdasarkan data hasil wawancara dapat dijabarkan bahwa pengelolaan sekolah berbasis pesantren di SMK NJ Paiton memiliki dampak secara langsung terhadap komponen-komponen yang terkait, yaitu; sekolah, dunia usaha, dan pesantren. Adapun keberadaan dampak hanya terbatas pada tiga komponen tersebut dikarenakan ketiganya merupakan institusi pembelajaran yang saling terkait antara satu dengan yang lain.

### **1. Dampak bagi Sekolah**

Pengelolaan SMK NJ berbasis (terintegrasi) dengan pesantren memiliki dampak positif dalam hal kepercayaan diri, kinerja tenaga pendidikan, pelayanan dan fokus pendidikan umum dan kewirausahaan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Dalam hal kepercayaan diri, pengelolaan SMK NJ melalui integrasi dengan pesantren Nurul Jadid menjadikan pihak sekolah memiliki keyakinan dan rasa optimisme yang tinggi akan adanya respon yang positif terhadap masyarakat sekitar. Pihak sekolah tidak terlalu khawatir dengan stigma negatif masyarakat tentang SMK yang sampai saat ini masih dianggap sekolah yang hanya berorientasi untuk menciptakan pekerja, buruh dan hanya beorientasi dunia. Maka, dengan adanya pengelolaan yang

integratif, SMK NJ bisa meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan SMK NJ yang terpadu dengan pesantren tidak hanya berorientasi dunia, namun juga menjadi wirausahawan yang memiliki kedalaman agama, karakter santri yang kuat, dan berakhlak karimah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Manaf selaku kepala sekolah SMK NJ, sebagai berikut:

“Adanya sistem integrasi SMK Nurul Jadid dengan pesantren ini, memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi kami sebagai pihak pelaksana sekolah. Sebab biasanya masyarakat menganggap SMK itu merupakan sekolah yang siswanya nakal-nakal, dan hanya berjuang untuk mencetak kerja atau buruh, jadi orientasinya, menurut mereka hanya dunia saja. Nah, dengan kondisi SMK Nurul Jadid yang terpadu dan menjadi bagian pesantren, kami bisa meyakinkan masyarakat bahwa SMK Nurul Jadid tidak hanya bertujuan kerja dan urusan dunia saja, tapi juga dididik dengan keagamaan yang mendalam, karakter kesantrian yang kuat dan akhlak al-karimah. Karena hal tersebut sudah menjadi karakteristik yang melekat pada pesantren.”<sup>229</sup>

Selanjutnya, integrasi sekolah dan pesantren sebagaimana di atas juga berdampak pada kinerja pendidik dan tenaga pendidikan di SMK NJ.

Hal tersebut karena mereka merasa tidak hanya sekedar menjalankan tugas profesional, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di SMK NJ.

Namun, mereka juga merasa berjuang dan berkhidmat kepada pesantren.

Selain itu, pesantren sangat memperhatikan kesejahteraan mereka, dengan memberikan mereka fasilitas BPJS, tambahan gaji ke 13 dan 14. Lebih dari itu, meningkatnya kinerja tersebut karena adanya supervisi dan kontrol

<sup>229</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

langsung dari pesantren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mukarrom selaku guru kewirausahaan di SMK NJ, sebagai berikut:

“Saya senang dan memiliki kepuasan tersendiri mengajar di SMK Nurul Jadid ini, sebagai seorang yang tidak pernah mondok, saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk bisa juga mengabdikan di pesantren besar seperti Nurul Jadid ini. Perasaan seperti ini tidak saya rasakan ketika saya mengajar di sekolah di luar pesantren sebelum saya bergabung di sini. Selain itu, kami juga merasa sungkan kalau tidak rajin dan bersungguh-sungguh mengajar di sini, karena pesantren sangat memperhatikan kesejahteraan kami lebih dari yang biasanya di sekolah-sekolah lain, seperti halnya pemberian fasilitas BPJS serta gaji ke-13 dan 14. Gaji ke-13 itu setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, sementara gaji ke-14 diberikan ketika menjelang tahun ajaran baru, karena banyak para guru yang harus menyiapkan biaya untuk anak-anaknya masuk ke sekolah. Bagi saya ini luar biasa”.<sup>230</sup>

Data sebagaimana di atas, diperkuat oleh data hasil observasi penelitian yang mendapati tenaga pendidik dan kependidikan di SMK NJ mengikuti jadwal yang ditentukan oleh sekolah serta sangat memperhatikan aturan dan kode etik yang berlaku. Mereka datang tepat waktu dan pulang pada waktu yang ditentukan pula. Apabila mereka memiliki udzur dan tidak bisa hadir ke sekolah, mereka mengajukan izin terlebih dahulu pada bagian yang menangani hal tersebut. Demikian juga dengan kewajiban para guru untuk membuat RPP, silabus, dan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya, berdasarkan hasil observasi peneliti tidak satupun dari mereka yang tidak membuat dan memiliki perangkat-perangkat tersebut.<sup>231</sup>

<sup>230</sup> Mukarrom (Guru Kewirausahaan SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 20 Maret 2018.

<sup>231</sup> Hasil Observasi Lapangan pada tanggal 21 Maret 2018.

Dampak integrasi SMK NJ dengan pesantren juga dirasakan oleh pihak sekolah dalam hal pelayanan dan fokus sekolah. Dalam hal ini sekolah lebih bisa memberikan pelayanan pendidikan terutama pada pelaksanaan kurikulum adaptif dan produktif, sehingga bisa lebih fokus dalam pembelajaran umum teknologi, keterampilan dan kompetensi kewirausahaan (*entrepreneurship*). Hal tersebut karena sekolah tidak terlalu disibukkan dengan pembelajaran keagamaan, penanaman karakter santri, peningkatan sarana dan prasarana, pendanaan, rekrutmen tenaga pendidik dan pendidikan dan evaluasi, yang kesemuanya itu banyak dibantu oleh pesantren. Penjelasan yang mencerminkan hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abd. Manaf sebagai berikut:

“Bagi kami, integrasi ini juga sangat membantu dalam hal pelayanan pendidikan umum dan teknologi serta fokus pada penguatan keterampilan dan kompetensi kewirausahaan sebagaimana yang menjadi cita-cita utama SMK. Dengan terintegrasinya SMK Nurul Jadid dengan pesantren, maka pesantren membantu dalam banyak hal, seperti pembelajaran agama (madrasah diniyah integratif), penanaman karakter santri, sarana, pendanaan, rekrutmen, tenaga pendidik dan kependidikan, sampai evaluasi dan supervisi. Itu semua sangat meringankan bagi kami sebagai pihak pengelola sekolah.”<sup>232</sup>

Lebih dari itu, integrasi SMK NJ dengan pesantren berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lulusan SMK. SMK NJ dianggap berbeda dengan SMK di luar pesantren yang hanya berorientasi mewujudkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha dan hanya memikirkan dunia saja. Dengan terintegrasinya SMK NJ dengan pesantren,

<sup>232</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

stigma negatif tersebut tidak berlaku bagi SMK NJ, karena pesantren dinilai memiliki komitmen keagamaan yang kuat, penanaman karakter santri yang mendalam serta orientasi yang seimbang antara dunia dan akhirat serta lingkungan yang aman di pesantren. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abd. Qodir selaku wali murid atas nama Milani Adita Putri dari Gresik sebagai berikut:

“Salah satu yang menjadi pertimbangan saya menyekolahkan anak saya di SMK Nurul Jadid ini, ya karena SMK ini berada di pesantren. Ketika anak saya meminta untuk melanjutkan ke SMK, saya berikan masukan dan pertimbangan untuk melanjutkan SMK yang ada di pesantren. Bagi saya sebagai orang tua, apalagi anak saya perempuan, pesantrelah tempat yang paling tepat untuk pertumbuhan anak zaman sekarang. Karena, di pesantren aman dari pergaulan bebas, pendidikan agamanya kuat, penanaman karakter santri dan akhlakul karimah juga kuat. Jadi imbang antara agama, umum dan keterampilannya. Selain itu, saya yakin dengan barokah pesantren dan doa para kyainya, insyaallah anak saya jadi sukses dunia akhirat, amin.”<sup>233</sup>

Berangkat dari hasil data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa integrasi SMK NJ dengan pesantren berdampak pada penilaian positif masyarakat terhadap keberadaan SMK, sekaligus menjadi tambahan motivasi untuk memondokkan anaknya di pesantren.

Namun demikian, betapapun integrasi SMK NJ dengan pesantren ini memiliki banyak dampak yang positif, terdapat pula dampak negatif yang dirasakan oleh sekolah, yaitu kebijakan dan kewenangan pengelola sekolah yang terbatas, pengelola sekolah cenderung bersifat pasif dan konsumtif serta bertambahnya beban tanggung jawab administratif yaitu

<sup>233</sup> Abd. Qodir (Wali Murid), *Wawancara*, Probolinggo, 04 April 2018.

tanggung jawab kepada pesantren dan pemerintah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Abd. Manaf sebagai berikut:

“Selain dampak positif dari integrasi ini, tentu ada juga dampak negatif yang kami rasakan meskipun perbandingan antara yang positif dan negatif jauh lebih ringan yang negatif. Misalnya saya sebagai kepala sekolah, kebijakan dan wewenangnya terbatas, artinya tidak seperti kepala sekolah yang di luar pesantren. Di SMK Nurul Jadid, para pengelolanya termasuk saya sebagai kepala sekolah harus memiliki mindset sebagai pelaksana cita-cita besar pesantren. Kebijakan dan wewenangnya yang otomatis harus sebangun dengan pesantren. Berbeda dengan kepala sekolah di luar pesantren yang hanya dituntut menyesuaikan dengan regulasi pemerintah yang ada, selesai. Selain itu, dengan adanya penanganan pesantren dalam banyak hal seperti, pembelajaran agama melalui madin integratif, penanaman arakter santri, penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan, itu cenderung memunculkan sikap pasif dan konsumtif bagi sekolah. Artinya dalam hal-hal tersebut sekolah tidak terlalu ditantang kreatifitas dan inovasinya. Selanjutnya, dengan adanya integrasi ini, sekolah punya tanggung jawab yang lebih karena harus bertanggung jawab kepada dua sektor sekaligus, yaitu pesantren dan pemerintah. Berbeda dengan sekolah yang berada di luar pesantren sama, sekolah hanya bertanggung jawab pada pemerintah saja.”<sup>234</sup>

Dalam rangka mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari dampak negatif tersebut, maka dalam setiap kesempatan yang ada, kepala sekolah selalu mengajak segenap stake holder yang ada di SMK untuk selalu sadar dan memahami bahwa SMK NJ adalah unit pelaksana visi pesantren. Dengan demikian, semua pengelola SMK mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan harus sebangun dengan pesantren. Maka dari itu hendaknya hal-hal demikian tidak dijadikan alasan tidak loyal kepada pesantren, bahkan semua itu dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada pesantren. Lebih dari itu hal tersebut harus diniati sebagai bentuk perjuangan bersama

<sup>234</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

pesantren untuk memajukan islam dan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abd. Manaf sebagai berikut:

“Sebagai upaya menekan dampak negatif dari integrasi sebagaimana dimaksud, ya saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan yang ada di SMK Nurul Jadid ini, setiap ada kesempatan selalu saya sampaikan tentang posisi sekolah sebagai pelaksana pesantren itu sangat penting untuk disadari dan dipahami bersama agar sekolah tidak *overlapping*. Kemudian saya juga sampaikan, dalam kultur pesantren yang menjadi patokan utama adalah cita-cita pendiri dan pengasuh pesantren itu sendiri. Jadi semua apa kata dawuh kyai. Ketaatan kepada kyai hendaknya kita maknai pengabdian kepadanya dan kepada pesantren bahkan itu semua merupakan bentuk perjuangan bersama-sama pesantren untuk meninggikan agama islam. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman disini. Dan alhamdulillah, teman-teman bisa menerima dan memaklumi sehingga tidak pernah ada yang komplain”.<sup>235</sup>

Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa, untuk menekan efek dari dampak negatif tersebut, pihak kepala sekolah melakukan upaya antisipatif yaitu dengan cara memberikan motivasi-motivasi serta pemahaman yang mendasar kepada segenap stake holder yang ada di SMK NJ baik tenaga pendidikan maupun tenaga kependidikan. Adapun pemahaman yang selalu ditekankan oleh kepala sekolah adalah tentang posisi SMK NJ sebagai pelaksana pesantren sehingga harus selalu sebangun dengan visi misi dan kebijakan pesantren. Berangkat dari kesadaran tentang posisi tersebut, maka sekolah dituntut punya loyalitas kepada pesantren. Selain itu, kepala sekolah sering memberikan pengarahannya bahwa loyalitas sebagai pelaksana pesantren hendaknya dimaknai sebagai pengabdian kepada kyai dengan pesantren bahkan

---

<sup>235</sup> Abdul Manaf Firdaus (Kepala SMK NJ), *Wawancara*, Probolinggo, 16 Maret 2018.

sebagai bentuk perjuangan bersama kyai dan pesantren dalam rangka meninggikan agama islam.

## 2. Dampak Bagi Dunia Usaha

Sebagai mitra sekolah, dunia usaha juga merasakan beberapa dampak dari adanya integrasi SMK NJ dengan pesantren, baik dampak yang positif maupun yang negatif. Adapun dampak yang positif antara lain: adanya kepuasan tersendiri karena merasa mendapat kepercayaan dari pesantren besar seperti Nurul Jadid Paiton, untuk dijadikan tempat praktek para santrinya. Hal itu juga diartikan sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam perjuangan pesantren sekaligus sebagai jalan mendapat barokah pesantren dan kyai. Selain itu, dunia usaha tertentu, mendapat kemudahan-kemudahan terutama dalam merekrut karyawan, karena telah mengetahui kompetensi, sikap dan perilaku santri magang, sehingga tidak harus repot lagi mencari yang lain. Lebih dari itu, dunia usaha merasa terbantuan dalam banyak hal, terutama dalam pekerjaan dan penghematan pendanaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Maksu sebagai salah satu pengusaha komputer dari Probolinggo, sebagai berikut:

“Tempat usaha saya ini seringkali ditempati magang siswa SMK baik SMK di luar pesantren maupun SMK di dalam pesantren. Hanya saya lebih senang kalau yang magang dari SMK pesantren. Mereka kan santri, jadi perilakunya beda, mereka sopan, gampang diatur dan jujur. Kalau masalah kompetensi dan keterampilan mereka tidak kalah dengan siswa SMK yang dari luar pesantren. Terus, jika yang magang dari SMK pesantren, seperti SMK Nurul Jadid Paiton, saya merasa itu kehormatan tersendiri karena saya

berkesempatan membantu perjuangan kyai dan pesantren. Dari sana saya yakin bisa mendapat barokah dari para beliau”.<sup>236</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan para informan dalam wawancara di atas, penjelasan yang diungkapkan oleh Wahyono sebagai pemilik usaha produksi film di Jember sebagai berikut:

“Alhamdulillah, SMK Nurul Jadid Paiton beberapa kali menempatkan siswa magangnya di tempat saya ini, saya senang, puas, karena mereka yang magang kompetensinya ya lumayan, akhlaknya bagus dan yang penting mereka jujur dan taat beribadah. Bagi saya itu modal utama untuk menjadi pengusaha sukses. Jadi saya merasa senang karena mereka tentu sangat membantu sukses. Jadi saya merasa senang karena mereka tentu sangat membantu mulai dari pekerjaan maupun keamanan di sini, tanpa harus saya bayar seperti karyawan yang beda, sehingga saya bisa menghemat juga”.<sup>237</sup>

Berdasarkan beberapa data hasil wawancara di atas nampak bahwa para pengelola dunia usaha memiliki kepuasan tersendiri ketika ditempati magang oleh para siswa SMK dari pesantren seperti halnya SMK NJ Paiton. Para pengelola dunia usaha merasakan kepuasan masing-masing, seperti merasa puas dan terhormat karena merasa dipercaya oleh pesantren, bisa berpartisipasi dalam perjuangan pesantren, bahkan berharap mendapatkan barokah kyai dan pesantren. Selain itu, mereka bisa mengetahui kompetensi dan karakter siswa magang secara langsung, sehingga memudahkan ketika harus merekrut karyawan.

Lebih dari itu, para pengelola dunia usaha merasa sangat terbantuan dalam pekerjaan karena adanya siswa SMK NJ yang magang.

<sup>236</sup> Mahsun (Pengusaha Komputer dari Probolinggo), *Wawancara*, Probolinggo, 12 April 2018.

<sup>237</sup> Wahyono (pemilik dunia usaha yang ditempati praktik siswa SMK NJ), *Wawancara*, Jember, 06 April 2018.

Mereka bisa diminta untuk mengerjakan hal-hal tertentu, sesuai bidang dan kemampuan para siswa magang tanpa harus diberi bayaran sebagaimana karyawan yang bekerja secara profesional. Dengan demikian, keberadaan siswa magang berdampak pada percepatan pekerjaan dan penghematan yang tentu sangat positif bagi dunia usaha yang ditempati.

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh pihak dunia usaha, adalah adanya standart dan tuntutan dari SMK NJ kepada siswa magang yang tetap memberlakukan beberapa tata tertib pesantren, sepanjang mereka melakukan praktik magang. Hal tersebut sering kali merepotkan pihak pengelola dunia usaha yang juga harus memahami kondisi tersebut. Contoh, siswa selama melaksanakan magang, siswa dilarang membawa Handphone (HP), sehingga pada saat-saat tertentu komunikasi antara pengelola usaha dengan siswa magang tidak begitu lancar. Selain itu, dampak negatif yang juga dirasakan oleh pihak pengelola dunia usaha adalah bertambahnya beban tanggung jawab secara moral. Hal tersebut karena harus turut menjaga dan memastikan keamanan, pergaulan dan keagamaan para siswa magang, misalnya juga harus dijadikan pertimbangan dan bahan evaluasi bersama, sehingga kerjasama antara komponen-komponen integrasi yang ada bisa lebih baik dan maksimal.

### 3. Dampak bagi pesantren

Adapun dampak bagi pesantren integrasi SMK NJ dengan pondok Nurul Jadid adalah menguatnya komitmen membangun visi bersama untuk

terwujudnya cita-cita. Artinya integrasi tersebut merupakan wahana dan instrumen penting bagi pesantren untuk menanamkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi para pengelola SMK NJ terhadap pesantren. Hal tersebut dikarenakan pesantren bisa menegaskan mindset pengelola sekolah sebagai pelaksana pesantren dan bukan pelaksana murni bagi sekolah. Selain itu, dengan integrasi sebagaimana dimaksud, pesantren bisa memastikan keseimbangan (*balancing*) dan simultanisasi proses pelaksanaan visi misi pesantren dan pemerintah di SMK NJ Paiton. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh KH. Abd Hamid Wahid sebagai Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai berikut:

“Pada prinsipnya integrasi lembaga dengan pesantren dilakukan untuk membangun visi bersama dalam rangka mewujudkan cita-cita besar pesantren. Melalui integrasi ini pesantren bisa menegaskan mindset lembaga termasuk SMK Nurul Jadid tentunya, sebagai pelaksana pesantren. Jadi, lembaga sebagai pelaksana pesantren, ya harus loyal dan militan kepada pesantren. Namun demikian, pesantren sadar bahwa sekolah juga harus mengikuti regulasi dinas pemerintah yang ada. Maka melalui integrasi ini pesantren juga bisa memastikan keseimbangan dan simultannya proses pelaksanaan visi pesantren dan pemerintah di SMK Nurul Jadid”.<sup>238</sup>

Hasil wawancara di atas nampaknya menginformasikan bahwa integrasi SMK NJ dengan pesantren dilaksanakan untuk memastikan semua stake holder dan lembaga yang ada memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi pesantren. Pesantren berkepentingan untuk memposisikan visi pesantren sebagai visi utama yang harus diwujudkan

---

<sup>238</sup> KH. Abd Hamid Wahid (Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

oleh lembaga-lembaga yang ada. Hal ini untuk mengantisipasi keluarnya lembaga dari visi misi pesantren karena lebih mengutamakan antara kementerian yang menaunginya.

Betapapun demikian pesantren juga tidak mau, jika sekolah melenceng dari regulasi dan arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian integrasi menjadi wahana untuk menyeimbangkan keduanya dalam pelaksanaan yang simultan di SMK NJ Paiton. Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai berikut:

“Yang saya pahami dari integrasi lembaga dengan pesantren Nurul Jadid, yaitu pesantren ingin mengantisipasi keluarnya lembaga dari visi misi pesantren. Seringkali, pesantren ketika membuat sekolah formal, maka yang diutamakan oleh sekolah tersebut adalah regulasi kementeriannya, sementara pesantrennya dinomorduakan. Menurut saya itu keliru, karena sekolah formal itu didirikan oleh pesantren sebagai upaya mewujudkan cita-cita dan visi pesantren juga. Dan jika itu dibiarkan maka pesantren tidak akan punya kewibawaan. Intinya, integrasi itu dilakukan sebagai upaya pesantren untuk memastikan lembaga-lembaga yang di bawahnya tetap mengutamakan pesantrennya daripada yang lain. Dengan integrasi itu pula, saya pikir pesantren memiliki kontrol untuk menyeimbangkan proses yang ada di lembaga antara visi pesantren dan pemerintah. Jadi, pembelajaran agama terutama Furudul ‘Ainiyah dan penanaman karakter sebagai misi pesantren, serta pembelajaran umum, teknologi dan keterampilan sebagai regulasi pemerintah, itu semua bisa dilaksanakan secara berbarengan di lembaga”.<sup>239</sup>

Secara lebih jelas, integrasi lembaga dengan pesantren memberikan peluang dan akses yang luas kepada pihak pesantren untuk mengetahui dan mengendalikan semua potensi dan sumber daya pesantren yang ada

---

<sup>239</sup> K. Moh Imdad Rabbani (Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 15 April 2018.

dilembaga termasuk di SMK NJ. Selanjutnya, pihak pesantren bisa melakukan pemerataan dalam memenuhi kebutuhan lintas lembaga. Dengan demikian, pihak pesantren bisa bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada lembaga-lembaga yang ada, serta bisa meminimalisir kesenjangan dan ego sektoral di antara pengelola lembaga-lembaga di bawahnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Faizin selaku Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai berikut:

“Endingnya, integrasi ini menjadikan pesantren tahu tentang potensi dan sumber daya yang dimilikinya pada lembaga-lembaga di bawahnya, tak terkecuali SMK Nurul Jadid. Nah, ketika pesantren sudah tahu, maka pesantren mudah untuk mengatur dan mengendalikannya. Apalagi terkait dengan sumber daya keuangan, melalui sistem sentralisasi keuangan, pesantren bisa mengatur pemenuhan pendanaan secara adil dan merata, tanpa membedakan mana lembaga yang besar dan mana yang kecil. Semuanya, diposisikan sama yaitu sebagai lembaga milik pesantren. Di sinilah kesenjangan dan ego sektoral antara lembaga bisa diminimalisir”.<sup>240</sup>

Selanjutnya integrasi sebagaimana di atas, juga memberi dampak positif kepada pesantren berupa bertambah antusias masyarakat untuk memondokkan anaknya di Pesantren Nurul Jadid Paiton. Sebagian masyarakat yang pada mulanya hanya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah umum, seperti SMK, namun memiliki kekhawatiran terkait dengan keamanan, pergaulan dan moral, maka keberadaan SMK yang berintegrasi dengan pesantren menjadi solusi alternatif yang efektif. Hal ini

---

<sup>240</sup> H. Faizin (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 20 April 2018.

sebagaimana disampaikan oleh Abd. Qodir salah satu wali murid dari Gresik Jawa Timur sebagai berikut:

“Memang pada awalnya, saya hanya berfikir yang penting anak saya bisa melanjutkan sekolah sesuai yang diinginkan. Namun ketika anak saya meminta untuk melanjutkan sekolah ke SMK saya kok merasa khawatir pergaulannya. Sekarang jamannya kan seperti ini, jadi sebagai orang tua, saya merasa was was dan khawatir. Alhamdulillah, ketika saya mengarahkan anak saya agar memilih SMK yang ada di pesantren, dia mu dan memilih di SMK Nurul Jadid ini”.<sup>241</sup>

Agak berbeda sedikit dengan hasil wawancara di atas, apa yang disampaikan oleh Zakaria wali santri dari Situbondo sebagai berikut:

“Bagi saya SMK Nurul Jadid ini menambahkan kesempatan masyarakat untuk memilih sekolah sesuai yang diinginkan, namun tetap bisa mondok. Di lingkungan saya, umumnya anak-anak belajar di sekolah umum dan jarang yang mondok, karena kebanyakan pesantren hanya menekankan agama saja. Alhamdulillah, anak saya mau mondok tapi belajar formalnya minta di SMK karena ingin memiliki keterampilan kerja. Ya, saya arahkan ke Nurul Jadid ini, dan anaknya kerasan”.<sup>242</sup>

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas, integrasi SMK Nurul Jadid dengan pesantren telah mampu meningkatkan kemauan masyarakat untuk memondokkan anaknya di pesantren. Terdapat beberapa pertimbangan masyarakat sehingga mereka memondokkan anaknya di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton antara lain; adanya rasa yakin tentang terjaminnya keamanan dan pergaulan santri serta banyaknya pilihan sekolah sesuai dengan keinginan masyarakat yang berada di komplek pesantren, termasuk SMK NJ.

<sup>241</sup> Abd. Qodir (Wali Murid), *Wawancara*, Probolinggo, 04 Mei 2018.

<sup>242</sup> Zakaria (Wali Santri), *Wawancara*, Probolinggo, 04 Mei 2018.

Betapapun demikian, integrasi SMK NJ dengan pesantren sebagaimana di atas juga memiliki dampak negatif bagi pesantren. Adapun dampak negatif tersebut adalah bertambahnya beban kerja dan tanggung jawab. Beratnya beban kerja karena pesantren tidak hanya mengurus kegiatan kepesantrenan saja, seperti pengajian kitab atau pendidikan diniyah, ubudiyah, keamanan dan sarana pesantren saja, namun juga harus mengurus lembaga pendidikan umum, termasuk SMK NJ. Dalam hal ini pesantren secara langsung berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lembaga-lembaga tersebut, sehingga beban kerjanya selama 24 jam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Faizin sebagai berikut:

“Sebagai sebuah kebijakan, betapapun integrasi ini banyak dampak positifnya bagi pesantren, namun tentu juga ada dampak negatifnya. Ya yang saya rasakan beban kerja pesantren itu sangat berat karena pesantren tidak hanya menangani kegiatan kepesantrenan saja, seperti pendidikan diniyah (keagamaan), ubudiyah, keamanan dan sarpras pesantren saja, tapi juga harus mengurus lembaga formal termasuk SMK tersebut. Sehingga pesantren terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Makanya beban kerja pengurus pesantren bisa dikatakan 24 jam, meskipun jam ngantor pengurus resminya 8 jam. Disini, para pengurus harus selalu siap kapan saja dtuhkan oleh pesantren seperti ketika kyai menghendaki rapat pesantren pada malam hari. Ya kita harus hadir”.<sup>243</sup>

Berdasarkan data wawancara di atas, didapati bahwa konsekwensi integrasi di pondok pesantren Nurul Jadid meniscayakan beratnya beban kerja pesantren. Pesantren harus mengurus semuanya, baik pesantren

---

<sup>243</sup> H. Faizin (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 20 April 2018.

sendiri maupun lembaga-lembaga yang ada di bawahnya dalam banyak hal. Selain beratnya beban berat pesantren, integrasi sebagaimana di atas juga, menambah beban tanggung jawab pesantren baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat.

Beban berat tanggung jawab kepada Allah didasari oleh pemikiran. Bahwa pesantren Nurul Jadid didirikan sebagai wahana berjuang untuk meninggikan agama Allah sekaligus merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun tanggung jawab kepada masyarakat, karena pesantren merupakan tempat pendidikan dengan sistem pondok di mana masyarakat atau wali santri memasrahkan putra-putri mereka selama 24 jam kepada pesantren (mukim di pesantren).

Untuk itu pesantren memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik dan membimbing para santri, baik dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, kewirausahaan dan akhlak (karakter). Demikian pula, pesantren memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para santri selama mereka menjalankan proses pendidikan dan pembimbingan tersebut di pesantren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Faizin selaku Sekretaris Umum Pondok Pesantren sebagai berikut:

“Kebijakan integrasi ini secara psikologis menambah beban tanggung jawab baik kepada Allah dan masyarakat. Pesantren ini merupakan tempat berjuang di jalan Allah dan tempat pelaksanaan amanah dari masyarakat. Dengan dipasrahkannya putra-putri mereka mondok di pesantren Nurul Jadid ini, berarti mereka yakin dan percaya bahwa putra-putri mereka akan dibimbing dengan baik

oleh pesantren. Keperayaan itulah yang harus kami jaga dan harus kami jalankan”.<sup>244</sup>

Berdasarkan data wawancara di atas, didapati bahwa dampak negatif adanya integrasi SMK NJ dengan pesantren, mengerucut pada dua hal yaitu beratnya beban kerja dan beban tanggung jawab para pengelola (pengurus pesantren). Untuk itu, para pengurus pesantren melakukan langkah-langkah strategis untuk meringankan dampak negatif tersebut, yaitu antara lain; membentuk struktur pengurus pesantren yang lengkap, kompeten dan kharismatik, sebagaimana disampaikan oleh KH. Abd Hamid Wahid sebagai berikut:

“Di antara langkah-langkah strategis yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan amanah di pesantren ini, yang paling penting adalah membuat struktur kepengurusan yang lengkap, kompeten dan kharismatik. Lengkap artinya bisa menjangkau semua bidang program sebagaimana yang dicita-citakan pesantren. Kompeten merupakan pertimbangan kemampuan dan keahlian para pengurus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kharismatik adalah kewibawaan dan mental kepemimpinan yang kuat dalam diri pengurus. Dalam hal ini kami sengaja memprioritaskan para keluarga dalam pesantren serta para alumni senior”.<sup>245</sup>

Data wawancara sebagaimana di atas, menginformasikan bahwa pihak pengelola pesantren telah melaksanakan langkah-langkah antisipatif untuk menekan efek dari dampak negatif yang muncul karena sistem integrasi yang ada. Bahkan untuk memastikan kinerja pengurus pesantren dengan beban kerja dan tanggung jawab yang besar sebagaimana di atas, pesantren tidak segan-segan memberikan jaminan kesejahteraan kepada

<sup>244</sup> H. Faizin (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 20 April 2018.

<sup>245</sup> KH. Abd. Hamid Wahid (Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 11 Agustus 2018.

mereka di atas kesejahteraan para kepala sekolah dan kepala unit lembaga yang lain di bawah pesantren Nurul Jadid Paiton. Secara jabatan, pengurus pesantren terutama di jajaran pengurus teras, mereka merupakan jabatan tertinggi di sistem kepegawaian di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton. Hal tersebut merupakan apresiasi tertinggi pesantren kepada para pengurusnya, karena merekalah yang selama 24 jam memikirkan seluruh masalah kepesantrenan. Dalam hal ini pesantren, memberikan tunjangan kesejahteraan di atas UMR, memberikan fasilitas BPJS serta memberikan gaji ke-13 dan 14, kepada pengurus dan para pelaksana atau pegawai dan karyawan pesantren. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Faizin sebagai berikut:

“Meningat beban tugas dan tanggung jawab pengurus pesantren begitu berat, maka kebijakan pesantren yang tentu dengan restu pngasuh, memberikan tunjangan kesejahteraan yang saya kira sangat cukup, kepada seluruh pengurus pesantren. Di Nurul Jadid ini, pengurus merupakan jabatan tertinggi dalam struktur jabatan pesantren, setelah majlis pengasuh. Adapun kesejahteraan yang didapat berdasarkan tingkat jabatan dan masa pengabdian di pesantren tapi yang jelas semua sudah di atas UMR. Selain itu pesantren juga memberikan gaji 13 dan 14 bagi semua pengurus, bahkan kepada semua pegawai dan karyawan pesantren seperti guru dan sebagainya. Namun itu semua berlaku untuk pengurus dan pegawai yang sudah hidup berkeluarga. Sementara bagi yang masih berstatus santri aktif tidak demikian, karena itu sebagai bentuk pengabdian saja. Mereka hanya mendapat fasilitas bebas biaya hidup di pesantren.”<sup>246</sup>

Berdasarkan paparan beberapa data wawancara di atas, didapati bahwa integrasi SMK NJ dengan pesantren memiliki dampak kepada

---

<sup>246</sup> H. Faizin (Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo, 20 April 2018.

pesantren itu sendiri baik positif maupun negatif. Adapun dampak positif sebagaimana dimaksud terdapat beberapa hal antara lain: tingginya loyalitas dan dedikasi pengelola SMK NJ kepada pesantren, pesantren bisa memastikan keseimbangan dan simultanisasi pelaksanaan visi pesantren dan pemerintah di SMK NJ, pesantren bisa mengetahui dan mengatur semua potensi dan sumberdaya yang ada di SMK NJ, serta bertambahnya antusiasme masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton.

Adapun dampak negatif adanya integrasi SMK NJ dengan pesantren adalah beratnya beban kerja dan beban tanggung jawab pesantren baik kepada Allah SWT maupun masyarakat. Untuk itu pesantren melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya menekan efek negatif tersebut, yaitu antara lain: membentuk struktur pesantren yang lengkap, kompeten dan kharismatik; merekrut pelaksana pesantren (pegawai dan karyawan) yang kompeten, profesional dan berintegritas; melaksanakan sistem managerial yang aplikabel, transparan dan akuntabel; serta memberikan jaminan kesejahteraan dan fasilitas yang cukup kepada segenap pengurus pesantren dan para pegawai atau karyawan pesantren.

## BAB V

### PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Model Pengelolaan Sekolah *Entrepreneurship* Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Sebagaimana disampaikan oleh para ahli, bahwa pengelolaan sekolah sering disamakan dengan manajemen sekolah. Seperti Mulyasa misalnya, menjelaskan bahwa manajemen pendidikan bisa diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.<sup>247</sup>

Selanjutnya, SMK NJ Paiton Probolinggo merupakan salah satu sekolah yang melakukan inovasi manajemen dalam pengelolaannya. Sebagai sekolah yang berada di pesantren, bahkan didirikan oleh pesantren, SMK NJ mau tidak mau memiliki dua induk organisasi sekaligus, yaitu pesantren dan pemerintah. Keduanya sama-sama memiliki cita-cita, yang pada gilirannya harus terakomodir dan terjewantahkan dalam Visi dan Misi SMK NJ. Hal ini pula yang mendorong dilaksanakannya sistem pengelolaannya sistem integratif di SMK NJ dengan pesantren Nurul Jadid Paiton.

Secara teoretis, manajemen atau pengelolaan integratif merupakan pengelolaan yang dilaksanakan secara terpadu dan menyatu.<sup>248</sup> Pengelolaan dengan sistem integrasi dalam konteks penyelenggaraan sekolah memiliki tiga

<sup>247</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 20.

<sup>248</sup> Iif Khoiru Ahmadi, dkk, *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), 2.

prinsip, yaitu pendidikan yang saling bersinergi dan terpadu (*seamless education*), membangun kesatuan yang utuh (*building image*), dan sumberdaya yang dijadikan milik bersama (*resources sharing*).<sup>249</sup>

Dalam pelaksanaan sistem integratif di SMK NJ, prinsip-prinsip di atas diaplikasikan dalam beberapa aspek. Berdasarkan paparan data yang telah disampaikan di atas, implementasi integrasi pengelolaan SMK NJ dengan pesantren terdapat dalam enam aspek, yaitu: integrasi sistem manajerial, integrasi kurikulum (kewirausahaan), integrasi sistem pembelajaran, integrasi keuangan, integrasi sarana dan prasarana dan integrasi iklim sekolah.

#### 1. Integrasi Manajerial

Secara konsepsional, manajerial meliputi tiga unsur pokok yang menjadi faktor utama terselenggaranya sebuah sistem pengelolaan pendidikan. Tiga unsur tersebut yaitu: pertama, manajemen. Dalam hal ini manajemen diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti perencanaan, rekrutmen pegawai, evaluasi dan lain-lain. Kedua, administrasi yang diartikan sebagai keseluruhan kegiatan *stidakeholder* yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam konteks sekolah terdapat beberapa kegiatan yang relevan dengan hal ini, seperti kegiatan pengajaran, kebhendahaan, ketatausahaan, kesiswaan, kehumasyan dan sebagainya. Ketiga adalah organisasi yang diartikan

---

<sup>249</sup> Ibid.

sebagai wadah sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>250</sup>

Berdasarkan temuan penelitian dalam penelitian ini, tiga unsur yang terkandung dalam manajerial sebagaimana dalam konsepsi di atas, terlaksana secara integratif antar SMK NJ dengan pesantren. Dalam ranah perencanaan, misalnya pihak SMK NJ selalu merencanakan hal-hal strategis dengan pihak pesantren, terutama dalam rapat-rapat yang diinisiasi oleh pesantren. Seperti contoh dalam perencanaan penerimaan siswa baru dan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, pihak SMK NJ membahas bersama dengan pesantren. Dalam hal rekrutmen siswa baru, hal-hal yang dibicarakan bersama dengan pesantren, seperti rencana kepanitiaan dari SMK, penentuan kuota berdasarkan kemampuan sekolah dan jadwal kegiatan terkait. Adapun dalam kegiatan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, perencanaan yang dilakukan bersama pihak pesantren seperti masalah kualifikasi tenaga yang dibutuhkan, penempatan pegawai sampai dengan evaluasi rekrutmen.

Selain itu di SMK NJ pelaksanaan integrasi dengan pesantren terimplementasikan juga dalam ranah administrasi, seperti dalam hal kebendaharaan, pengelolaannya disentralkan kepada pesantren. Dalam banyak hal, masalah kebendaharaan dilakukan secara integratif dengan pesantren. Sementara dalam masalah kehumasan, seperti sosialisasi

---

<sup>250</sup> Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren Departemen Agama, 2003), 56-57.

sekolah, promosi dan informasi-informasi yang penting disampaikan kepada masyarakat, juga dilakukan bersama dengan pesantren.

Selanjutnya dalam ranah organisasi, pihak SMK NJ dalam menyusun struktur organisasi sekolah dilibatkan secara langsung. Meskipun penentuan struktur organisasi dalam level pimpinan seperti menentukan kepala sekolah dan para wakil kepala diputuskan oleh pihak pesantren. Namun pihak SMK dilibatkan dalam memberi masukan dan pertimbangan. Hal tersebut karena pihak SMK lah yang paling paham dengan kompetensi personal yang ada. Artinya keputusan yang diambil oleh pesantren berdasarkan masukan dan pertimbangan dari pihak SMK NJ.

Berangkat dari pola integrasi sebagaimana di atas bisa dikatidakan bahwa pola integrasi manajerial yang dilakukan oleh SMK NJ dengan pesantren bersifat integratif kolaboratif. Dikatakan demikian karena integrasi yang dilakukan oleh pihak SMK NJ dengan pihak pesantren merupakan sinergi kerja dua sistem dimana antara sistem yang satu dengan yang lain saling mengakui dan menghargai posisi partnernya. Hal tersebut tercermin dari dialek dan komunikasi yang terjalin antara SMK NJ dengan pesantren, semisal ketika ada keinginan kiai untuk menambah kuota siswa baru, maka beliau tetap mendiskusikan hal tersebut dengan pihak SMK. Ini menunjukkan bahwa betapapun kiai sebagai pengasuh pesantren merupakan top manajer bahkan pemilik pesantren itu sendiri menurut

tradisi di pesantren, namun beliau tetap menghormati dan “memanusiakan” posisi kepala SMK yang notabene merupakan bawahan pesantren.

Pola dialektika dan komunikasi sebagaimana di atas, jika ditelusuri landasan teoretisnya dalam perspektif manajemen, relevan dengan pola manajemen simbiotik. Menurut Tilaar, pola manajemen simbiotik merupakan improvisasi manajemen pendidikan pola ganda (*dual system*), dimana dalam pola ini selain mengakui adanya berbagai jenis lembaga yang sama-sama memiliki hak hidup, diharuskan terwujudnya sinergitas dan kerjasama antar lembaga-lembaga tersebut demi terwujudnya kualitas pendidikan yang baik.<sup>251</sup>

Adapun titik relevansi antara konsepsi di atas dengan realita pengelolaan manajerial integratif di SMK NJ adalah besarnya kebebasan pihak SMK NJ untuk memakai model pengelolaan manajerial melalui pola integrasi dengan pesantren. Dalam hal ini sekolah mendapat kebebasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Berpijak pada landasan fondasional di atas, SMK NJ Paiton memposisikan diri sebagai unit utama pengelola proses pendidikan,

---

<sup>251</sup> Terkait dengan posisi pendidikan Islam dalam konteks reformasi pendidikan nasional, Tilaar menemukan tiga pola manajemen pendidikan yaitu: pola tunggal, pola ganda (*dual system*) dan pola simbiotik. Menurutnya, pola tunggal merupakan pola yang hanya mengakui satu jenis sistem, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil bersifat sentralistik yang mengharuskan berbagai jenis lembaga yang ada untuk mengikuti kebijakan tersebut suka maupun tidak suka. Adapun pola ganda, merupakan pola yang mengakui berbagai jenis lembaga yang ada dan memberikan hak masing-masing untuk bisa eksis. Namun pola ini memiliki kelemahan dalam hal mutu dan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Sementara pola simbiotik merupakan pola yang mengharuskan adanya sinergitas antar lembaga-lembaga yang ada, sehingga bisa saling menguatkan demi terwujudnya kualitas yang baik. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 80-81.

sementara pesantren menjadi unit pendukung dan pelayan sekolah, meskipun secara filosofis adalah pemilik sekolah. Sampai di sini, secara fondasional, integrasi manajerial di SMK NJ berpijak pada Undang-Undang pendidikan Nasional tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) yang menjadi bagian dari konsep besar manajemen berbasis sekolah (MBS).

Selanjutnya, dari perspektif manajemen pondok pesantren, adanya pola integrasi manajerial yang dilakukan oleh SMK NJ dengan pesantren menegaskan bahwa pondok pesantren Nurul Jadid Paiton menerapkan konsep manajemen berbasis pondok pesantren (MBPP). Menurut Sulthon dan Moh. Khusnuridho, MBPP adalah manajemen pesantren yang mengkombinasikan antara nilai-nilai idealisme dan nilai-nilai profesionalisme.<sup>252</sup> Sementara menurut Nur Efendi adalah manajemen pondok pesantren yang mengintegrasikan antara nilai-nilai tradisional dengan profesional.<sup>253</sup>

Sulthon dan Moh. Khusnuridho menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri khas manajemen pesantren yang berbasis nilai-nilai idealisme, antara lain yaitu berorientasi pada jiwa ketulusan atau keikhlasan yang lebih dikenal dengan istilah “*lillahi ta’ala*”. Selain itu, manajemen pesantren terpusat pada figur sentral kiai dan administrasi

---

<sup>252</sup> H.M. Sulthon dan Moh. Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: Laksbang, 2006), 32.

<sup>253</sup> Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Teras, 2014), 145.

seadanya.<sup>254</sup> Meskipun tidak dipungkiri bahwa nilai-nilai idealisme tersebut mengandung nilai-nilai positif, namun seiring perkembangan global, manajemen yang hanya berorientasi pada nilai-nilai idealisme tersebut tidak cukup lagi untuk diandalkan. Oleh karenanya, manajemen idealisme yang ada harus dikombinasikan dengan konsep-konsep manajemen profesional yang lebih modern dan kontekstual. Artinya modal utama berupa ketulusan “*lillahi ta’ala*” dan kharismatik figur kiai harus dilapisi dengan profesionalisme yang memadai, sehingga terwujudlah kombinasi yang ideal dan utuh dalam sebuah manajemen yaitu manajemen berbasis pondok pesantren.<sup>255</sup>

Selain itu, seringkali pesantren dikelola melalui manajemen yang serba tidak formal yaitu bentuk pengelolaan yang asal jadi, tidak memiliki standart strategi tertentu, serta tidak adanya mekanisme dan administrasi yang baku. Kebiasaan mengelola pesantren dengan serba “mono” dan serba tidak formal inilah yang dikatidakan manajemen pesantren tradisional. Pada gilirannya pola pengelolaan tersebut akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan wewenang dan kreatifitas struktur yang ada di bawah kiai dan pesantren, termasuk unit-unit dan lembaga yang ada.

Maka dari itu, menurut Nur Efendi, pesantren semestinya melaksanakan pola manajemen integratif yaitu mengintegrasikan tradisi dan modernisasi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang selama ini dipegang

---

<sup>254</sup> H.M. Sulthon dan Moh. Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, 33.

<sup>255</sup> Ibid.

kukuh oleh pesantren yaitu “*al muh}a>fad}ah ‘ala al-Qur’an al-s}a>lih wa al-akhdu bi al-jadid al-As}lah*” (memelihara hal-hal yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik).<sup>256</sup>

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, nampaknya telah melakukan proses pengelolaan atau manajemen pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dan modernisasi sesuai dengan konsepsi di atas. Sebagaimana telah disampaikan dalam paparan data bahwa di pondok pesantren Nurul Jadid terdapat struktur pesantren dengan tugas dan kewenangan yang jelas. Artinya dipelaksanaan manajemen di pondok pesantren Nurul Jadid tidak memakai pola “mono” dan serba “tidak formal”. Kiai tidak memosisikan dirinya sebagai pengambil kebijakan tunggal dan arogan, namun kiai bersikap demokratis, dengan mengedepankan diskusi dan musyawarah. Selain itu, di pondok pesantren Nurul Jadid terdapat pembagian kerja dan wewenang yang jelas antara pesantren dan unit-unit atau lembaga-lembaga di bawah naungannya.

## 2. Integrasi Kurikulum

Secara etimologi kata integrasi memiliki arti sebagai proses penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.<sup>257</sup> Berangkat dari pemahaman ini, integrasi bisa dikatidakan sebagai proses penyatuan dua atau beberapa hal menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

<sup>256</sup> Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren.*, 145.

<sup>257</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 295.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka integrasi kurikulum didefinisikan sebagai kurikulum yang memadukan bahan pelajaran dari berbagai mata pelajaran.<sup>258</sup>

Dalam konteks SMK NJ Paiton nampaknya pengintegrasikan kurikulum berdasarkan pengertian di atas dilaksanakan dengan mempertemukan materi pelajaran tertentu dengan pelajaran keagamaan (diniyah) seperti fiqih (hukum), akidah dan akhlak. Seperti dalam pembelajaran kewirausahaan, jika materinya adalah tentang transaksi bisnis, maka transaksi tersebut dipastikan memakai transaksi berdasarkan hukum-hukum fiqih Islam yang benar dan sah. Begitu pula jika terkait dengan etika bisnis maka hal tersebut dikorelasikan dengan ajaran akhlak dan nilai-nilai Islam, seperti jujur, disiplin, lemah lembut, lapang dada dan sebagainya.

Apabila terkait dengan motivasi ibadah melalui pemahaman bahwa bekerja dan berbisnis dalam Islam merupakan perintah Allah dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Hal ini menjadikan seorang wirausahawan dan bisnisan (*entrepreneur*) tidak hanya berorientasi dunia tetapi juga berorientasi akhirat.

Selain pengertian di atas, integrasi kurikulum sering kali disamakan dengan istilah *Interdisciplinary Curriculum* yaitu organisasi kurikulum dimana terjadi penentuan titik singgung antara mata pelajaran untuk dipusatkan pada masalah kehidupan dengan tetap didasarkan pada ruang

---

<sup>258</sup> Iif Khoiru Ahmadi, *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu.*, 111.

lingkup belajar. Menurut Sulthon dan Khusnuridho, kurikulum interdisipliner mencakup beberapa pendekatan khusus, antara lain: pendekatan “*broad-field*”, pendekatan kurikulum inti (*core curriculum*), dan pendekatan fusi.<sup>259</sup>

Pendekatan “*broad-field*” merupakan upaya mengintegrasikan beberapa mata pelajaran (disiplin) yang saling berkaitan agar siswa memahami ilmu pengetahuan secara holistik dan dapat diintegrasikan dalam kehidupannya yang nyata.

Adapun pendekatan kurikulum inti pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan *broad-field*, karena juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Hanya saja, dalam pendekatan ini, kurikulum diberikan berdasarkan suatu fokus masalah tertentu tentang sosial maupun personal. Sementara pendekatan fusi merupakan upaya mem-fusi-kan atau menyatukan dua atau lebih disiplin tradisional menjadi satu bidang studi yang baru, seperti: geografi, geologi, botani, arkeologi digabung menjadi satu bidang studi yaitu *earth sciences*. Berdasarkan paparan di atas, nampak bahwa semua pendekatan interdisipliner di atas memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami dalam konteks kehidupannya yang nyata.

---

<sup>259</sup> H.M. Sulthon dan Moh. Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global.*, 153.

Pengintegrasian kurikulum di sekolah merupakan strategi tersendiri untuk mencapai tujuan idealisme pendidikan. Menurut Halim Soebahar, pembelajaran di sekolah hendaknya diorientasikan untuk mewujudkan lulusan sebagai sosok manusia yang utuh sesuai dengan keinginan tuhan.<sup>260</sup> Dalam konteks SMK NJ Paiton orientasi pembelajaran semacam itu tercermin dari keinginan mewujudkan *entrepreneur* yang santri dan santri yang *entrepreneur*.

Berdasarkan temuan penelitian tentang keinginan mewujudkan *entrepreneur* yang santri dan santri yang *entrepreneur*, maka SMK NJ Paiton memandang bahwa melalui integrasi pengelolaan sekolah, termasuk integrasi kurikulum keinginan tersebut akan bisa dicapai. Keinginan mengkombinasikan antara dua entitas kompetensi, yaitu *entrepreneur* dan nilai-nilai kesantrian dalam satu sosok lulusan tidak bisa dilakukan dalam dimensi *entrepreneurship* saja, atau kompetensi kesantrian saja. Untuk itu sekolah dan pesantren dalam hal ini diniscayakan untuk berinteraksi dan berintegrasi.

Menurut Azyumardi Azra, dalam mengintegrasikan kurikulum sekolah dan pesantren, harus dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi kelembagaan pendidikan Islam.<sup>261</sup> Sedangkan menurut Muhaimin integrasi kurikulum sekolah dan pesantren merupakan implikasi pengembangan sekolah terpadu, sebagai respon terhadap perdaban global.

---

<sup>260</sup> Bandingkan dengan Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 74.

<sup>261</sup> Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 89.

Menurutnya nilai-nilai religius di pesantren masih relevan untuk mengantisipasi dampak negatif sekaligus menjawab tantangan global. Dalam hal ini, ia mengacu kepada pendapat Sachiko Murata dan Willian Chittik yang mengatidakan bahwa ketaatan beragama (*relegiutas*) merupakan obat untuk mengatasi berbagai problem masyarakat global.<sup>262</sup>

Abuddin Nata menganggapi integrasi kurikulum sekolah dan pesantren sebagai inovasi pengembangan kurikulum pesantren dalam rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, integrasi tersebut akan menganatarkan lulusan pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama, namun juga ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan keterampilan (*skill*).<sup>263</sup> Hal ini akan menjadikan pesantren mampu menjadi lembaga pendidikan alternatif dalam menjawab tantangan zaman yang ada.<sup>264</sup>

Berdasarkan diskusi teoretis di atas, integrasi kurikulum yang dilakukan oleh SMK NJ Paiton terlaksana dalam bentuk integrasi antar mata pelajaran dan integrasi kurikulum antar kelembagaan yaitu sekolah dan pesantren. Inovasi pengembangan kurikulum melalui integrasi ini akan mengantarkan kedua lembaga tersebut, terutama pesantren menjadi *the centre of excellent* yang menjadi tawaran alternatif pendidikan di era *posmodernisme*.

<sup>262</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 109.

<sup>263</sup> Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 332.

<sup>264</sup> Dawan Rahardjo, "Madrasah Sebagai The Centre of Excellent", dalam Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), xviii.

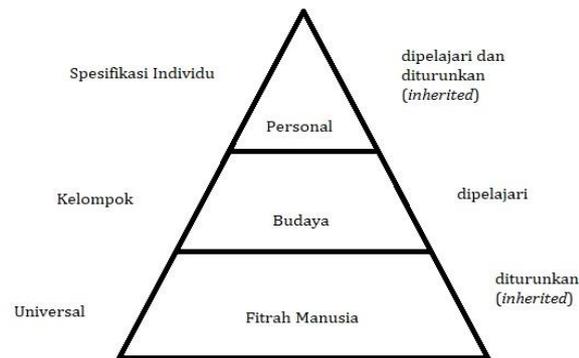
Dalam konteks pengembangan pendidikan *entrepreneurship*, integrasi kurikulum kewirausahaan di SMK NJ Paiton pada hakikatnya merupakan bagian dari inovasi pengembangan kurikulum dan pengembangan pendidikan kewirausahaan yang dilakukan sekolah tersebut. Secara konseptual integrasi kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam ranah kurikulum merupakan bentuk penegasan bahwa *entrepreneurship* bisa dikembangkan dan diajarkan. Dalam hal ini, Tilaar menyampaikan bahwa dalam berbagai penelitian psikologi berpikir (*think psychology*), ilmu kognitif, *neuroscience* menunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan atau perilaku-perilaku (*traits*) *entrepreneurship* itu berbasis pada kemampuan kognitif manusia. Kemampuan kognitif manusia mampu melahirkan proses berpikir yang biasa dari proses berpikir yang kritis.<sup>265</sup>

Menurut Tilaar, *entrepreneurship* merupakan tingkah laku (*behavior*) yang didasarkan kepada kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Dalam konteks ini, ia mengacu pada teori pola pembentukan *behavior* manusia menurut Hofstede sebagaimana gambar berikut<sup>266</sup>

Gambar 5.1 Pola Pembentukan *Behavior* Manusia Hofstede

<sup>265</sup> Tilaar, *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), 151-152.

<sup>266</sup> Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, *Cultures and Organizations Software of the Mind* (New York: Mc Graw, 2005), 4.



Sumber: Alan L. Carsrud & Malin Branback, *Understanding Entrepreneurship* (2009)

Menurut gambar di atas menunjukkan bahwa tingkah laku (*behavior*) manusia ditentukan oleh banyak faktor antara lain fitrah manusia yang bersifat universal melalui proses keturunan, lingkungan budaya dimana manusia itu hidup secara berkelompok melalui proses pembelajaran dan faktor personal berupa spesifikasi individu baik melalui proses pembelajaran maupun keturunan.

Berdasarkan teori pola pembentukan *behavior* manusia di atas, menurut Tilaar, seseorang dapat menjadi seorang *entrepreneur* dengan kemauan keras, mau belajar, mempunyai motivasi yang besar untuk menjadi seorang *entrepreneur*. Dengan demikian, munculnya *entrepreneurship* dalam diri seseorang tidak hanya tertumpu pada potensi bawaan sejak lahir saja, tetapi juga tertumpu pada kreasi dan inovasi yang dibentuk melalui program-program pendidikan.<sup>267</sup>

Jika dikaitkan dengan teori pengembangan manusia, menurut Tilaar, pembentukan *entrepreneurship* sebagaimana di atas lebih relevan

<sup>267</sup> Tilaar, *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional.*, 155.

dengan teori konvergensi yang digagas oleh William Stern.<sup>268</sup> Menurut teori ini, perkembangan manusia merupakan konvergensi (gabungan) antara potensi (fitrah) manusia yang dibawa sejak lahir dengan pengalaman-pengalaman. Dengan demikian, menurut teori ini, setiap pertumbuhan dan perkembangan pribadi, termasuk *entrepreneurship* merupakan hasil dari proses konvergensi dari faktor-faktor internal dan eksternal sekaligus.

Dalam pandangan para pemikir muslim, teori konvergensi di atas lebih cocok dengan perspektif pendidikan Islam dibandingkan dengan teori yang lain yaitu nativisme maupun empirisme. Ahmad Tafsir misalnya mengatidakan bahwa konvergensi inilah yang lebih mendekati kebenaran sebagaimana dalam ajaran Islam. Tafsir beragumen dengan salah satu hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

---

<sup>268</sup> William Stern merupakan seorang pelopor psikologi kepribadian dan kecerdasan. Teori konvergensi yang digagasnya merupakan kritik terhadap dua teori yang muncul sebelumnya yaitu teori nativisme dan empirisme. Teori nativisme yang digagas oleh Arthur Schopenhauer ini meyakini bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor pembawaan dari lahir yang bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah oleh alam sekitar atau lingkungannya. Baginya potensi-potensi hereditas itulah pribadi seseorang yang sesungguhnya dan bukan hasil pendidikan. Sementara, aliran empirisme digagas oleh John Locke, seorang filosof inggris, dimana ia meyakini bahwa pengetahuan atau kebenaran yang sempurna tidak diperoleh oleh akal, tetapi diperoleh melalui panca indera. Artinya, pengalaman indrawilah seperti lingkungan, budaya, pendidikan dan faktor eksternal yang lain. Menurut Lock, merupakan faktor penentu pengembangan manusia. Jiwa pada teori nativisme dinyatakan bahwa pendidikan atau lingkungan kurang berperan dalam pembentukan kepribadian manusia, maka pada teori empirisme ditemukan hal yang sebaliknya. Menurut aliran empirisme, pendidikan atau lingkungan menjadi penentu kemana arah perkembangan manusia yang diinginkan. Selanjutnya, teori konvergensi William Stern hadir sebagai respon dari pertentangan dan aliran sebelumnya tersebut. Stern mensistensiskan dua teori yang bertentangan tersebut dengan menyatakan bahwa pembawaan (*hereditas*) dan lingkungan merupakan dua faktor yang secara simultan mempengaruhi perkembangan manusia. Abuddin Nata, *Pemikir Pendidikan Islam dan Barat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 231-251.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ

(رواه البخارومسلم)

“Setiap orang yang dilahirkan membawa fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi” (HR. Bukhori dan Muslim).

Menurut Tafsir, hadis di atas menegaskan bahwa manusia lahir membawa fitrah atau potensi (kemampuan bawaan). Adapun kedua orang tua (sebagai representasi lingkungan, pendidikan, budaya, dan entitas eksternal yang lain) memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia, mereka bisa mempengaruhi perkembangan seseorang baik jasmani maupun rohani.<sup>269</sup>

Menurut Al-Shaibani, pengaruh faktor eksternal terhadap perkembangan manusia, bahkan dimulai sejak bayi berupa embrio, dan akan berakhir setelah kematian orang tersebut. Tingkat dan pengaruh tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan segi pertumbuhan masing-masing serta perbedaan umur dan fase perkembangan, faktor pembawaan lebih dominan pengaruhnya tatkala seseorang masih bayi, sementara lingkungan (alam dan budaya) lebih dominan pengaruhnya ketika orang tersebut sudah dewasa.<sup>270</sup>

Lebih dari itu, Abuddin Nata mengatidakan bahwa Islam sesungguhnya bisa dikatidakan sebagai ajaran yang berpandangan

<sup>269</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 34-35.

<sup>270</sup> Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 136.

konvergensi plus, yakni faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perkembangan manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan lahir dan lingkungan saja, namun juga karena hidayah dan anugerah dari Allah SWT. Dalam hal ini Nata berpegangan pada pemahaman al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ  
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (QS. 31: 14).

Berdasarkan ayat di atas, menurut Nata terdapat perintah dari Allah SWT agar anak Luqman yang dididik ayahnya, untuk terlebih dahulu berterima kasih kepada Allah SWT., dan bukan kepada Luqman al-Hakim. Hal tersebut karena Allah SWT yang menjadikan Luqman bisa mendidiknya anaknya dan Allah SWT berkenan memberikan hidayah kepada anak tersebut.<sup>271</sup>

Integrasi kurikulum kewirausahaan sebagai bentuk penegasan bahwa *entrepreneurship* bisa dibentuk dan diajarkan di lembaga pendidikan, juga relevan dengan konsepsi pendidikan dalam perspektif ekonomi. Pendidikan dalam perspektif ekonomi, merupakan *human investmen* yaitu lembaga yang harus menghasilkan manusia-manusia yang

<sup>271</sup> Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 34-35.

handal sebagai subyek penggerak pembangunan ekonomi. Dengan demikian investasi di bidang pembangunan pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis untuk suksesnya pembangunan ekonomi nasional.<sup>272</sup>

Berdasarkan paparan teoretis di atas, bisa dipahami bahwa integrasi kurikulum kewirausahaan (*entrepreneurship*) sebagaimana yang dilakukan di SMK NJ Paiton memiliki landasan teoretis yang kokoh dalam berbagai perspektif. Dalam hal ini nampak bahwa integrasi kurikulum kewirausahaan relevan dengan teori psikologi pendidikan dan perkembangan manusia (baik dalam pandangan Barat maupun Islam), teori ideologi pendidikan Islam, teori teologi Islam dan teori pendidikan dalam perspektif ekonomi.

Sebagaimana ditemukan dalam paparan data penelitian ini, bahwa integrasi kurikulum kewirausahaan (*entrepreneurship*) di SMK NJ Paiton terlaksana dalam berbagai bentuk integrasi yaitu; integrasi ke dalam semua mata pelajaran, integrasi ke dalam kegiatan ekstra kurikuler, integrasi ke dalam program pengembangan diri, integrasi ke dalam kultur sekolah dan pesantren, serta integrasi melalui muatan lokal.

Secara teoretis, pengintegrasian kurikulum kewirausahaan di sekolah tidak mengharuskan sekolah membuat kurikulum baru. Tetapi, cukup dengan memadukan kurikulum kewirausahaan kurikulum sekolah yang sudah ada.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep, Teori dan Model* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 5.

<sup>273</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi)* (Jogjakarya: Pustaka Pelajar, 2011), 60.

Dalam hal ini, sekolah perlu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah, baik kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang dipandang cocok untuk disinergikan dengan kurikulum pendidikan kewirausahaan.

Di SMK NJ Paiton, kurikulum pendidikan kewirausahaan tidak didesain secara mandiri, namun cukup disinergikan dan dipadukan dengan kegiatan kurikulum yang sudah ada. Dengan demikian pengintegrasian kurikulum kewirausahaan tersebut relevan dengan teori sebagaimana di atas. Sebagaimana hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan, di antara pengintegrasian kurikulum kewirausahaan tersebut dilakukan melalui mensinergikan kurikulum kewirausahaan dengan seluruh mata pelajaran. Secara konseptual, integrasi semacam ini lebih ditekankan pada proses pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan pembelajaran.<sup>274</sup>

Menurut Barnawi dan Arifin, pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud harus dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, sekolah harus melakukan pengadaptasian silabus dan RPP dengan menambahkan pada materi, langkah-langkah, dan terhadap nilai-nilai kewirausahaan. Sementara dalam pelaksanaannya, pembelajaran harus diorientasikan pada upaya mengantarkan siswa untuk bisa menerima, merespon, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan menginternalisasikan nilai-nilai *entrepreneurship* menjadi karakter. Adapun dalam tahap evaluasi, sekolah

---

<sup>274</sup> Ibid, 61.

hendaknya melakukan pengontrolan dan penilaian baik selama proses berjalan maupun capaian hasil yang diperoleh.<sup>275</sup>

Adapun proses pengintegrasian kurikulum pendidikan kewirausahaan dilakukan pada saat menyampaikan materi, melalui metode pembelajaran maupun melalui sistem penilaian. Artinya integrasi kurikulum kewirausahaan hendaknya dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran.

Selain diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain, kurikulum kewirausahaan di SMK NJ, sebagaimana temuan dalam penelitian ini, juga diintegrasikan dengan kegiatan ekstra kurikuler. Menurut Wibowo, kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling yang bertujuan untuk pengembangan siswa, berdasarkan kebutuhan, potensi serta bakat dan minat. Menurutnya, ada beberapa kegiatan ekstra kurikuler yang bisa diberi muatan pendidikan kewirausahaan, seperti olahraga, seni budaya, kepramuakaan, pameran dan sebagainya.<sup>276</sup>

Berdasarkan temuan di SMK NJ Paiton, integrasi pendidikan kewirausahaan dengan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan dalam kegiatan berupa olahraga dan pramuka. Kegiatan olahraga sebagaimana dikatidakan oleh Maulana, mengandung nilai sportivitas sebagai bentuk nilai-nilai

---

<sup>275</sup> Barnawi & Mohammad Arifin, *School Preneurship Membangkitkan Jiwa dan Sikap Kewirausahaan Siswa* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 62-63.

<sup>276</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi)*., 67

kejujuran. Sportivitas mengajarkan ketangguhan, keberanian dan kejujuran. Sementara kegiatan pramuka mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan berupa kedisiplinan, kemandirian, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan menemukan peluang.

Bentuk pengintegrasian kurikulum kewirausahaan selain di atas, sebagaimana dilakukan oleh SMK NJ Paiton adalah pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dengan kegiatan pengembangan diri, seperti layanan konseling dan kegiatan rutin seperti upacara, berjamaah, keteladanan dan pengkondisian sekolah. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan diri sebagaimana yang disampaikan kemendiknas.<sup>277</sup>

Adapun pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dengan kultur sekolah dan pesantren, sebagaimana di SMK NJ Paiton, memiliki landasan teoretis yang kuat. Secara teoretis, kultur sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana para siswa berinteraksi dengan sesamanya, pengajar dengan sesamanya, pegawai dengan sejawatnya dan suasana interaksi antar anggota kelompok masyarakat sekolah.<sup>278</sup>

Secara umum pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang memiliki budaya dan kultur yang khas. Sulthon dan Khusnuridlo menjelaskan bahwa sedikitnya pesantren itu memiliki delapan ciri khas yang mencerminkan budaya dan kultur pesantren, yaitu: adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya, kepatuhan santri kepada kiai,

<sup>277</sup> Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan.*, 61-63. Bandingkan dengan Barnawi dan Mohammad Arifin, *Schoolpreneurship.*, 64.

<sup>278</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi).*, 72.

hidup hemat dan sederhana, mandiri, jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan yang hangat, disiplin dan pemberian ijazah (pengakuan dan penghargaan) kepada santri berprestasi.<sup>279</sup>

Selain itu, menurut Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip oleh Nata, terdapat beberapa budaya kultur pesantren yang sekaligus menjadi prinsip pendidikan pesantren itu sendiri, antara lain; *teosentrik*, ikhlas dalam mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektifitas, mengatur kegiatan bersama, kebebasan terpimpin, kemandirian, sebagai tempat menuntut ilmu dan mengabdikan, mengamalkan ajaran agama, belajar di pesantren bukan sekedar mencari ijazah dan kepatuhan terhadap kiai.<sup>280</sup>

Di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton sendiri selaku lingkungan yang melingkupi SMK NJ, memiliki rumusan-rumusan nilai budaya yang terkandung dalam trilogi santri dan panca kesadaran santri. Adapun trilogi santri yang dimaksud adalah الإِهْتِمَامُ بِالْفُرُوضِ الْعَيْنِيَّةِ (memperhatikan kewajiban-kewajiban *fardhu 'ain*), الإِهْتِمَامُ بِتَرْكِ الْكَبَائِرِ (mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar), حُسْنُ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ وَمَعَ الْخَلْقِ (berbudi luhur kepada Allah dan makhluk).

Sementara panca kesadaran santri merupakan lima kesadaran santri yang meliputi beberapa hal, antara lain: الْوَعْيُ الدِّينِي (kesadaran beragama), الْوَعْيُ الْعِلْمِي (kesadaran berilmu), الْوَعْيُ الْإِجْتِمَاعِي (kesadaran bermasyarakat),

<sup>279</sup> H.M Sulthon dan Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global.*, 12.

<sup>280</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 13.

الوععي النظامى (kesadaran berbangsa dan bernegara), الوعى الحكومى والشعبى (kesadaran berorganisasi).<sup>281</sup>

Berangkat dari rumusan nilai-nilai yang tercakup dalam trologi santri, maka pengembangan kultur atau budaya di Pondok Pesantren Nurul Jadid diarahkan pada penanaman tiga aspek yang tercakup di dalamnya. Seperti penanaman tentang kewajiban dan pengamalan ajaran-ajaran keagamaan terutama kewajiban beribadah, seperti sholat lima waktu berjama'ah, mengacu pada poin pertama dalam trilogi santri, yaitu “memperhatikan kewajiban-kewajiban *fardhu 'ain*”. Selanjutnya, penanaman budaya pergaulan antar sesama santri, dipisahinya santri putra dan santri putri baik dalam penataan asrama santri maupun kelompok belajar di sekolah, dilarangnya santri merokok terutama bagi santri yang masih berstatus siswa, menjadi salah satu bentuk komitmen pesantren dalam mengimplementasikan poin kedua trilogi santri yaitu “mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar”. Adapun poin ketiga trilogi santri menjadi acuan tentang penanaman karakter dan akhlak santri baik yang berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT., maupun yang berhubungan secara horizontal dengan sesama makhluk. Pengembangan budaya santri, seperti: teosentrik, ikhlas, mengabdikan, sederhana, tawadhu', tolong menolong, suasana persaudaraan yang hangat, hubungan akrab antara kiai dan santri, kepatuhan dan ta'dzim santri pada kiai, merupakan

---

<sup>281</sup> Dokumen Pondok Pesantren Nurul Jadid, 2.

bentuk komitmen pesantren pada pelaksanaan poin ketiga tersebut yaitu “berbudi luhur kepada Allah dan makhluk”.

Begitu pula panca kesadaran santri, yang juga menjadi rumusan akan pengembangan penanaman kesadaran dan arah kompetensi santri yang pada akhirnya menuntut pola pembiasaan yang konstant. Inilah yang pada proses pengaplikasiannya memunculkan budaya agamis, ilmiah, akademik, peka terhadap persoalan-persoalan sosial, nasionalis, dan organisatoris. Panca kesadaran santri inilah yang menjadi arah pembentukan kompetensi lulusan Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.

Pengintegrasian kurikulum pendidikan kewirausahaan di SMK NJ dilakukan dengan mengintegrasikan dengan mata pelajaran muatan lokal (mulok). Secara teoretis mata pelajaran muatan lokal merupakan mata pelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan yang cocok dengan daerahnya masing-masing. Dengan demikian mata pelajaran mulok harus memuat karakteristik lokal, keterampilan, dan nilai-nilai luhur budaya setempat yang pada akhirnya memberikan bekal keterampilan dasar (*life skill*) kepada siswa.<sup>282</sup>

Di SMK NJ Paiton sebagaimana paparan data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa muatan lokal yang ada lebih diorientasikan pada karakteristik pesantren. Hal ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain: pelaksanaan pendidikan madrasah diniyah, pengajian al-Qur'an,

---

<sup>282</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan Konsep dan Strategi.*, 72.

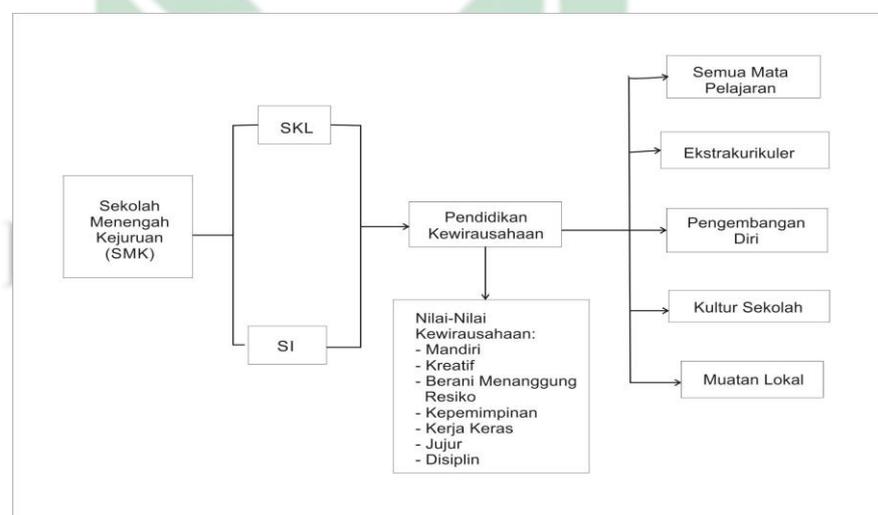
pengajian kitab kuning, dan praktik ibadah. Dengan demikian pengembangan kurikulum kewirausahaan dipadukan dengan kurikulum madrasah diniyah, pengajian kitab kuning, dan praktik ibadah, melalui penyesuaian-penyesuaian tertentu dengan nilai-nilai kewirausahaan yang ingin ditanamkan.

Adapun pelaksanaan pengintegrasian kurikulum kewirausahaan di dalam mata pelajaran muatan lokal, secara konseptual dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, RPP harus dirancang agar muatan maupun proses pembelajarannya mampu memfasilitasi pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan yang diinginkan. Dalam hal ini, dengan menambahkan pada materi, langkah-langkah pembelajaran atau penilaian dengan nilai-nilai kewirausahaan yang ingin ditanamkan.

Di SMK NJ Paiton, pelaksanaan, pengintegrasian kurikulum kewirausahaan dengan pelajaran muatan lokal melalui penekanan materi-materi kewirausahaan yang memiliki korelasi dan relevansi dengan mata pelajaran madrasah diniyah, seperti tarikh, fiqih, tauhid, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Penekanan-penekanan tersebut dimulai dari tahap perencanaan-perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, contohnya di RPP mata pelajaran tarikh Islam, tertulis nilai-nilai kewirausahaan yang ingin ditanamkan, seperti motivasi berwirausaha sebagai salah satu tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. semenjak beliau masih kecil sampai dewasa. Begitu

juga dalam fiqih, dimana nilai-nilai kewirausahaan yang ditekankan lebih pada kompetensi halal dan haram dalam praktik bisnis. Sementara dalam mata pelajaran tauhid misalnya, ditekankan bahwa bekerja mencari rizki, berwirausaha atau berbisnis merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT., dan seterusnya.

Berangkat dari diskusi teoretis dan data penelitian sebagaimana di atas maka ditemukan bahwa integrasi kurikulum kewirausahaan di SMK NJ Paiton terlaksana secara sistematis dan memiliki landasan teoretis yang kuat. Pengintegrasian kurikulum pendidikan kewirausahaan di atas nampaknya memiliki kecocokan dengan *framework* pengintegrasian kurikulum pendidikan kewirausahaan menurut kemendiknas,<sup>283</sup> sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Bahan Pelantihan Penguatan Metodologi Pembelajaran, Pusat Kurikulum Kemendiknas, 2010.

<sup>283</sup> Pusat Kurikulum Kemendiknas, *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa* (Jakarta: Pusat Kurikulum, 2010), 14.

Menurut gambar di atas, pengintegrasian dimulai dengan mengkaji dan menelaah standar kompetensi lulusan dan standar isi pada satuan pendidikan yakni sekolah menengah kejuruan. Hal tersebut untuk memetidakkan nilai-nilai dan kompetensi lulusan terkait dengan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Setelah nilai-nilai kewirausahaan yang akan diintegrasikan sudah dipetidakkan dan diidentifikasi, maka nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan proses pembelajaran yang ada, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan diri, kultur sekolah dan muatan lokal.

### 3. Integrasi Sistem Pembelajaran

Berdasarkan data temuan dalam penelitian ini bahwa sistem pembelajaran di SMK NJ Paiton melibatkan tiga subsistem yaitu subsistem sekolah, subsistem pesantren, dan subsistem dunia usaha atau industri. Secara teoretis, Bukit menyebut subsistem dalam kontek model pendidikan kejuruan sebagai komponen, sebagaimana dalam konsep pendidikan sistem ganda (PSG) atau yang dikenal dengan *dual system*.<sup>284</sup>

Sebagai komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan dengan model banyak sistem, komponen-komponen tersebut harus berkoordinasi secara intens antara satu dengan yang lain. Hal tersebut

---

<sup>284</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan.*, 47.

dikarenakan komponen-komponen yang dimaksud sekaligus menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan yang diinginkan.

Selain itu, koordinasi yang kuat tersebut diharuskan karena masing-masing komponen yang ada memiliki fokus dan penekanan-penekanan yang berbeda-beda. Sekolah misalnya, fokus dan penekanan pembelajarannya diorientasikan kepada pembekalan keterampilan dasar (*basic skill*). Bekal keterampilan dasar yang diterima oleh siswa harus cocok (*match*) dengan kebutuhan keterampilan dalam kegiatan praktik kerja industri.

Sementara pesantren, di samping sebagai lembaga pendidikan Islam, ia juga sebagai pusat pelayanan beragama dan moral. Pesantren dengan demikian memiliki tugas ganda yaitu sebagai pusat pembelajaran ilmu agama dan juga sebagai pusat pendidikan moral. Dalam proses pembelajaran di pesantren fokus yang ditekankan adalah kompetensi keagamaan dan akhlak (mental spiritual).<sup>285</sup>

Adapun dunia usaha dan industri lebih menekankan pada pembelajaran yang bersifat praktik. Kontek pendidikan sistem ganda, praktik kerja industri diorientasikan sebagai proses memberikan pengalaman kerja industri kepada siswa. Proses pelaksanaan praktik kerja industri, siswa mendapat bimbingan dari instruktur atau karyawan yang bekerja menangani suatu pekerjaan.<sup>286</sup>

---

<sup>285</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 83.

<sup>286</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan.*, 50.

Berangkat dari paparan di atas, maka nampak bahwa proses pembelajaran dengan sistem ganda memerlukan koordinasi yang kuat dan intens. Dalam konteks SMK Nurul Jadid Paiton koordinasi yang dilakukan antar masing-masing komponen bersifat integratif-interkoneksi sebagaimana dalam teori yang digagas Amin Abdullah. Pada hakikatnya perspektif Integratif-Interkoneksi dipakai dalam diskursus integrasi ilmu agama dan sains. Menurut Amin Abdullah interkoneksi digunakan sebagai upaya memahami kompleksitas fenomena problematika kehidupan yang dihadapi manusia. Semua bangunan keilmuan apapun tidak bisa berdiri sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterkaitan dan keterhubungan antara satu dengan yang lain.<sup>287</sup>

Di SMK NJ Paiton, sebagaimana dalam paparan data penelitian ini, proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditentukan, dilakukan melalui melibatkan tiga subsistem, yakni sekolah, pesantren dan dunia usaha atau industri dengan intensitas koordinasi yang kuat antar satu dengan yang lain. Dalam hal ini SMK NJ yang bertanggung jawab atas pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dasar (*basic skill*) untuk para siswa, bersinergi dengan pesantren dan dunia usaha atau industri. Begitu pula pesantren yang memiliki visi mencerdaskan santri yang tidak hanya paham ilmu agama dan akhlak mulia saja, namun juga

---

<sup>287</sup> Istilah Integratif-Interkoneksi merupakan istilah perspektif pendidikan yang digagas oleh Amin Abdullah yang dikenal dengan teori laba-laba. Baca Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vii-viii.

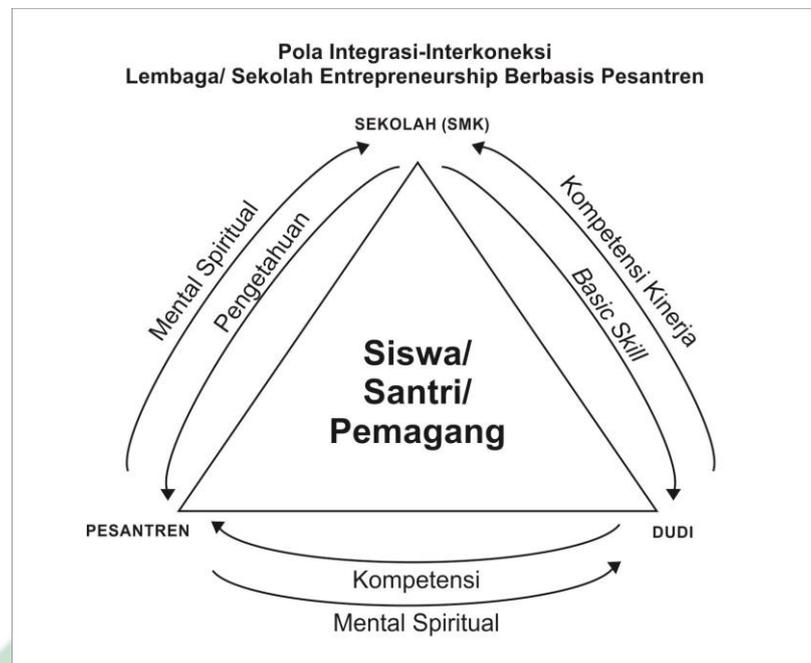
memiliki kompetensi *skill (entrepreneur)* merasa harus bersinergi dengan sekolah dan dunia usaha atau industri. Begitu juga halnya, dunia usaha dan industri yang membutuhkan karyawan yang kompeten dan berkarakter, tentu memandang perlu untuk bersinergi pula dengan sekolah dan pesantren. Dengan demikian, sinergitas dan saling keterkaitan antara komponen-komponen yang ada, kemudian membentuk pola integrasi yang bersifat interkonektif.

Corak pendekatan integrasi sistem pembelajaran yang dilakukan di SMK NJ Paiton, cenderung bersifat sirkular.<sup>288</sup> Hal tersebut dikarenakan masing-masing komponen memandang penting antara komponen yang satu terhadap yang lain. Masing-masing komponen sadar bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri dan pasti saling membutuhkan. Hal ini pula yang nampaknya relevan dengan praktik-praktik yang berkembang saat ini dalam tradisi keilmuan dan lembaga Islam di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, pola integrasi-interkoneksi antar SMK NJ, pesantren dan DUDI bisa diilustrasikan dalam gambar berikut:

---

<sup>288</sup> Dalam perspektif Amin Abdullah setidaknya terdapat tiga corak pendekatan integrasi keilmuan Islam dan sains, yaitu: pertama, pendekatan paralel, yaitu masing-masing dari keilmuan yang lain. Kedua, pendekatan linier, yaitu salah satu dari keduanya antara keilmuan Islam dan sains akan lebih diunggulkan, sehingga ada kemungkinan berat sebelah. Ketiga, pendekatan sirkular, yaitu masing-masing dapat memaklumi keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling melengkapi dan memperkuat antara satu dengan yang lain. Ibid., 219-223.



Menurut gambar di atas nampak ketiga komponen pendidikan yang menjadi tempat pembelajaran siswa yang sekaligus santri pesantren yang juga melaksanakan pemagangan di dunia usaha dan industri (DUDI) saling bersinergi, dan berinteraksi dalam satu kesatuan tidak terpisahkan. Satu sama lain nampak saling membutuhkan dan saling melengkapi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dari pola integrasi-interkoneksi sebagaimana tampak dalam gambar di atas, pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang notabene santri tersebut bersifat holistik-komprehensif dan tidak partikular-atomistik. Proses pembelajaran dengan pola integrasi-interkoneksi sebagaimana gambar di atas pada akhirnya akan melahirkan lulusan santri yang entrepreneur dan entrepreneur yang santri.

Berangkat dari fenomena adanya beberapa komponen subsistem pembelajaran yang terintegrasi dan terinterkoneksi, sebagaimana paparan di atas, nampaknya model pembelajaran di SMK NJ Paiton memiliki titik

relevansi dengan konsep dasar pendidikan sistem ganda (PSG). Artinya di SMK NJ Paiton dalam hal melibatkan beberapa komponen di luar komponen dirinya (pesantren dan dunia usaha atau industri) memiliki keserupaan dengan PSG. Dalam PSG terdapat dua komponen yang terlibat dalam proses pembelajarannya, yaitu sekolah dan dunia industri.

Hal tersebut di atas di dasarkan pada konsep PSG yang didefinisikan oleh para pakar dengan beberapa pengertian. Idler misalnya, mendefinisikan PSG sebagai “*vocational and enterprises of the formal or informal sector*” artinya “pelatihan praktik dan keterampilan yang dilakukan melalui kerjasama antar lembaga pelatihan dengan dunia usaha baik sektor formal maupun non formal.”<sup>289</sup>

Sementara Wardiman mengemukakan bahwa PSG sebagai pelatihan praktik kerja dan keterampilan yang dipersiapkan oleh dua partner yaitu sekolah dan industri. Pengertian ini serupa dengan definisi Wolf yang mengatidakan PSG adalah “*two place of learning of equal value and the same standard arcombined together to form a system*” yakni pembelajaran yang memiliki dua tempat pelaksanaan yaitu sekolah dan industri.<sup>290</sup>

Berdasarkan paparan di atas, betapapun pelaksanaan pembelajaran integratif di SMK NJ Paiton memiliki relevansi dengan konsep dasar PSG, tetetapi terdapat perbedaan jumlah komponen tempat pembelajaran. Jika

---

<sup>289</sup> H. Idler, *Study on Promotion of Market Oriented Training In Indonesia* (Jakarta: Dedikbud, 1995), 42.

<sup>290</sup> Wardiman Djojonegoro, *The Meaning of Link and Match, Paper Presented the Monthly Luncheon of the Indonesia-British Association* (Jakarta: Depdikbud, 1994), 43.

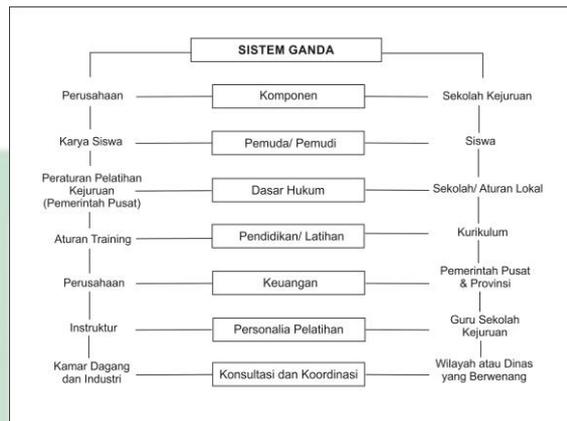
PSG sebagaimana pendapat para pakar hanya memiliki dua tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka di SMK NJ Paiton terdapat tiga komponen yang semuanya saling terlibat, saling berinteraksi dan sama-sama memiliki tanggung jawab, yaitu sekolah, pesantren dan dunia usaha atau industri (DUDI).

Selain itu, keterlibatan dan interaksi, serta tanggung jawab masing-masing komponen dalam realisasinya di SMK NJ Paiton tidaklah serigid konsep PSG yang ada.<sup>291</sup> Hal tersebut terutama dalam interaksi sekolah dan DUDI dengan pesantren. Jika dalam PSG keterkaitan program praktik di industri dengan pembelajaran di sekolah dituntut ketat menjadi suatu kombinasi yang kuat dan hal tersebut menjadi aspek vital, maka keterkaitan dengan pesantren dilakukan secara lebih longgar. Hal tersebut karena pesantren lebih dituntut untuk penguatan aspek mental spiritual dan *akhlakul karimah* yang lebih abstrak. Sementara sekolah dan DUDI lebih diorientasikan untuk kompetensi keterampilan dan kompetensi kerja. Sekolah bertanggung jawab untuk pengawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar, sementara DUDI bertanggung jawab dalam pengalaman praktik kerja nyata.

---

<sup>291</sup> Dalam hal ini, Bukit menjelaskan dalam konsep PSG, keterkaitan antara sekolah dan industri merupakan, reformasi pembelajaran yang secara rigid memiliki beberapa ciri khas, antara lain: terjadi aliran informasi yang artikulatif melalui dialog intens antara kedua belah pihak, guru-guru dan pembimbing dari pihak industri bekerjasama dalam persiapan pembelajaran di sekolah dan industri, instruktur pembimbing di industri mempelajari program pembelajaran di sekolah, dan sebaliknya para guru di sekolah mempelajari standar kompetensi dan pekerjaan praktik di industri. Ibid., 52.

Apabila dilihat dari sudut pandang pilar-pilar atau unsur-unsur yang menghubungkan antara sekolah dan DUDI dalam konsep PSG, dapat dilihat dari diagram seperti yang dilukiskan oleh Bukit sebagaimana berikut:<sup>292</sup>



Gambar Pilar-Pilar Utama pada PSG

Menurut diagram di atas, industri dan sekolah kejuruan merupakan unsur-unsur atau komponen utama dalam PSG. Selbihnya, diagram tersebut menunjukkan bahwa PSG memiliki komponen lainnya yang menonjol, yaitu: pemuda/ pemuda atau peserta didik, landasan hukum, acuan pendidikan/ pelatihan, pembiayaan, tenaga pengajar, dan dewan pembina/ koordinator. Begitu pula dapat di lihat dari diagram di atas, bahwa terdapat perbedaan-perbedaan istilah yang dipakai oleh dua belah pihak yaitu sekolah dan perusahaan. Namun, yang paling pokok, bahwa PSG memiliki komponen kegiatan pendidikan yang berbasis di industri (*work based training*). Kedua, tempat belajar tersebut memiliki nilai dan standar yang sama, dan dikombinasikan membentuk satu keutuhan.

<sup>292</sup> Ibid., 48.

Demikian pula, jika pelaksanaan integrasi sistem pembelajaran di SMK NJ Paiton dilihat dari sudut pandang pilar dan unsur-unsur di dalamnya, maka akan ditemukan titik singgung yang kuat dengan konsep PSG di atas. Hanya saja, tetap terdapat perbedaan yang menonjol di antara keduanya, terutama dalam jumlah komponen dan istilah-istilah yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan komponen subsistem pendidikan yang berintegrasi dengan SMK NJ bukan hanya DUDI sebagaimana di PSG, namun juga terdapat komponen lain berupa pondok pesantren.

Adapun perbedaan-perbedaan istilah yang digunakan, nampak pada penyebutan istilah-istilah yang terkait dengan unsur-unsur yang ada di komponen pesantren. Seperti istilah pemuda atau pemudi, jika dalam PSG disebut dengan siswa dalam komponen sekolah dan karya siswa dalam komponen perusahaan, maka dalam komponen pesantren disebut santri. Begitu pula dalam penyebutan pada unsur yang lain, seperti dasar hukum di pesantren disebut undang-undang atau tata tertib pesantren, panduan pendidikan/ pelatihan di pesantren disebut kurikulum pesantren, sumber keuangan di pesantren bersumber sari kas pesantren, serta konsultasi dan koordinasi di pesantren dilakukan dengan majlis atau dewan pengasuh dan pengurus yayasan pondok pesantren. Hal ini, jika digambarkan dalam bentuk diagram seperti diagram PSG di atas, maka akan nampak sebagaimana diagram berikut:



Gambar Diagram Pendidikan Multi Sistem

Berdasarkan paparan dan diagram di atas, nampak secara lebih jelas titik singgung sekaligus perbedaan-perbedaan yang ada antara teori PSG dengan pendidikan di SMK NJ Paiton. Jika dalam konsep PSG, komponen subsistem pendidikan yang terlibat hanya terdiri dari dua komponen yakni sekolah dan perusahaan, maka dalam konteks SMK NJ Paiton tidak hanya melibatkan dua komponen, tetapi tiga komponen dengan menambah komponen pesantren di dalamnya. Dengan demikian, penyebutan konsep pendidikan di SMK NJ Paiton menjadi tidak cocok disebut dengan istilah pendidikan sistem ganda (*dual system*), tetapi lebih cocok disebut dengan istilah pendidikan multi sistem, sebagaimana dalam diagram di atas.

Berdasarkan diskusi teoretis dengan data temuan penelitian sebagaimana di atas, maka bisa dipahami bahwa integrasi sistem pembelajaran di SMK NJ Paiton memakai pola Integrasi-Interkoneksi dengan melibatkan tiga komponen subsistem, yakni: sekolah, pesantren, dan DUDI. Melalui corak pendekatan sirkular, ketiga komponen subsistem tersebut saling berinteraksi, bersinergi, saling mengisi dan melengkapi.

Pembelajaran yang dilakukan di SMK NJ menjadi Holistik-Komprehensif dan tidak parsial dan atomistik.

Selanjutnya, konsep pendidikan yang dilaksanakan oleh SMK NJ Paiton yang menekankan pada sinergitas tiga komponen subsistem yang ada, memiliki titik relevansi dengan konsep pendidikan sistem ganda (PSG). Namun demikian, pola pendidikan di SMK NJ tidak serta merta bisa dikaitkan dengan pendidikan sistem ganda (PSG) karena di SMK NJ tidak hanya melibatkan dua subsistem (*dual system*), namun melibatkan tiga subsistem. Dengan demikian pola pendidikan di SMK NJ Paiton cenderung lebih tepat jika disebut pendidikan multi sistem (PMS), yaitu pola pendidikan yang melibatkan banyak (beberapa) subsistem.

#### 4. Integrasi Keuangan

Secara teoretis, keuangan dan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Menurut Mulyasa, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi *urgen* dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam manajemen pendidikan.<sup>293</sup>

Di SMK NJ Paiton, sebagaimana data yang ditemukan dalam penelitian ini, pengelolaan keuangan dan pembiayaan dilaksanakan secara integratif dengan pesantren, melalui sistem sentralisasi keuangan pesantren. Secara teoretis, konsep sentralisasi merupakan salah satu dari dua kondisi ekstrim pola manajemen dalam sebuah organisasi. Adapun

---

<sup>293</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah.*, 47.

lawan dari sentralisasi adalah desentralisasi, dimana salah satu keduanya sangat mungkin diambil menjadi pola pengelolaan dalam organisasi tersebut, sentralisasi diartikan bahwa semua keputusan dalam organisasi dibuat oleh satu orang atau top manajer, sementara desentralisasi mengasumsikan bahwa keputusan diambil oleh semua anggota.<sup>294</sup>

Sementara itu, Megginson menyatidakan bahwa desentralisasi adalah penyebaran kekuatan dan pengambilan keputusan kepada *lower-level manager* dalam organisasi. Definisi ini didukung oleh pendapat Hodgetts yang menyatidakan bahwa desentralisasi merupakan sistem manajemen yakni pengambilan keputusan dilaksanakan oleh tingkat yang lebih rendah dalam hirarki struktur organisasi.

Mencermati paparan teoretis di atas, nampaknya sistem sentralisasi yang dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid Paiton tidak serta merta cocok dengan definisi sentralisasi di atas. Hal tersebut dikarenakan sentralisasi keuangan sebagaimana di pesantren Nurul Jadid, tidak diputuskan hanya oleh top manajer pesantren (pengasuh), namun diputuskan oleh forum pengurus pesantren. Bahkan dalam forum atau rapat tersebut, pihak pesantren juga melibatkan pihak unit-unit pendidikan pesantren dalam pengelolaan keuangan. Dalam perencanaan, pesantren melakukan perencanaan melalui rapat bersama dengan semua unit pendidikan yang ada, sementara dalam pelaksanaannya, pesantren mencairkan pendanaan

---

<sup>294</sup> Harold Koontz, Cyril O'donnell & Heinz Wehrich, *Essentials of Management* (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 1982), 4.

sesuai kebutuhan unit melalui pengajuan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) setiap bulan. Adapun evaluasi keuangan, dilakukan oleh dewan pengawas (DEWAS) pesantren melalui pemeriksaan langsung di sekolah atau unit-unit yang ada.

Dengan demikian, sentralisasi keuangan di pesantren Nurul Jadid Paiton bisa diartikan sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang terpusat di pesantren, yang mengikat semua unit dan lembaga yang berada di bawah naungannya. Sentralisasi demikian berangkat dari filosofi bahwa pesantren sebagai lembaga utama dalam hirarki kelembagaan di dalamnya. Sementara unit-unit dan lembaga yang ada merupakan pelaksana pesantren dan bentuk pengembangan semata.

Hal tersebut di atas, sesuai dengan teori tentang beberapa faktor yang mempengaruhi diterapkannya sentralisasi atau desentralisasi dalam sebuah organisasi antara lain: biaya organisasi, ukuran dan usia organisasi, filosofi dari *top management*, filosofi personalia, area fungsional, sejarah perkembangan organisasi, persebaran geografis organisasi, ketersediaan, kontrol yang efektif, kualitas dan ketersediaan manajer, keragaman produk barang atau jasa yang ditawarkan, kebutuhan untuk beradaptasi dan berinovasi, tujuan akan kesatuan bentuk dari kebijakan, keinginan untuk independent dan pengaruh lingkungan.<sup>295</sup>

Berdasarkan teori di atas, terdapat beberapa faktor yang relevan dengan kontek sentralisasi di pesantren Nurul Jadid Paiton, antara lain

---

<sup>295</sup> Ibid.

biaya organisasi, filosofi dari pesantren sebagai *top management*, sejarah perkembangan organisasi, dan tujuan akan kesatuan bentuk kebijakan. Dalam masalah biaya organisasi, pesantren menyadari bahwa pengelolaan pesantren yang besar sebagaimana Nurul Jadid dengan berbagai jenjang lembaga pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, serta berbagai lembaga non pendidikan yang ada, sangat memerlukan biaya yang besar. Hal tersebut kemudian memerlukan pengelolaan yang menyatu dan sentral agar pesantren bisa memastikan semua unit dan lembaga di bawah naungan bisa berjalan, berkembang, dan maju bersama.

Adapun faktor filosofi, pesantren sebagai lembaga yang paling awal berdiri dalam konteks kelembagaan, sekaligus menjadi penggagas berdirinya unit-unit dan lembaga yang berada di bawah naungannya, merasa memiliki tanggung jawab akan eksistensi dirinya dan lembaga yang dinaungi. Pesantren harus bisa mengayomi semua dalam bentuk pelayanan yang adil dan merata. Di samping itu, pesantren sebagai lembaga yang utama, dengan visi misinya yang ada, dalam menggagas dan mendirikan lembaga-lembaga di bawahnya diorientasikan sebagai unit pelaksanaan pesantren. Dalam hirarki kelembagaan, pesantren merupakan lembaga tertinggi, sementara unit dan lembaga yang di bawahnya merupakan sub pesantren atau pelaksana pesantren. Hal ini juga terkait dengan faktor sejarah organisasi, dimana pesantren merupakan lembaga yang paling awal didirikan oleh pendiri pesantren sebelum berdirinya unit-unit dan lembaga pengembangannya.

Terkait faktor tujuan akan kesatuan bentuk kebijakan, di pesantren Nurul Jadid Paiton nampaknya juga demikian. Berangkat dari hasil data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pesantren Nurul Jadid Paiton tidak menginginkan adanya ego sektoral dalam pengelolaan unit dan lembaga di bawahnya. Hal tersebut tidak hanya akan menyebabkan disharmonisasi antar lembaga, namun bisa membuka kemungkinan lepasnya kontrol unit-unit dan lembaga tersebut dari pesantren. Untuk itu, pesantren berkepentingan untuk menyatukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan, meskipun tidak serta merta meninggalkan unit-unit dan lembaga yang ada, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Sementara itu, pelaksanaan sentralisasi keuangan di pesantren Nurul Jadid Paiton, berdasarkan temuan data dalam penelitian ini adalah semua bentuk pemasukan atau penerimaan yang diperoleh unit dan lembaga di lingkungan pesantren Nurul Jadid harus disetor ke rekening pesantren. Bahkan semua santri (yang notabene juga siswa di sekolah) dalam membayar semua pembiayaan pendidikan (baik SPP sekolah, SPP pondok, uang makan, biaya ujian dan lain-lain) cukup membayar melalui satu kali proses pembayaran langsung ke rekening pesantren. Pesantren mengelolah dan mengatur penerimaan dana tersebut untuk disebar lagi ke unit-unit atau lembaga-lembaga sesuai dengan RAPBS yang diajukan tiap bulan oleh pihak unit atau lembaga seperti SMK NJ.

Maka berdasarkan paparan di atas, integrasi keuangan yang dilaksanakan di SMK NJ Paiton merupakan sistem pengelolaan keuangan

yang mengikuti kebijakan sentralisasi keuangan pesantren. Bentuk sentralisasi keuangan di pesantren Nurul Jadid sebagaimana di atas, bisa diistilahkan sebagai sistem *one gate revenue policy* dan *multigates expenses policy*. Artinya sistem sentralisasi tersebut pertama mengharuskan semua bentuk pendapatan dari unit dan lembaga di bawah pesantren, seperti SMK NJ, harus disetor ke rekening pesantren dan dicatat sebagai pendapatan pesantren. Penerimaan pendapatan tersebut, disebarkan kembali oleh pesantren kepada unit dan lembaga melalui prosedur pengajuan RAPBS setiap bulan.

Adapun evaluasi dari proses sentralisasi keuangan tersebut dilakukan oleh pesantren melalui dewan pengawas pesantren, dengan melakukan pemeriksaan langsung ke unit-unit dan lembaga-lembaga yang ada. Dengan demikian, bisa dikatidakan bahwa evaluasi sentralisasi keuangan di SMK NJ Paiton dilakukan oleh badan periksaan keuangan eksternal berupa dewan pengawas pesantren.

#### 5. Integrasi Sarana dan Prasarana

Secara teoretis sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan terutama kegiatan belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta media pengajaran dan lain-lain. Sementara prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses

pendidikan, seperti halaman sekolah, taman, kebun, akses jalan menuju sekolah, lapangan dan lain-lain.<sup>296</sup>

Mengingat urgensi sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan, maka pengelolaan atau manajemen sarana dan prasarana harus bisa dipastikan terlaksana dengan baik.<sup>297</sup> Manajemen sarana dan prasarana, menurut Sobri diartikan sebagai kegiatan sementara mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penghapusan, penginvestasian, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah agar tepat guna dan tepat sasaran.<sup>298</sup> Sementara menurut Rohiat, manajemen sarana dan prasarana adalah aktivitas mengatur dalam rangka mempersiapkan segala peralatan dan material yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan, terutama kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.<sup>299</sup>

Di SMK NJ Paiton, pengelolaan sarana dan prasarana terintegrasi dengan manajemen sarana dan prasarana pesantren Nurul Jadid. Artinya kegiatan pengaturan dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di SMK NJ, direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan diawasi bersama pihak pesantren. Bahkan cenderung pihak pesantren yang lebih menonjol dan dominan dalam pelaksanaan manajemen tersebut. Hal ini dikarenakan

---

<sup>296</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah.*, 49. Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Malang: Erlangga, 2007), 170-171.

<sup>297</sup> Ibid, 50.

<sup>298</sup> Sobri, *Pengelolaan Pendidikan* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), 61.

<sup>299</sup> Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 26.

pesantren merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi atas keberlangsungan proses pendidikan yang ada di SMK NJ, dimana SMK NJ digagas dan didirikan oleh pesantren Nurul Jadid Paiton.

Lebih dari itu, integrasi pengelolaan sarana dan prasarana antar pihak SMK NJ dan pesantren bisa terselenggarakan dengan baik, karena keberadaan SMK NJ secara fisik berada di dalam kompleks pesantren, sehingga secara otomatis menjadi bagian tidak terpisahkan (terpadu) dari pesantren. Di samping itu, secara filosofis, keberadaan SMK NJ diposisikan sebagai unit pelaksanaan pesantren, sehingga segala sesuatunya tidak boleh lepas dari kebijakan pesantren yang menaungi.

Pelaksanaan integrasi pengelolaan sarana dan prasarana di SMK NJ dengan pesantren, sebagaimana di atas, terselenggara dalam beberapa kegiatan pengelolaan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan teori umum tentang fungsi manajemen.<sup>300</sup> Dalam proses perencanaan, pihak pesantren melakukan rapat bersama dengan unit dan lembaga di bawah naungannya untuk membahas segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk sarana dan prasarana, sesuai unit dan lembaga masing-masing. Dalam rapat tersebut, unit dan lembaga-lembaga yang ada mengusulkan kebutuhan-kebutuhan, perlengkapan masing-masing, yang kemudian ditampung oleh pesantren. Berangkat dari usulan-usulan itulah,

---

<sup>300</sup> Teori sebagaimana dikutip oleh Mulyono berpendapat bahwa terdapat empat fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC yaitu: *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), 23-24.

pesantren menentukan skala prioritas pengadaannya dengan mempertimbangkan keberadaan dana yang tersedia.

Perencanaan sebagaimana di atas, nampaknya sesuai dengan langkah-langkah perencanaan dalam konsep manajemen sarana dan prasarana sebagaimana dijelaskan oleh para pakar. Ibrahim Bafadal misalnya, menjelaskan bahwa proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi langkah-langkah antara lain: (1) menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diusulkan oleh unit-unit atau menginferisir kebutuhan-kebutuhan atau kekurangan perlengkapan sekolah, (2) menyusun rencana kebutuhan sekolah dalam periode tertentu, (3) mengkroscek rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang sudah ada, (4) menyesuaikan rencana kebutuhan dengan anggaran dana sekolah yang tersedia.<sup>301</sup>

Dalam pengorganisasian pengelolaan sarana dan prasarana di SMK NJ dilaksanakan melalui pembagian tugas antar sekolah dan pesantren Nurul Jadid. Artinya dalam proses pengadaan, penggunaan, pemeliharaan serta tanggung jawab inventarisir dan pengawasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, terdapat pembagian tugas, mana yang menjadi tanggung jawab sekolah dan mana yang menjadi tanggung jawab pesantren.

Pengorganisasian sebagaimana di atas, relevan dengan konsep pengorganisasian (*organizing*) dalam manajemen sarana dan prasarana

---

<sup>301</sup> Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

pendidikan sebagaimana disampaikan oleh para ahli. Menurut Hidayat dan Machali yang mengutip pendapat Haidjarachman menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, melalui pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang diantara mereka serta saling berinteraksi dan berintegrasi secara aktif.<sup>302</sup>

Adapun dalam ranah pelaksanaan, pengelolaan sarana dan prasarana di SMK NJ Paiton terealisasi secara sinergis dan integratif. Melalui komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan pesantren, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Seperti dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan, kedua belah pihak seringkali berbagi tugas atau bersama-sama melakukan, sesuai kondisi yang ada. Demikian pula dalam pelaksanaan distribusi atau penggunaan sarana dan prasarana, jika sarana dan prasarana tersebut milik pesantren dan bisa diakses bersama oleh unit-unit dan lembaga yang ada, maka pesantren menetapkan prosedur perizinan kepada pesantren, seperti lapangan bersama milik pesantren, balai latihan kerja santri, masjid pesantren dan sebagainya.

Sementara dalam pelaksanaan pemeliharaan dan inventarisir, baik sekolah maupun pesantren masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan bagian sarana dan prasarana masing-masing. Untuk pelaksanaan di

---

<sup>302</sup> Ari Hidayat, Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah* (Bandung: Pustaka Educa, 2010), 22.

pihak pesantren ditangani oleh bagian sarana dan prasarana pesantren serta bertanggung jawab pada pimpinan pesantren, sebagaimana juga sekolah.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam ranah pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di SMK NJ Paiton yang terintegrasi dengan pesantren, mengerucut pada pelaksanaan distribusi dan pemeliharaan. Hal ini selaras dengan konsep umum pelaksanaan dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang diorientasikan untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan yang lancar, produktif, efektif, nyaman, dan menyenangkan.<sup>303</sup>

Dalam ranah evaluasi atau pengawasan sarana dan sarana pendidikan di SMK NJ Paiton dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi dengan pesantren. Dalam hal ini, menentukan sebuah sarana atau prasarana yang masih baik atau rusak ditentukan melalui mekanisme yang melibatkan dua belah pihak yakni sekolah dan pesantren. Pihak sekolah bertugas mengecek dan memeriksa serta melaporkan kondisi sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pesantren untuk ditindak lanjuti. Kemudian pesantren menindak lanjuti laporan yang ada, serta menetapkan statusnya apakah masih bisa dipertahankan atau diganti. Dengan kata lain, proses pengawasannya dilakukan secara terpadu antara pihak sekolah dan pesantren.

---

<sup>303</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), 124.

Secara teoretis, pengawasan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan dimaksudkan sebagai proses pengamatan dan pengukuran antara kondisi tertentu pasca proses pelaksanaan berbagai kegiatan dengan standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini pengawasan bermuara pada penetapan dan penghapusan barang. Dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi sarana dan prasarana yang akan dihapuskan, antara lain: rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak sesuai kebutuhan, terkena larangan, mengalami penyusutan secara alami, biaya pemeliharaan yang tidak seimbang, hilang dan terkena bencana alam.<sup>304</sup>

Berdasarkan diskusi antara konsep teoretis dan temuan data di atas, bisa dikatidakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di SMK NJ Paiton memiliki kesesuaian dengan teori manajemen. Menurut Terry, yang mengungkapkan terdapat empat fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* (POAC). Adapun pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarananya dilakukan secara integratif antara SMK NJ dengan pesantren, dengan pendekatan komunikasi dan saling berinteraksi. Dengan demikian corak integrasi yang dilaksanakan bercorak integrasi-interkoneksi dua arah antara sekolah dan pesantren.

#### 6. Integrasi Iklim Sekolah

Secara teoretis, menurut Litwin dan Stringer sebagaimana dikutip oleh Gunbuyi, iklim sekolah memiliki beberapa variasi definisi yang

---

<sup>304</sup> Ibid., 127.

dirumuskan oleh para ahli berdasarkan persepsi subyektif terhadap sistem formal maupun informal, gaya kepala sekolah, dan faktor lingkungan sekolah penting lainnya yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai dan motivasi individu dilingkungan sekolah tersebut.<sup>305</sup>

Pengertian yang lebih jelas tentang iklim sekolah didefinisikan oleh beberapa ahli seperti Pretorius dan Villiers yang menjelaskan bahwa iklim sekolah adalah sesuatu yang merujuk kepada jiwa, psikologi dan atribut institusi sekolah yang menjelaskan persepsi kolektif dari perilaku rutin yang mempengaruhi sikap dan perilaku sekolah.<sup>306</sup> Sementara Hoy, Smith dan Swetkad, sebagaimana dikutip oleh Milner, mendefinisikan iklim sekolah sebagai manifestasi dari kepribadian sekolah yang dapat dievaluasi.<sup>307</sup> Senada dengan pengertian ini, Sorenson dan Goldsmith memahami iklim sekolah sebagai kepribadian sekolah yang kolektif.<sup>308</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, iklim sekolah diartikan sebagai suatu kepribadian sekolah yang membedakan dengan sekolah yang lain. Lebih tegasnya, iklim sekolah merupakan manifestasi kualitas dan karakter kehidupan sekolah yang mencerminkan norma-norma, tujuan, nilai, hubungan interpersonal, praktek pembelajaran serta struktur sekolah.

---

<sup>305</sup> Gunbuyi, Ilhan, *School Climate and Teachers Perception on Climate Factors: Research Into nine Urban High Schools* (The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2007), 1.

<sup>306</sup> Stephanus Pretorius dan Elsabe de Villiers, *Educators Perceptions of School Climate and Health in Selected primary School* (South African Journal of Educational, 2009), 33.

<sup>307</sup> Karen Milner dan Harriet Khoza, *A Comparison of Teachers Strees and School Climate Acroos School With Differet Macrie Succes Rate* (South African Journal of Educational, 2008), 158.

<sup>308</sup> Sorenson dan Richard D. Goldsmith, Liyod M, *The Principal's Guide to Managing School Personal* (Corwin Prees, 2008), 30.

Dalam konteks SMK NJ Paiton, nampaknya iklim sekolah yang ada, jika didasarkan pada teori-teori di atas, merujuk pada kepribadian pondok pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga yang menaunginya. Adapun kepribadian pesantren Nurul Jadid tercermin pada Visi Misi Pesantren, serta Trilogi santri dan Panca kesadaran santri yang dirumuskan oleh pendiri sekaligus pengasuh periode pertama, yaitu KH. Zaini Mun'im. Kondisi demikian dikarenakan keberadaan SMK NJ, baik secara fisik maupun filosofis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pesantren itu sendiri.

Secara fisik, SMK NJ berada di tengah-tengah kompleks pesantren, bahkan menjadi salah satu asset pesantren. Sementara, secara filosofis, SMK NJ merupakan salah satu unit pendidikan yang digagas dan didirikan pesantren. SMK NJ merupakan salah satu unit pelaksana pesantren diantara unit dan lembaga-lembaga yang lain.

Berangkat dari fenomena di atas, terlaksananya Integrasi iklim sekolah di SMK NJ dengan pesantren merupakan konsekuensi logis dari keberadaan SMK yang terpadu dengan pesantren. Dengan kata lain, proses terselenggaranya integrasi iklim sekolah dengan pesantren berjalan secara alamiah dan otomatis. Hal tersebut juga diperkuat dengan keberadaan siswa SMK NJ yang sekaligus merupakan santri mukim di pondok pesantren Nurul Jadid itu sendiri. Dengan demikian, integrasi iklim sekolah dengan pesantren menjadi kokoh karena kompleks, lingkungan dan subjek pembelajaran (siswa/santri) yang terpadu dan menyatu.

Terpadunya, komplek, lingkungan dan subjek belajar dimana siswa SMK NJ sekaligus merupakan santri pesantren, menjadi poin penting bagi pelaksanaan integrasi iklim sekolah yang efektif dan efisien. Hal ini mengacu pada konsep dan strategi penanaman nilai-nilai spiritual, karakter dan nilai-nilai budaya lainnya melalui integrasi sekolah dan pesantren menurut para ahli. Muhaimin misalnya, menjelaskan sedikitnya ada dua cara pengintegrasian dalam proses penanaman nilai-nilai tersebut kepada para siswa atau santri, yaitu: pengintegrasian melalui kegiatan sehari-hari dan pengintegrasian dalam kegiatan yang diprogramkan.<sup>309</sup>

Dalam pengintegrasian melalui kegiatan sehari-hari, menurut Muhaimin dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: keteladanan, kegiatan spontan teguran, pengkondisian lingkungan dan kegiatan rutin. Keteladanan, merupakan proses meniru dan mencontoh perilaku pimpinan, guru, staf dan semua karyawan lembaga yang bisa dijadikan model bagi siswa. Jika di sekolah, maka siswa akan meniru dan mencontoh (meneladani) perilaku kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, guru, staf sampai petugas satpam sekolah sebagai model perilaku mereka. Sementara di pesantren, santri akan meneladani perilaku kiai, pengurus pesantren, ustadz dan semua karyawan pesantren sebagai uswah dalam tingkah laku mereka.

---

<sup>309</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 115-117.

Di SMK NJ Paiton, keteladanan senantiasa dilaksanakan dan ditekankan kepada para siswa. Demikian juga ketika siswa berada di luar sekolah, dan pulang ke asrama masing-masing di pondok pesantren, keteladanan semakin ditekankan karena memang menjadi budaya utama pesantren. Dengan demikian keteladanan bagi siswa SMK NJ bisa berlangsung terus-menerus selama 24 jam baik di sekolah maupun di pesantren. Penanaman nilai-nilai spiritual, budaya dan karakter yang ingin ditanamkan kepada siswa atau santri betul-betul intens dan maksimal.

Adapun kegiatan spontan, juga terlaksana baik di sekolah maupun di pesantren. Di sekolah, semisal ada guru melihat sikap atau tingkah laku siswa yang kurang baik, seperti malas, terlambat, membuang sampah di sembarang tempat, bertutur kata yang tidak sopan, dan sebagainya, maka guru tersebut secara spontan dan segera menegur dan memberi penjelasan dan arahan agar tidak mengulangi lagi dan bisa lebih baik dalam bersikap. Di pesantren, para santri yang juga sebagai siswa di sekolah mereka akan segera mendapati teguran, arahan, apabila mereka melakukan sikap dan tingkah laku yang kurang baik, secara spontan, baik dari pegasuh langsung, pengurus maupun para ustadz.

Terkait pengkondisian lingkungan, sekolah dan pesantren di Nurul Jadid Paiton, sama-sama melakukan pengkondisian yang dimaksud. Misalnya, di sekolah, untuk ruang kelas di pisah antara kelas putra dan kelas putri, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan bersama namun tetap memakai tabir

pemisah antara putra dan putrid. Itu, pengkondisian lingkungan tentang kebersihan dan keindahan, di sekolah terdapat slogan-slogan mengenai nilai-nilai keagamaan, tersedianya tempat sampah, aturan tata tertib sekolah yang ditempelkan ditempat yang strategis, serta pengkondisian-pengkondisian lingkungan yang lain, sehingga para siswa selama berada di sekolah mereka merasa terus menerus dikondisikan dalam atmosfer nilai-nilai agamis dan positif.

Demikian pula, ketika siswa pulang kelingkungan asrama pesantren mereka juga menemukan pengkodisian-pengkondisian lingkungan dan suasana spiritual yang kental, mulai dari tata letidak asrama yang berdekatan dengan dhalem pengasuh, masjid pesantren, maqbarah para *mashayikh* yang telah wafat, serta suasana ibadah, pengajian Qur'an, kitab kuning, kerja bakti, serta suasana persaudaraan yang kuat, dan sebagainya, menjadikan proses penanaman nilai-nilai tersebut betul betul konstan dan mengakar. Selain itu, pemisahan asrama putra dan putri, tata tertib pesantren, penyediaan balai tamu dan sebagainya, menjadi proses penanaman sikap agamis dan budaya pergaulan yang Islami. Dengan demikian para siswa atau santri benar-benar mendapat pembiasaan yang efektif tentang nilai-nilai spiritual, budaya dan karakter Islami.

Adapun dalam kegiatan rutin, di SMK NJ ataupun di pondok pesantren terlaksana baik dalam kegiatan rutin harian maupun periodik. Dalam kegiatan harian di sekolah, para siswa dibiasakan berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, mengucapkan salam saat bertemu

orang lain, berjabat tangan dan mencium tangan guru ketika bertemu, membersihkan kelas, berjamaah shalat dhuhur di musalla sekolah, dan lain-lain. Demikian pula di pesantren para santri diharuskan mengikuti kegiatan-kegiatan rutin harian, seperti shalat jamaah lima waktu, mengaji al-Qur'an, berdhikir, shalat tahajjud, istighasah, mengaji kitab kuning kepada pengasuh atau kepada badal, dan sebagainya. Sementara kegiatan yang periodik di sekolah, seperti pelaksanaan acara peringatan hari besar Islam (PHBI) di sekolah, upacara Mingguan setiap hari Senin, dan upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, dan lain-lain. Adapun di pesantren, terdapat kegiatan-kegiatan periodik, kegiatan *Rotjibul Haddad* setiap hari Selasa dan Jum'at, pembacaan salawat, surat yasin dan tahlil setiap malam Jum'at, pelaksanaan shalat hajat dan istighasah kubra setiap malam Sabtu Wage, khataman kitab kuning setiap Ramadhan, pelaksanaan peringatan hari besar Islam, upacara hari santri nasional dan lain-lain.

Adapun, pengintegrasian melalui kegiatan-kegiatan yang diprogramkan, di SMK NJ Paiton berupa kegiatan-kegiatan yang direncanakan, dan di programkan terlebih dahulu oleh guru. Hal tersebut diselenggarakan jika guru menganggap perlu memberikan pemahaman atau prinsip-prinsip nilai religius yang diperlukan. Seperti, ketika guru menginginkan untuk menanamkan nilai religius atau karakter-karakter yang lain dalam sebuah mata pelajaran, maka dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru tersebut memasukkan muatan nilai-nilai dimaksud di dalamnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka bisa dipahami bahwa integrasi iklim sekolah dengan pesantren di SMK NJ Paiton terlaksana secara natural, karena tiga faktor utama, yaitu keberadaan SMK secara fisik yang terletak di tengah-tengah kompleks pesantren, keberadaan SMK secara filosofis sebagai salah satu unit pelaksana pesantren, dan keberadaan siswa SMK yang notabene sebagai santri mukim pesantren. Selanjutnya, tiga faktor itulah yang menjadi modal efektifitas proses pengintegrasian iklim sekolah melalui kegiatan sehari-hari ataupun melalui kegiatan yang diprogramkan baik di sekolah ataupun di pesantren.

## **B. Dampak Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton**

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini, pengelolaan SMK NJ Paiton melalui sistem integrasi, memiliki dampak, baik positif maupun negatif bagi komponen-komponen yang terkait, yakni sekolah, dunia usaha atau industri dan pesantren. Adapun penjelasan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Dampak Bagi Sekolah**

Menurut paparan temuan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa dampak pengelolaan sekolah melalui sistem integrasi bagi SMK NJ sendiri, yaitu; meningkatnya kepercayaan diri segenap pengelolaan SMK NJ, meningkatnya etos dan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terfokusnya pelayanan pendidikan pada proses

pembelajaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada SMK NJ Paiton.

Secara teoretis kepercayaan diri merupakan salah satu syarat penting baik bagi individu maupun kelompok dalam mengembangkan aktivitas dan kreativitas dalam rangka mencapai prestasi. Kepercayaan diri (*Self Confidence*) menurut para ahli terdapat beberapa pengertian. Lauster misalnya, mengatidakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap yang mencerminkan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki, sehingga ia tidak cemas dalam melakukan segala sesuatu, merasa bebas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, mampu mempertanggung jawabkan, sopan dalam berinteraksi, memiliki motivasi untuk berprestasi, serta paham dengan kelebihan dan kekurangan diri sendiri.<sup>310</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Ghufroon dan Risnawati mengatidakan kepercayaan diri sebagai aspek kepribadian seseorang yang berupa keyakinan atas kemampuan yang dimiliki, sehingga ia tidak mudah terpengaruh orang lain, bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak, bersikap gembira, optimis, toleran dan bertanggung jawab.<sup>311</sup> Sementara Angelis mengatidakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap dan perasaan yakin yang tertanam dalam diri seseorang bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan melakukan sesuatu yang nyata.<sup>312</sup>

---

<sup>310</sup> P. Lauster, *Tes Kepribadian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4.

<sup>311</sup> M. N. Ghufroon & R. S. Risnawati, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2002), 91.

<sup>312</sup> B. De Angelis, *Percaya Diri Sumber Sukses dan Kemandirian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 5.

Dalam perspektif Islam, kepercayaan diri merupakan sikap positif yang senantiasa didorong untuk dimiliki oleh umat Islam. Pemahaman tentang konsep kepercayaan diri bisa dilacak dan ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an di antaranya adalah QS. Ali Imran: 139 sebagai berikut:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ١٣٩

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Ali Imran: 139).

Demikian pula QS. Fussilat: 30 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا  
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ٣٠

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatidakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatidakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu” (QS. Fussilat: 30).

Kedua ayat di atas secara jelas mendorong terwujudnya sikap tidak takut dan bersedih pada diri umat Islam. Perasaan tidak takut dan tidak bersedih merupakan salah satu ungkapan rasa percaya diri seseorang. Dengan demikian jelas bahwa percaya diri sangat dianjurkan dalam Islam. Hal tersebut mengingat percaya diri menjadi salah satu unsur kesempurnaan karakter personal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kehidupan.

Berdasarkan paparan di atas, nampak bahwa sikap percaya diri menjadi modal penting bagi individu-individu dalam melaksanakan aktifitas dan tanggung jawab profesi yang digeluti. Dalam konteks pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana SMK NJ Paiton, kepercayaan diri bagi para pengelolanya juga menjadi modal utama untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan yang diinginkan.

Adapun meningkatkan etos kerja tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan serta terfokusnya pelayanan pendidikan pada proses pembelajaran di SMK NJ Paiton menjadi modal terwujudnya pendidikan yang sukses. Hal tersebut dikarenakan tenaga pendidikan (guru) merupakan salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Guru merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran signifikan dalam proses pembelajaran, karena ia merupakan perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas guru, perlu adanya kondisi dan iklim sekolah yang kondusif serta hubungan yang baik antar unsur yang ada di lingkungan sekolah tersebut.<sup>313</sup>

Secara etimologi tersebut, maka etos merupakan sikap yang di dalamnya terkandung gairah atau semangat yang sangat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara maksimal dan selalu berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna.<sup>314</sup> Adapun kerja oleh para ahli

---

<sup>313</sup> Bandingkan dengan Sofyan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah.*, 251.

<sup>314</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 15.

didefinisikan dalam beberapa pengertian. Al Khayyat mengartikan kerja sebagai bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal intelektual atau fisik, materi maupun non materi, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi.<sup>315</sup> Sementara al-Khindi mengartikan kerja sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat fisik, psikologis maupun sosial.<sup>316</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, maka etos kerja bisa diartikan sebagai pandangan terhadap kerja yang memunculkan gairah dan semangat yang kuat dalam melakukan upaya memenuhi kebutuhan baik *duniawi* maupun *ukhrawi*. Dari sini, etos kerja yang tinggi bisa memiliki nilai ibadah sebagai manifestasi amal saleh melalui sudut pandang dan motivasi (niat) yang luhur. Apabila etos kerja dikaitkan dengan tenaga pendidikan dan kependidikan (guru dan karyawan) maka dapat diartikan sebagai sikap dan pandangan terhadap kerja yang dimiliki oleh tenaga pendidikan dan kependidikan.

Dalam konteks SMK NJ Paiton, meningkatnya etos kerja tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kependidikan (karyawan) sebagai dampak pelaksanaan integrasi pengelolaan, memiliki relevansi dengan teori tentang faktor-faktor munculnya etos kerja. Secara garis besar, terdapat

<sup>315</sup> Abdul Aziz al-Khayyat, *Nazrah al-Islam Lil 'Amah Wa Atsaruhu Fi at Tanmiyah*, Terj. Moh. Nurhakim (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), 13.

<sup>316</sup> Ali Sumanto al-Khindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat* (Solo: CV Aneka, tt), 41.

dua faktor yang mempengaruhi etos kerja, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>317</sup>

Dalam konteks etos kerja guru, faktor internal yang mempengaruhi hal tersebut antara lain; ajaran yang diyakini atau sistem budaya, agama dan kepercayaan, serta semangat untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi. Sementara faktor-faktor eksternal yang dimaksud adalah antara lain; latar belakang pendidikan, sistem sosial dan lingkungan kerja.<sup>318</sup>

Berangkat dari teori di atas, maka meningkatnya etos kerja guru atau tenaga pendidikan dan bahkan tenaga kependidikan di SMK NJ Paiton sebagai dampak dari sistem integrasi manajemen cenderung masuk dalam kategori internal dan eksternal sekaligus. Hal tersebut dikarenakan integrasi itu sendiri muncul sebagai bentuk kebijakan lokal (*local wisdom*) di pesantren Nurul Jadid dan SMK NJ yang berada di lingkungan pesantren dan menjadi salah satu unit pelaksana pesantren. Hal tersebut menjadikan posisi tenaga pendidikan dan kependidikan di SMK NJ sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan pesantren. Dengan merasa sebagai pejuang pesantren, maka mereka tidak hanya memaknai bekerja sebagai tuntutan profesi, tetapi juga sebagai bentuk perjuangan, pengabdian dan ibadah. Hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk

---

<sup>317</sup> Abd. Jilil, *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan.*, 71.

<sup>318</sup> HM. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 283.

pandangan kerja (mengajar) yang dipengaruhi oleh *World View Islam* dan budaya pesantren.

Adapun meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada SMK NJ Paiton sebagai dampak integrasi manajemen yang ada merupakan poin penting bagi SMK tersebut. Hal ini karena keberadaan SMK secara umum masih seringkali dihadapkan pada problematika berupa stigma negatif di masyarakat. Menurut Bukit adanya stigma negatif terhadap pendidikan kejuruan sebagaimana SMK senantiasa menjadi problem dalam pengembangan pendidikan kejuruan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain.<sup>319</sup>

Dalam konteks Indonesia, stigma negatif kepada pendidikan kejuruan tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yaitu masyarakat memandang SMK belum bisa memberikan jaminan bahwa lulusannya akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Di samping itu, masyarakat lebih memilih pandangan tradisional bahwa gelar kesarjanaan lebih bergengsi dan lebih menjanjikan, sehingga bagi mereka pendidikan umum lebih baik. Lebih dari itu, bagi kalangan agamis konservatif terdapat persepsi bahwa SMK merupakan sekolah yang hanya berorientasi duniawi dan jauh dari pembelajaran keagamaan dan akhlak.

Di lain pihak, para pengusaha sebagai pengguna tenaga kerja di Indonesia, belum mengandalkan tenaga kerja mereka dari lulusan sekolah menengah kejuruan. Bagi pengusaha, kompetensi lulusan SMK masih

---

<sup>319</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan.*, 6.

belum sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga SMK belum mampu menjadi tumpuan dan solusi. Sebab itu, para pengusaha tidak terlalu berkepentingan dan tidak terlalu peduli dengan SMK.<sup>320</sup>

Berangkat dari problematika di atas, nampaknya pengelolaan SMK Nurul Jadid Paiton, melalui integrasi manajemen yang melibatkan tiga komponen yaitu sekolah, pesantren, dan dunia usaha dan industri, memiliki dampak positif sebagai *problem solving* terutama terkait citra dan stigma di atas. Melalui strategi integrasi dengan dunia usaha dan industri, SMK NJ Paiton mampu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan proses pembelajaran menuju terwujudnya lulusan SMK yang kompeten dan memiliki kecakapan kerja sesuai standar kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan prinsip *link and match* dan integrasi simbiosis antar sekolah dan dunia usaha atau industri, proses pembelajaran di SMK NJ tentu akan menjadi daya tarik dan citra positif tersendiri bagi masyarakat.

Sementara integrasi SMK NJ dengan pesantren, memiliki dampak positif berupa hilangnya persepsi negatif masyarakat bahwa SMK hanya berorientasi duniawi saja dan jauh dari pembelajaran agama dan akhlak.

Integrasi penuh<sup>321</sup> antara SMK NJ Paiton dengan pesantren mampu

---

<sup>320</sup> Ibid., 7-8.

<sup>321</sup> Integrasi penuh merupakan istilah model integrasi yang dipopulerkan oleh Affandi Mochtar dalam diskursus transformasi pesantren. Menurut Mochtar terdapat empat model integrasi yang dilakukan oleh pesantren dalam proses transformasi yang dilakukan. Empat model tersebut yaitu; model integrasi penuh, integrasi selektif, integrasi instrumental dan integrasi minimal. Integrasi penuh memiliki ciri utama yaitu mempertahankan sepenuhnya watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah, serta menyelenggarakan sepenuhnya pola sistem pendidikan sekolah, madrasah dan bahkan perguruan tinggi. Sementara integrasi selektif memiliki ciri mempertahankan watak dan sistem pesantren salafiyah sementara sistem madrasah atau sekolah

mengubah persepsi negatif tersebut, karena proses pembelajaran antara pengetahuan umum, keterampilan, pengetahuan agama dan praktiknya, serta pembinaan akhlak dan karakter religius, dilaksanakan secara seimbang dengan intensitas yang tinggi.

Keberadaan sekolah di tengah-tengah kompleks pesantren, status siswa yang notabene santri mukim pesantren, serta iklim dan budaya kepesantren yang kental menjadikan masyarakat percaya bahwa SMK NJ Paiton tidak hanya berorientasi kerja duniawi saja, namun juga berorientasi religius (ukhrawi), sehingga ia berbeda dengan SMK yang lain, terutama SMK yang berada di luar pesantren.

Adapun dampak negatif bagi sekolah atas pelaksanaan integrasi manajemen di SMK NJ sebagaimana dalam temuan data penelitian ini adalah antara lain; terbatasnya kebijakan dan kewenangan pengelola sekolah, pengelola sekolah cenderung pasif dan konsumtif serta bertambahnya tanggung jawab sekolah, tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga tanggung jawab kepada sekolah.

Terbatasnya kebijakan dan kewenangan pengelolaan sekolah sebagaimana paparan di atas dikarenakan pengelola sekolah terutama kepala sekolah bukan merupakan pihak yang bisa secara mandiri

---

diadopsi sebagai instrumen pengorganisasian belajar saja tanpa mengadopsi kurikulum modern yang ada di madrasah atau sekolah. Integrasi instrumental memiliki ciri memodifikasi watak dan sistem pendidikan pesantren salafiyah dengan memberikan tekanan kepada bahasa dan menggunakan sistem madrasah atau sekolah sebagai instrumen pengorganisasian belajar. Adapun integrasi minimal memiliki ciri sistem pesantren dimodifikasi sebagai instrumen pendidikan berasrama, sementara pola pendidikan yang diselenggarakan memakai sistem madrasah atau sekolah secara penuh. Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam* (Ciputat: Penerbit Kalimah, 2001), 131.

mengambil sebuah kebijakan atau kewenangan tertentu. Tetapi pengelola sekolah harus berkomunikasi dan mendapat persetujuan atau restu pesantren, terutama dalam menentukan keputusan atau kebijakan strategis. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sekolah dalam hal ini SMK NJ sebagai unit pelaksana pesantren. Kondisi semacam ini sedikit banyak akan mengganggu pada dinamisasi gerak pengelolaan sekolah, terutama kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Secara teoretis kepala sekolah sebagai pimpinan pengelolaan sekolah memiliki beberapa tugas dan peran fungsi, antara lain; sebagai administrator, evaluator, supervisor, manajer, motivator, leader dan inovator.<sup>322</sup> Tugas dan peran fungsi tersebut bisa tidak berjalan dengan baik jika terdapat beberapa penghambat yaitu; sekedar mengadopsi konsep apa adanya tanpa upaya kreatif, kepada sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri atau hanya berdasarkan instruksi yang ada kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak saja, menganggap bahwa manajemen sekolah yang ada akan berhasil dengan sendirinya tanpa harus ada upaya lebih yang harus dilakukan.<sup>323</sup>

Dalam konteks SMK NJ Paiton nampaknya pelaksanaan pengelolaan sekolah melalui integritasi manajemen dengan pesantren sedikit banyak mereduksi kreatifitas kepala sekolah. Kepala sekolah

---

<sup>322</sup> Bandingkan dengan Sudarwan Danini, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 211.

<sup>323</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 98.

merasa cukup melaksanakan kebijakan pesantren berdasarkan intruksi yang ada. Hal demikian juga terjadi pada tenaga pendidik dan kependidikan yang lain. Dengan demikian, sebagai dampak lanjutan, maka pengelola sekolah pada akhirnya lebih bersifat pasif dan konsumtif, terutama dalam hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan, seperti pengembangan dalam hal sarana dan prasarana, keuangan dan sumber daya yang lain. Mereka, hanya maksimal dan fokus pada proses pembelajaran dengan pencapaian standar hasil pendidikan yang sudah ditentukan.

Dalam hal bertambahnya tanggung jawab sekolah yang tidak hanya harus bertanggung jawab pada pemerintah, namun juga harus bertanggung jawab kepada pesantren. Hal tersebut dikarenakan integrasi manajemen antara sekolah dan pesantren meniscayakan sekolah memiliki dua induk instansi sekaligus, yaitu pemerintah dan pesantren. Keduanya memiliki regulasi-regulasi dan standar-standar tertentu yang harus diikuti oleh SMK NJ. Untuk itu sekolah harus bertanggung jawab baik secara administratif maupun moril kepada kedua instansi tersebut, sehingga sedikit banyak, bertambahnya tanggung jawab sebagaimana di atas menambah pula beban kerja yang harus dipikul oleh para pengelola sekolah.

Namun demikian, dampak negatif yang ada sebagaimana di atas senantiasa dicarikan solusi baik oleh pihak pesantren maupun sekolah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang

dilakukan oleh pesantren dan sekolah dalam meminimalisir dampak negatif tersebut, antara lain, pihak pesantren dan sekolah sering memberikan arahan, pemahaman dan motivasi-motivasi yang mendasar kepada pihak pengelola sekolah terkait dengan posisi SMK NJ dalam konteks pesantren, yaitu sebagai pelaksana pesantren. Posisi sebagai pelaksana pesantren hendaknya jangan dimaknai negatif, tetapi sebaliknya harus dimaknai secara positif. Artinya, dengan posisi sebagai pelaksana pesantren, posisi pengelola sekolah menjadi mitra kiai, teman seperjuangan kiai dalam mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara. Mereka memiliki predikat sebagai subjek utama perjuangan bersama para kiai dan pengurus pesantren Nurul Jadid Paiton. Dengan demikian, melaksanakan yang ada tidak hanya sebagai bentuk profesionalitas dan loyalitas, namun juga sebagai bentuk pengabdian yang bernilai ibadah serta menjadi jalan menggapai barakah dan ridho Allah SWT.

## 2. Dampak Bagi Dunia Usaha dan Industri

Berdasarkan temuan data dalam penelitian ini, terdapat dampak positif pelaksanaan integrasi pengelolaan SMK NJ dengan dunia usaha dan industri (DUDI), bagi DUDI itu sendiri, yaitu antara lain: munculnya kepuasan tersendiri karena mendapat kepercayaan pesantren, merasa terlibat dalam perjuangan pesantren, mudah mendapatkan karyawan yang diinginkan serta merasa terbantu dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan pendanaan yang hemat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa konsep pendidikan dengan melibatkan sektor dunia usaha dan industri, seperti halnya PSG, juga memiliki beberapa manfaat yang kembali pada dunia usaha dan industri itu sendiri. Beberapa manfaat tersebut, menurut Bukit, antara lain: Pertama, dunia usaha dan industri bisa mengenal secara mendalam tentang pengetahuan, keterampilan serta sikap setiap siswa magang. Hal ini menjadikan dunia usaha dan industri tersebut seakan-akan memiliki data base tenaga kerja siap pakai sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, penghematan biaya transisi tenaga kerja dengan mempercepat masa transisi dari sekolah ke dunia kerja. Dengan demikian, perusahaan bisa menghemat pembiayaan administrasi dan biaya adaptasi ke lini produksi, sekaligus bisa mengurangi resiko dan biaya rekrutmen tenaga kerja.

Ketiga, dengan adanya siswa magang, maka industri yang ditempati tersebut bisa melakukan penghematan (*saving*) biaya kerja dan karyawan. Artinya siswa magang, selain mereka memiliki tujuan belajar praktek industri secara langsung, namun pada dasarnya mereka sedang berkontribusi produktif kepada industri tersebut. Keempat, perusahaan atau dunia industri yang menjalankan pemagangan akan mendapat keringanan pajak penghasilan. Hal tersebut karena perusahaan bisa memasukkan biaya penyelenggaraan pemagangan tersebut kedalam ongkos produksi. Dengan demikian dalam penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan bisa ditekan.

Kelima, perusahaan bisa berkontribusi dalam pembangunan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam ini peningkatan mutu tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat kepuasan tersendiri bagi perusahaan karena ikut terlibat dan berperan penting dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa dan negara.<sup>324</sup>

Berangkat dari paparan teoretis di atas, nampaknya dampak positif yang dirasakan oleh dunia usaha dan industri atas pelaksanaan integrasi pengelolaan antara SMK NJ dengan dunia usaha dan industri memiliki relevansi yang kuat. Dampak positif berupa munculnya rasa puas karena mendapat kepercayaan dari pesantren Nurul Jadid, bahkan merasa terlibat dalam perjuangan pesantren, itu memiliki titik korelasi dan relevansi dengan poin kelima dalam konsepsi PSG sebagaimana disampaikan Bukit di atas.

Adapun dampak yang berupa kemudahan mendapatkan yang diinginkan memiliki relevansi dengan poin pertama dalam paparan konsep tentang manfaat PSG menurut Bukit di atas. Sementara dampak yang berupa terbantunya perusahaan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan biaya yang hemat bisa dipahami sebagai bentuk kontribusi produktif siswa magang di perusahaan tersebut. Dengan demikian, dampak tersebut berkorelasi dan relevan dengan poin ke dua dan ke tiga menurut konsep Bukit di atas.

---

<sup>324</sup> Masriam Bukit, *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan dari Kompetensi ke Kompetisi*, 58-59.

Berdasarkan dialektika antara temuan penelitian dan konseptual di atas bisa dikatidakan bahwa dampak positif yang dirasakan DUDI atas terselenggaranya integrasi pengelolaan di SMK NJ paiton memiliki relevansi dengan konsepsi dampak Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagaimana yang dijelaskan oleh Bukit.

Namun demikian, terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh pihak dunia usaha dan industri ketika menerima siswa magang SMK NJ Paiton sebagai konsekuensi integrasi antara sekolah perusahaan. Dampak tersebut berupa adanya tuntutan untuk bisa beradaptasi dengan budaya santri (pesantren), serta merasa memiliki beban tersendiri karena harus ikut menjaga sikap dan perilaku siswa atau santri magang.

Sebagai komponen pembelajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan integrasi pengelolaan di SMK NJ Paiton, pihak dunia usaha dan industri ikut memiliki rasa tanggung jawab secara moral atas konsistensi siswa atau santri magang terhadap nilai pesantren yang selama di sekolah dan pesantren senantiasa di tekankan, seperti kondisi siswa magang yang dilarang membawa HP selama magang sebagai bentuk kebijakan pesantren dan sekolah, maka pihak perusahaan harus bisa memaklumi, sekalipun itu menyulitkan hubungan komunikasi antara pihak perusahaan dan siswa magang. Sulitnya komunikasi, tentu sedikit banyak mengganggu kelancaran komunikasi dan informasi-informasi tertentu yang perlu disampaikan oleh salah satu kedua belah pihak kepada yang lainnya, terutama oleh pihak perusahaan.

Begitu pula adanya beban tersendiri dari pihak perusahaan, dimana mereka merasa ikut bertanggung jawab atas konsistensi dan kedisiplinan siswa santri magang selama waktu magang. Pihak perusahaan, ikut merasa berkewajiban untuk memastikan bahwa siswa atau santri magang tidak berubah dan tetap istiqamah dengan nilai-nilai dan budaya kepesantrenan yang mereka pahami. Bagi pihak perusahaan ini bukan sesuatu yang mudah karena pihak perusahaan lebih berfikir bisnis dari pada etis. Artinya, di banding siswa magang dari sekolah umum non pesantren, bagi pihak perusahaan siswa magang dari pesantren memiliki perbedaan tanggung jawab yang lebih kompleks.

Untuk itu, dalam rangka memastikan kesinambungan sinergitas dan integrasi antara SMK NJ Paiton dengan dunia usaha dan dunia industri, maka pihak sekolah dan pesantren melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Berdasarkan data hasil penelitian ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan sekolah dan pesantren antara lain; melibatkan pihak perusahaan dalam menyusun standar, aturan, tata tertib dan sanksi-sanksi serta hal-hal lain yang kemudian ditulis berupa buku panduan magang. Selain itu, komunikasi antara pihak sekolah, pesantren dengan pihak perusahaan dibangun dengan baik dan intens, sehingga apapun yang terjadi dalam proses pemagangan bisa disikapi secara baik dan kekeluargaan. Dengan demikian, semua pihak yakni sekolah dan pesantren dan perusahaan merasa satu keluarga yang memiliki keinginan tujuan yang sama.

### 3. Dampak Bagi Pesantren

Pelaksanaan integrasi pengelolaan di SMK NJ Paiton dengan melibatkan tiga komponen, yakni, sekolah, DUDI dan pesantren, tentu juga memberikan dampak tersendiri bagi pesantren pesantren, baik positif maupun negatif. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa dampak positif bagi pesantren, antara lain; menguatnya loyalitas pengelola SMK NJ kepada pesantren dalam mewujudkan visi dan misi pesantren, pesantren bisa memastikan keseimbangan dan simultanisasi proses penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan cita-cita pesantren dan pemerintah. Pesantren bisa mengetahui secara menyeluruh segala potensi yang dimiliki serta bisa mendistribusikan dalam bentuk pelayanan yang adil dan merata, dan bertambah antusias masyarakat untuk memondokkan anak-anak nya di pesantren Nurul Jadid Paiton.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan sekaligus sebagai institusi sosial, pesantren memiliki struktur hubungan antar manusia di dalamnya. Menurut Muhaimin pesantren (sekolah) memiliki tiga klasifikasi hubungan antar manusia. Yaitu; hubungan atasan-bawahan, hubungan profesional dan hubungan sederajat.<sup>325</sup>

Dalam hubungan atasan-bawahan dalam konteks pesantren, hal ini meniscayakan pentingnya kepatuhan dan loyalitas para pelaksana pesantren terhadap pimpinan pesantren. Adapun yang dimaksud para

---

<sup>325</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran* ., 125.

pelaksana pesantren antara lain para ustadz (guru), para pengurus, dan para karyawan pesantren. Selain itu, kepatuhan santri terhadap kiai dan para ustadz juga termasuk dalam klasifikasi hubungan atasan-bawahan tersebut.<sup>326</sup>

Adapun hubungan profesional cenderung mengandalkan hubungan yang rasional, kritis dan dinamis antar sesama ustadz (guru), atau antara para ustadz, pengurus dengan pimpinan pesantren, atau juga antar santri dengan para ustadz, pengurus dan kiai. Sementara hubungan sederajat merupakan hubungan manusiawi antar sejawat untuk saling membantu, mengingatkan dan saling melengkapi.

Berangkat dari paparan teoretis di atas, nampaknya penguatan loyalitas pelaksana pesantren terhadap (pimpinan) pesantren memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam konteks hubungan antar atasan-bawahan di pesantren. Artinya, loyalitas menjadi kata kunci produktifitas hubungan antara pelaksana pesantren dan (pimpinan) pesantren. Dengan demikian adanya dampak penguatan loyalitas pelaksana pesantren Nurul Jadid Paiton (pengelola SMK NJ) terhadap (pimpinan) pesantren Nurul Jadid menjadi poin yang sangat positif bagi kepentingan pesantren.

Loyalitas sendiri oleh para pakar diartikan sebagai kemauan bekerja sama yang bermakna kesediaan mengorbankan diri, kesediaan melakukan pengawasan diri dengan penuh kesadaran untuk mengabdikan

---

<sup>326</sup> Bandingkan dengan Sulthon dan Moh. Khusnurido, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global.*, 12-13.

kepada sebuah institusi.<sup>327</sup> Loyalitas ini selanjutnya akan merekomendasikan komitmen pada diri seseorang. Bagi sebuah institusi, sebagaimana pesantren, komitmen para pengelolanya untuk mewujudkan visi dan misi yang ada sangatlah penting. Menurut Mulyasa, komitmen yang tinggi dari pengelola institusi pendidikan (sekolah atau pesantren) akan memunculkan kreatifitas dan inovasi pemikiran dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang ada.<sup>328</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka adanya loyalitas yang tinggi dalam diri pengelola lembaga pendidikan sebagaimana pesantren Nurul Jadid Paiton, sangat penting untuk terwujudnya bangunan komitmen bersama dalam rangka mencapai visi dan misi yang ada. Loyalitas dan komitmen tersebut merupakan representasi dari perasaan keberpihakan dan keterlibatan dalam tugas yang muncul karena adanya kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan posisinya.

Dalam konteks inilah pesantren Nurul Jadid memandang bahwa pelaksanaan integrasi manajemen sebagaimana di SMK NJ sebagai instrumen untuk memastikan mindset yang benar pada segenap pelaksana pesantren. Mindset yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam oleh semua pengelola unit di bawah naungan pesantren, bahwa unit tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan pesantren sekaligus pelaksana pesantren. Dengan pola integrasi manajemen, pesantren mampu

---

<sup>327</sup> Mulyadi, *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses* (Jakarta: LPTK Depdikbud, 1989), 251.

<sup>328</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Kompetensi dan Aplikasinya* (Bandung: PT Rosdikarya, 2003), 147.

untuk meminimalisir munculnya kelalaian dan perilaku unit yang tidak sebangsa dengan pesantren.

Adapun dampak yang berupa kemampuan pesantren untuk memastikan keseimbangan dan simultanitas proses pelaksanaan pendidikan guna mencapai cita-cita besar baik dari pesantren dan pemerintah, merupakan hal yang utama bagi pesantren. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang lebih awal dibanding dengan lembaga formal yang ada di Indonesia, bahkan dikenal sebagai institusi pendidikan yang Indegenous di Indonesia,<sup>329</sup> pesantren berkepentingan untuk mempertahankan ciri khasnya. Karakteristik pendidikan pesantren sangat menekankan kepada pendidikan agama, spiritualitas dan akhlak karena agama dianggap sebagai sumber pengetahuan dan norma.<sup>330</sup>

Dalam rangka merespon problem dikotomi pendidikan sebagaimana di atas, para pemikir di Indonesia mengupayakan integrasi agama dan ilmu pengetahuan (sains). Sebagai bentuk dari upaya tersebut, muncul institusi-institusi pendidikan yang menyelenggarakan sekaligus pendidikan agama dan sains, dengan kesadaran yang tinggi bahwa keduanya sangatlah penting bagi peradaban manusia. Dalam konteks ini pula pondok pesantren Nurul Jadid Paiton mengelola konsep pendidikannya melalui sistem integrasi.

---

<sup>329</sup> Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Proses Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1998), 3.

<sup>330</sup> Dawani Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta : LP3ES, 1995), 15.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyelenggaraan proses pendidikan yang seimbang dan simultan di pesantren Nurul Jadid sebagai dampak pengelola integrasi yang ada, merupakan bagian dari upaya memastikan tidak adanya dikotomi pembelajaran dan diskriminasi keilmuan di pesantren tersebut. Proses pendidikan non dikotonomis tersebut sekaligus sebagai upaya sinkronisasi pelaksanaan cita-cita pesantren dan pemerintah, sebagai dua institusi yang sama-sama menaungi unit sekolah yang ada di pesantren Nurul Jadid, termasuk SMK NJ.

Terkait dengan dampak bahwa melalui integrasi, pesantren bisa mengetahui secara menyeluruh semua potensi yang dimiliki, kemudian mendistribusikan dalam bentuk pelayanan yang adil dan merata, hal tersebut merupakan konsekuensi logis bagi pesantren. Pesantren Nurul Jadid Paiton sebagai lembaga utama yang membawahi semua unit dan lembaga yang ada, bertanggung jawab dalam hal perkembangan dan kemajuan semua unit dan lembaga tersebut. Untuk itu, sistem manajemen yang dilakukan harus berbasis keadilan dan pemerataan. Melalui sistem integrasi, pengelolaan yang berkeadilan dan merata tersebut diharapkan bisa diwujudkan.

Selain itu, sebagai sebuah instansi sosial dan pendidikan yang menaungi beberapa unit dan lembaga dalam berbagai jenjang, pesantren Nurul Jadid Paiton dihadapkan pada beberapa ancaman pengelolaan, diantaranya adalah ego sektoral. Ego sektoral yang dimaksud adalah kondisi dimana individu-individu dan bagian-bagian (unit & lembaga)

yang ada di pesantren tidak bisa melihat peran mereka dalam sebuah organisasi (pesantren). Mereka cenderung mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri bahkan sampai mengorbankan kepentingan dan organisasi (pesantren) yang lebih luas.

Dalam teori manajemen, kordinasi menjadi salah satu solusi efektif dalam rangka menekan dan meminimalisir munculnya ego sektoral dalam sebuah organisasi. Koordinasi sendiri pada hakikatnya merupakan entitas yang tidak terpisahkan dari konsepsi manajemen. Hal tersebut karena dalam manajemen terdapat langkah-langkah kordinasi yang termuat dalam fungsi-fungsi manajemen.<sup>331</sup>

Berangkat dari paparan di atas, bisa dipahami bahwa pelaksanaan integrasi manajemen di pesantren Nurul Jadid merupakan upaya manajerial (koordinasi) untuk menekan munculnya ego sektoral dari unit-unit atau lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Ego sektoral dianggap sebagai penghambat tercapainya tujuan bersama pesantren, sehingga harus diantisipasi.

Koordinasi dengan bentuk integrasi, sebagaimana di pesantren Nurul Jadid Paiton memiliki manfaat yang besar bagi proses penyelenggaraan tugas organisasi kepesantrenan dalam rangka memastikan kelancaran dan produktifitas kerja semua stidakeholders yang ada. Sebagai pesantren yang memiliki banyak bagian, lembaga dan unit

---

<sup>331</sup> Arifin Imamul dan Hadi Giana, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Bandung: PT Setia Purna, 2007), 64.

pelaksana, pesantren Nurul Jadid Paiton sangat berkepentingan dengan pola manajemen yang mampu membangun kesatuan dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan.

Mengenai dampak berupa bertambahnya antusiasme masyarakat untuk memondokkan anaknya di pesantren, hal ini besar kaitannya dengan kegelisahan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam hal degradasi moral. Hal tersebut didasarkan pada beberapa hasil temuan data dalam penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Dalam paparan data paparan temuan penelitian ini, setidaknya terdapat beberapa alasan para wali santri dalam memondokkan anaknya ke pesantren Nurul Jadid Paiton. Diantaranya, yaitu; para wali santri merasa mendapatkan jaminan keamanan bagi putra putrinya di pesantren dari maraknya perilaku pergaulan bebas. Dengan memondokkan putra putrinya, para wali santri meyakini putra-putrinya kelak akan mendapatkan ilmu yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, serta mereka berharap akan mendapatkan barokah (para kiai) pesantren sehingga bisa bahagia di dunia dan akhirat.

Dalam konteks inilah integrasi pendidikan sekolah dan pesantren sebagaimana di pesantren Nurul Jadid Paiton menemukan *positioning* yang jelas. Dengan kata lain integrasi manajemen yang dilakukan di pesantren Nurul Jadid Paiton menjadi upaya konkrit dalam memberikan tawaran penyelesaian alternatif bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Lebih dari itu, Nata mengatidakan bahwa lulusan pendidikan Islam dengan penyelenggaraan pendidikan yang berimbang, antara pendidikan keagamaan, ilmu pengetahuan dan keterampilan, akan jauh lebih siap untuk memasuki lapangan kerja dibandingkan dengan lulusan pendidikan lain. Hal ini dikarenakan lulusan pendidikan Islam tersebut selain memiliki *hard skill*, juga memiliki *soft skill* yang lebih kuat dibanding dengan lulusan dengan lulusan yang lain. Bahkan saat ini, beberapa perusahaan baik di luar maupun dalam negeri sudah banyak yang memprioritas *soft skill* dari pada *hard skill*. *Hard skill* jauh lebih mudah dibina dari pada *soft skill*.<sup>332</sup>

Berangkat dari diskusi di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan pesantren yang integratif sebagaimana pesantren Nurul Jadid Paiton akan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, karena dipandang sebagai lembaga yang komprehensif. Penyelenggaraan proses pendidikan yang seimbang antara agama, ilmu pengetahuan dan keterampilan, akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan citra baik pesantren di tengah masyarakat yang lebih luas. Pesantren dengan demikian, tidak hanya digandrungi masyarakat agamis tradisional, namun juga masyarakat religius modern.

---

<sup>332</sup> Dalam hal ini Abuddin Nata juga mengulas hasil survei NACE (*National Association Colleges and Employers*) USA pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa dunia kerja lebih membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi komunikasi, integrasi (kejujuran), kemampuan bekerja sama, etos kerja yang baik, punya inisiatif, kemampuan beradaptasi, menganalisa dan berorganisasi, punya kemampuan IT, ramah, sopan, IP di atas 3,0, kreatif, humoris dan kemampuan entrepreneurship. Dan seluruh kriteria-kriteria tersebut bisa dijumpai pada lulusan pendidikan Islam, terutama di pesantren yang integratif. Abuddin Nata, *Kapita Selektta Pendidikan Islam.*, 40.

Namun demikian, penerapan integrasi pengelolaan yang dilakukan di pesantren Nurul Jadid sebagaimana di atas, juga memiliki dampak negatif bagi pesantren. Dampak tersebut berupa bertambahnya beban kerja dan tanggung jawab pesantren. Dalam hal beban kerja, pesantren tidak lagi hanya mengurus tentang hal-hal kepesantrenan saja, seperti pengajian al-Qur'an dan kitab kuning, kegiatan praktik ibadah dan akhlak santri, serta tradisi pesantren yang lain, tetapi juga harus mengurus pendidikan formal dengan karakteristik dan standar yang berbeda dengan dirinya.

Begitu pula dalam hal tanggung jawab, dimana pesantren Nurul Jadid sebagai lembaga induk yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai variasinya, baik formal, non formal maupun informal, dari berbagai jenjang, mulai dari tingkat kelompok bermain (KB) sampai tingkat Universitas, memiliki tanggung jawab yang lebih. Pesantren Nurul Jadid tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah SWT, namun juga bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi efek negatif sebagaimana di atas, maka pondok pesantren Nurul Jadid Paiton melakukan upaya-upaya strategis antara lain; membentuk struktur kepengurusan pesantren yang lengkap, kompeten dan kharismatik, merekrut para pelaksana pesantren (pegawai dan karyawan) yang kompeten, profesional dan integritas, melaksanakan sistem manajerial yang aplikabel, transparan dan akuntabel, serta memberikan jaminan kesejahteraan dan fasilitas yang cukup kepada segenap pengurus, pegawai dan karyawan pesantren.

Secara teoretis, manajemen pesantren merupakan faktor utama diantara faktor-faktor yang ada dalam menentukan laju perkembangan pesantren tersebut. Berbagai problematika yang dihadapi pesantren, menurut para pakar, akan bisa diselesaikan dengan baik, jika manajemen pesantren tersebut dikelola secara baik dan profesional.<sup>333</sup> Dalam hal ini Qomar mengajukan beberapa langkah tidaktis yang bisa dilakukan oleh pesantren, antara lain; menerapkan manajemen secara profesional, menerapkan kepemimpinan kolektif, menerapkan demokratisasi kepemimpinan serta menerapkan manajemen struktur.<sup>334</sup>

Dalam kontek pesantren Nurul Jadid Paiton, membentuk kepengurusan pesantren yang lengkap dengan standar kompetensi masing-masing kepengurusan bisa dipahami sebagai upaya pengelolaan melalui manajemen yang profesional. Hal tersebut sesuai dengan konsep manajemen profesional yang bisa ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu: menguasai ilmu dan praktik tentang pengelolaan pesantren, menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara maksimal, memiliki *skill* yang dibutuhkan. Pesantren memiliki kewajiban moral untuk memajukan pesantren, memiliki integritas yang tinggi serta mampu menjadi teladan yang baik bagi bawahannya.<sup>335</sup>

Selain itu, pembentukan kepengurusan sebagaimana yang dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid tersebut, juga memiliki relevansi

---

<sup>333</sup> Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, 157.

<sup>334</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 68.

<sup>335</sup> Ibid.

dengan konsep penerapan manajemen struktur seperti dalam teori di atas. Efendi menjelaskan, bahwa strategi penerapan manajemen struktur dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain; menyusun struktur organisasi secara lengkap (sesuai kebutuhan pesantren), menyusun deskripsi pekerjaan (*job description*), menjelaskan hubungan kewenangan antar pegawai dan pemimpin secara vertikal maupun horizontal, serta menanamkan komitmen terhadap tugas masing-masing pegawai atau karyawan.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid Paiton sebagaimana di atas memiliki dasar konseptual yang jelas serta relevan dengan konsep manajemen modern yang ada. Begitu pula, dalam hal rekrutmen pelaksana pesantren (pegawai dan karyawan) yang kompeten, profesional dan berintegritas, nampak memiliki relevansi yang kuat dengan prasyarat-prasyarat manajemen profesional sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para pakar di atas.

Adapun pemberia jaminan kesejahteraan dan fasilitas yang cukup kepada pengurus, karyawan dan pegawai di pesantren Nurul Jadid Paiton pada dasarnya mengacu pada konsep manajemen mutu/ kualitas (*Quality Management*). Manajemen kualitas, oleh pakar didefinisikan sebagai

sebuah organisasi melalui penggunaan sumber daya manusia dan modal yang dimiliki.<sup>336</sup>

Pemberian jaminan kesejahteraan dan fasilitas kepada pegawai ataupun karyawan, dalam persepektif manajemen mutu juga dikenal dengan istilah pemberian gaji. Beberapa ahli mendefinisikan gaji sebagai balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta memiliki jaminan yang pasti. Gaji merupakan salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan, karena gaji merupakan alat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pemberian gaji bagi karyawan akan memotivasi mereka untuk bekerja secara lebih giat di masa yang akan datang.

Menurut Hisbuan, pemberian gaji terhadap karyawan memiliki beberapa tujuan, antara lain; menguatkan ikatan kerja sama antara karyawan dan pemilik perusahaan, kepuasan kerja karyawan, motivasi, stabilitas, disiplin, dan produktifitas karyawan.

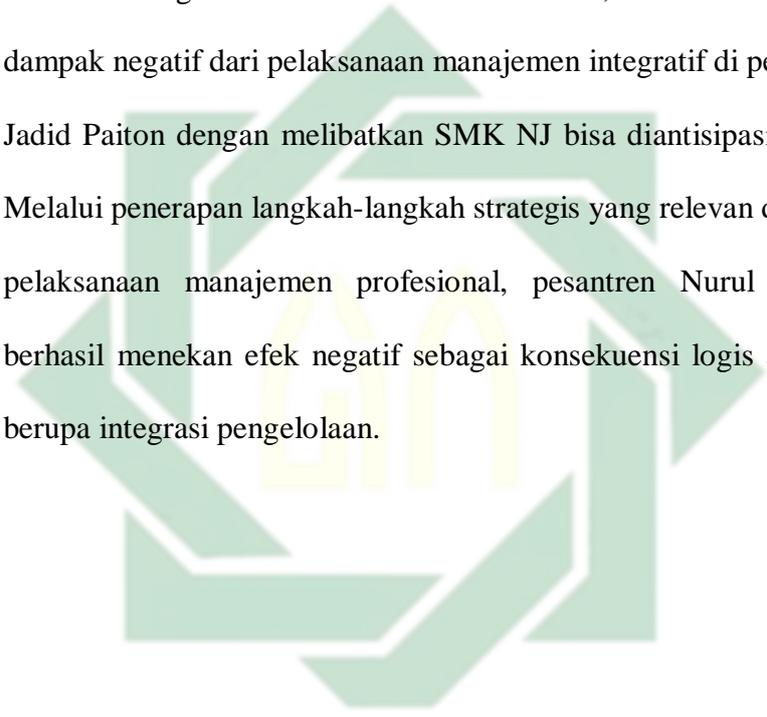
Berdasarkan beberapa tujuan penggajian di atas, maka bisa dipahami bahwa pemberian jaminan kesejahteraan dan fasilitas sebagaimana dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid Paiton dimaksudkan untuk memastikan mutu dan kualitas para pelaksana pesantren. Selain itu, dengan pemberian tersebut, pesantren berkepentingan untuk menguatkan ikatan kerjasama dengan semua pelaksana, serta memberikan motivasi

---

<sup>336</sup> Bandingkan dengan Vincent Gaspersz, *Total Quality Management* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 4.

kepada mereka untuk selalu menjaga stabilitas dan produktifitas kerja. Sehingga betapapun berat beban kerja yang dipikul, mereka tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kepesantrenan yang telah ditentukan.

Berangkat dari hasil diskusi di atas, bisa dikatidakan bahwa dampak negatif dari pelaksanaan manajemen integratif di pesantren Nurul Jadid Paiton dengan melibatkan SMK NJ bisa diantisipasi dengan baik. Melalui penerapan langkah-langkah strategis yang relevan dengan konsep pelaksanaan manajemen profesional, pesantren Nurul Jadid Paiton berhasil menekan efek negatif sebagai konsekuensi logis atas kebijakan berupa integrasi pengelolaan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan temuan hasil penelitian dan analisa di depan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pengelolaan sekolah *entrepreneurship* berbasis pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah model pengelolaan integratif berpola kolaboratif-simbiotik dengan melibatkan tiga komponen yaitu SMK NJ, dunia usaha dan industri (DUDI) serta pesantren Nurul Jadid Paiton. Implementasi pengelolaan integratif sebagaimana dimaksud, meliputi beberapa aspek antara lain: (a) Integrasi Manajerial yang meliputi tiga hal yaitu manajemen, administrasi dan organisasi (b) Integrasi Kurikulum yang meliputi integrasi antar mata pelajaran dan integrasi kurikulum antar kelembagaan (sekolah, pesantren dan DUDI). Khusus dalam kurikulum kewirausahaan, dilakukan dalam berbagai bentuk integrasi, yaitu :Integrasi ke dalam semua mata pelajaran, Integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, Integrasi ke dalam program pengembangan diri, Integrasi ke dalam kultur sekolah dan pesantren, Serta integrasi melalui muatan lokal. (c) Integrasi Sistem Pembelajaran dengan corak pendekatan yang bersifat sirkular dan melibatkan tiga komponen pembelajaran yaitu sekolah, pesantren dan DUDI, sehingga bisa disebut sebagai **model Pendidikan Multi Sistem (PMS)**. (d) Integrasi Keuangan melalui sistem sentralisasi keuangan (*One Gate Revenue Policy dan*

*Multigates Expenses Policy*). (e) Integrasi Sarana dan Prasarana, yang meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi. (f) Integrasi Iklim Sekolah.

2. Pengelolaan Sekolah Berbasis Pesantren di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo memiliki dampak positif dan negatif terhadap tiga komponen yang terlibat, yaitu (a) Sekolah, dengan dampak positif antara lain; Meningkatnya kepercayaan diri segenap pengelola SMK NJ, Meningkatnya etos dan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK NJ, Terfokusnya pelayanan pendidikan di SMK NJ kepada proses pembelajaran, serta Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada SMK NJ Paiton. Adapun dampak negatifnya antara lain; Terbatasnya kebijakan dan kewenangan pengelola sekolah, Pengelola sekolah cenderung paasif dan konsumtif, dan Bertambahnya tanggung jawab sekolah tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kepada pesantren. (b) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan dampak positif antara lain; Munculnya kepuasan tersendiri dari DUDI karena merasa mendapat kepercayaan dari masyarakat pesantren, Merasa bangga karena bisa terlibat dalam perjuangan pesantren, Mudah mendapat karyawan yang diinginkan sesuai standar dan kebutuhan yang ada, dan Merasa terbantu dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan pendanaan yang hemat, khususnya ketika pelaksanaan prakerin. Adapun dampak negatifnya antara lain; Adanya tuntutan untuk beradaptasi dengan budaya pesantren, terutama ketika menerima siswa magang, Merasa memiliki beban

tersendiri karena merasa harus ikut menjaga keamanan, sikap dan perilaku siswa magang ketika praktik kerja industri (prakerin). (c) Pesantren, dengan dampak positif antara lain; Menguatnya loyalitas para pelaksana pesantren (pengelola SMK NJ) kepada pesantren, Pesantren bisa memastikan keseimbangan dan simultanisasi proses penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudnya cita-cita pesantren maupun pemerintah, Pesantren bisa mengetahui secara menyeluruh segala potensi yang dimiliki, serta dapat mengatur pendistribusiannya dalam bentuk pelayanan yang adil dan merata, dan Meningkatnya antusiasme masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya ke pesantren Nurul Jadid Paiton. Adapun dampak negatifnya antara lain; Bertambahnya beban kerja pesantren, karena tidak hanya cukup mengurus urusan-urusan kepesantrenan, tetapi juga harus mengurus lembaga pendidikan formal (sekolah), dan Beratnya tanggung jawab pesantren karena harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, pemerintah dan masyarakat.

## **B. Implikasi Teoretik**

Penelitian ini memfokuskan pada model pengelolaan sekolah entrepreneurship berbasis pesantren di SMK NJ Paiton Probolinggo. Dari hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa hal yang mengandung implikasi teoritik sebagai berikut:

Pertama, dalam tataran teoritis, temuan dalam penelitian ini mengandung implikasi mendukung sekaligus menemukan sesuatu yang baru

terkait model pengelolaan SMK yang telah dikemukakan oleh para pakar. Sebagaimana kajian Masriam Bukit tentang model pengelolaan pendidikan kejuruan, seraya mendasarkan pada hasil simposium yang diselenggarakan oleh *United Nation Of Education Science and Culture Organization* (UNESCO) yang dilaksanakan di Hamburg Jerman pada tahun 1989, ia menyatakan bahwa UNESCO mengklasifikasi model pendidikan kejuruan menjadi 4 model. Adapun 4 model tersebut, yaitu; 1. Model pelatihan perusahaan (*Company Model*), 2. Model persekolahan (*School Model*), 3. Model pendidikan kerjasama (*cooperative model*) atau disebut juga model pendidikan sistem ganda (*dual system*), dan (4) model pendidikan kejuruan informal (*informal vocational education*).

Dalam konteks Indonesia, Wardiman Djoyonegoro selaku Mendiknas pada tahun 1993 mengenalkan dan memberlakukan model pendidikan sistem ganda (PSG) pada sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia model PSG di Indonesia lebih merupakan pengembangan dari model persekolahan (*School Model*) yang ditambah dengan pelatihan di perusahaan yang disebut Praktik Kerja Industri (prakerin).

Hadiwaratama sebagai Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan pada tahun 1993 mengedepankan model baru, yaitu model pendidikan kejuruan Berbasis Unit Produksi (*Production Based*). Model tersebut dimaksudkan sebagai solusi dari problem ketidak seimbangan antara banyaknya siswa SMK yang ingin melakukan prakerin dengan jumlah perusahaan yang akan di tempati.

Berdasarkan klasifikasi model pendidikan kejuruan di atas, maka temuan penelitian ini, memiliki implikasi mendukung sekaligus mengkritisi teori-teori yang ada, dengan mengajukan temuan model yang baru yaitu **Model Pendidikan Multi Sistem**, yang oleh penulis disingkat PMS. Model PMS sebagaimana temuan penelitian ini, merupakan model pengelolaan pendidikan sekolah kejuruan (SMK) tidak hanya mencukupkan belajar teori dan mendapatkan keterampilan dasar (*Basic Skill*) di sekolah serta melakukan prakerin di perusahaan atau industri, namun juga menekankan pendidikan agama (Religiuitas) dan akhlakul karimah di pesantren. Model PMS memiliki orientasi untuk mencetak lulusan yang komprehensif dan holistik yaitu lulusan yang memiliki iman, taqwa dan akhlakul karimah, serta memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan teknologi dan keterampilan hidup. Profil lulusan dimaksud, penulis sebut dengan istilah santri yang enterpreneur dan enterpreneur yang santri.

Model PMS ini penulis katakan memiliki implikasi mendukung teori yang ada, dikarenakan PMS merupakan bentuk pengembangan model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagaimana yang digagas oleh Wardiman Djoyonegoro, dalam konteks Indonesia. Dengan demikian PMS tidak serta merta dikatakan model yang sama sekali baru, namun lebih merupakan bentuk pengembangan dari teori yang sudah ada.

Adapun penegasan penulis, bahwa penemuan model PMS juga memiliki implikasi mengkritisi dan merupakan temuan baru dalam diskursus model pengelolaan pendidikan kejuruan, dikarenakan beberapa hal yang

membedakan dengan model PSG dan model-model yang lain. Jika model PSG dan model-model yang lain dalam pengelolaan pendidikan kejuruan di orientasikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kerja dan kewirausahaan saja, maka model PMS ini di orientasikan tidak sekedar untuk mencetak lulusan yang hanya memiliki kompetensi kerja dan kewirausahaan saja, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan (Religiuitas) dan akhlakul karimah.

Selain itu, jika dalam model PSG, proses pembelajarannya hanya melibatkan dua komponen sub sistem pembelajaran, yaitu sekolah dan perusahaan atau industri, maka dalam model PMS ada tiga komponen sub sistem pembelajaran yang terlibat sekaligus, yaitu sekolah, perusahaan atau industri dan pesantren. Kemudian, jika di perbandingkan antara PSG dan PMS akan terlihat perbedaan-perbedaan istilah pada poin-poin yang terkandung pada masing-masing komponen sub sistem tersebut, sebagaimana telah penulis gambarkan dalam pembahasan temuan di depan.

Kedua, dalam tataran praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model PMS yang melibatkan tiga komponen sub sistem pembelajaran di jalankan melalui pendekatan integratif-interkoneksi. Artinya, ketiga komponen yang terlibat, yaitu sekolah, DUDI dan pesantren masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Ketiganya saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Dengan demikian pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang notabene santri, bersifat holistik-komprehensif dan tidak partikular–atomistik. Proses pembelajaran yang demikian pada

akhirnya diharapkan menghasilkan lulusan santri yang enterpreneur dan enterpreneur yang santri.

### **C. Keterbatasan Studi**

Hasil penelitian yang disusun oleh penulis ini, betapapun telah di upayakan untuk senantiasa sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun tentu masih terdapat banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya di lakukan pada satu fokus, yaitu SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dengan demikian temuan-temuan yang di dapat dalam penelitian tidak serta merta bisa di generalisasikan pada fokus yang lain.
2. Fokus penelitian ini hanya terbatas pada model pengelolaan SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang berbasis pesantren. Dengan demikian hasil penelitian ini mungkin akan berbeda ketika di lakukan di SMK yang lain, terutama yang tidak berbasis pesantren.
3. Penelitian ini hanya sebatas penelitian yang lebih cenderung mengkaji masalah manajemen dari dimensi model pengelolaannya saja, sehingga pembahasannya kurang menyentuh hal-hal yang implementatif dalam ranah manajemen yang lain.

### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan dan temuan-temuan penelitian serta kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka merespon segala perkembangan yang ada, perlu kiranya para pengelola lembaga pendidikan, terutama yang berbasis islam atau pesantren, untuk senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan profesionalisme manajerialnya. Hal tersebut penting mengingat aspek manajemen merupakan faktor utama keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Namun tetap harus di pastikan, institusi tersebut tidak tercerabut dari karakteristik ke-islamannya yang khas.
2. Para praktisi pendidikan Islam, terutama yang ada di pesantren untuk terus melakukan kerasi dan inovasi manajerialnya, serta senantiasa bersikap inklusif, sehingga pesantren betul-betul bisa menjadi lembaga pendidikan alternatif yang komprehensif bagi masyarakat luas.
3. Mengingat pentingnya pendidikan *enterpreneurship* dalam kontek pembangunan di Indonesia, hendaknya pesantren juga mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam pengembangannya, sehingga dimasa yang akan datang para enterpreneur di Indonesia adalah para santri dan para santri pesantren banyak yang menjadi enterpreneur.
4. Bagi para peneliti dan para ahli, pendidikan perlu menggalakkan penelitian-penelitian tentang pendidikan *eneterpreneurship*, sehingga peran penting bidang pendidikan dalam pembangunan bangsa lebih konkrit dan nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Iif Khoiru dan Sofyan Amri. *Pengembangan dan Model Pembelajaran Tematik Intregatif*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya. 2014.
- \_\_\_\_\_, Iif Khoiri, dkk. *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2011.
- Abdullah, Amin, dkk. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- al-Abyari, Ibrahim. *al-Mawsu'ah al-Iqtishadiyyah*, vol. VIII. Beirut: Mu'assal Sijjil al-'Arab. 1984.
- al-Khayyat, Abdul Aziz. *Nazrah al-Islam Lil 'Amah Wa Atsaruhu Fi at Tanmiyah*, Terj. Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Pers. 1994.
- al-Khindi, Ali Sumanto. *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*. Solo: CV Aneka. t.t.
- al-Qordhawi, Yusuf. *Tuntunan Membangun Masjid*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (ed) Darmadi. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- Angelis, B. De. *Percaya Diri Sumber Sukses dan Kemandirian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Ensiklopedia Leadership & Muhammad saw: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing. 2010.
- Anwar. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung: ALFABETA. 2006.
- \_\_\_\_\_. "Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda Pada SMK di Kota Kendari". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 036 Mei 2002.
- \_\_\_\_\_, Muhammad. *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Aqil, M. Hamid. "Kebijakan Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Formal (Studi Kasus Pada SMK Di Pondok Pesantren "Nahdlatuth-Thalabah") Kesilir Wuluhan Jember". Tesis. 2002.
- Arifin. "Pendidikan Kewirausahaan Siswa melalui Koperasi Sekolah". Makalah disampaikan dalam Workshop dan Penataran Manajemen Koperasi Siswa

se-Jawa Timur di gedung PSBB MAN 3 Malang pada Tanggal 9 November 2008.

- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press. 1993.
- Arifin, HM. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Arifin, M. *Kapita Sekala Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Azra, Azyumardi. *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-ekonomi Indonesia November 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. 2011.
- Bafadal, Ibrahim. *Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Bawani, I. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ihlas. 1993.
- Barnawi, I. dan Mohammad Arifin. *School Preneurship Membangkitkan Jiwa dan Sikap Kewirausahaan Siswa*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2012.
- Barnawi, Deys dan M. Arifin. *Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship*. Jogjakarta: AR-RUZZ Media. 2013.
- Bukit, Masriam. *Streng than TVET Teacher Education Through Teacher Industry Link ages: Report of the Third Online Conference*. Bonn: UNESCO – UNIVOC. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Strategi Inovasi Pendidikan Kejuruan dari Kompetensi ke Kompetensi*. Bandung: ALFABETA. 2014.
- Bogdan, R.C., S.K. Biklen. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and methods*. London: Allyn and bacon. 1982.
- Curtiz, R. Finch dan J. Crunkilton. *Curriculum Development In Vocational and Technical Education*. Boston: Allyn & Bacon. 1993.
- Calchoun, Calfrey C. dan Alton V. Finch. *Vocational Education Concepts and Operations*. California: Wadsworth Inc. 1982.

- Danini, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Departemen Agama. *Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia Tahun 1997*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Link and Match*. Jakarta: Depdikbud. 1993.
- Departemen Pendidikan Formal. *Pendidikan Sistem Ganda Strategi Operasional Link and Match Pada Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud. 1995.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Depdiknas. “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003”.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3E5. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3E5. 2011.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Ditpekapontren Departemen Agama. 2003.
- Djojonegoro, Wardiman. *The Meaning of Link and Match, Paper Presented the Monthly Luncheon of the Indonesia-British Association*. Jakarta: Depdikbud. 1994.
- Drucker, Peter. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principels*. London: Willian Hernemann Ltd. 1985.
- Dokumen Pondok Pesantren Nurul Jadid.
- Efendi, Nur. *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Teras. 2014.
- Fogarty, Robin. *How To Integrate The Carrricula*. Illinois: Skylight Publising Inc. 1991.
- Finisica, Patrikha. “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dalam Keluarga dan di Sekolah Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Self-efficacy Siswa SMK (SMEA) di Kota Malang”. UM: Tesis. 2012.

- Gardner, Howard. *Frames of mind: The Theory of multiple Intelligences*. New York: Basic Books. 1983.
- Gaspersz, Vincent. *Total Quality Management*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Geertz, Clifford. *Abangan Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1983.
- Ghazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1989.
- Ghufron, M. N. dan R. S. Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2002.
- Gunbuyi, Ilhan, *School Climate and Teachers Perception on Climate Factors: Research Into nine Urban High Schools*. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). 2007.
- Hadiwaratama. *Production Based Education*. Bandung: Politeknik Manufaktur ITB. 1992.
- Halim, Neddy Rafinaldy. *Penguatan Lembaga Pendidikan Dalam Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan*. Makalah Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Pendidikan Islam dan Launching Program Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2010 di Makassar, 24 Maret 2010.
- Hamdani, Muhammad. *Entrepreneurship Untuk Mahasiswa Sebuah Solusi Untuk Siap Mandiri*. Jakarta: Trans Info Media. 2012.
- Haqiqi, Ziad Faroh. "Manajemen Kewirausahaan (Studi Kasus di Pesantren Abdurrahman Bin Auf Klaten)". Tesis. 2010.
- Hariadi. *Evolusi Pesantren Studi Kepemimpinan Kyai Berbasis Orientasi ESQ*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2015.
- Hartono, D. dan Ehrmann. *The Indonesian Economic Crisis and Its Impact on Educational Enrolmen and Quality*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 2001.
- Hidayat, Ari dan Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Bandung: Pustaka Educa. 2010.
- Hofstede, Geert dan Gert Jan Hofstede. *Cultures and Organizations Software of the Mind*. New York: Mc Graw. 2005.

- Howard, Aldrich. *“Entrepreneurship” dalam The Handbook Of Economic Sociology*. New Jersey: Pristown University Press. 2005.
- Idler, H. *Study on Promotion of Market Oriented Training In Indonesia*. Jakarta: Dedikbud. 1995.
- Imamul, Arifin dan Hadi Giana. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung : PT Setia Purna. 2007.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Jail, Abd. “Spiritual Entrepreneurship; Studi Transformasi Spiritualitas Pengusaha Kudus”. IAIN: Disertasi. 2013.
- Jabali, Fuad dan Jamhari. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Jalil, Abd. *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*. Yogyakarta: LKS. 2013.
- Kemendiknas. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan. Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Kemendiknas Balitbang Pusat Kurikulum. 2010.
- Kemendiknas, Pusat Kurikulum. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa Dan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Pusat Kurikulum. 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan, Bahan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Jakarta: Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum. 2010.
- Klaus, Ruth dan Grollmann Philipp. *Monitoring VET System of Mayor EU Competitor Countries*. London: Universitas Bremen. 2009.
- Khusnah, Inayatul. “Pesantren Entrepreneurship (Upaya Pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto dalam Pembentukan Jiwa Entrepreneurship Santrinya)”. Skripsi. 2011.
- Koontz, Harold, Cyril O’donnell & Heinz Weihrich. *Essentials of Management*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd. 1982.
- Lauster, P. *Tes Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Lindsay, DV. *Roles and Contribution of The Educators on Promoting Industrial Development*. Hongkong: Institution of Engineer. t.t.

- Lupiyoadi, Rambat dan Jero Wacik. *Wawasan Kewirausahaan, Cara Mudah menjadi Wirausaha*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 2004.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Proses Perjalanan*. Jakarta : Paramadina. 1998.
- Mahbub, Mohamad Hizqil. “Pendidikan Kewirausahaan Di Kalangan Santri (Kasus Pondok Pesantren Assa’idiyyaah Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus)”. UNS: Tesis. 2011.
- Majid, Abdul. *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS. 1994.
- Masyhud, M. Sulton dan Khusnuridho. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2006.
- Mas’ud, Abdurrachman. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Miles, Manthaw B. dan Huberman.A.M. *Qualitative Data Analysis A. Course Book of New Method*. Berverly Hills: Sage Publication Inc. 1992.
- Milner, Karen dan Hariet Khoza. *A Comparison of Teachers Strees and School Climate Acroos School With Different Macrie Succes Rate*. South African Journal of Educational. 2008.
- Minta, Poerwadra W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Mochtar, Affandi. *Membedah Diskursus Pedidikan Islam*. Ciputat: Penerbit Kalimah. 2001.
- Moerdyanto. *Manajemen Sekolah Indonesia yang Efektif Melalui Penerapan Total Quality Management*. Makalah di sampaikan pada Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia, 22-24 Juni 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitia/ Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2011.
- Moutakas, Lark. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE, Thousand Oaks. 1994.

- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasih. 2002.
- Mulyadi. *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses*. Jakarta : LPTK Depdikbud. 1989.
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Kompetensi dan Aplikasinya*. Bandung : PT Rosdikarya. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2008.
- Nadjib, Moh. "Makna Pembelajaran Berbasis Agribisnis Semangat Kerja dan Kemandirian Komunitas Pondok : Studi Kasus pada Pondok Sirojuth Tholibin". Tesis. 2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1998.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo. 2001.
- \_\_\_\_\_, Abuddin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- \_\_\_\_\_, Abuddin. *Pemikir Pendidikan Islam dan Barat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Viv Press. 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Nugroho, Riant. *Memahami latar belakang pemikiran Entrepreneurship Ciputra*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.

- Nurlaili, Fitri. "Pembelajaran kewirausahaan di Pesantren Wirausaha Agrobisnis Abdurrahman bin Auf Klaten". USM: Tesis. 2013.
- Pakpahan, J. *Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdikbud. 1995.
- Pretorius, Stephanus dan Elsabe de Villiers. *Educators Perceptions of School Climate and Health in Selected Primary School*. South African Journal of Educational. 2009.
- Purwatiningsih. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Semarang: Stikubank. 1992.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Erlangga. 2007.
- Qomariah, Aan. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Rahardjo, Dawan. "Madrasah Sebagai The Centre of Excellent", dalam Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Raharjo, M. Dawani. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M 1985.
- \_\_\_\_\_, Dawani. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta : LP3ES. 1995.
- Rahmat, Jalaluddin. *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Qur'ani*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Raihani. *Curriculum Construction In The Indonesian Pesantren*. Melbourne: The University of Melbourne. 2001.
- Rasyad, Moh. "Pemberdayaan Pesantren Menuju Kemendirian dan Profesionalisme (Studi tentang Manajemen Kewirausahaan Pondok Modern Darussyahid Sampang Madura)". Tesis-IAIN Sunan Ampel, Surabaya. 2013.
- Riayanti, B. Prihatin Dwi. *Entrepreneurship dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Grasindo. 2003.
- Rohiat. *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Saroni, Mohammad. *Mendidik dan melatih Entrepreneur Muda Membuka Kesadaran Atas Pentingnya Kewirausahaan Bagi Anak Didik*. Jogjakarta: Ar- Ruz Media. 2012.

- Sigit, Soeharto. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. Jakarta: Lukman Offset. 1999.
- Silver, David, A. *The Entrepreneurial Life*. New York: John Wiley & Sons. 1983.
- Sobri. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo. 2009.
- Soebahar, Halim. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2002.
- Sorenson, Liyod M, dan Richard D. Goldsmith. *The Principal's Guide to Managing School Personal*. Corwin Prees. 2008.
- Sukmadinata, Nna Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Sulthon, H.M. dan Moh. Khusnuridho. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: Laks Bang. 2006.
- Supeno, Wahyudin. *Perpustakaan Masjid, Pembinaan dan Pengembangannya*, (ed) Abdul Hamid. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1984.
- Surnaya, Yuyus dan Kartib Bayu. *Kewirausahaan, Pendekatan, Karakteristik Wirausaha Sukses*. Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Sutomo, Rahmat. *Kewirausahaan Dari Sisi Kebijakan Pendidikan, dalam "Forum Mangan Wijaya V & VI Membentuk Jiwa Wirausaha"*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2012.
- \_\_\_\_\_, Yuyas dan Kartib. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawa Sukses*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Steenbrink, K.A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3E5. 1986.
- Syuaeb, Kurdie. *"Pendidikan Kewirausahaan Melalui Kemitraan Antara Deperindag Dengan Pesantren: Studi Kasus Usaha Permeubelan pada Pondok Pesantren Al-Ittihad Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka"*. UPI: Tesis. 2013.
- Tanan, Antonius. *Mendidik Enterpreneur*. Harian Kompas, Edisi Senin 22 Februari 2010
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2002.
- Tilaar. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pengembangan Kreativitas dan Entrepreneurship dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2012.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2003.
- Wahjoetomo. *Perguruan Tinggi Pesantren*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Wahyu, D. I. "Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda". *Jurnal Kependidikan*, No. 26 Th. 1996.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan Kewirausahaan Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Widodo, Sembodo Ari. *Struktur Keilmuan Pesantren Studi Komparatif antara pesantren Tebuireng Jombang dan Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo. 2002.
- Willianson, H.F. dan J.A. Buttrick (Eds). *Economic Development*. Englewood Cliff: Prentice Hall Inc. 1961.
- Winardi, J. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Wirasmita, Yuyun. *Pemikiran Kewirausahaan, Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan*. Bandung: Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Unpad. 1999.
- Word Economic Forum. *The Indonesia Competitiveness Report 2011*. Geneva: Word Economic forum. 2011.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumberwidya. 1992.
- Yasmadi. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Zarkasyi, Abdullah Syukuri. *Manajemen Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press. 2005.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.